



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 14 Tahun 2019

Seri E Nomor 11

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 11 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. 24. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
19. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
28. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
29. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
35. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
36. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

37. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
39. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
40. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
41. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
42. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
43. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
44. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
46. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
47. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
48. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
49. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
50. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

51. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
52. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.
- (3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 September 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.
NIP. 19630220 1991092001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(14/195/2019).

LEMBARAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 14 Tahun 2019
TANGGAL : 10 September 2019
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019-2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Grafik.....	xviii
Daftar Gambar.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I.9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I.15
1.4.1 Maksud.....	I.16
1.4.2 Tujuan.....	I.16
1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Kota Bogor 2020-2024.....	I.17

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II.1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II.1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II.1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi.....	II.2
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II.9
2.1.3 Aspek Demografis.....	II.17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.19
2.2.1 Pertumbuhan PDRB.....	II.19
2.2.2 Laju Inflasi.....	II.25

2.2.3	PDRB Per Kapita.....	II.26
2.2.4	Indeks Gini.....	II.28
2.2.5	Tingkat Kemiskinan.....	II.30
2.2.6	Indeks Pembangunan Manusia.....	II.32
2.2.7	Angka Melek Huruf.....	II.34
2.2.8	Rata-rata Lama Sekolah.....	II.35
2.2.9	Angka Partisipasi Kasar.....	II.37
2.2.10	Angka Partisipasi Murni.....	II.38
2.2.11	Angka Kelangsungan Hidup Bayi.....	II.39
2.2.12	Angka Kematian Bayi.....	II.39
2.2.13	Angka Kelangsungan Hidup Ibu.....	II.40
2.2.14	Angka Usia Harapan Hidup.....	II.43
2.2.15	Persentase Balita Gizi Buruk.....	II.45
2.2.16	Rasio Penduduk yang Bekerja.....	II.45
2.2.17	Keluarga Pra Sejahtera.....	II.46
2.2.18	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	II.47
2.2.19	Opini BPK Atas Keuangan Pemerintah Daerah.....	II.48
2.2.20	Percepatan Skor Pola Pangan Harapan.....	II.48
2.2.21	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB.....	II.49
2.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.....	II.49
2.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB.....	II.50
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II.50
2.3.1	Layanan Urusan Wajib	II.50
2.3.1.1	Pendidikan.....	II.50
2.3.1.2	Kesehatan.....	II.54
2.3.1.3	Pekerjaan Umum Penataan Ruang.....	II.57
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	II.63
2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.....	II.64
2.3.1.6	Sosial.....	II.65

2.3.1.7	Tenaga Kerja.....	II.67
2.3.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II.69
2.3.1.9	Pangan.....	II.71
2.3.1.10	Pertahanan.....	II.71
2.3.1.11	Lingkungan Hidup.....	II.73
2.3.1.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II.75
2.3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.....	II.76
2.3.1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II.77
2.3.1.15	Perhubungan.....	II.78
2.3.1.16	Komunikasi dan Informasi.....	II.81
2.3.1.17	Koperasi.....	II.82
2.3.1.18	Penanaman Modal.....	II.83
2.3.1.19	Kepemudaan dan Olahraga.....	II.84
2.3.1.20	Statistik.....	II.85
2.3.1.21	Persandian.....	II.85
2.3.1.22	Kebudayaan.....	II.85
2.3.1.23	Perpustakaan.....	II.86
2.3.1.24	Kearsipan.....	II.87
2.3.2	Layanan Urusan Pilihan.....	II.88
2.3.2.1	Pariwisata.....	II.88
2.3.2.2	Pertanian.....	II.91
2.3.2.3	Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II.92
2.3.2.4	Perdagangan.....	II.94
2.3.2.5	Perindustrian.....	II.95
2.3.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	II.95
2.3.3.1	Perencanaan Pembangunan.....	II.95
2.3.3.2	Keuangan.....	II.96
2.3.3.3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	II.96
2.3.3.4	Pengawasan.....	II.97
2.3.3.5	Penelitian dan Pembangunan.....	II.98

2.3.3.6	Sekretariat Daerah	II.99
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II.100
2.4.1	Pengeluaran Per Kapita.....	II.100
2.4.2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita...	II.100
2.4.3	Kriminalitas.....	II.101
2.4.4	Rasio Ketergantungan.....	II.103
2.5	Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014 -2019.....	II.105
2.6	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II.110
2.6.1	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2016..	II.110
2.6.1.1	Lingkungan Hidup.....	II.110
2.6.2	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017..	II.114
2.6.2.1	Pendidikan.....	II.114
2.6.2.2	Kesehatan.....	II.115
2.6.2.3	Pekerjaan Umum.....	II.116
2.6.2.4	Perumahan Rakyat.....	II.118
2.6.2.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II.119
2.6.2.6	Sosial.....	II.122
2.6.3	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018..	II.123
2.6.3.1	Pendidikan.....	II.123
2.6.3.2	Kesehatan.....	II.125
2.6.3.3	Pekerjaan Umum.....	II,127
2.6.3.4	Perumahan Rakyat.....	II.128
2.6.3.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II.129
2.6.3.6	Sosial.....	II.131
2.7	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Organisasi Perangkat Daerah.....	II.133
2.7.1	Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial.....	II.133
2.7.2	Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi.....	II.134
2.7.3	Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan.....	II.135

2.7.4	Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	II.136
2.8	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	II.137
2.8.1	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor.....	II.137
2.8.2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor.....	II.139
2.8.3	PD. Pasar Pakuan Jaya.....	II.143
2.8.4	Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).....	II.145
2.9	Kerja Sama dengan Daerah Lain.....	II.147
2.9.1	Kerjasama Antar Daerah.....	II.147
2.9.2	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	II.152
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	
3.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	III.1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III.2
3.1.2	Neraca Daerah.....	III.17
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	III.24
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III.25
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III.25
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III.27
3.4	Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya.....	III.37
3.4.1	APBN (Dana Transfer dan Belanja DIPA K/L di Daerah).....	III.37
3.4.2	Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.....	III.38
3.4.3	Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dalam Penganggaran Pembangunan Daerah.....	III.38
3.4.4	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).....	III.41
3.4.5	Obligasi Daerah.....	III.44
3.4.5.1	Dasar Hukum Pelaksanaan Obligasi Daerah.....	III.45
3.4.5.2	Prinsip Umum Penerbitan Obligasi Daerah.....	III.45
3.4.5.3	Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah.....	III.46
3.4.5.4	Rencana Program Pembangunan Infrastruktur Strategi Kota Bogor yang akan didorong melalui Skema Pembiayaan Obligasi Daerah Tahun 2020-2024.....	III.47

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	IV.1
4.1.1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar.....	IV.3
4.1.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	IV.29
4.1.3	Urusan Pilihan.....	IV.48
4.1.4	Urusan Fungsi Penunjang.....	IV.51
4.2	ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA BOGOR.....	IV.56
4.2.1	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial.....	IV.105
4.2.2	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi.	IV.106
4.2.3	Identifikasi Isu Pemangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan.....	IV.107
4.3	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2020-2024.	IV.108
4.3.1	Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	IV.140
4.3.2	Keterkaitan antara Isu Strategis Pusat, Isu Strategis Provinsi Jawa Barat, Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	IV.141

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

5.1	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BOGOR TAHUN 2019-2024.....	V.1
5.2	MISI.....	V.6
5.3	Keselarasan RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan RPJMD Kota Bogor 2019-2024.....	V.8
5.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024.....	V.9
5.5	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2019-2024.....	V.24
5.6	Program Unggulan dan Program Strategis 2019-2024.....	V.34
5.7	Korelasi Isu Strategis dengan Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019-2024.....	V.35

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	VI.3
6.2	Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	VI.27
6.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial.....	VI.48
6.3.1	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang.....	VI.49

6.3.2	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang.....	VI.50
6.3.3	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang.....	VI.53
6.3.4	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis....	VI.55
6.3.5	Arahan Pemanfaatan Ruang Periode Jangka Menengah Tahun 2019-2024.....	VI.56
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII.2
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
8.1	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2019-2024.....	VIII.4
8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	VIII.4
8.3	Indikator Kerja Kunci (Ikk).....	VIII.6
BAB IX	PENUTUP	
9.1	Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	IX.1
9.2	Pedoman Transisi Dalam Rangka Menjaga Kestinambungan Pembangunan.....	IX.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor.....	II.1
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor.....	II.9
Tabel 2.3	Arahan Pengembangan Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor.....	II.10
Tabel 2.4	Rencana Ruang Kegiatan Tematik pada Sub Pusat Kota/ Pusat Wilayah Pelayanan (WP).....	II.17
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor.....	II.19
Tabel 2.6	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2013-2017 (persen).....	II.20
Tabel 2.7	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) 2013-2017.....	II.22
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2013- 2017 (miliar Rupiah).....	II.24
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Rupiah).....	II.26
Tabel 2.10	PDRB per Kapita di Kota Bogor 2011 – 2017.....	II.27
Tabel 2.11	Perkembangan Indeks Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2011-2017.....	II.29
Tabel 2.12	Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor.....	II.31
Tabel 2.13	Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor Tahun 2014-2017.....	II.33
Tabel 2.14	Pertumbuhan IPM Kota Bogor Tahun 2010-2017.....	II.34
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor Tahun 2017.....	II.38
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 Kota Bogor Tahun 2014–2018.....	II.39
Tabel 2.17	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Bogor.....	II.39
Tabel. 2.18	Angka Kematian Bayi Kota Bogor.....	II.40
Tabel. 2.19	Angka Kematian Ibu.....	II.41
Tabel. 2.20	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan.....	II.43
Tabel 2.21	Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Bogor Tahun 2015-2017.....	II.46
Tabel 2.22	Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan di Kota Bogor.....	II.47
Tabel 2.23	Indeks Kepuasan Masyarakat 2014-2018.....	II.47

Tabel 2.24	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.48
Tabel 2.25	Skor PPH Kemandirian Pangan Kota Bogor 2014-2018.....	II.48
Tabel 2.26	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bogor....	II.49
Tabel 2.27	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Bogor.....	II.50
Tabel 2.28	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Bogor.....	II.50
Tabel 2.29	Rasio Murid dan Guru	II.52
Tabel 2.30	Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II.54
Tabel 2.31	Rasio Posyandu di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018.....	II.54
Tabel 2.32	Rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.55
Tabel 2.33	Rasio Rumah Sakit di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018.....	II.55
Tabel 2.34	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	II.56
Tabel 2.35	Rasio Tenaga Medis di Kota Bogor Tahun 2013 - 2017....	II.57
Tabel 2.36	Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bogor Tahun 2015-2017.....	II.57
Tabel 2.37	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Tahun 2015-2018.....	II.58
Tabel. 2.38	Persentase Ramah Tangga yang Dilayani Air Minum.....	II.59
Tabel 2.39	Ketersediaan Pengolahan Air Limbah yang Aman.....	II.59
Tabel 2.40	Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2015-2018.....	II.60
Tabel 2.41	Rasio Tempat ibadah di Kota Bogor Tahun 2013-2017.....	II.60
Tabel 2.42	Perkembangan pengendalian Bangunan ber-IMB di Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.61
Tabel 2.43	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II.62
Tabel 2.44	Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018.....	II.63
Tabel 2.45	Data Penanganan Pada Kawasan Permukiman Kumuh (Luas Kawasan < 10 Ha).....	II.64
Tabel 2.46	Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah Dan DPRD Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II.69
Tabel 2.47	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bogor Tahun 2013 - 2017.....	II.70
Tabel 2.48	Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II.71
Tabel 2.49	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Di Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II.72

Tabel 2.50	Penyelesaian Kasus Tanah Di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018.....	II.72
Tabel 2.51	Penyelesaian Izin Lokasi Di Kota Bogor Tahun 2015-2018.	II.73
Tabel 2.52	Perkembangan Indeks Kualitas Air Dan Udara Di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018.....	II.74
Tabel 2.53	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II.74
Tabel 2.54	Rasio Penduduk ber-KTP dan Akte Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II.75
Tabel 2.55	Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018.....	II.76
Tabel 2.56	Perkembangan Kesertaan masyarakat dalam program keluarga berencana Tahun 2015 – 2019.....	II.77
Tabel 2.57	Perkembangan jumlah penumpang angkutan umum Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.....	II.78
Tabel 2.58	Perkembangan Rasio Izin Trayek Kota Bogor Tahun 2015 – 2018.....	II.78
Tabel 2.59	Jumlah Angkutan Umum Wajib Uji di Kota Bogor Tahun 2014-2017.....	II.79
Tabel 2.60	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II.80
Tabel 2.61	Perkembangan Koperasi di Kota Bogor Tahun 2014-2018.	II.82
Tabel 2.62	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif di Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II.83
Tabel 2.63	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Tahun 2015-2018.....	II.84
Tabel 2.64	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.84
Tabel 2.65	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.85
Tabel 2.66	Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.86
Tabel 2.67	Perkembangan Perpustakaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.87
Tabel 2.68	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.88
Tabel 2.69	Daftar Obyek Wisata, Alamat dan Daya Tarik Wisata di Kota Bogor	II.89
Tabel 2.70	Kontribusi sub sektor Pertanian, dan perikanan terhadap PDRB.....	II.92
Tabel 2.71	Jumlah Pelanggan, Daya tersambung, dan Energi Listrik Terjual Menurut Lokasi di Kota Bogor, 2017.....	II.93
Tabel 2.72	Jumlah Pelanggan Listrik Kota Bogor.....	II.94

Tabel 2.73	Realisasi Nilai Ekspor Kota Bogor Tahun 2014-2017 (dalam US Dollar).....	II.94
Tabel 2.74	Kontribusi sub sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Bogor.....	II.94
Tabel 2.75	Kontribusi sub sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB.....	II.95
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2018.....	II.95
Tabel 2.77	Indikator Keuangan Kota Bogor Tahun 2015 – 2018.....	II.96
Tabel 2.78	Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018.....	II.97
Tabel 2.79	Indikator Pengawasan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018.....	II.97
Tabel 2.80	Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Bogor Tahun 2014 - 2018.....	II.98
Tabel 2.81	Indikator Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018.....	II.98
Tabel 2.82	Nilai SAKIP Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.99
Tabel 2.83	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	II.100
Tabel 2.84	Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita di Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	II.100
Tabel 2.85	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor Tahun 2014-2017.....	II.101
Tabel 2.86	Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2017.....	II.102
Tabel 2.87	Banyaknya Kejadian Unjuk Rasa di Kota Bogor Tahun 2012-2016.....	II.103
Tabel 2.88	Rasio Ketergantungan di Kota Bogor Tahun 2015-2017....	II.104
Tabel 2.89	Rasio Ketergantungan Muda Kota Bogor Tahun 2016-2017.....	II.105
Tabel 2.90	Realisasi Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air.....	II.111
Tabel 2.91	Realisasi pelayanan pencemaran udara dari sumber Tak Bergerak.....	II.112
Tabel 2.92	Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara sumber tidak bergerak.....	II.112
Tabel 2.93	Realisasi pelayanan informasi status kerusakan Lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa	II.113
Tabel 2.94	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya Dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.....	II.114
Tabel 2.95	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.....	II.114
Tabel 2.96	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.....	II.115
Tabel 2.97	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum.....	II.116

Tabel 2.98	Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat..	II.119
Tabel 2.99	Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II.120
Tabel 2.100	Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial.....	II.122
Tabel 2.101	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.....	II.124
Tabel 2.102	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.....	II.125
Tabel 2.103	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum.....	II.127
Tabel 2.104	Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat..	II.129
Tabel 2.105	Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II.130
Tabel 2.106	Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial.....	II.132
Tabel 2.107	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Sosial.....	II.134
Tabel 2.108	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Ekonomi.....	II.135
Tabel 2.109	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Lingkungan.....	II.136
Tabel 2.110	Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah dalam Capaian Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	II.136
Tabel 2.111	Perkembangan Usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor.....	II.138
Tabel 2.112	Tingkat Kesehatan Bank.....	II.138
Tabel 2.113	Sumber Air Baku & Kapasitas Produksi Air Bersih PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2018.....	II.141
Tabel 2.114	Perkembangan Jumlah Pelanggan Per Kecamatan.....	II.141
Tabel 2.115	Jumlah Pelanggan Per Golongan Tarif.....	II.142
Tabel 2.116	Jumlah Pelanggan dan cakupan Pelayanan Tahun 2014-2018.....	II.142
Tabel 2.117	Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak.....	II.143
Tabel 2.118	Perolehan Laba dari Tahun 2014 s/d 2018.....	II.143
Tabel 2.119	Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Sampai dengan Tahun 2018.....	II.144
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 s/d 2018 Kota Bogor.....	III.2
Tabel 3.2	Realisasi Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	III.15
Tabel 3.3	Kondisi Neraca Daerah Tahun 2014-2018.....	III.17

Tabel 3.4	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	III.22
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	III.23
Tabel 3.6	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2014-2018.....	III.24
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018.....	III.25
Tabel 3.8	Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	III.26
Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	III.29
Tabel 3.10	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	III.33
Tabel 3.11	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	III.34
Tabel 3.12	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024.....	III.35
Tabel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kota Bogor.....	III.36
Tabel 3.14	Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bogor.....	III.39
Tabel 3.15	Program Pembangunan Infrastruktur Strategis Kota Bogor 2020-2024 melalui Skema Pembiayaan Obligasi Daerah.....	III.47
Tabel 4.1	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas berdasarkan kemampuan Membaca dan Menulis.....	IV.4
Tabel 4.2	Penduduk Kota Bogor usia 7-24 tahun berdasarkan status Bersekolah.....	IV.6
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017.....	IV.7
Tabel 4.4	Angka Kesakitan Kota Bogor Tahun 2017.....	IV.9
Tabel 4.5	Persentase Bayi Lahir berdasarkan Berat Badan saat lahir	IV.9
Tabel 4.6	Kasus kesehatan yang berpotensi memicu kematian pada bayi.....	IV.10
Tabel 4.7	Data permasalahan terkait gizi bayi dan balita Tahun 2015-2018.....	IV.10
Tabel 4.8	Penyebab Masalah Gizi pada Bayi dan Balita Tahun 2015-2018.....	IV.11
Tabel 4.9	Cakupan pemberian Asi pada Baduta Tahun 2017.....	IV.12
Tabel 4.10	Cakupan pemberian Imunisasi pada Balita Tahun 2017..	IV.12
Tabel 4.11	Proses Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Bukan Fasilitas Kesehatan Tahun 2017	IV.13

Tabel 4.12	Kasus Kelahiran dengan Resiko Tinggi Tahun 2018.....	IV.14
Tabel 4.13	Kasus Komplikasi saat Kehamilan Tahun 2018	IV.14
Tabel 4.14	Sepuluh Penyakit Utama di Kota Bogor Tahun 2017.....	IV.15
Tabel 4.15	Sepuluh Penyakit Utama di Kota Bogor Tahun 2017.....	IV.15
Tabel 4.16	Tren Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Kejiwaan Tahun 2015-2027.....	IV.16
Tabel 4.17	Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, Tahun 2017.....	IV.18
Tabel 4.18	Persentase Penduduk yang merokok, Tahun 2017.....	IV.18
Tabel 4.19	Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke jamban sehat, Tahun 2017.....	IV.19
Tabel 4.20	Persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum bersih dan akses air minum layak, Tahun 2017...	IV.20
Tabel 4.21	Gambaran kondisi Angkatan Kerja Kota Bogor, Tahun 2017.....	IV.29
Tabel 4.22	Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Kota Bogor menurut sector lapangan pekerjaan , Tahun 2017.....	IV.30
Tabel 4.22a	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran, Tahun 2018.....	IV.35
Tabel 4.22b	Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita, Tahun 2018.....	IV.36
Tabel 4.23	Rata-rata Konsumsi Protein Perkapita.....	IV.37
Tabel 4.24	Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025.....	IV.69
Tabel 4.25	Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025.....	IV.71
Tabel 4.26	Kemampuan Lahan Kota Bogor.....	IV.95
Tabel 4.27	Kesesuaian Lahan Kota Bogor.....	IV.96
Tabel 4.28	Rumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pilar Sosial.....	IV.106
Tabel 4.29	Rumusan Isu Strategis PB Pilar Ekonomi di Kota Bogor....	IV.107
Tabel 4.30	Rumusan Isu Strategis PB Pilar Lingkungan.....	IV.108
Tabel 4.31	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, 2017.....	IV.116
Tabel 4.32	Konsep Pengembangan Transportasi Berkelanjutan.....	IV.134
Tabel 4.38	Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor.....	IV.142
Tabel 5.1	Keselarasan Misi pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Bogor 2019-2024.....	V.8
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	V.17

Tabel 5.3	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	V.25
Tabel 5.4	Sinergitas Isu Strategis Dengan Perumusan Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	V.36
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	VI.5
Tabel 6.2	Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024(Penjabaran Misi 1 : Mewujudkan Kota Sehat.....	VI.28
	Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024(Penjabaran Misi 2 : Mewujudkan Kota Cerdas.....	VI.34
	Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024(Penjabaran Misi 3 : Mewujudkan Kota Sejahtera.....	VI.45
Tabel 6.3	Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan.....	VI.56
Tabel 6.4	Indikasi Program Transportasi.....	VI.62
Table 6.5	Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota....	VI.80
Tabel 6.6	Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung.....	VI.96
Tabel 6.7	Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya.....	VI.105
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	VII.2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor Tahun 2019.....	VII.9
Tabel 7.3	Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.....	VII.44
Tabel 7.4	Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.....	VII.46
Tabel 7.5	Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	VII.48
Tabel 7.6	Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	VII.50
Tabel 7.7	Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	VII.52
Table 7.8	Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial.....	VII.54
Table 7.9	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan.....	VII.55
Tabel 7.10	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Transmigrasi.....	VII.55

Tabel 7.11	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	VII.55
Tabel 7.12	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	VII.56
Tabel 7.13	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan.....	VII.57
Tabel 7.14	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan.....	VII.58
Tabel 7.15	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.....	VII.59
Tabel 7.16	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	VII.61
Tabel 7.17	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	VII.62
Tabel 7.18	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan.....	VII.64
Tabel 7.19	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika.....	VII.66
Tabel 7.20	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik.....	VII.67
Tabel 7.21	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian.....	VII.67
Tabel 7.22	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	VII.68
Tabel 7.23	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal.....	VII.70
Tabel 7.24	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal.....	VII.71
Tabel 7.25	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan.....	VII.72
Tabel 7.26	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pariwisata.....	VII.72
Tabel 7.27	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan.....	VII.73
Tabel 7.28	Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan.....	VII.73
Tabel 7.29	Penjabaran Program Urusan Pilihan Bidang Pertanian.....	VII.74
Tabel 7.30	Penjabaran Program Urusan Pilihan Bidang Perikanan dan Kelautan.....	VII.75
Tabel 7.31	Penjabaran Program Urusan Pilihan Bidang Perdagangan.	VII.76
Tabel 7.32	Penjabaran Program Urusan Pilihan Bidang Perindustrian	VII.77

Tabel 7.33	Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan.....	VII.78
Tabel 7.34	Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan.....	VII.79
Tabel 7.35	Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan.....	VII.80
Tabel 7.36	Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.....	VII.82
Tabel 7.37	Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan.....	VII.84
Tabel 7.38	Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan.....	VII.85
Tabel 8.1	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	VIII.3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	VIII.4
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor.....	VIII.7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017..	I.5
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah.....	I.10
Gambar 1.3	Tahapan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025.....	I.11
Gambar 1.4	Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.....	I.12
Gambar 1.5	Bagan Alur Hubungan Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.....	I.13
Gambar 1.6	Fokus/Tema Tahapan RKPD Kota Bogor Periode 2019-2024.....	I.14
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kota Bogor.....	II.2
Gambar 2.2	Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kota Bogor.....	II.8
Gambar 2.3	Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2016-2018....	II.8
Gambar 3.1	Prinsip Obligasi Daerah.....	III.46
Gambar 3.2	Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah.....	III.46
Gambar 4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	IV.3
Gambar 4.2	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor 2005-2025.....	IV.71
Gambar 4.3	Keterkaitan Antarkota PKN Metropolitan Jabodetabek-Punjur (Eksisting).....	IV.91
Gambar 4.4	Peta Kemampuan Lahan Kota Bogor.....	IV.95
Gambar 4.5	Peta Kesesuaian Lahan Kota Bogor.....	IV.97
Gambar 4.6	Sinergitas antara Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024....	IV.109
Gambar 4.7	Keterkaitan antar Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	IV.109
Gambar 4.8	Interaksi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam Pembangunan Kota Bogor.....	IV.110
Gambar 4.9	Pilar-Pilar Pendukung Produktivitas Ekonomi Kreatif.....	IV.124
Gambar 4.10	Permasalahan Utama yang Mempengaruhi Daya Saing Ekonomi Kreatif.....	IV.125
Gambar 4.11	Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah.....	IV.126
Gambar 4.12	Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD 2019-2024.....	IV.141
Gambar 5.1	Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah.....	V.8

Gambar 5.2	Penjabaran Misi 1, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024.....	V.10
Gambar 5.3	Penjabaran Misi 2, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024.....	V.12
Gambar 5.4	Penjabaran Misi 3, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024.....	V.14
Gambar 6.1	Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025.....	VI.3
Gambar 6.2	Fokus/Tema Tahapan RKPD Kota Bogor Periode 2019-2024.....	VI.4
Gambar 8.1	Terminologi Tahapan Pencapaian Visi Pembangunan Daerah.....	VIII.2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan 2017.....	II.6
Grafik 2.2	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor 2018.....	II.17
Grafik 2.3	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor 2018.....	II.18
Grafik 2.4	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor 2018.....	II.18
Grafik 2.5	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk per kecamatan Kota Bogor 2017.....	II.19
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II.25
Grafik 2.7	Laju Inflasi Kota Bogor.....	II.25
Grafik 2.8	Perbandingan Laju Inflasi Kota Bogor dan Jawa Barat, 2017.....	II.26
Grafik 2.9	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%).....	II.27
Grafik 2.10	PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017.....	II.28
Grafik 2.11	Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2017.....	II.29
Grafik 2.12	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Bogor.....	II.31
Grafik 2.13	Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat 2014-2018.....	II.32
Grafik 2.14	Perbandingan Kota Bogor, IPM Provinsi Jawa Barat, dan IPM Nasional Tahun 2010-2018.....	II.33
Grafik 2.15	Angka Melek Huruf.....	II.35
Grafik 2.16	Tren Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat 2010-2018.....	II.36
Grafik 2.17	Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2018.....	II.37
Grafik 2.18	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA per Kecamatan.....	II.38
Grafik 2.19	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk	II.42
Grafik 2.20	Perbandingan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.....	II.42
Grafik 2.21	Angka Harapan Hidup Kota-Kota Jawa Barat Tahun 2014-2018.....	II.44

Grafik 2.22	Tren Angka Harapan Hidup Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2018.....	II.44
Grafik 2.23	Persentase Gizi Buruk.....	II.45
Grafik 2.24	Rasio Jumlah Murid dan Sekolah di Kecamatan Kota Bogor.....	II.53
Grafik 2.25	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Bogor Tahun 2014-2017.....	II.79
Grafik 2.26	Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Kota Bogor 2015-2018.....	II.91
Grafik 2.27	Perkembangan Rumah Tangga Pelanggan Gas di Kota Bogor 2012-2016.....	II.93
Grafik 3.1	Realisasi Pendapatan Asli daerah Tahun 2014-2018.....	III.5
Grafik 3.2	Persentase Penerimaan DAU terhadap Total Pendapatan Kota Bogor.....	III.6
Grafik 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	III.7
Grafik 3.4	Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018.....	III.8
Grafik 3.5	Proporsi Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2014-2018.....	III.9
Grafik 3.6	Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2014-2018.....	III.10
Grafik 3.7	Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai (BTL) Tahun 2014-2018.....	III.10
Grafik 3.8	Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018.....	III.11
Grafik 3.9	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014-2018	III.12
Grafik 3.10	Rata-Rata Perbandingan antara Komponen-Komponen Belanja pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014-2018.....	III.13
Grafik 3.11	Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018.....	III.14
Grafik 3.12	Tren Pagu Anggaran Belanja Langsung per Urusan Tahun Anggaran 2015-2018.....	III.14
Grafik 3.13	Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018.....	III.16
Grafik 3.14	Komposisi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018....	III.16
Grafik 3.15	Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014-2018.....	III.27
Grafik 4.1	Perkembangan Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan.....	IV.17
Grafik 4.2	PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017.....	IV.115

Grafik 4.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota-kota di Jawa Barat, 2013-2017.....	IV.118
Grafik 4.4	Indeks Keparahan Kemiskinan Kota-kota di Jawa Barat, 2013-2017.....	IV.119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis.

Pada tanggal 27 Juni 2018, Kota Bogor melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2019/2024. Berdasarkan hasil pilkada maka ditetapkan pasangan Bima Arya dan Dedie A. Rachim sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2019/2024 serta telah dilantik pada tanggal 20 April 2019. Walikota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana

diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

UU 25/2004 juga mengamanatkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ini selanjutnya menjadi acuan kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor pada periode 2019-2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 41 menyebutkan bahwa untuk persiapan penyusunan RPJMD ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Adapun rancangan teknokratik RPJMD merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan teknokratik RPJMD

sebagaimana dimaksud diatas mencakup analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan perumusan isu strategis Daerah.

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Penyempurnaan Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Selanjutnya penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD tersebut merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dengan ketentuan sistematika sebagai berikut :

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan Daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS

Penyusunan RPJMD Kota Bogor harus dilakukan dengan berbagai tahapan dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Selain itu RPJMD Kota Bogor disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up. Pendekatan proses perencanaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu:

1. **Pendekatan Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Pendekatan Politis juga dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bogor, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
2. **Pendekatan Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. **Pendekatan Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, para pakar/narasumber yang kompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi dari berbagai elemen

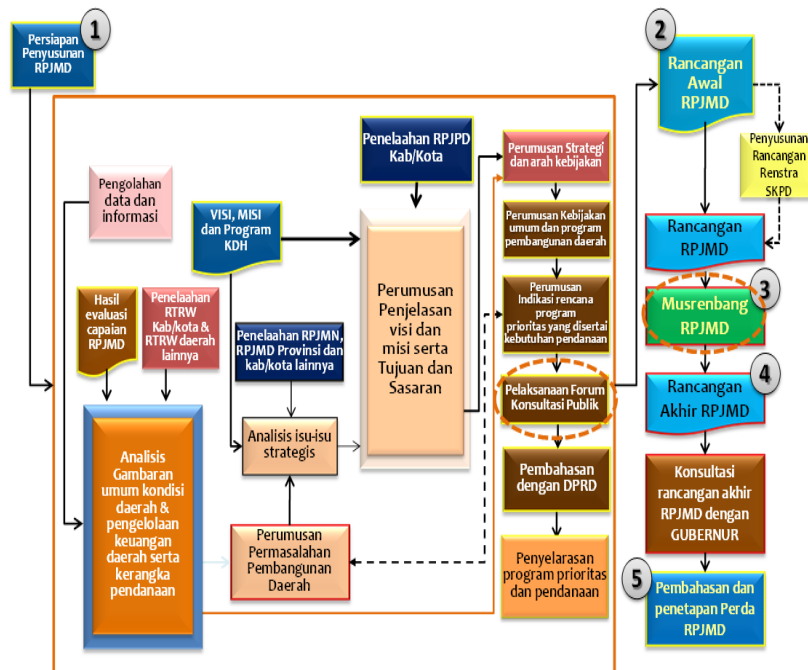
masyarakat dilaksanakan melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan OPD sebagai pelaksana pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;

4. **Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up)**, pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Selanjutnya Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun

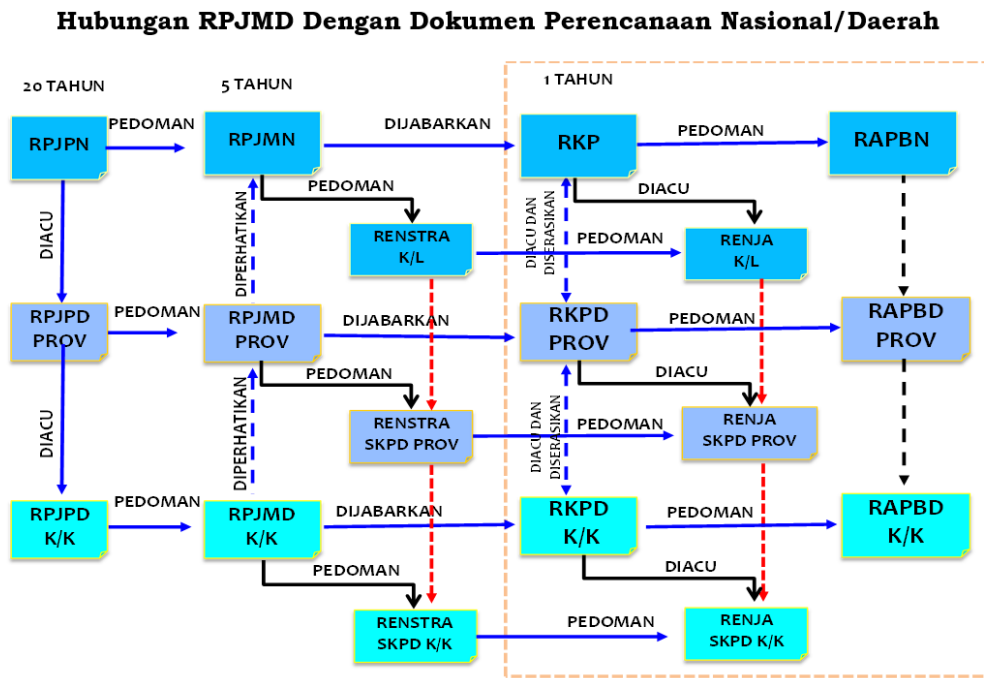
- 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2019-2024, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Selanjutnya agar RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Nasional/Daerah



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan

pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1.3.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

2. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

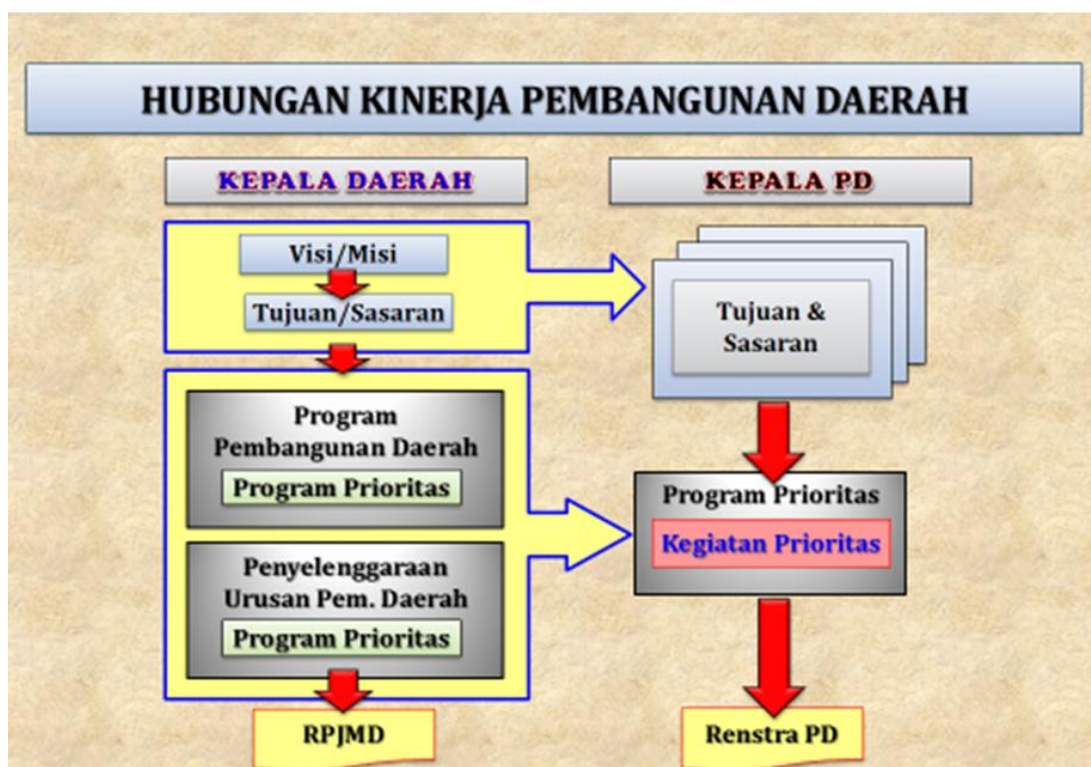
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan

dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

Gambar 1.4
Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

3. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bogor yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

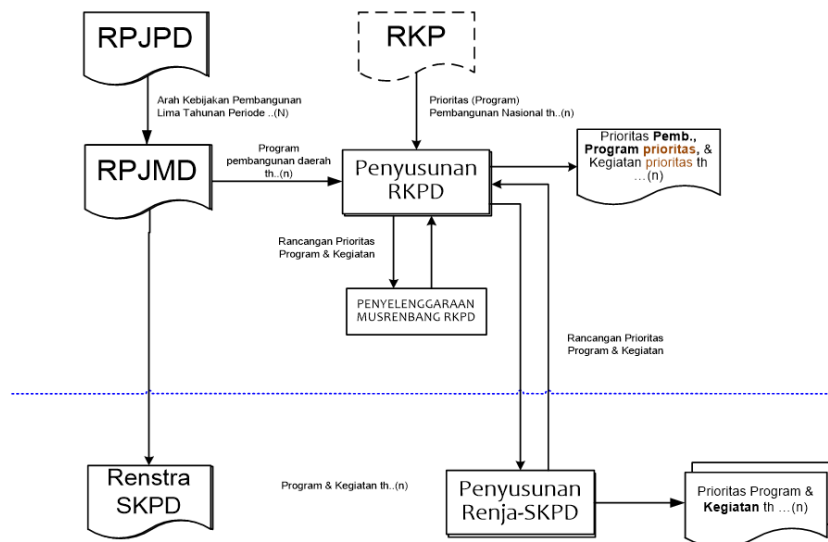
Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bogor, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD

mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.5.

Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

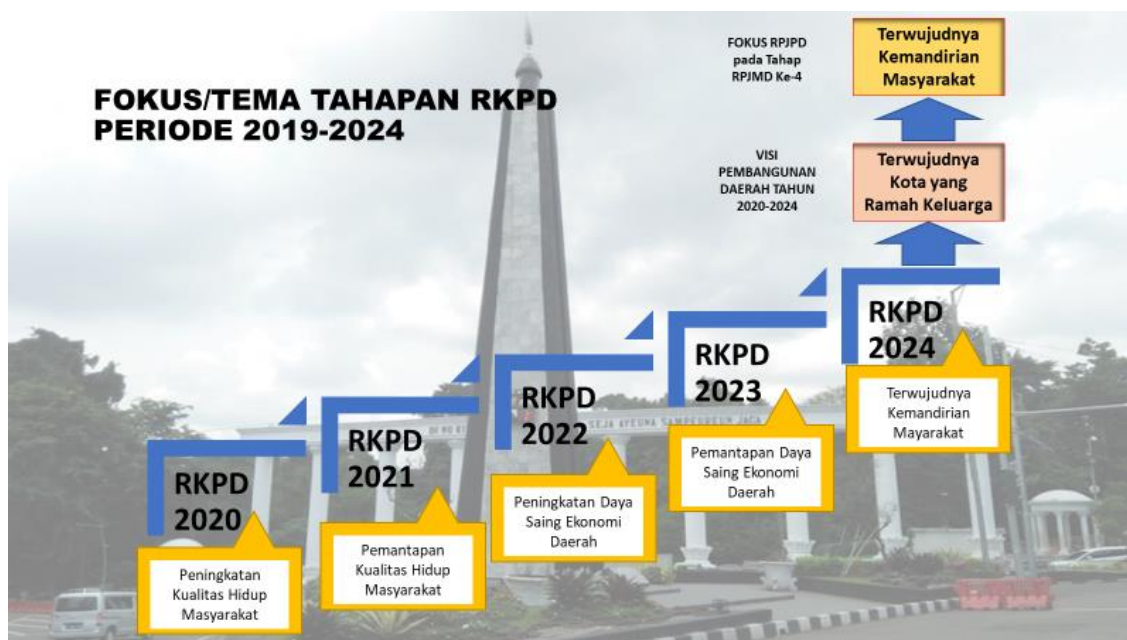


Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

Keterkaitan Tema dan Prioritas antara RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan penjabarannya ke setiap tahapan RKP tahun 2019-2024 juga dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut :

Gambar 1.6.

Fokus/Tema Tahapan RKPD Kota Bogor Periode 2019-2024



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

4. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kota Bogor, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kabupaten/Kota yang berbatasan
5. Dokumen terkait lainnya (Dokumen perencanaan sektoral).

Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berpedoman pada RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis dalam proses pembangunan Kota Bogor Lima Tahun Kedepan, yaitu bahwa :

1. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
5. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;

Untuk menjaga nilai-nilai strategis dan politis sebagaimana dimaksud diatas maka, Maksud dan Tujuan ditetapkannya RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1.4.1 Maksud

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bogor sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bogor, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

1.4.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024;

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2024, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2019-2024, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024.
5. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bogor periode 2019-2024.

1.5. Sistematika Penulisan RPJMD Kota Bogor 2020-2024

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Bogor.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang

kondisi Kota Bogor secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu, (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta (3) Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bogor untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Bogor dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN VIII DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

2.1.1.1 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 hektar yang terdiri dari enam kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 3.285 hektar dan terdiri dari 16 kelurahan, sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 813 hektar dan terdiri dari 11 kelurahan. Untuk luas wilayah menurut kecamatan tersaji pada Tabel 2.1.

Secara administratif kota bogor dikelilingi oleh wilayah kabupaten bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

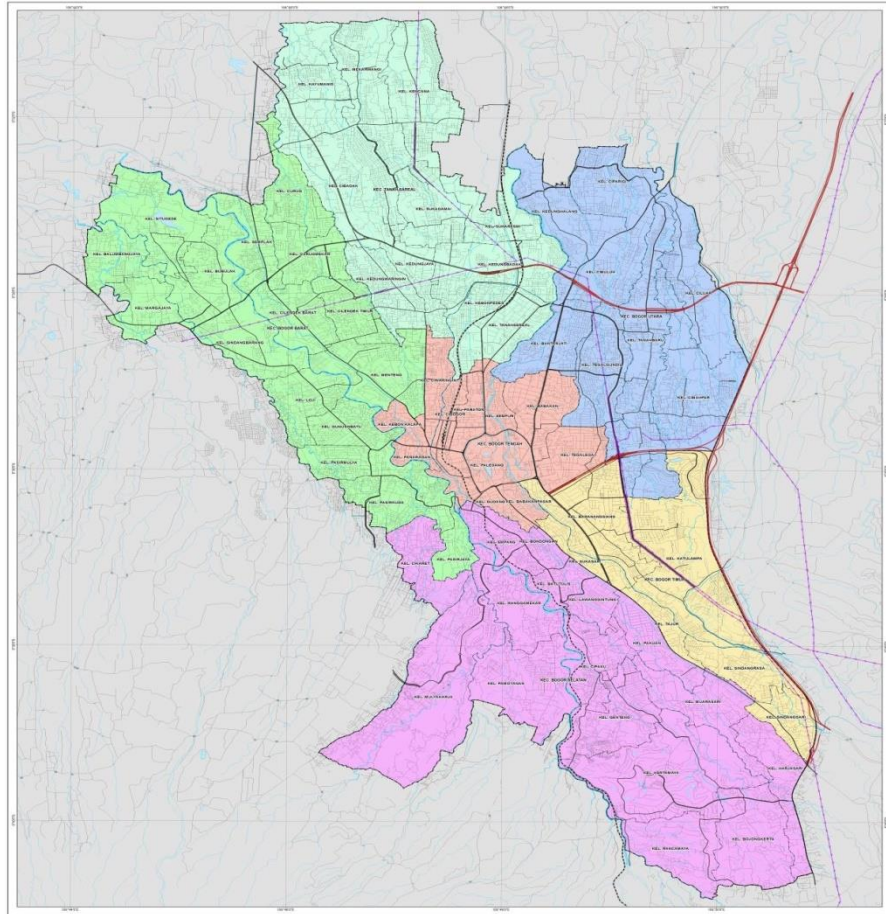
Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)
1	Bogor Selatan	3.081
2	Bogor Timur	1.015
3	Bogor Utara	1.772
4	Bogor Tengah	813
5	Bogor Barat	3.285
6	Tanah Sareal	1.884
Jumlah		11.850

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2018

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Bogor



2.1.1.2 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara $106^{\circ}43'30''\text{BT}$ – $106^{\circ}51'00''\text{BT}$ dan $6^{\circ}30'30''\text{LS}$ – $6^{\circ}41'00''\text{LS}$. Kedudukan geografi Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan DKI Jakarta. Jarak Kota Bogor dengan Kota Jakarta kurang lebih 60 kilometer dan dengan Kota Bandung sekitar 120 kilometer. Hal ini menjadi potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Berdasarkan hasil foto udara diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

A. TOPOGRAFI

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0-2 persen, untuk luasan lahan datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2-15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15-25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25-40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat peka terhadap erosi, karena mempunyai kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam sehingga daerah tersebut sangat peka terhadap erosi.

B. GEOLOGI

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar.

Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas aluvial.

C. HIDROLOGI

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dalam mengalami penurunan dibanding tahun

2011. Demikian pula kapasitas air tanah dalam, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor. Lahan di Kota Bogor hingga tahun 2012 masih banyak lahan tidak kritisnya yaitu sekitar 81,45 persen (9.651,98 ha). Sementara lahan kritisnya mencapai 1,82 persen (215,47 ha). Sisanya agak kritis 2,49 persen (295,07 ha) dan potensial kritis 14,24 persen (1.687,48 ha). Lahan kritis banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Semua Kelurahan di daerah tersebut mengandung lahan kritis kecuali Kelurahan Cikaret. Lahan potensial kritis selain di Kecamatan Bogor Selatan juga banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat.

Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang dan Situ Curug difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai luas pengaliran 185 kilometer persegi dan Sungai Ciliwung mempunyai luas pengaliran 211 kilometer persegi. Menurut hasil pengukuran debit tahun 2004, setiap satu kilometer persegi Sungai Cisadane memiliki debit 75,8 liter per detik dan setiap satu kilometer persegi Sungai Ciliwung memiliki debit 74,1 liter per detik.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri *e-colli* sedikit diatas kriteria yang disyaratkan.

D. KLIMATOLOGI

Udara di Kota Bogor cukup sejuk dengan suhu udara rata-rata tiap bulannya mencapai 33,90C, dengan suhu terendah 18,80C dan suhu tertinggi 36,10 C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata 3.654 per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 79,0 – 652,0 mm dengan rata-rata hujan 14 hari per bulan dan kelembaban udara 70%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut.

Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan.

E. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kota Bogor sebesar 1.358,88 hektar atau 11,467 persen lahan Kota Bogor sudah menjadi kawasan perumahan. Sedangkan sisanya dipergunakan antara lain untuk lahan pertanian kota seluas 3.107,70 hektar (26,22%), lahan industri seluas 98,81 hektar (0,83%), perdagangan dan jasa seluas 246,88 hektar (2,08%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 51,60 hektar (0,43%), kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,95 hektar (1,16%), danau/situ seluas 19,36 hektar (0,16%), sungai seluas 1,10 hektar serta sempadan sungai seluas 1,07 hektar. (cek di RTRW)

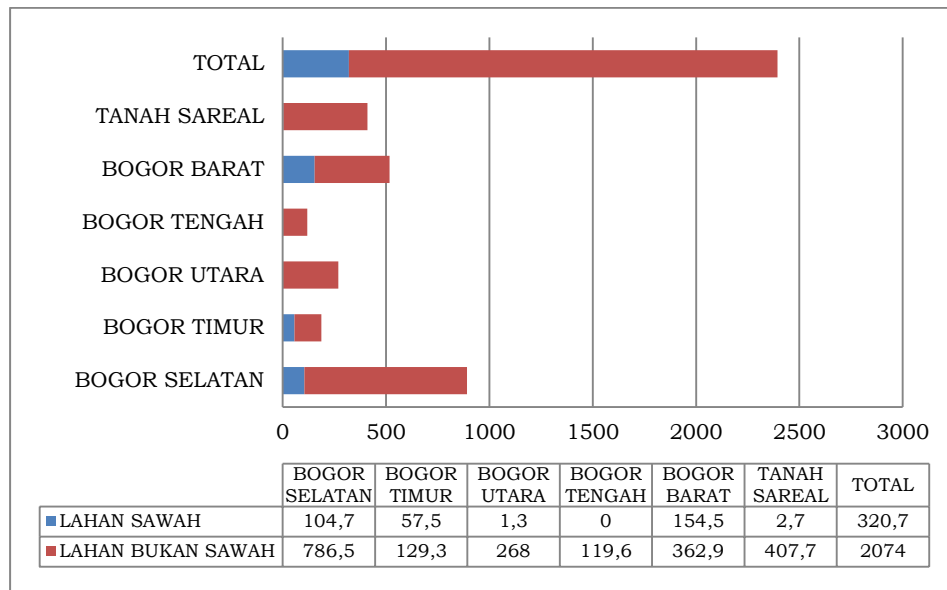
Luas lahan sawah di enam kecamatan pada tahun 2017 yaitu 320,7 hektar luas lahan sawah dan luas bukan sawah yaitu 2.074 hektar. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luasan lahan sawah terbesar yaitu 154,5 hektar dan Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luasan lahan bukan sawah terbesar yaitu 786,5 hektar. Jenis penggunaan lahan bukan sawah dapat

dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu: Tegall, Ditanami Pohon, Kolam, Tidak Diusahakan dan Lainnya.

Pada tahun 2017, lahan tegal mempunyai luasan yang paling besar yaitu 1.648 hektar dan Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luas lahan bukan sawah terbesar di Kota Bogor.

Grafik 2.1

Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan, 2017



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2018

Kemampuan lahan di Kota Bogor terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

A. Lahan yang tidak dapat dikembangkan (*restricted area*)

Lahan yang tidak dapat dikembangkan adalah lahan yang sudah ditetapkan mempunyai fungsi perlindungan dan lahan yang ditetapkan tidak dapat dialihfungsikan ke penggunaan lain yang tidak sesuai. Secara umum lahan ini adalah lahan perlindungan setempat, kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota. Lahan ini terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota, serta kawasan perlindungan setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada Pasal 60, bahwa kawasan perlindungan plasma nutfah adalah Kebun Raya Bogor. Wilayah Hutan Kota yang dapat dijadikan potensi RTH Kota Bogor kedepan adalah hutan-hutan penelitian yang notabene adalah milik Departemen/kantor pusat yang sewaktu-

waktu bisa dialihkan fungsinya menjadi fungsi komersial diantaranya: Hutan Penelitian Biotrop dan Kebun Penelitian IPB.

B. Lahan yang dapat dikembangkan dengan persyaratan (*limited area*)

Lahan yang dapat dikembangkan dengan persyaratan adalah lahan belum terbangun yang dapat dialihfungsikan untuk kegiatan perkotaan dengan persyaratan tertentu seperti pengaturan bangunan atau penggunaan teknologi tertentu. Di Kota Bogor lahan ini terdiri dari lahan resapan air dimana pembangunannya memerlukan pengaturan KDH dan/atau pemberlakuan aturan penyediaan sumur resapan.

C. Lahan yang dapat dikembangkan (*developed area*)

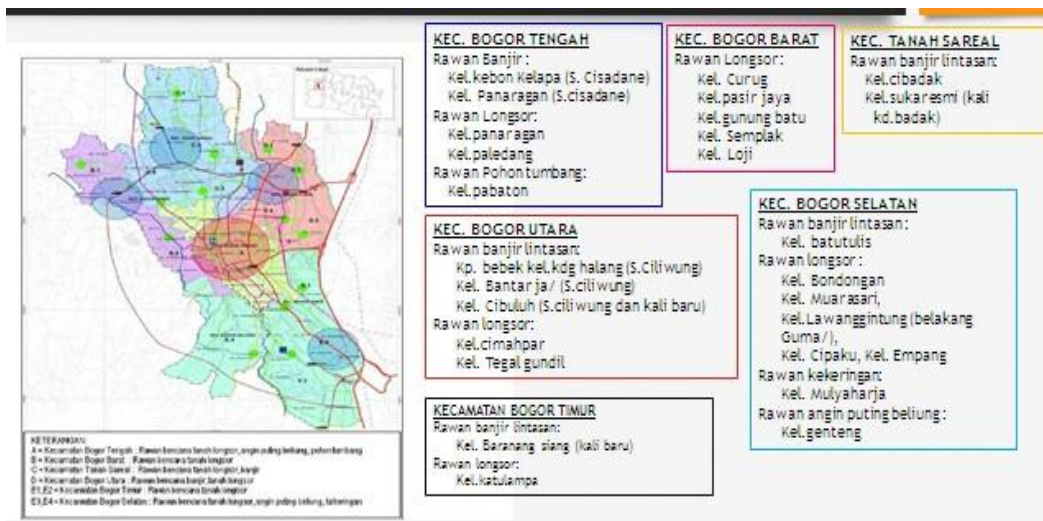
Lahan yang dapat dikembangkan adalah lahan terbangun atau lahan tidak terbangun yang dapat dialihfungsikan penggunaannya untuk keperluan aktivitas budidaya perkotaan, seperti perumahan dan prasarananya, industri, perdagangan dan jasa. Dalam kecenderungannya lahan tidak terbangun cenderung beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan prasarananya atau industri. Sedangkan kegiatan komersial perkotaan berupa perdagangan dan jasa cenderung berubah dari penggunaan lahan perumahan atau lahan terbangun lainnya.

F. WILAYAH RAWAN BENCANA

Berdasarkan hasil pemutakhiran data daerah rawan bencana yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor telah terdeteksi daerah rawan bencana sebagai berikut:

Gambar 2.2

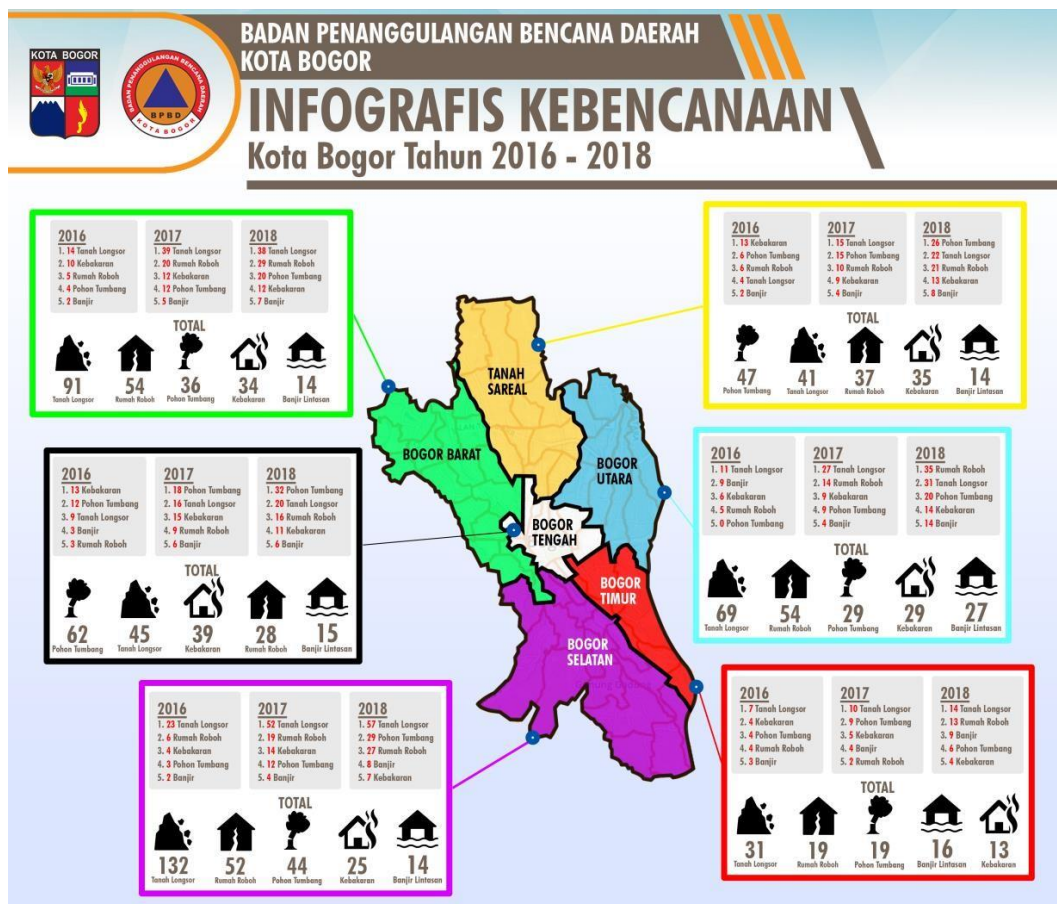
Daerah Rawan Bencana Di Wilayah Kota Bogor



Kejadian Bencana Tahun 2016 - 2018 tersebar di setiap kecamatan sebagaimana tergambar dalam infografis berikut:

Gambar 2.3

Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2016-2018



Sumber : Pusdalop – PB BPBD Kota Bogor 2016

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 - 2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

1. Wilayah Pengembangan (WP) A, dengan pusat WP di Kebun Raya dan sekitarnya;
2. Wilayah Pengembangan (WP) B, dengan pusat WP di kawasan di Bubulak dan sekitarnya;
3. Wilayah Pengembangan (WP) C, dengan pusat WP di kawasan di Yasmin dan Pasar TU Kemang;
4. Wilayah Pengembangan (WP) D, dengan pusat WP di kawasan di BORR Kedunghalang, Sentul, dan Warung Jambu;
5. Wilayah Pengembangan (WP) E, dengan pusat WP dikawasan Tajur R3, Inner Ring Road.

Dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka pembagian wilayah pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jml Penduduk (jiwa)	Keterangan
1	A	Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersil di sekitar Kebun Raya (Pusat Kota Lama)	Pusat Kota Sub- Pusat Kota (Pusat WP-A)	Seluruh Kota WP	296.180	
2	B	Daerah Bubulak - Sindang barang	Subpusat Kota (Pusat WP-B)	- WP	216.065	Melayani penduduk perbatasan
3	C	Daerah Jasmin – Pasar TU Kemang	Subpusat Kota (Pusat WP-C)	- WP	427.718	
4	D	Daerah warung	Subpusat Kota	- WP	382.509	

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jml Penduduk (jiwa)	Keterangan
		Jambu-Jl. Adnawijaya	(Pusat WP-D)			
5	E	Daerah Tajur & sekitar rencana akses toll Ciawi-Sukabumi- Inner Ring Road	Subpusat Kota (Pusat WP-E)	- WP	353.554	Melayani penduduk perbatasan

Sumber : RTRW Kota Bogor 2011-2031

Tabel 2.3

Arahan Pengembangan Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
A	Pengendalian, revitalisasi (pembangunan kembali) dan peremajaan kota (Urban Renewal)	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional sepanjang koridor jalan utama	Jalan Pajajaran, Jalan Juanda, Jalan Suryakencana, Jalan Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Pahlawan
		Revitalisasi kawasan	Stasiun Kereta Api, Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani, Pasar Kebon Kembang, Kawasan Jembatan Merah, serta Kawasan Pasar Bogor dan sekitarnya
		Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur yang berlokasi pada	Bantaran Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cipakancilan
	bantaran sungai dengan mengembangkan perumahan vertikal KDB rendah		
	Menjaga dan	Kawasan Kebun Raya	

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
	melindungi dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi dan nilai kawasan	dan Istana Bogor	
	Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebar	
	Pengendalian perubahan fungsi dan bentuk bangunan	Kawasan cagar budaya permukiman Taman Kencana dsk	
B	Pengembangan yang terkendali	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional	Jalan Gunung Batu (Jl. Mayjen Ishak Djuarsa), Jalan Sindangbarang (Jl. Ibrahim Adjie), Jalan RE Abdullah, Jalan Aria Surialaga, Jalan Ciomas Raya dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh serta rencana jalan inner ring road
		Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU	Pusat WP B
		Perlindungan kawasan lindung dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi lindung kawasan	Situ gede dan hutan kota Cifor
		Mempertahankan luasan lahan pertanian kota	menyebar
		Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan agar	menyebar

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
		tetap berkepadatan sedang dan rendah	
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Perumahan kepadatan tinggi (areal eksisting)
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebar
		Mempertahankan RTH pusat penelitian dan kebun percobaan	Kawasan pusat penelitian dan kebun percobaan
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
C	Pengembangan baru yang terarah	Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	terutama di sepanjang Jalan Kemang-Kedunghalang (Jl. Sholeh Iskandar) dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh
		Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU	Pusat WP C
		Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pemaduserasian perencanaan pembangunan perumahan	Menyebar

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
		dengan wilayah sekitarnya	
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebar
		Pembangunan infrastruktur kota baru disertai jalur hijau di sekitarnya	TPPAS dan TPU Kayu manis
		Mengembangkan kawasan stoplet Sukaresmi sebagai terminal multimoda yang terkait dengan pengembangan kegiatan komersial, fasilitas pelayanan dan hunian vertical (konsep TOD)	Kawasan stoplet Sukaresmi
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Perumahan kepadatan tinggi Kebon Pedes
		Mempertahankan RTH privat di lingkungan pabrik dengan pemberian insentif yang sesuai	Kawasan industri Pabrik ban Good year
		Menjaga dan melindungi dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sarana olahraga (SOR)	Kawasan sarana olah raga stadium Pajajaran RTH Sarana Olah raga
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
D	Pengembangan baru terarah	Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	Jalan Pajajaran, Jalan Kedunghalang (Jalan KS. Tubun), Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya Pemda, Jalan Pangeran Sogiri serta rencana jalan-jalan kolektor baru
		Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU	Pusat WP D
		Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pemaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya	Menyebar
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Menyebar , daerah eksisting
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebar
		Membatasi penambahan lokasi industri yang baru serta menata kawasan sekitarnya	Jalan Raya Pemda
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi	TPU eksisting dan rencana

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
		RTH	
E	Pengembangan terbatas	Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	terutama di sepanjang Jalan Bogor-Ciawi (Jl.Raya Tajur), rencana jalan R3, rencana jalan inner ring road , Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret
		Membatasi perkembangan perumahan melalui penetapan kawasan perumahan berKDB rendah	menyebar
		Melindungi kawasan resapan air	menyebar
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai dengan hirarki pelayanan	menyebar
		Mengembangkan ekowisata	Kelurahan Rancamaya, Kertamaya, Bojongkerta, Pamoyanan, Mulyaharja, Cipaku
		Mengembangkan sarana umum skala kota (Stadion skala Kota)	Sub WP E3
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Perumahan kepadatan tinggi di kelurahan Tajur dan Sukasari, Muarasari (di area eksiting)
		Membatasi penambahan lokasi industri yang baru	Kawasan industri yang ada

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
		serta menata kawasan sekitarnya	
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
		Mempertahankan lahan pertanian yang ada sebagai RTH kota	menyebar
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Menyebar , daerah eksisting
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebar
		Membatasi penambahan lokasi industri yang baru serta menata kawasan sekitarnya	Jalan Raya Pemda
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
		Mempertahankan lahan pertanian yang ada sebagai RTH kota	menyebar

Sumber : RTRW Kota Bogor 2011-2031

Tabel 2.4
Rencana Ruang Kegiatan Tematik pada Sub Pusat Kota / Pusat
Wilayah Pelayanan (WP)

Komponen Ruang	WP A	WP B	WP C	WP D	WP E
Ruang kegiatan tematik	Perdagangan jasa skala kota, perkantoran, RTH kota	Jasa akomodasi, perdagangan dan ecowisata	Sentra elektronik, pasar induk	Jasa akomodasi, perkantoran, wisata kuliner	Sentra otomotif, wisata belanja, MICE, jasa akomodasi, ecowisata

Sumber: Hasil Analisis, 2010

2.1.3 ASPEK DEMOGRAFIS

Penduduk Kota Bogor pada tahun 2018 menurut BPS terdapat sebanyak 1.096.828 jiwa yang terdiri atas 555.995 orang laki-laki dan sebanyak 540.833 orang perempuan. Dengan luas wilayah 118,50 kilometer persegi, kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2018 mencapai 92.559 jiwa perkilometer persegi.

Grafik 2.2

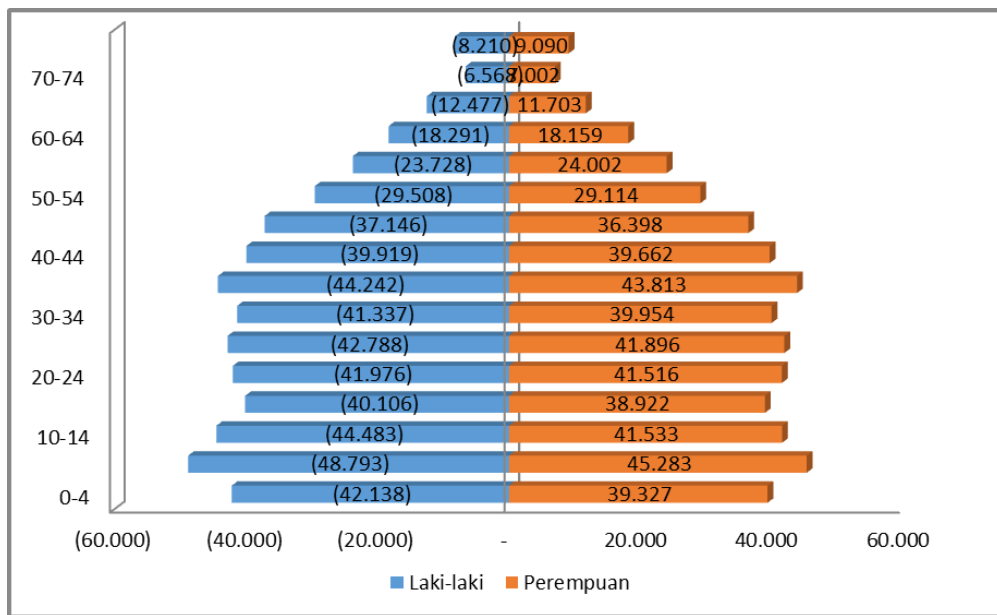
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Grafik 2.3

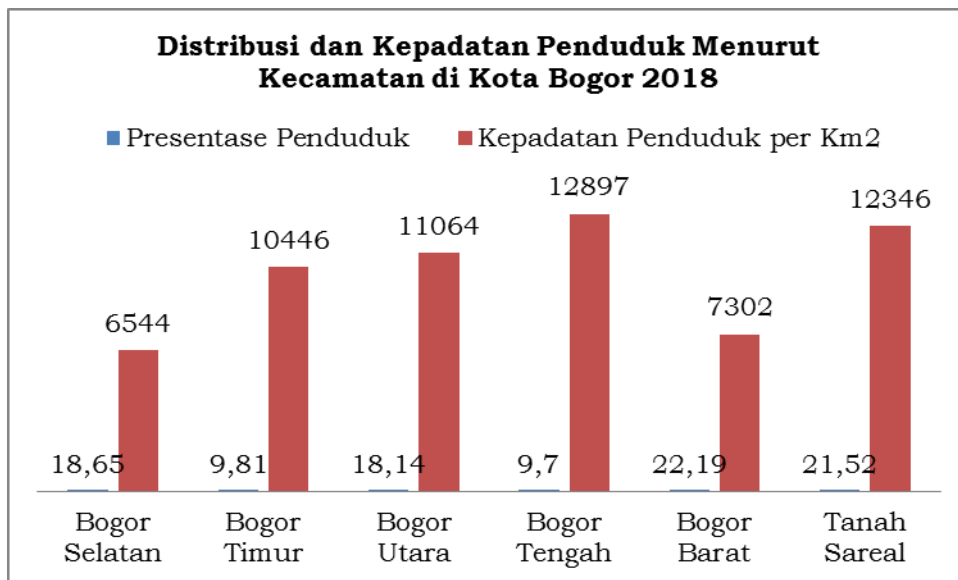
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor 2018



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, 2018

Grafik 2.4

Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor 2018



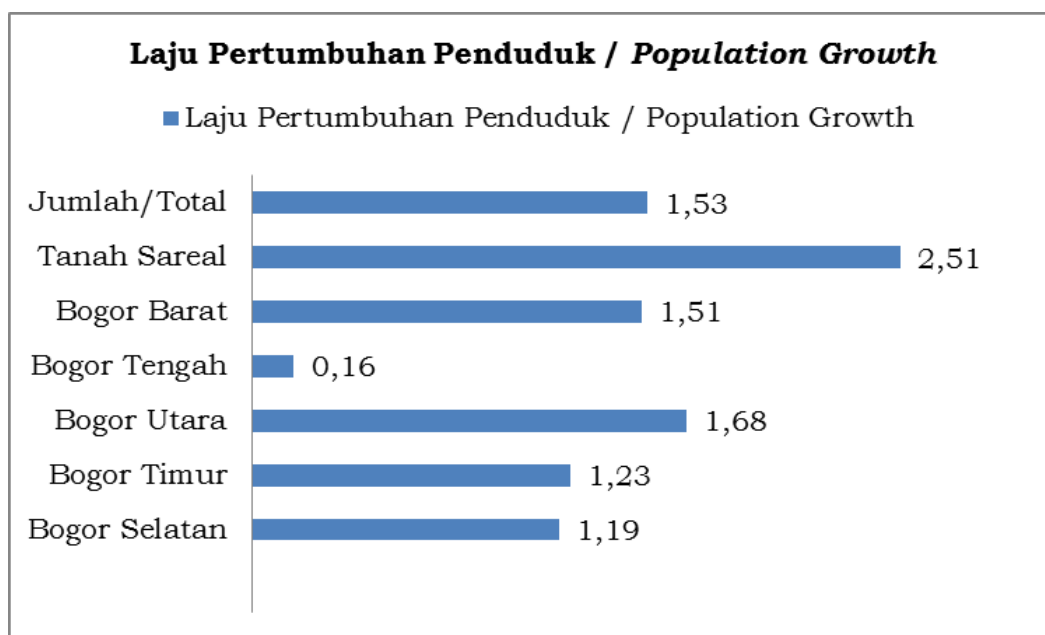
Sumber : BPS dan Bappeda, 2018

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kota Bogor

Kecamatan/Subdistrict	Jumlah Penduduk (Orang)/Population (Person)			Laju Pertumbuhan Penduduk / Population Growth
	2010+	2016	2017	Rate (%)
010 Bogor Selatan	182.830	199.248	201.618	1,19
020 Bogor Timur	95.855	104.737	106.029	1,23
030 Bogor Utara	171.863	192.812	196.051	1,68
040 Bogor Tengah	102.115	104.982	104.853	0,16
050 Bogor Barat	212.812	236.302	239.860	1,51
060 Tanah Sareal	192.640	226.906	232.598	2,51
Jumlah/Total	958.115	1.064.687	1.081.009	1,53

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Grafik 2.5
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk per kecamatan Kota Bogor
Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 PERTUMBUHAN PDRB

Pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,61 dari tahun 2016 yaitu 6,12 pada tahun 2017 dan 6.73 dari tahun 2016. Dimana sebelumnya pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3

tahun sebelumnya. Penurunan ini secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global khususnya kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Barat, yang mengalami penurunan pula sebesar 0.37. Walau demikian bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat dan Nasional, Kota Bogor masih berada di atas keduanya.

Jika dilihat lebih dalam distribusi persentase PDRB, peningkatan dari tahun sebelumnya terdapat pada kategori konstruksi pada tahun 2017 mengalami peningkatan tertinggi 0,33 dibanding kategori yang lain di ikuti oleh kategori informasi dan komunikasi (0,28) dan transportasi dan pergudangan (0,16). Sedangkan kategori tertinggi pada tahun 2017 adalah adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,21 diikuti industri pengolahan 18,35 diikuti transportasi dan pergudangan 12,05, Jasa keuangan dan asuransi 0,15 serta jasa lainnya 0,14.

Tabel 2.6

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2013-2017 (persen)

Keterangan	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	231.4	241.6	254	269.2	280.3
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	4,838	5,393.10	5,998.60	6,538.50	7,064.80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,514.70	1,960.80	1,925.00	1,970.60	1,949.80
E	Pengadaan Air, Pengolahan	27.4	28.8	32	36	41

Keterangan	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Sampah, dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	2,964.50	3,280.10	3,647.80	3,937.70	4,409.40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,927.80	6,476.60	7,088.10	7,643.80	8,168,1
H	Transportasi dan Pergudanga n	2,894.30	3,151.10	3,776.20	4,210.10	4,638.10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,170.30	1,294.50	1,421.40	1,586.00	1,750.00
J	Informasi dan Komunikasi	1,085.80	1,284.90	1,521.40	1,710.40	1,967.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,085.30	1,975	2,142.60	2,475.20	2,748.40
L	Real Estate	580.00	653.30	716.30	782.80	846.50
M,N	Jasa Perusahaan	533.40	593.70	675.20	746.10	799.30
O	administrasi Pemerintah an, Pertahanan, dam Jaminan Sosial Wajib	787.90	881.00	955.90	1,019.00	1,080.90
P	Jasa Pendidikan	658.80	798.20	907.50	997.70	1,072.30
Q	Jasa	269.80	318.10	374.10	425.80	490.50

Keterangan	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
R,S, T, U	Jasa Lainnya	765.90	816.70	925.90	1,051.90	1,198.80
PDRB TOTAL		26,082.30	29,147.20	32,364.90	35,400.90	38,506.50

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018; Data Diolah Dari SIPD

Bila mengamati laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 2017 kategori usaha bidang transportasi dan komunikasi mengalami peningkatan sebesar 1.04 yaitu 13.40 , diikuti kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11.77 dan jasa lainnya 9.69. Pertumbuhan ekonomi di pada kategori-kategori sektor ekonomi tersier yang cukup cepat mengindikasikan bahwa pembangunan perekonomian Kota Bogor semakin bertumpu pada sektor- sektor non produksi, terutama mengandalkan perekonomian pada kategori jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Pembangunan kategori sektor jasa membutuhkan skill masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan sebagai prasyarat keberhasilan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor harus memberikan prioritas pembangunan yang tepat dalam mendorong potensi kategori sektor tersier sebagai sasaran pembangunan regional.

Tabel 2.7

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2013-2017

Ket	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	216.32	220.69	225.14	230.15	233.03
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri	4325,58	4,564.57	4,843.79	5,109.36	5,351.64

Ket	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik dan Gas	980.51	1,025.05	898.23	903.13	831.95
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	23.92	25.94	27.36	28.52	29.5
F	Konstruksi	2,555.96	2,696.29	2,646.75	3,011.15	3,237.68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,114.43	5,367.11	5,650.09	5,972.86	6,306.05
H	Transportasi dan Pergudangan	2,496.95	2,637.72	2,893.36	3,133.22	3,366.50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,002.85	1,059.40	1,119.75	1,209.84	1,304.03
J	Informasi dan Komunikasi	1,070.49	1,270.61	1,506.67	1,692.96	1,919.82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,549.25	1,606.73	1,676.55	1,847.07	1,951.35
L	Real Estate	490.88	525.98	555.98	601.02	639.84
M,N	Jasa Perusahaan	456.80	477.36	516.83	560.21	590.80
O	administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	456.80	477.36	516.83	560.21	590.80
P	Jasa Pendidikan	626.87	643.23	660.73	675.93	683.61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	587.39	656.81	718.86	772.60	826.60
R,S, T, U	Jasa Lainnya	739.51	777.95	843.36	912.98	1,001.43
PDRB TOTAL		22,484.67	23,835.31	25,298.60	27,002.25	28,654.97

Sumber : Bogor Dalam Angka, 2018; Data Diolah Dari SIPD

Berdasarkan data yang dimiliki BPS, PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2017 telah mencapai Rp 38.506.500.000 atau meningkat 8,77% dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp 35.400.800.000 Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga

Konstan mencapai Rp 28.654.970,000 atau meningkat 6,12% dibanding pencapaian pada tahun 2016 sebesar Rp 27.002.250,000.

Tabel 2.8

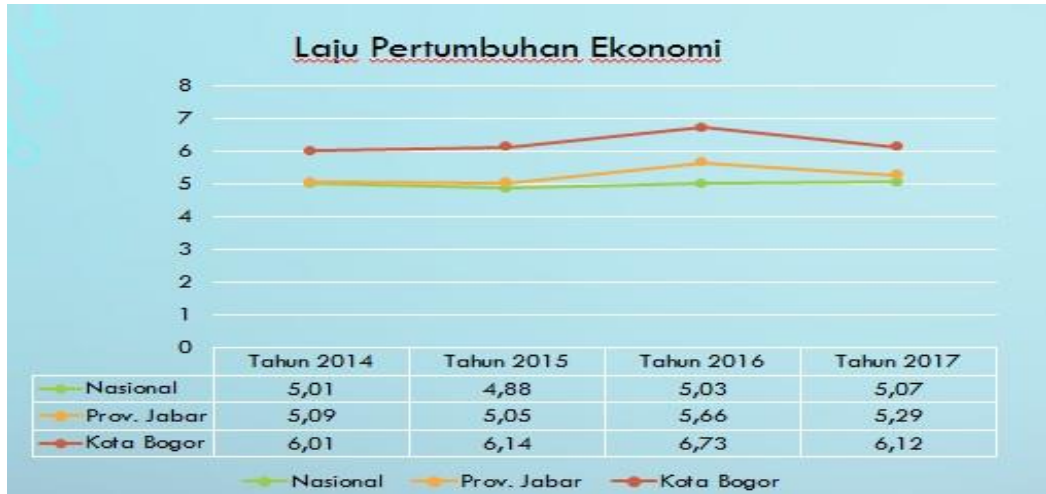
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2013-2017 (miliar Rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2013	26.082,3	22.484,67
2	2014	29.147,2	23.835,31
3	2015	32.364,9	25.298,60
4	2016	35.400,8	27.002,25
5	2017	38.506,5	28.654,97

Sumber : Data Diolah Dari SIPD

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor kurun waktu tahun 2014 – 2016 mengalami perkembangan. Pada Tahun 2014 sebesar 6.01 kemudian naik lagi pada tahun 2015 menjadi 6.14, mengalami kenaikan lagi sebesar 0.59 menjadi 6.73. tetapi terjadi pelambatan pada tahun 2017 sebesar 0.61 menjadi 6.12. Apabila di bandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor masih berada d atas dengan selisih 0.83 pada tahun 2017, dimana provinsi berada pada angka 5.29. Begitu juga bila di bandingkan dengan tingkat nasional yang berada pada angka 5.07 pada tahun 2017 ada selisih sebesar 1.05.

Grafik 2.6



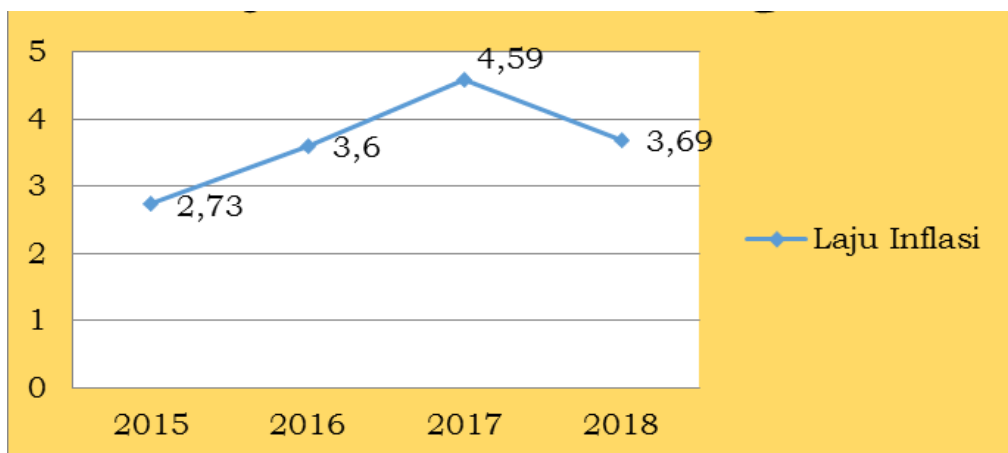
Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2018

2.2.2 LAJU INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Selama periode 2015-2018, Kota Bogor mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat inflasi Kota Bogor pada posisi 2,75 %, mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu menjadi 3,6% dan 4,59. Dan mengalami penurunan sampai 0,9% pada tahun 2018 yaitu 3,69%.

Grafik 2.7

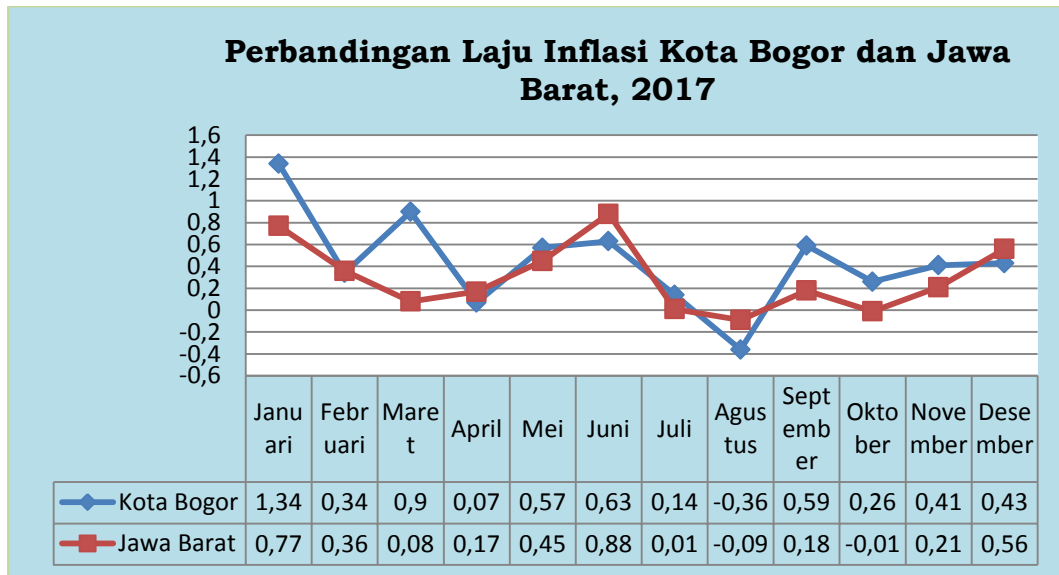
Laju Inflasi Kota Bogor



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Grafik 2.8

Perbandingan Laju Inflasi Kota Bogor dan Jawa Barat, 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

2.2.3 PDRB PER KAPITA

Peningkatan di bidang Ekonomi juga terlihat dari pencapaian PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Bogor dimana Nilai PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 27,77 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 37,18 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.9

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017*)
1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	25,75	28,28	30,88	33,25	35,62
2	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (2010)	22,20	23,12	24,14	25,36	26,51
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita	4,16	4,19	4,40	5,05	4,52

Sumber : LKPJ AMJ Walikota Bogor 2015-2019; Data Diolah Dari SIPD

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan

masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2017 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 35,62 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 6,12 persen.

Tabel 2.10

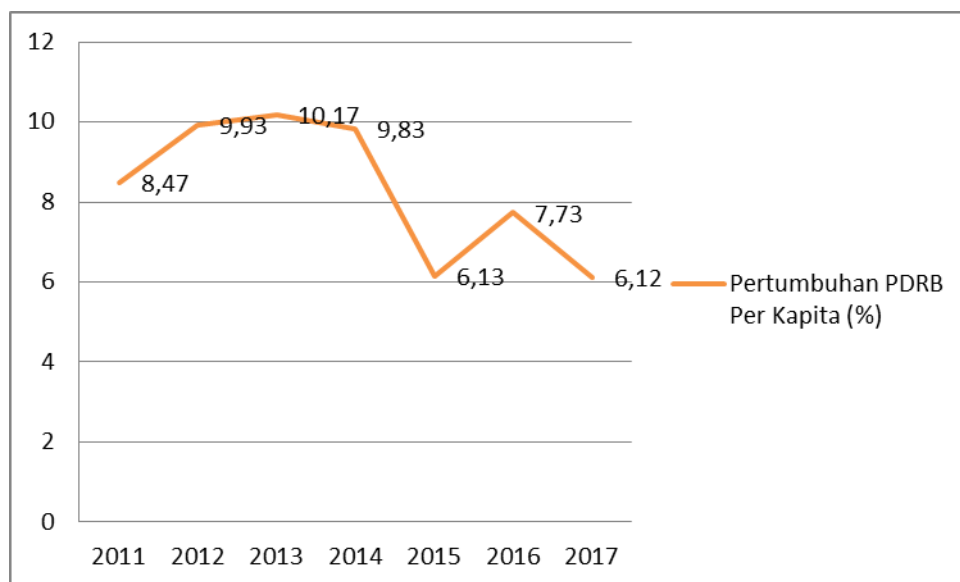
PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2011-2017

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)
2011	21,26	8,47
2012	23,27	9,93
2013	25,72	10,17
2014	28,23	9,83
2015	30,88	6,13
2016	33,25	7,73
2017	35,62	6,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017; Data Diolah Dari SIPD

Grafik 2.9

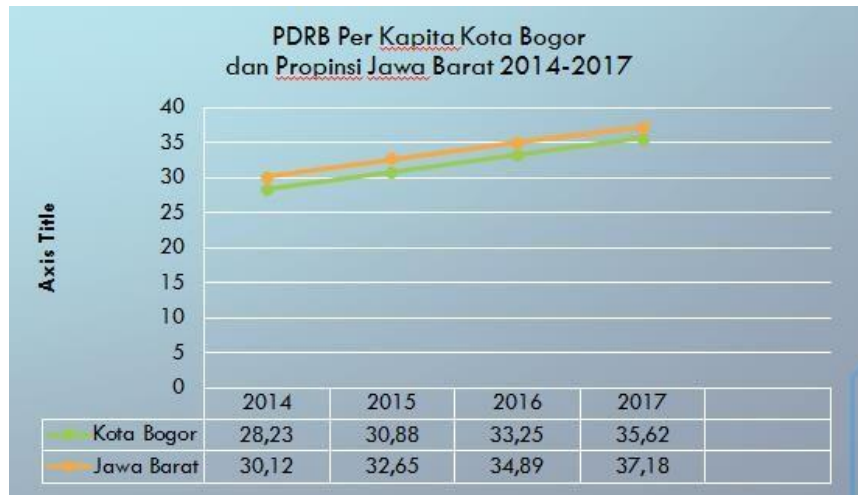
Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Ditinjau dari nilai PDRB per kapita Kota Bogor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 berada pada posisi 9,83 lalu mengalami penurunan 3,7 menjadi 6,13 pada tahun 2015 dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2016 menjadi 7,73 lalu terjadi penurunan sebesar 1.61 pada tahun 2017 menjadi 6,12. Ini menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.

Grafik 2.10



Sumber : BPS Kota Bogor, 2019

Apabila dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor berada di posisi di bawah angka Provinsi.

2.2.4 INDEKS GINI

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM- FEUI, 1995) :

- $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

- GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebesar 0,431 artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan yang ditentukan dengan Koefisien Gini Rasio antara 0-1 (>0 dan <1), semakin rendah Koefisien Gini maka pendapatan suatu wilayah/ daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila Indeks Gini lebih besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan Indeks Gini dibawah 0,5 (tinggi > 0,5 dan rendah <0,5).

Tabel 2.11

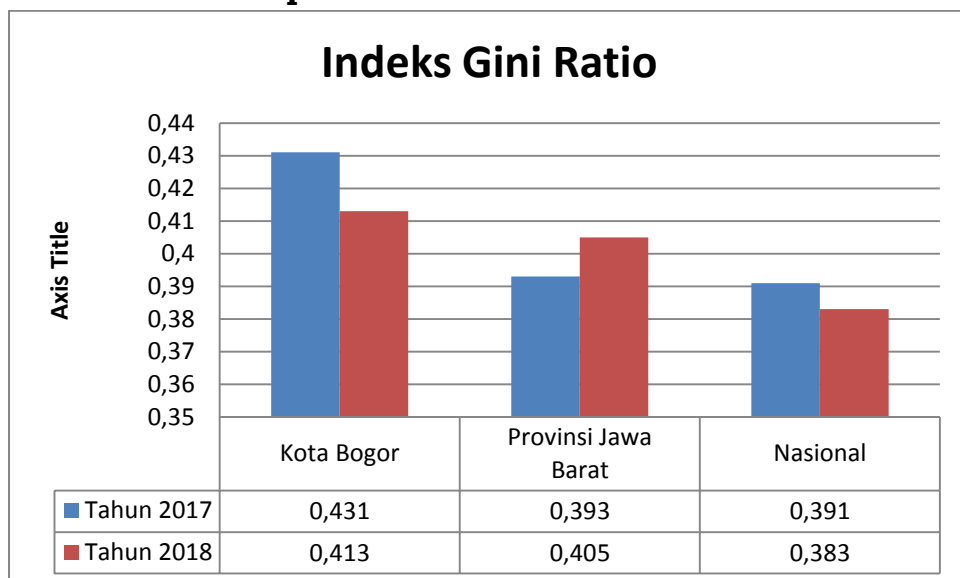
Perkembangan Indeks Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2011-2017

Wilayah Kabupaten Kota	Gini Rasio						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bogor	0.39	0.45	0.45	0.36	0.47	0.43	0.431

Data diolah dari SIPD

Grafik 2.11

Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2017-2018



Sumber : BPS Jawa Barat, 2019

2.2.5 TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
- b. Angkatan Kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
- d. Kurangnya perhatian pemerintah, dimana pemerintah terkadang kurang peka terhadap permasalahan kemiskinan serta tidak memiliki program yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan.
- e. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) rumah tangga miskin dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:

- Kelompok 1 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah di Indonesia/paling miskin.
- Kelompok 2 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11 persen-20 persen terendah di Indonesia/hampir miskin.
- Kelompok 3 adalah rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21 persen-30 persen terendah di Indonesia/rentas miskin.

Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga miskin di Kota Bogor mencapai 212.085 rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah tangga miskin pada kelompok 1/paling miskin di Kota Bogor mencapai 15.657 rumah tangga. Pada kelompok 2/hampir miskin, jumlah rumah tangga miskin mencapai 24.556 rumah tangga, sedangkan penduduk yang masuk kelompok 3/rentan miskin sebanyak 171.872 rumah tangga.

Tabel 2.12

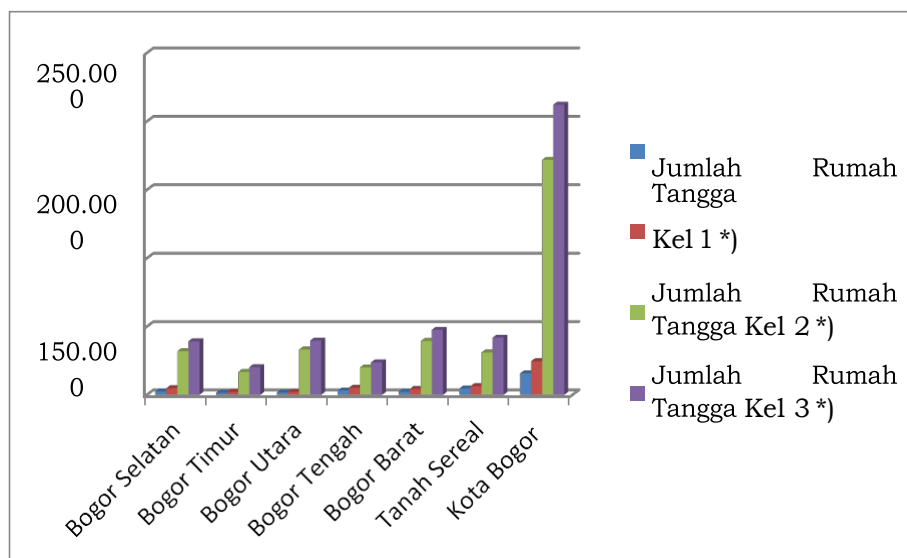
Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor

NAMA KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA			TOTAL
	KEL 1 *)	KEL 2 *)	KEL 3 *)	
Bogor Selatan	2.510	4.781	31.906	39.197
Bogor Timur	1.469	2.102	16.643	20.214
Bogor Utara	1.652	2.117	33.103	39.585
Bogor Tengah	3.136	5.084	19.947	23.711
Bogor Barat	2.280	4.202	39.339	47.559
Tanah Sereal	4.610	6.270	30.939	41.819
Kota Bogor	15.657	24.556	171.872	212.085

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018 ; Data diolah dari SIPD

Grafik 2.12

Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018

Grafik 2.13



Sumber: BPS Kota Bogor, 2019

Berdasarkan data di atas bahwa Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah yang mempunyai sebaran Rumah tangga Miskin terbanyak yaitu sebanyak 47.559 kk atau 22,42% dari total jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada di Kota Bogor. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik.

2.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2014-2018 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumberdaya manusia Kota Bogor yang ditandai dengan meningkatnya kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui IPM. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor mencapai 75,66 poin pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 73,1. Hal ini disebabkan adanya

peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran per kapita per tahun). Angka IPM sebesar 75,66 di atas, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera. Realisasi komponen pembentuk IPM berdasarkan data BPS yaitu:

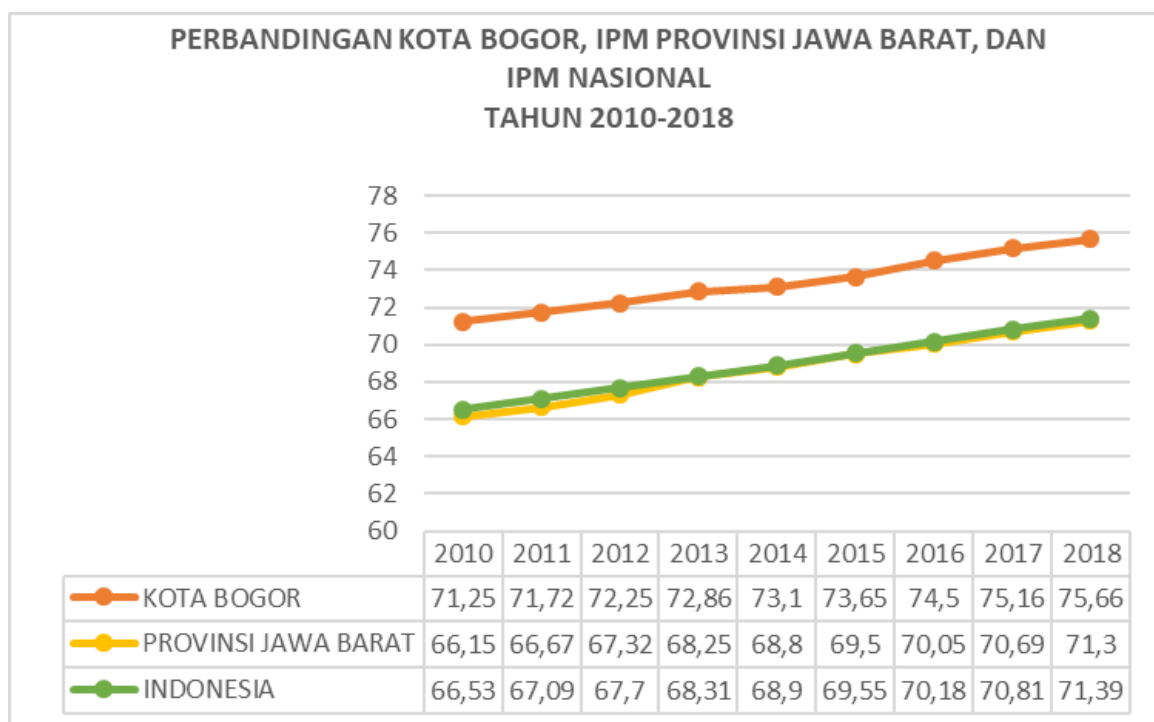
Tabel 2.13

Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor Tahun 2014-2017

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)	73,1	73,65	74,5	75,16	75,66
	Komposit IPM terdiri dari:					
	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,58	72,88	72,95	73,01	73,21
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,23	12,36	13,01	13,37	13,38
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,01	10,2	10,28	10,29	10,30
	Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu)	10.532	10.576	10.662	10.940	11 348

Sumber : Diolah dari Bogor Dalam Angka 2018 ; Data diolah dari SIPD

Grafik 2.14



Sumber: BPS Kota Bogor, 2019

Tabel 2.14

Pertumbuhan IPM Kota Bogor Tahun 2010-2017

TAHUN	KOTA BOGOR	PROVINSI	NASIONAL
2014	0,24	0,55	0,59
2015	0,55	0,7	0,65
2016	0,85	0,55	0,63
2017	0,66	0,64	0,63
2018	0.50	0.61	0.58

Sumber : Data diolah dari SIPD

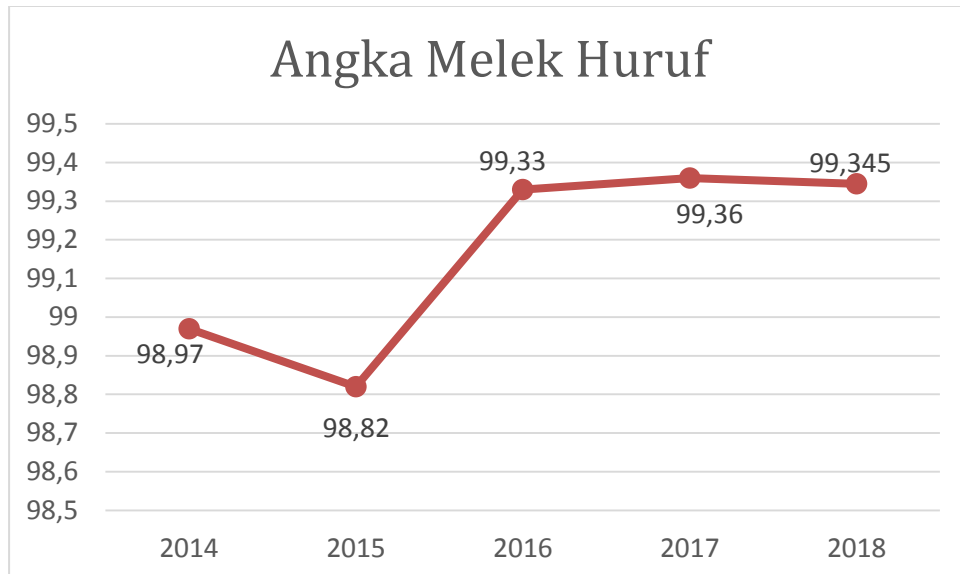
Hasil Evaluasi terhadap perkembangan IPM Kota Bogor dari tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2014 kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor melambat cukup signifikan dan jauh dibawah pertumbuhan IPM Jabar dan IPM Nasional
- Tahun 2015-2016 kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor kembali meningkat cukup signifikan dan pada tahun 2016 pertumbuhan IPM Kota Bogor bahkan melebihi pertumbuhan IPM Jabar dan Nasional
- Pada tahun 2017 kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor kembali terjadi perlambatan walaupun masih sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Jabar dan IPM Nasional
- Tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 0,5 poin dari tahun 2017, akan tetapi kenaikannya berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2.2.7 ANGKA MELEK HURUF

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2014-2018. capaian angka melek huruf Kota Bogor fluktuatif. Angka melek huruf di Kota Bogor pada tahun 2018 sebesar 99,345%.

Grafik 2.15



Sumber : BPS Kota Bogor 2018, AMJ 2014-2018

Tahun 2018 masih ada masyarakat Kota Bogor yang buta huruf (0,655%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

2.2.8 RATA RATA LAMA SEKOLAH

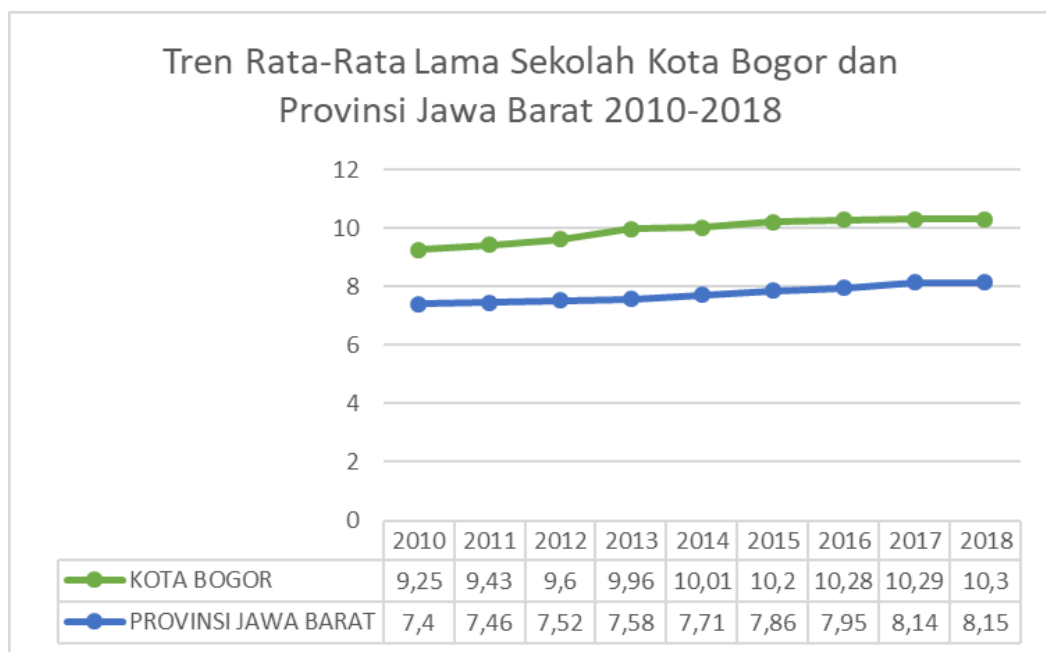
Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah.

Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Rerata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan sudah melampaui wajib pendidikan dasar 9 tahun, walaupun belum sesuai dengan harapan untuk mencapai rata rata lama sekolah 12 tahun. Berikut adalah perkembangan rata-rata lama sekolah di kota Bogor dari tahun 2011-2018.

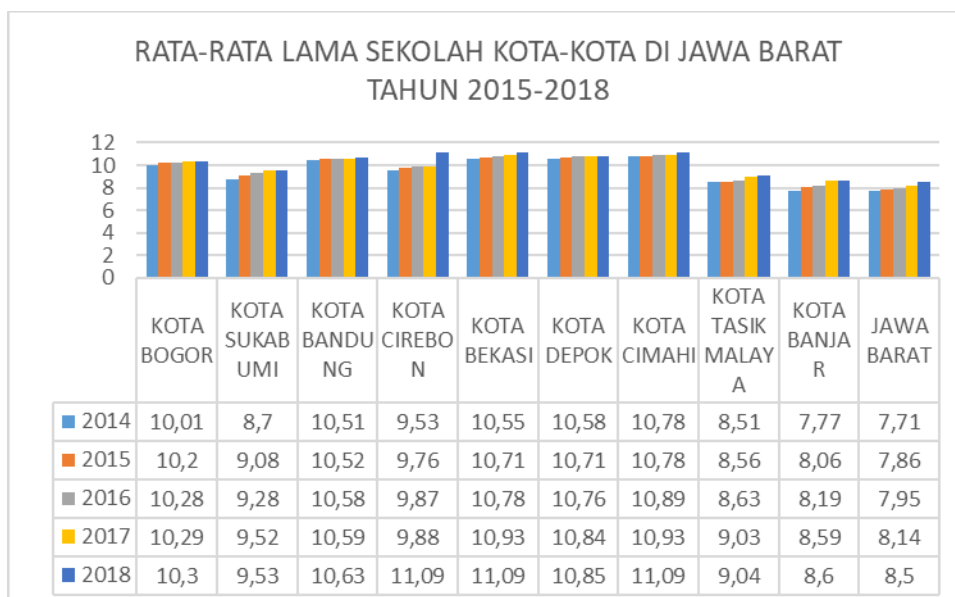
Grafik 2.16



Sumber : BPS Kota Bogor. 2018

Apabila dibandingkan dengan perkembangan rata rata lama sekolah di kabupaten/kota se Jawa Barat, Kota Bogor masih menduduki peringkat ke-5 di Jawa Barat dalam hal pencapaian rata-rata lama sekolah. Berikut ini adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Jawa Barat:

Grafik 2.17



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2018

Mulai tahun 2016-2017 pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah Kota Bogor cenderung terjadi perlambatan sementara pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah di Jawa Barat cenderung meningkat lebih tinggi dibanding pertumbuhan RLS Kota Bogor.

Permasalahan perlambatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bogor dikarenakan oleh masih adanya penduduk berusia > 25 tahun yang tidak tamat SMP dan SMA. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu dilakukan oleh Kota Bogor adalah upaya untuk menekan Angka Putus Sekolah SMP dan SMA serta mengintensifikan program kejar paket A, paket B dan paket C melalui pengembangan PKBM di wilayah wilayah.

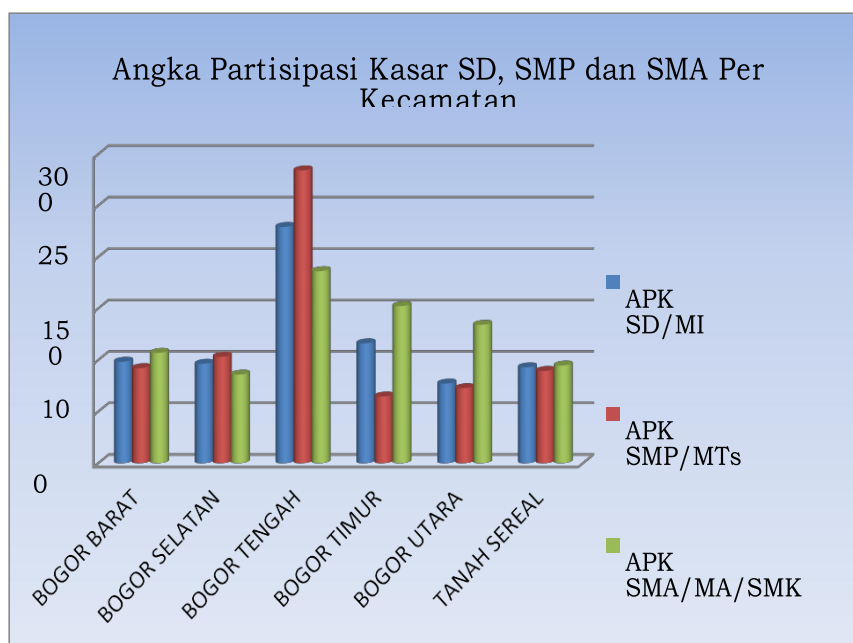
2.2.9 ANGKA PARTISIPASI KASAR

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bogor Tahun 2017 menurut Kecamatan :

Tabel 2.15**Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	APK SD/MI			APK SMP/MTs			APK SMA/MA/SMK		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	BOGOR BARAT	99.42	97.39	98.39	100.25	84.28	92.19	112.91	101.24	107.02
2	BOGOR SELATAN	102.20	90.74	96.41	104.71	101.83	103.26	94.82	77.28	85.96
3	BOGOR TENGAH	240.76	218.07	229.30	292.71	275.82	284.18	173.70	198.60	186.28
4	BOGOR TIMUR	123.03	109.56	116.23	64.87	64.63	64.74	145.97	158.57	152.33
5	BOGOR UTARA	80.03	74.38	77.18	70.34	75.22	72.80	145.00	123.62	134.20
6	TANAH SEREAL	97.37	88.66	92.97	93.15	86.00	89.54	86.81	102.56	94.77
TOTAL		88.63	81.67	105.53	107.11	100.87	103.95	118.34	114.97	116.64

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor (2017) ; Data diolah dari SIPD

Grafik 2.18**2.2.10 ANGKA PARTISIPASI MURNI**

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor pada tahun 2018 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 108.593% dari target 99,5 dan SMP/MTS mencapai 102.885% dari target 94,14 . Angka yang di capai sudah melampaui

target, Dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK sebesar 88 %. Hal ini menunjukkan perlu masih adanya penduduk yang belum mengikuti jenjang pendidikan sehingga masih perlu dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan.

Catatan : jenjang pendidikan menengah SMA/SMK tahun 2018 menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.16

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 Kota Bogor Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Kejar Paket A	99.44	103.98	98.30	95.44	108.05
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Kejar Paket B	97.89	99.41	74.30	74.75	94.14
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	73.75	103.99	78.6	61.21	88

Sumber : Bogor Dalam Angka 2018 dan Dinas Pendidikan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

2.2.11 ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) pada tahun 2018 di Kota Bogor sebesar 19.621 menggambarkan peluang bayi yang hidup usia di bawah satu tahun diantara 1.000 bayi yang lahir adalah sebanyak 19.621 bayi. Dari tahun 2015 ke tahun 2018 ada kenaikan positif sebanyak 160 poin.

Tabel 2.17

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Bogor

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kelahiran Hidup	19.729	19.729	19.081	20.502	19.669
2	Jumlah Kematian Bayi	55	65	53	74	59
3	Angka Kematian Bayi	2,7	3,2	2,7	3,6	2,99
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	997,3	996,8	997,3	996,4	997,01
Rumus	AKBH = (1000-AKB)					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

2.2.12 ANGKA KEMATIAN BAYI

Salah satu indikator utama derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR).

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Pada Tahun 2018, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran di Kota Bogor mencapai 2.9. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat yaitu 3.39. Upaya Pemerintah Kota Bogor terus berupaya untuk menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam rangka meningkatkan kualitas derajat kesehatan Masyarakat. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 dalam menekan AKB dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tabel 2.18

Angka Kematian Bayi Kota Bogor

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kelahiran Hidup	19.729	19.729	19.081	20.502	19.669
2	Jumlah Kematian Bayi	55	65	53	74	59
3	Angka Kematian Bayi	2,7	3,2	2,7	3,6	2,99
Rumus	$AKB = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1.000$					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 di bidang kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah menurunkan angka kematian bayi mencapai 24 kasus per 1000 kelahiran hidup pada akhir tahun 2019. Sementara dalam RPJMD Kota Bogor 2015- 2019, telah ditargetkan bahwa pada akhir tahun 2019, angka kematian bayi di Kota Bogor mencapai 3 kasus per 1000 kelahiran hidup. Target tersebut jauh melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2.2.13 ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP IBU

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, Ibu dan Anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan. Penilaian terhadap status kesehatan dan

pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu menjadi salah satu tolok ukur yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang sangat berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan dan pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian Ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

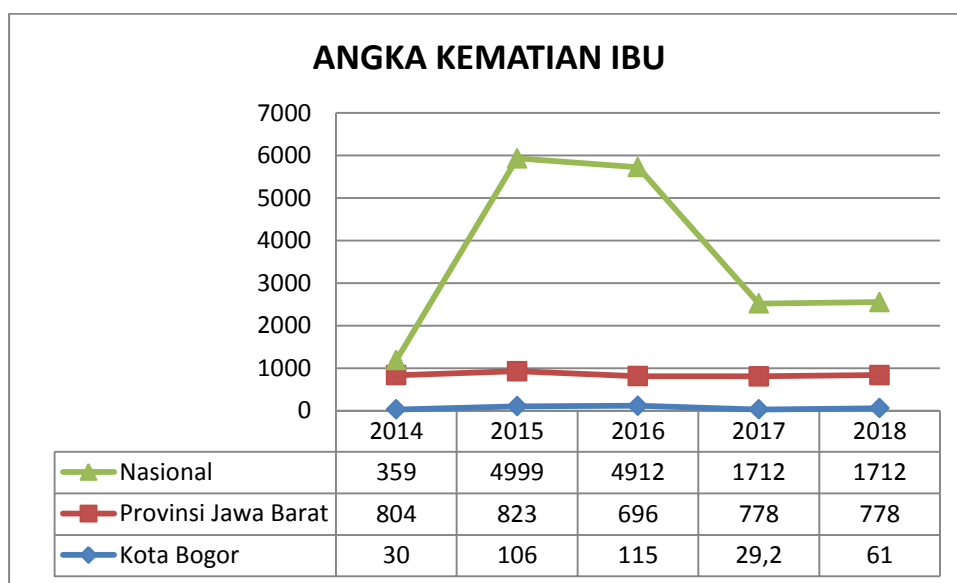
Berdasarkan survei demografi Kesehatan Indonesia, (SDKI), sampai dengan tahun 2012, Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi yaitu sebesar 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, untuk data di Kota Bogor pada Tahun 2018, Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 100 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan AKI di level nasional. Berikut ini adalah gambaran performa AKI di Indonesia berdasarkan hasil sensus demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012).

Tabel 2.19
Angka Kematian Ibu Kota Bogor

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kelahiran Hidup	19.729	19.729	19.081	20.502	19.669
2	Jumlah Kematian Ibu	6	21	22	6	12
3	Angka Kematian Ibu	30	106	115	29,2	61
Rumus	$AKI = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

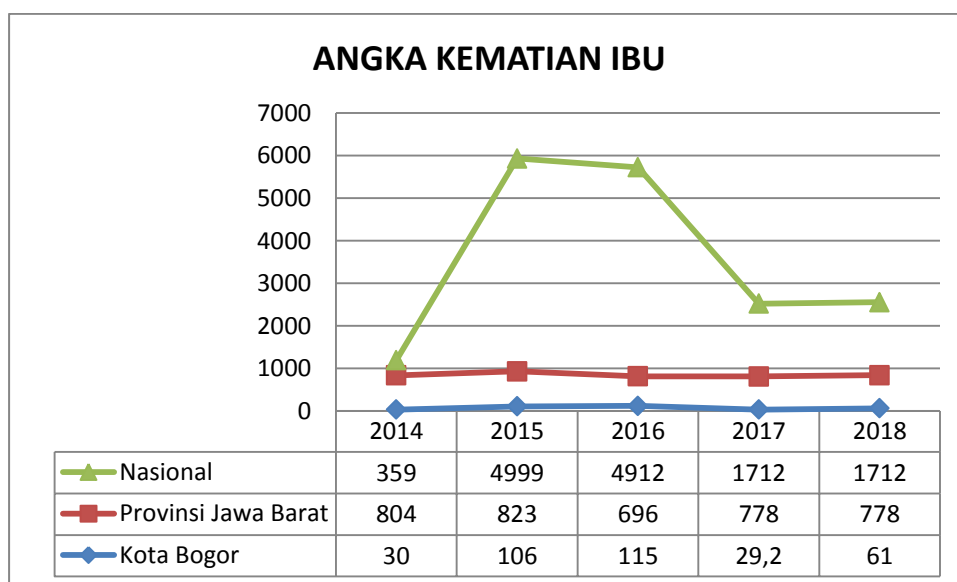
Grafik 2.19
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk



Sumber: Dinas Kesehatan, Januari 2019 dan Rancangan RPJMD Prop Jabar 2018-2023

Hasil Sensus Kependudukan tahun 2010 menunjukkan bahwa 90% kematian ibu terjadi saat atau segera setelah proses persalinan. Persentase tertinggi sejak satu dekade terakhir karena perdarahan. Walaupun aborsi hanya berkontribusi 1% terhadap kematian ibu, data sesungguhnya mungkin lebih tinggi, bisa mencapai 11% - 15%. Hal ini disebabkan banyaknya kasus aborsi tidak aman tercatat sebagai infeksi dan perdarahan akibat komplikasi persalinan.

Grafik 2.20
Perbandingan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional



Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

Tabel 2.20
Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan

Tahun	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah yang ditolong Nakes	%
2014	20.663	18.981	91,85
2015	20.354	18.883	92,80
2016	20.354	18.992	93,30
2017	20.354	19.139	94,00
2018	20.148	19.357	96,10

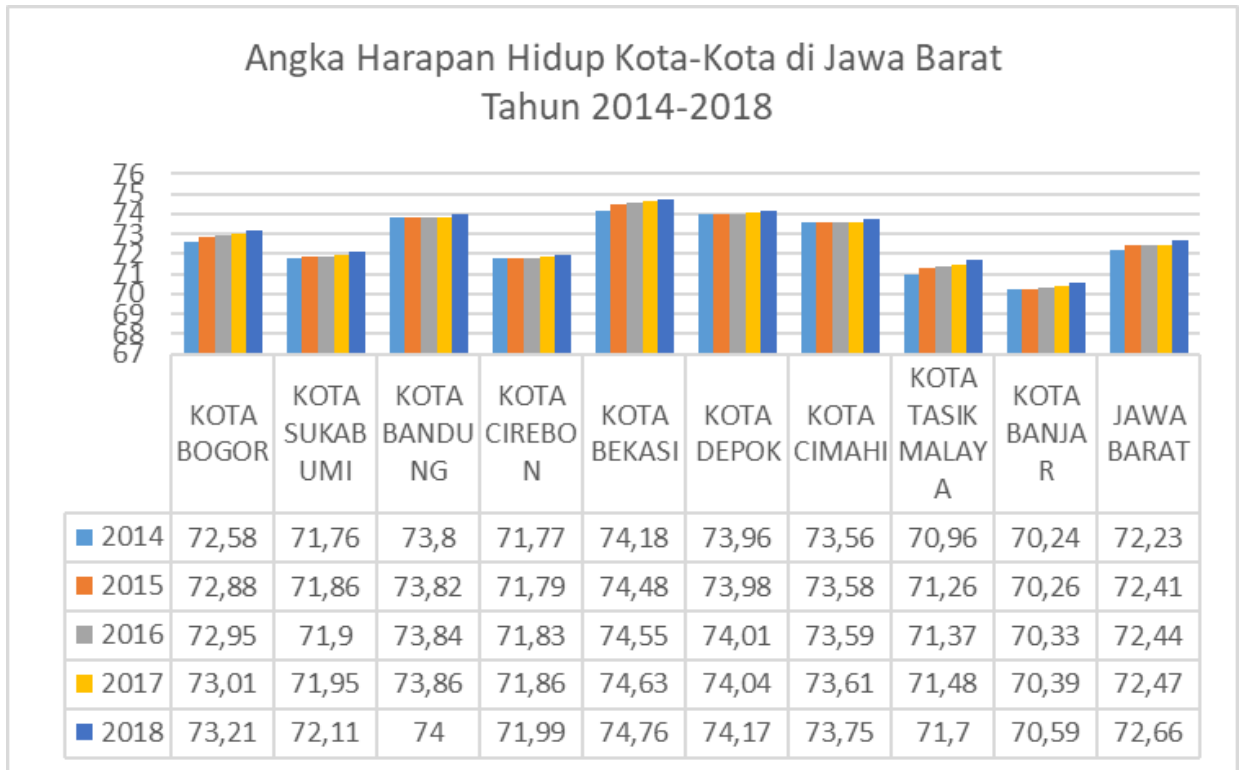
Data diolah dari SIPD

2.2.14 ANGKA USIA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan.

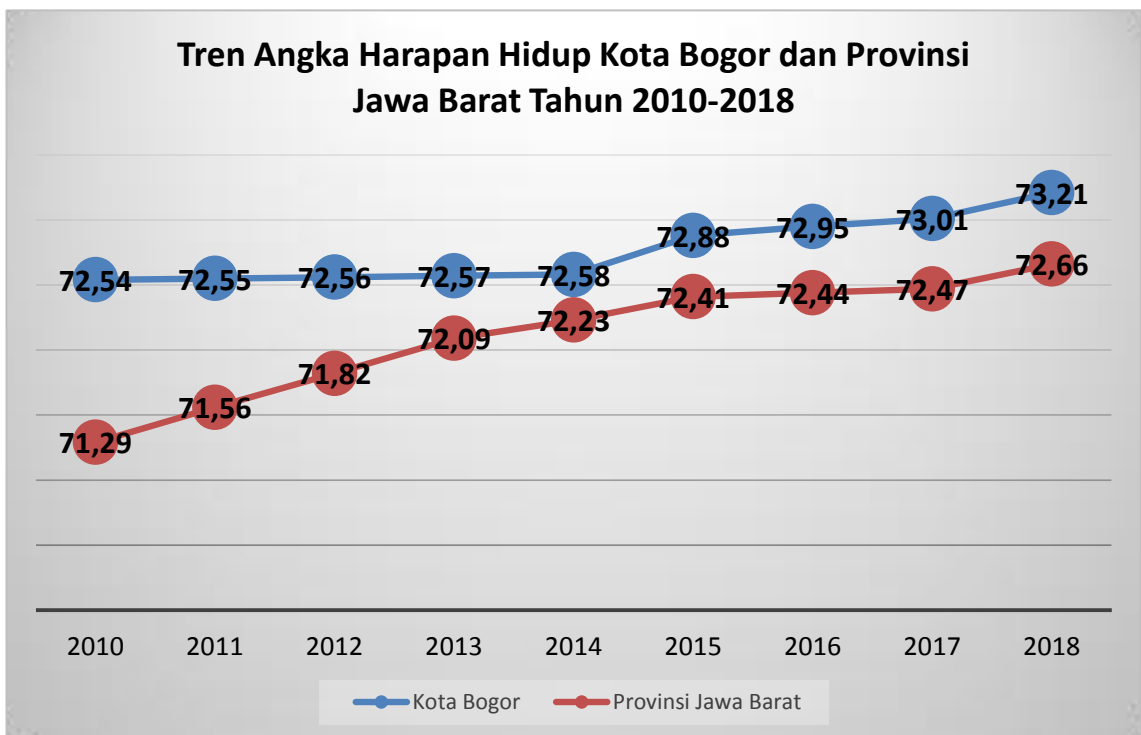
Peningkatan AHH di Kota Bogor cukup baik walaupun peningkatan dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan, untuk itu beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih diperhatikan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang akan datang.

Grafik 2.21



Sumber: BPS Jawa Barat 2018

Grafik 2.22



Sumber: BPS Jawa Barat 2018

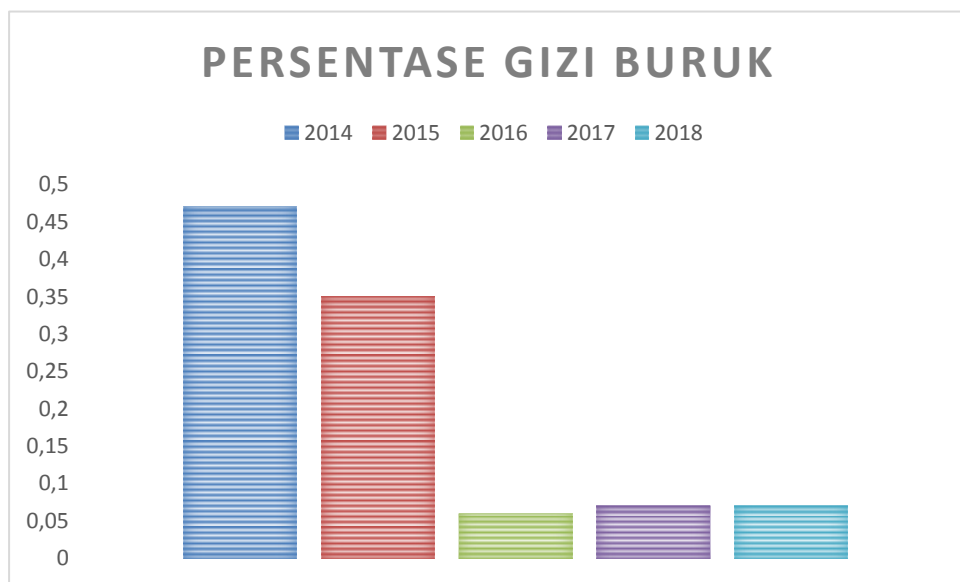
Mulai tahun 2015 - 2018 angka harapan hidup di Kota Bogor mengalami peningkatan walau agak lambat. Seiring dengan tren angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor masih berada di atas Provinsi Jawa Barat sebesar 0,55.

2.2.15 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK

Persentase jumlah balita yang menderita gizi buruk di Kota Bogor pada tahun 2018 adalah sebesar 0,47 persen, besarnya persentase ini menunjukkan adanya penurunan balita gizi buruk dari tahun 2014 yang mencapai 0,4 . Penurunan persentase balita gizi buruk di Kota Bogor mengindikasikan adanya peningkatan kesehatan balita itu sendiri dan kesadaran ibu-ibu untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anaknya.

Adapun perkembangan kondisi balita gizi buruk di dalam kurun waktu tahun 2014-2018 disajikan dalam Grafik 2.24.

Grafik 2.23



2.2. 16 RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15 - 64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi ke- mampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk

melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor pada tahun 2014 - 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.21
Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Bogor Tahun 2014-2018

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	59.96	57.74	57.74	61.13	62.27
2.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9.48	11.03	10.03	9.57	9.28
3	Rasio penduduk yang bekerja	40.27	51.34	51.34	55.28	57.1
4	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	90.51	88.97	89.9	90.43	90.35

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Bogor tidak mengalami kenaikan pada tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu 57.74 persen tetapi mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 menjadi 61.13 persen. Dan pada akhir 2018 mengalami kenaikan lagi sebanyak 1.14 menjadi 62.27 persen.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor relatif fluktuatif sepanjang tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka 11.03 persen kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 10.03 persen. Kenaikan positif terjadi pada tahun 2017 sebanyak 3.53 persen menjadi 6.5 persen. Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 yaitu menjadi 9,28.

2.2. 17 KELUARGA PRA SEJAHTERA

Keberhasilan program Keluarga Berencana tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama menyukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan

kepada 5 (lima) tahapan keluarga yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II, Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III plus. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I dan II di Kota Bogor disajikan pada table berikut

Tabel 2.22
Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan
di Kota Bogor

TAHUN	PRASEJAHTERA	SEJAHTERA I	SEJAHTERA II	JUMLAH
2014	9072	46118	98494	153684
2015	9440	46834	98774	155048
2016	9377	47009	99278	155664
2017	15657	24556	171872	212085
2018	13767	24582	188442	226791

Data diolah dari SIPD

2.2.18 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Bogor disajikan pada table di bawah.

Tabel 2.23
Indeks Kepuasan Masyarakat 2014-2018

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2014	2015	2016	2017	2018
	NA	3,1	3,2	3,21	3,39

Data diolah dari SIPD

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada Tahun 2015 hingga 2018 terus mengalami peningkatan, terakhir mencapai 3,39 pada tahun 2018. Ini

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin meningkat.

2.2.19 OPINI BPK ATAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Kota Bogor setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kota Bogor pada kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
OPINI BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Data diolah dari SIPD

Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kota Bogor pada kurun waktu 2014-2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan meningkat pada 2017-2018 dengan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2.20 PERCEPATAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Tabel 2.25

Skor PPH Kemandirian Pangan Kota Bogor 2014-2018

Skor PPH Konsumsi	2014	2015	2016	2017	2018
	NA	82,3	78,3	82,7	88,7

Data diolah dari SIPD

Data menunjukkan, skor PPH Kota Bogor tahun 2015 sebesar 82,3, menurun menjadi 78,3 pada 2016. Namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat sehingga mencapai 88,7 di tahun 2018. Skor

PPH ini menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan di Kota Bogor.

2.2.21 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB

Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bidang pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi Sektor Pertanian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 2.26

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bogor

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	0,89	0,85	0,81	0.69

Data diolah dari SIPD

Pada kurun waktu 2014-2018 kontribusi pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor pertanian yang mencapai 0.93 pada tahun 2014 terus menurun hingga hanya mencapai 0,69 pada tahun 2018.

2.2.22 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Adapun kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan-kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor perdagangan adalah perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Tabel 2.27

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Bogor

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,52	22,33	22,12	22,01	20.60

Data diolah dari SIPD

Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2014 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 22,52 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018, sektor perdagangan memberi kontribusi sebesar 20.60 persen.

2.2.23 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Akan tetapi kontribusi sektor industri juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai 19,15, kemudian terus menurun hingga mencapai 18,55 di tahun 2018.

Tabel 2.28

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Bogor

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Industri Pengolahan	19,15	19.15	18,92	18,68	18.55

Data diolah dari SIPD

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 LAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1 PENDIDIKAN

A. Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase

jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Angka partisipasi sekolah Kota Bogor berdasarkan statistik kesejahteraan rakyat Kota Bogor, APS formal dan non formal penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2015 sebesar 99,09 (laki laki) dan 98,66 (perempuan) meningkat pada tahun 2018 menjadi 99,53 (laki laki) dan 100 (perempuan). APS formal dan non formal penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun 2015 sebesar 95,91 (laki laki) dan 91,03 (Perempuan) menurun pada tahun 2018 untuk laki laki menjadi 90,67, tetapi meningkat pada perempuan menjadi 98,41 di tahun 2018. Untuk kelompok umur 16 – 18 tahun pada tahun 2015 sebesar 71,11 (laki laki) dan 74,45 (Perempuan) kembali menurun pada tahun 2018 untuk laki laki yang hanya 59,01 dan 71,36 untuk perempuan.

B. Rasio ketersediaan Sekolah (Penduduk Usia SD dan Menengah)

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah . Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

C. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang tertentu. Rasio guru

murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Rasio ini juga dapat mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru. Sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, bahwa setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kota Bogor masih dapat dikatakan ideal sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:

Tabel 2.29
Rasio Murid dan Guru

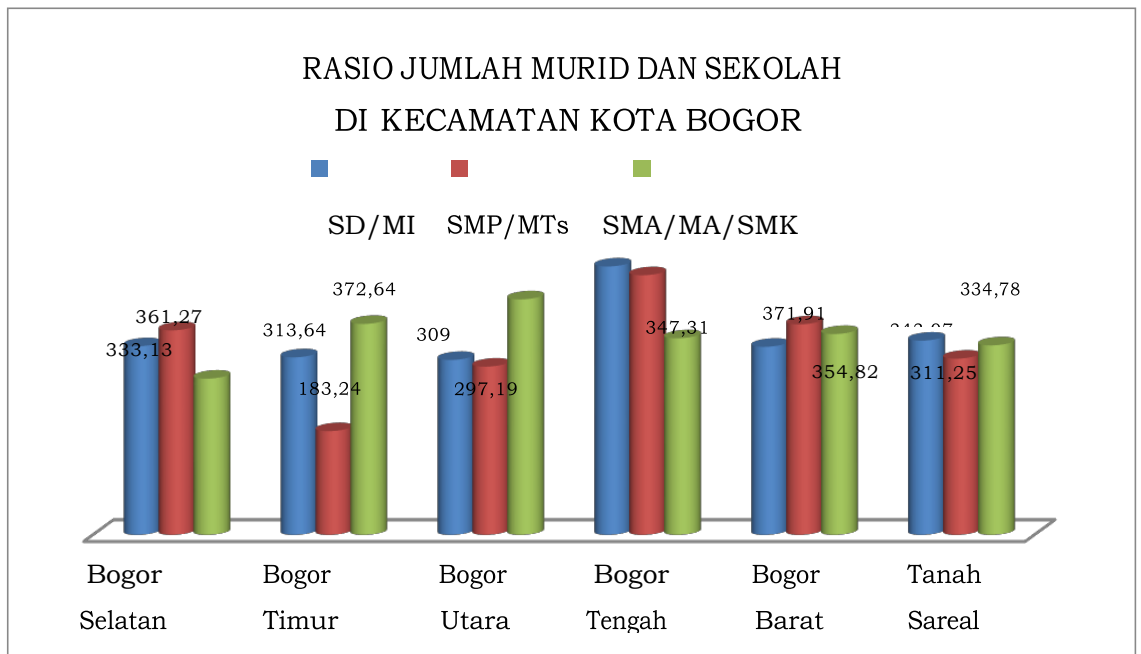
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio murid – guru SD	22	23	22	22	24
Rasio murid – guru SMP	17	21	17	20	16
Rasio murid – guru SMA	12	26	17	15	16
Rasio murid – guru SMK	15	55	26	22	21

Data diolah dari SIPD

D. Rasio Jumlah Murid dan Sekolah

Rasio jumlah murid dan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Data ini menggambarkan daya tampung sekolah. Kondisi daya tampung sekolah di Kota Bogor pada setiap Kecamatan pada tahun 2017 dapat tergambar dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.24



Sumber data : Kota Bogor Dalam Angka 2018

Dari grafik di atas tergambar rasio jumlah murid dan sekolah tertinggi di Kota Bogor untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs terdapat di Kecamatan Bogor Tengah. Jenjang pendidikan SD/MI, 474,1; yang artinya satu sekolah SD/MI menampung 474 siswa. Jenjang pendidikan SMP/MTs dengan rasio sebesar 458,61 angka ini berarti satu sekolah SMP/MTs menampung 458 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA rasio jumlah murid dan sekolah terbesar di Kecamatan Bogor Utara dengan rasio sebesar 416 yang artinya satu sekolah SMA/MA menampung 416 siswa.

E. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-1V

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2018, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat sudah mencapai 87.87. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kota Bogor, akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kota Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2015 - 2018.

Tabel 2.30**Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	NA	85	88,5	85	87,87

Sumber data : Kota Bogor Dalam Angka 2018 ; Data diolah dari SIPD

2.3.1.2 KESEHATAN**A. Rasio Posyandu**

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah 75 – 100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka di lakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu.

Tabel 2.31**Rasio Posyandu di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Posyandu	961	965	978	970	974
2	Jumlah Balita	91.850	95.427	95.427	95.427	94.902
3	Rasio Posyandu per satuan balita	10,40	10,11	10,24	10,16	10,26

Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD

Rasio Posyandu di Kota Bogor mencapai 1 ; 90 dengan range 95 – 98. Artinya rasio posyandu di Kota Bogor termasuk rasio ideal.

B. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas dan puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah

ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.32

Rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Puskesmas	24	24	24	25	25
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	29	29	32	31	31
3	Jumlah penduduk	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009	1.096.828
4	Rasio Puskemas	0,69	0,68	0,67	0,69	0,68

Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD

Dari data di atas , rasio puskesmas per satuan penduduk Kota Bogor dari tahun 2014 - 2017 adalah 19.424,37 artinya setiap puskesmas dan pustu melayani sebanyak 19.424 jiwa. Dengan demikian rasio puskesmas/pustu di Kota Bogor sudah memenuhi standar karena standarnya 1 pustumas/pustu 30.000 jiwa.

C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah jumlah Rumah Sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas Rumah Sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Tabel 2.33

Rasio Rumah Sakit di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Rumah sakit	19	17	18	19	20
2	Jumlah penduduk	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009	1.096.828
3	Rasio Rumah sakit	0,018	0,016	0,016	0,017	0,018

Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD

Rasio rumah sakit di Kota Bogor dari tahun 2014 – 2017 rata rata melayani 57.932 jiwa.

D. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Idealnya adalah satu berbanding 2.500 artinya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, ini sesuai dengan standar sistem pelayanan terpadu.

Tabel 2.34

Rasio Dokter Persatuan Penduduk

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	JUMLAH PENDUDUK	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009	1.096.828
JUMLAH DOKTER PRAKTEK						
2	DOKTER UMUM	602	821	272	199	373
3	DOKTER SPESIALIS	554	696	560	570	682
4	DOKTER GIGI	290	344	166	63	125
RASIO						
5	DOKTER UMUM	0,58	0,78	0,25	0,18	0,34
6	DOKTER SPESIALIS	0,53	0,66	0,52	0,52	0,63
7	DOKTER GIGI	0,28	0,32	0,15	0,05	0,11

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2018 ; Data diolah dari SIPD

Pada tabel di atas, Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 rasio dokter umum per satuan penduduk mencapai 3.914 artinya satu dokter melayani 3.914 jiwa. Berlanjut sampai tahun 2017 rasio dokter per satuan penduduk menjadi 5.432. Sedangkan rasio dokter spesialis per satuan penduduk juga sudah memenuhi standar karena pada tahun 2017 rasio nya mencapai 1.896 yang artinya satu dokter spesialis melayani 1.896 jiwa. Rasio dokter gigi per satuan penduduk adalah 17.158 artinya satu dokter gigi melayani 1 jiwa. Kondisi di atas menunjukkan bahwa rasio dokter per satuan penduduk di katakan sudah ideal.

E. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.35**Rasio Tenaga Medis di Kota Bogor Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Tenaga medis	19.007	18.981	18.883	18.992	18.992	2.688
2	Jumlah penduduk	1.030.720	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009	1.096.828
3	Rasio Tenaga medis	18,44	18,41	18,01	17,83	17,56	2,45

Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD

2.3.1.3 PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG**A. Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum**

Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kota Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu juga yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi. Secara umum kinerja pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.36**Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	Pekerjaan Umum				
1.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	87.6	88.15	88.32	88.59
2.	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	61.32	61.71	61.83	66.44
3.	Persentasi rumah tinggal bersanitasi yang aman	66.8	66.8	72.1	67.21
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	2.78	5.48	7.22	11.01
5.	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	23	89	37	74.19
6.	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik (%)	11.46	22.92	34.38	45.83

Sumber: Dinas pekerjaan Umum dan Penataan ruang ; Data diolah dari SIPD

B. Rasio Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya di Kota Bogor tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.37

Rasio Jaringan Irigasi di Kota Tahun 2015-2018

No	Irigasi	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Jaringan Irigasi	0,0644	0,1289	0,1933	0,2578

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Data diolah dari SIPD

Proporsi panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya di Kota Bogor mengalami kenaikan setiap tahunnya .

C. Ketersediaan Air Minum

Ketersediaan air, terutama air minum, menjadi salah satu penentu kualitas hidup suatu masyarakat. Berdasarkan data capaian program peningkatan sanitasi dasar Kota Bogor tahun 2018 bahwa prosentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman di Kota Bogor pada tahun 2018 mencapai 91,98%. Capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Bogor dari tahun 2015-2018 dapat dijelaskan pada tabel 2.35.

Tabel 2.38**Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Presentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang aman	82	86,92	90,55	91,98
2	Presentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum PDAM	82	85,85	88,73	91,44
3	Presentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum NON PDAM	-	1,07	1,82	0,54

Sumber ; LKPJ AMJ Walikota tahun 2018 ; Data diolah dari SIPD

D. Ketersediaan Pengolahan Air Limbah yang Aman

Ketersediaan sistem jaringan pengolahan air limbah yang aman di Kota Bogor dari tahun 2015-2018 dapat dijelaskan pada Tabel 2.36.

Tabel 2.39**Ketersediaan Pengolahan Air Limbah yang Aman**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Presentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	66,80	66,80	72,10	67,21

E. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Tabel 2.40
Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk
Tahun 2015-2018

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	
1.	Rasio pemakaman umum per satuan penduduk	116.87	114.95	113.14	111.44	109.83

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Rasio pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2015 di Kota Bogor sebesar 11,59 artinya jumlah daya tampung tempat pemakaman umum sebesar 11.59 per 1000 penduduk. Sebesar 11.71 per 1000 penduduk daya tampung tempat pemakaman umum untuk tahun 2018. Maksudnya pada tahun 2018 Kota Bogor hanya mampu menampung 11 sampai 12 orang dari 1000 penduduk.

F. Rasio Tempat Beribadah Per Satuan Penduduk

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Tabel 2.41
Rasio Tempat ibadah di Kota Bogor Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tempat ibadah	1957	1947	1947	1948	1948
2	Jumlah penduduk	1.030.720	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009
3	Rasio Tempat ibadah	526,68	526,68	526,68	526,68	526,68

Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD

G. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik

Dalam rangka mendukung sasaran strategis meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, dan

meningkatnya kuantitas dan kualitas taman kota dan taman lingkungan. Capaian Tahun 2016 adalah terpeliharanya hutan Kota di Kelurahan Pamoyanan dengan penanaman pohon sebanyak 700 pohon, dan tercapainya target RTH terbangun adalah sebesar 418.661 m² atau sebesar 98.90% dari target capaian tahunan sebesar 423.328 m².

Sampai dengan tahun 2018 telah tersedia Ruang terbuka Hijau Publik seluas 1.160.083,07 m² yang meliputi taman dan taman sudut, jalur hijau, median jalan, hutan kota, pulau jalan, bantaran sungai, lapangan, kebun pembibitan dan area pemakaman dan di tahun 2018 terdapat penambahan total luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau lainnya yang baru sebesar 7.302,39 m² serta taman jalur, jalur hijau, dan furniture hijau lainnya yang tertata menjadi 418.651,41 m².

H. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Tabel 2.42

**Perkembangan pengendalian Bangunan ber-IMB di Kota Bogor
Tahun 2014-2018**

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kesesuaian Bangunan dengan IMB yang telah terbangun	97.28%	96.94%	98,47%	98.90%	99.74%
2	Pencegahan Bangunan tidak Ber-IMB	NA	77.86%	88.83%	88.83%	82.32%

Sumber: LKPJ Walikota Bogor Tahun 2015,2016,2017,2018 ; Data diolah dari SIPD

Kesesuaian bangunan dengan IMB yang di telah dibangun pada tahun 2014 mencapai 97,28% kemudian ada penurunan menjadi 90% pada tahun 2015 sudah ber IMB terus mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 99.37 % bangunan dan naik kembali pada tahun 2017 sebesar 98.90% dan naik lagi pada tahun 2018 menjadi 99.74 %.

I. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

Tabel 2.43

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Bogor Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90	90	99.77	98.9	99.74

Sumber: Bappeda Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi :

- penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;
- penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah.

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin taat suatu daerah pada RTRW, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi.

2.3.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2015- 2018. Ditahun 2015 mencapai 79.16, meningkat menjadi 79.27 di tahun 2016, 79.29 di tahun 2017 dan menjadi 82.78 di tahun 2018. Artinya di tahun 2018 penduduk Kota Bogor masih ada 17.28 rumah tidak layak huni. Lebih lengkap kondisi rumah layak huni di Kota Bogor seperti dalam Tabel 2.40.

Tabel 2.44

Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio rumah layak huni (Rumah Layak Huni Per Satuan Penduduk)	20.84	20.73	20.71	17.28
2	Rasio pemukiman layak huni	91.8	92.92	94.03	95.14
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	74.3	78.11	78.4	70.59

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman ; Data diolah dari SIPD

Dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018, rasio pemukiman layak huni terus meningkat. Yang pada tahun 2015 mencapai 91.8 menjadi 95.14 di tahun 2018. Sedangkan untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layak huni yang terjangkau sangat fluktuatif menjadi 70.59 dan 76.61 pada tahun 2017 dan 2018.

B. Penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh

Tabel 2.45

Data Penanganan Pada Kawasan Permukiman Kumuh
(Luas Kawasan < 10 Ha)

Kegiatan	Uraian	2015	2016	2017	2018	Total
Penanganan Pada Kawasan Permukiman Kumuh (Luas Kawasan < 10 Ha)	Perbaikan Jalan Lingkungan Pada Lokasi Kawasan Kumuh	1.572,17	3.858,33	1.334,00	3.804,35	10.568,85
	Perbaikan Saluran/Drainase pada Lokasi Kawasan Kumuh	820,00	2.827,40	1.582,00	4.715,00	9.944,40

Data diolah dari SIPD

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan anggaran dari KOTAKU APBN yaitu, penataan kawasan kumuh di 5 kelurahan (Kelurahan Paledang, Cibogor, Babakan Pasar, Ciwaringin dan Cimahpar) meliputi pekerjaan fisik, yaitu perbaikan jalan setapak, drainase, septic tank komunal, dan gerobak sampah. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu, 14 Kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mulyaharja, Kertamaya, Bojong Kerta, Batu Tulis, Babakan Pasar, Paledang, Cibuluh Suka Sari, Sempur, Ciwaringin, Cimahpar, Menteng, Cibogor, Gunung Batu.

2.3.1.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL

A. Penyelesaian Penegakan Perda dan sidang tipiring

Kegiatan Penegakan Perda dan Sidang Tipiring Tahun 2014 s.d 2017 telah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penertiban Perizinan (Sweeping) sebanyak 368 kali kepada 1.322 perusahaan;
- 2) Sidang Tipiring PKL sebanyak 16 kali kepada 540 PKL;

- 3) Sidang Tipiring KTR sebanyak 17 kali kepada 330 perokok;
- 4) Monitoring Tempat Hiburan Malam, Cafe dan rumah Bilyard sebanyak 54 kali.
- 5) Penyelidikan Pelanggar Perda sebanyak 69 kali;
- 6) Penyidikan Pelanggar Perda sebanyak 6 kali;
- 7) Razia mercon/petasan, majalah/ dan VCD/DVD porno, dan minuman keras sebanyak 141 kali;
- 8) Razia Wanita Tuna Susila (WTS) sebanyak 35 kali.

B. Penanganan Bencana

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) Penanggulangan Kebakaran. Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Pemadam Kebakaran saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kota Bogor tahun 2015- 2017 sudah mencapai angka 95% dengan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) penanggulangan kebakaran rata-rata 18,6 menit (standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 adalah 15 menit).

2.3.1.6 SOSIAL

A. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara umum capaian tahun 2014-2018 pada penanganan urusan sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah operator, pendamping dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) / KSM Program Keluarga Harapan yang dibina tahun 2018 sebanyak 17.017 RTSM/KPM tahun 2017 yaitu 14.825

KPM tahun 2016 sebesar 9.823 KPM. Tahun 2015 jumlah RTSM yang dibina sebanyak 8.801 RTSM. Tahun 2018 telah diberikan juga Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada 32.435 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 110.000/bulan.

- 2) Sampai dengan tahun 2018 jumlah E-Warong KUBE jasa untuk melayani KPM Penerima Bansos BPNT adalah 58 unit yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Bogor.
- 3) Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang ditindaklanjuti Tahun 2017 sebanyak 62 orang. Menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 150 orang. Dan tahun 2018 jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang memperoleh pembinaan sebanyak 20 orang.
- 4) Jumlah Panti Asuhan yang dibina Tahun 2015-2017 sebanyak 74 atau 100% dari target. Tahun 2018 panti asuhan yang dibina sebanyak 78 yayasan
- 5) Tahun 2018 terjadi penurunan jumlah PMKS yang ditangani dibanding tahun 2017 yaitu Anak jalanan 14 orang, Gepeng 42 orang dan WTS 19 orang. Jumlah PMKS yang ditangani tahun 2017 adalah Anak jalanan 140 orang, Gepeng 257 orang dan WTS 70 orang, tahun 2016 jumlah PMKS yang dibina sebanyak 334 orang yang terdiri dari 133 anjal, 151 Gepeng dan 50 WTS. Tahun 2015 PMKS yang di bina sebanyak 402 orang yang terdiri dari 140 anjal, 216 gepeng dan 46 WTS.
- 6) Jumlah korban narkoba dan HIV/AIDS/WTS yang dibina tahun 2018 sebanyak 26 orang, tahun 2017 sebanyak 110 orang, Tahun 2016 sebanyak 40 orang, tahun 2015 sebanyak 40 orang dan tahun 2014 sebanyak 74 orang, sehingga total korban narkoba dan HIV/AIDS/WTS yang dibina tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 290 orang melalui pembinaan social, pembinaan dan keterampilan.
- 7) Jumlah anak terlantar yang dibina tahun 2018 sebanyak 38 anak 2017 mencapai 41,47% yaitu tertanganinya 146 anak jalanan dan bayi terlantar dari 352 seluruh anjal di Kota Bogor. Tahun 2016 anak terlantar yang di bina sebanyak 100 orang, tahun 2015 sebanyak 25 orang dan tahun 2014 sebanyak 31 anak sehingga total anak terlantar yang dibina tahun 2015-2018 adalah sebanyak 340 anak melalui pemberian latihan

keterampilan Jumlah penanganan korban tindak trafficking tahun 2017 sebanyak 4 kasus, tahun 2015 sebanyak 37 orang yang mengalami kasus trafficking, penanganan dilakukan melalui konseling, case conference dan pemberian rujukan bagi korban ke lembaga social. Ditahun 2018 Penanganan kasus trafficking sebanyak 2 (dua) kasus melalui konseling, case conference dan pemberian rujukan bagi korban ke lembaga sosial yang menangani serta Penanganan korban tindak kekerasan (seksual) tahun 2018 sebanyak 15 kasus.

- 8) Tahun 2017 Memberikan bantuan terhadap 33 orang penyandang cacat usia produktif yaitu berupa uang sebesar 5.000.000/orang, kursi roda, tongkat tuna netra, tongkat Disabilitas, dan tongkat patah tulang. Sedangkan pada tahun 2018 melalui kementerian Sosial RI telah diberikan bantuan uang sebesar Rp. 2.800.000 kepada 25 Penyandang Disabilitas, selain itu diperoleh juga bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebanyak 25 buah, dari yayasan jepang Provinsi DKI Jakarta 25 buah, dari yayasan HDI sebanyak 12 buah dari CSR Mandiri sebanyak 5 buah, bantuan tongkat, walker, dan alat bantu dengar.

Pada tahun 2018 telah diberikan bantuan uang dari kementerian Sosial RI kepada 25 orang penyandang cacat fisik sebesar Rp. 2.800.000,- Bantuan Kursi Roda sebanyak 25 buah dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan 25 buah dari Yayasan Jepang Provinsi DKI Jakarta, 12 buah dari Yayasan HDI, 5 buah dari CSR Mandiri. Tongkat Disabilitas 1 buah, alat bantu disabilitas (walker) dari CSR 3 buah, alat bantu dengar dari CSR sebanyak 21 set serta pelunasan tunggakan biaya sekolah SMK Kamandaka dari CSR.

2.3.1.7 TENAGA KERJA

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari hari yang merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat

partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Bogor pada tahun 2015 mencapai 57,74% dari 780.951 jiwa jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2015. Angka ini menurun dari tingkat partisipasi tahun 2014 yang mencapai 59,95% dari 764.972 jiwa jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2014, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 mencapai 61,13% atau 495.825 jiwa dari jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2017 sebanyak 811.118 jiwa jumlah penduduk usia kerja. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2015.

Jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2018 mencapai 60 orang atau 11,60% dari target 517 tenaga kerja. Jumlah Penyerapan tenaga kerja tahun 2017 mencapai 2.781 atau mencapai 73% dari 3768 Pencari kerja, meningkat dibanding tahun 2016 mencapai 30,92% atau sebanyak 955 orang dari 3.088 pencari kerja dan tahun 2015 mencapai 32,23% atau sebanyak 2.033 orang dari 6.306 pencari kerja yang berhasil ditempatkan.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil survey dan publikasi BPS dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, TPT Kota Bogor terbilang sangat tinggi dan melebihi TPT nasional dan TPT Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2017, TPT nasional adalah sebesar 5,5 sementara TPT provinsi Jawa Barat sebesar 8,22 persen sedangkan TPT Kota Bogor sebesar 9,57 yang berarti dari 100 angkatan kerja di Kota Bogor masih terdapat sekitar 9 hingga 10 orang pengangguran. Walaupun demikian, TPT Kota Bogor sudah dapat ditekan dari angka tahun sebelumnya pada tahun 2015 yaitu berkisar 11,08 menjadi 9,57.

C. Rasio Pencari Kerja

Rasio pencari kerja tahun 2018 mencapai 80,71%, yaitu sebanyak 4558 pencari kerja terhadap 3679 lowongan yang tersedia. Rasio Pencari kerja tahun 2017 mencapai 63,23% yaitu sebanyak 3768 orang pencari kerja terhadap 5959 lowongan kerja yang tersedia. tahun 2015 Rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja mencapai 92,95% yaitu sebanyak 6.306 pencari kerja dengan

lowongan yang tersedia sebanyak 5.862. tahun 2014 mencapai sebesar 68,1% atau lebih besar dari target tahun 2014 sebesar 35%.

2.3.1.8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46

Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah Dan DPRD Kota Bogor Tahun 2015-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Prosentase Perempuan di lembaga pemerintahan	38.45	36.06	32.39	31.69	31.42
2	Prosentase Perempuan di DPRD	17.78	15.56	15.56	15.56	18.18

Sumber: BPS dan Data diolah dalam SIPD

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Capaian pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan pada tahun 2016 sebanyak 52 Kasus yang dilaporkan baik terhadap Perempuan maupun Anak, dan yang terselesaikan sebanyak 42 kasus dan 13 kasus lainnya sedang dalam tahap proses penyelesaian baik di Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun Pengadilan. Tahun 2017 P2TP2A telah menangani 117 kasus dengan 66 kasus terhadap perempuan dan 51 kasus kekerasan terhadap anak.

Selama tahun 2018, P2TP2A telah menangani sebanyak 109 kasus dengan terdiri dari Kasus Kekerasan terhadap Anak (KTA) sebanyak 56 kasus dan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) sebanyak 53 kasus dan semua kasus yang dapat ditangani dengan baik

Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan yang masuk ke P2TP2A Kota Bogor sebanyak 109 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 56 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 53 kasus dan seluruhnya selesai ditangani dengan baik

C. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Pada tahun 2017 Kota Bogor meraih penghargaan Anugerah Kota Layak Anak untuk kategori Pratama Tingkat Nasional, pada tahun 2018 penghargaan Kota Tingkat Madya, dan pada tahun 2019 peringkat tidak berubah, tetap pada posisi Madya. Prestasi lainnya yang diperoleh yang terkait dengan program pengembangan kota layak anak diantaranya adalah meraih penghargaan inisiasi pelayanan ramah anak di puskesmas dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan meraih penghargaan posyandu award dari gubernur Provinsi Jawa Barat.

D. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah jumlah angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan dikalikan 100 persen

Tabel 2.47

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bogor Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	14.03	13.43	11.77	NA	12,91
---	-------	-------	-------	----	-------

Sumber : BPS dan data diolah dari SIPD

2.3.1.9 PANGAN

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bogor. Ketersediaan pangan utama Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48

Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pangan utama	165.72	188.69	230,61	230,90
2	Ketersediaan energi per kapita	2318	2394.6	2482.7	2512.8
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	94.62	86.37	87.1	91.53

Sumber; BPS dan Data diolah dalam SIPD

2.3.1.10 PERTANAHAN

A. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak- hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 2.49
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Bogor
Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	0.76	0.77	0.80	0.92

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, diolah dalam SIPD

Luas lahan bersertifikat di Kota Bogor terhadap jumlah luas wilayah mengalami terus peningkatan yang pada tahun 2015 sebesar 0,76% menjadi 0.92 pada tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 0.16 % dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018.

B. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Perkembangan penyelesaian kasus tanah Negara di Kota Bogor mengalami peningkatan terhadap kasus yang terdaftar, lengkap terlihat dalam tabel berikut ;

Tabel 2.50
Penyelesaian Kasus Tanah Di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyelesaian kasus tanah negara	NA	13	16	24	24

Sumber; BPKAD Kota Bogor ; diolah dalam SIPD

C. Penyelesaian Izin Lokasi

Kondisi daerah Kota Bogor terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari penyelesaian permohonan izin lokasi. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui kemudahan investasi sebagai daya tarik investasi dalam mengundang investor. Semakin banyak penyelesaian permohonan izin lokasi menggambarkan semakin mudah dan menarik berinvestasi di suatu daerah. Berikut disajikan data persentase penyelesaian izin lokasi/permohonan di Kota Bogor selama kurun waktu tahun 2015-2017.

Tabel 2.51

Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Bogor Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Penyelesaian izin lokasi	7	8	3	3

Sumber: BPMPTSP dan di olah dari SIPD

Penyelesaian izin lokasi di Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 sebanyak 7 ijin lokasi dan di tahun 2018 sebanyak 3 lokasi.

2.3.1.11 LINGKUNGAN HIDUP

A. HASIL PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR

Perhitungan indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan yang terus dilakukan tidak saja oleh Pemerintah Kota Bogor namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara di Kota Bogor kepada masyarakat. Perkembangan Indeks kualitas air dan udara di Kota Bogor seperti terlihat dalam Tabel 2.64.

Tabel 2.52
Perkembangan Indeks Kualitas Air dan Udara Di Kota Bogor
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Indeks kualitas air	50	27.33	34.44	49.67
2	Indeks Kualitas Udara	70.56	78.56	85.3	85.86

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ; diolah dalam SIPD

B. PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Adapun persentase penanganan sampah di Kota Bogor tertera pada Tabel 2.49.

Tabel 2.53
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor
Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	72.2	74	74.38	75.85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor ; diolah dalam SIPD

Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2015 persentase jumlah sampah

yang ditangani 72.2 persen, pada tahun 2018 nilainya meningkat menjadi 75.85 persen.

2.3.1.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK dan Akte Kelahiran. Selama kurun waktu dari tahun 2015 – 2018 rata-rata rasio penduduk ber-KTP dan rasio bayi berakte kelahiran mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan selama kurun waktu tahun 2015-2018.

Tabel 2.54

Rasio Penduduk ber-KTP dan Akte Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio penduduk ber -KTP per satuan penduduk	94,53	91	95	93,08	94,30
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	91,90	25	93,01	93,84	94,70

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; diolah dalam SIPD

Pada tahun 2015 terjadi penurunan rasio penduduk berKTP per satuan penduduk dikarenakan adanya verifikasi ulang NIK se-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri. Verifikasi sebagaimana dimaksud berkaitan dengan adanya NIK ganda dan NIK penduduk yang sudah meninggal dunia. Data rasio penduduk berKTP per satuan penduduk tahun 2015 sampai dengan 2018 didasarkan pada data konsolidasi bersih Kementerian Dalam negeri yang merupakan awal online SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kementerian Dalam Negeri.

Data rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2015 juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya verifikasi ulang NIK se-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri yang berdampak pada proses entry data akte kelahiran dan proses konsolidasi dari Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2015.

2.3.1.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor bertujuan untuk memampukan kelurahan dalam melakukan tindakan bersama serbagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, masyarakat kelurahan atau pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya di kelurahan.

Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor dapat di lihat dari Tabel 2.77.

Tabel 2.55
Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rata rata jumlah kelompok binaan PKK	100	100	100	100
2	Persentase LSM Aktif	32	26	30	26
3	PKK aktif	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100

Sumber: Data diolah dari SIPD

2.3.1.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian penduduk merupakan suatu pola perkembangan penduduk kearah pertumbuhan penduduk yang di inginkan yang ditempuh melalui kebijakan program Keluarga Berencana

A. RATA RATA JUMLAH ANAK PER KELUARGA

Tujuan keluarga berencana adalah untuk menanamkan konsep NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) pada seluruh keluarga. NKKBS adalah salah satu slogan pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar lebih seimbang. Berdasarkan data dari Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana rata rata jumlah anak perkeluarga periode tahun 2015 sampai 2018 di Kota Bogor adalah 2 orang anak. Sedangkan tingkat laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang di rilis oleh Bapan Pusat Statistik sebesar 1,53 artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Perkembangan kesertaan masyarakat dalam program keluarga berencana dapat di lihat dalam Tabel 2.52.

Tabel 2.56

Perkembangan Kesertaan masyarakat dalam program keluarga berencana Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ratio akseptor KB	75,97	76.82	76.12	76.94	77.41
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	75,97	76.82	76.12	76.94	77.41

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ; Data diolah dari SIPD

2.3.1.15 PERHUBUNGAN

A. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Jumlah penumpang umum pada tahun 2015 sampai tahun 2018 menunjukkan data yang fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebagaimana tergambar dalam tabel ini:

Tabel 2.57
Perkembangan jumlah penumpang angkutan umum Kota Bogor
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah arus penumpang angkutan	22.910.641	21.676.355	23.134.385	19.459.510	24.060.642

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

B. Rasio Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang atau pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin trayek yang dikeluarkan selama satu tahun terhadap jumlah penduduk. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Bogor umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

Tabel 2.58
Perkembangan Rasio Izin Trayek Kota Bogor 2015 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio izin Trayek	0,000859	0,000579	0,0003644	0,001785	0,000381

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

C. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan

terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Uji Kir ini diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang diakibatkan asap kendaraan.

Tabel 2.59

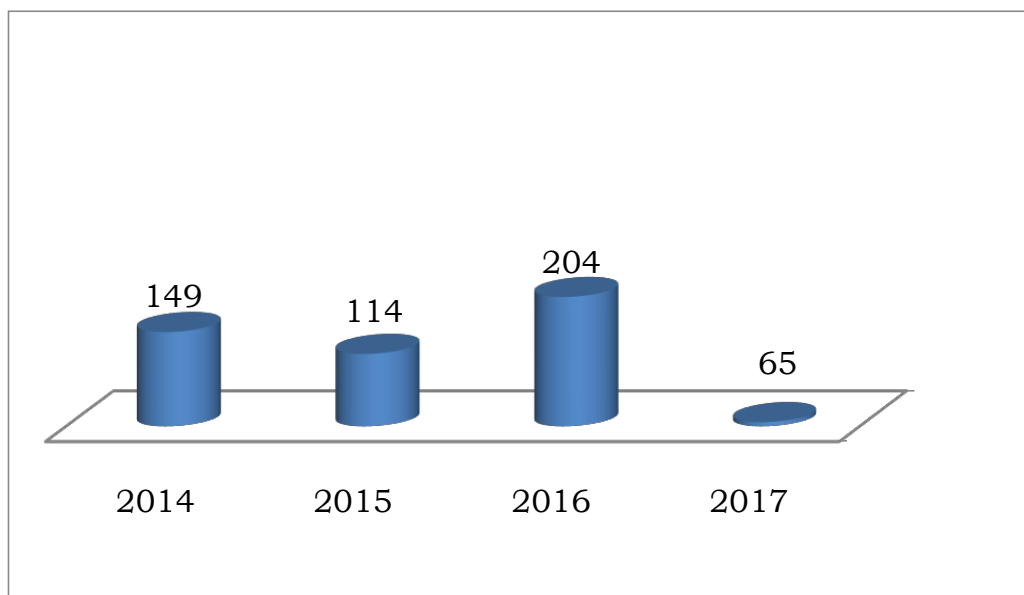
Jumlah angkutan umum wajib uji di Kota Bogor 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mobil Penumpang Umum	5.292	5.292	5.292	5.292	5.292
2	Mobil Bus	421	390	594	619	559
Jumlah		5.713	5.682	5.886	5.911	5.851

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor (Kota Bogor Dalam Angka 2018) ; Data diolah dari SIPD

Grafik 2.25

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Bogor 2014-2017



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor (Kota Bogor Dalam Angka 2018)

Ada peningkatan Jumlah angkutan umum yang telah melakukan Uji Kir pada tahun 2016 sebanyak 20.482 unit kendaraan. Jumlah angkutan umum yang melakukan Uji Kir semakin meningkat mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran para pemilik kendaraan umum terhadap kendaraannya yang berimbas terhadap kenyamanan penumpang angkutan umum.

D. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang/barang yang terangkut dalam periode 1 (satu) tahun. Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk ke ibukota , kecamatan dan Kabupaten/Kota terdekat meliputi angkutan umum yang tersedia untuk melayani trayek dari desa ke ibukota kecamatan, kabupaten/kota atau kabupaten/kota lain terdekat.

Indikator ini mengukur jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Semakin tinggi jumlah orang yang diangkut, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan fasilitas angkutan umum, dan semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum terdokumentasinya data terkait jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor.

Tabel 2.60

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor Tahun 2015-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah arus penumpang angkutan	7.656.696	7.628.096	6.321.878	5.328.604	4.335.315

Sumber : Dinas Pehubungan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

E. TERMINAL

Terminal yang melayani Kota Bogor terdiri dari terminal regional Baranangsiang dan terminal Bubulak. Terminal Baranangsiang merupakan terminal tipe A yaitu melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan pedesaan. Dalam masalah integritas pelayanan dengan pihak Kabupaten Bogor tampaknya perlu melakukan sinergitas, mengingat terminal yang beroperasi antara terminal Laladon yang merupakan terminal milik kabupaten dan Bubulak milik Kota Bogor pelayanannya relatif dekat

kurang lebih 500 meter. Sehingga efektifitasnya kurang; biaya operasionalnya menjadi mahal dan tidak berkembang secara maksimal.

F. TRANSPORTASI KERETA API

Saat ini angkutan kereta api dilayani oleh dua Stasiun Kereta Api yang terdapat di Kecamatan Kota Bogor Tengah dan Kota Bogor Selatan. Stasiun Kota Bogor Tengah melayani pergerakan orang atau barang ke arah Kota Jakarta dan Sukabumi sekurang - kurangnya 15 ritasi perhari. Umumnya pola pergerakan membentuk pola komuter, pengguna jasa angkutan kereta terdiri dari pelajar, pekerja, pedagang melakukan aktivitas di Jakarta atau Sukabumi. Sedangkan Stasiun Kota Bogor Selatan hanya melayani rute angkutan Jakarta - Sukabumi dengan sekurang-kurangnya mencapai tiga ritasi perharinya.

Transportasi kereta api merupakan angkutan yang memiliki intensitas yang cukup tinggi berkaitan dengan pergerakan penduduk Kota Bogor yang bekerja di Jakarta maupun Sukabumi sehingga perlu adanya pengembangan peningkatan sarana dan prasarana bagi peningkatan pelayanannya, mengingat laju pertumbuhan pengguna kereta api adalah 3,02% pertahun.

Berdasarkan data Kota Bogor Dalam Angka 2016 diketahui jumlah penumpang kereta api Stasiun Bogor pada tahun 2015 adalah sebanyak 16.541.315 orang ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 15.253.945 orang. Dengan rata rata penumpang perhari nya 45.284 orang di tahun 2015 dan 41.775 orang di tahu 2014.

2.3.1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMASI

A. Ketersediaan SDM yang mempunyai kemampuan di bidang TIK

Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan, karena dengan adanya skill para pegawai dan kualitas sumber daya dapat menggerakkan suatu pemerintahan dengan baik dan benar. Di era globalisasi seperti ini peranan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat penting dan berpengaruh salah satunya dalam bidang

manajemen sumber daya manusia. Dengan berkembang pesatnya dunia teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dan memudahkan dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pemerintahan . Adanya teknologi informasi dan komunikasi ini juga akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan di dalam manajemen sumber daya manusia yang sebelumnya dilakukan tanpa dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Kesersediaan sumberdaya manusia di bidang TIK di Kota Bogor mulai tahun 2015 minimal 2 orang di setiap perangkat daerah.

2.3.1.17 KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

A. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Tabel 2.61

Perkembangan Koperasi di Kota Bogor Tahun 2014-2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Koperasi	570	797	814	826	848
2	Jumlah koperasi aktif	353	395	472	498	528
3.	Persentase koperasi aktif (%)	47.06	49.56	57.98	60.2	62.26

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM 2018 dan di olah dari SIPD

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya perkembangan/pertumbuhan jumlah koperasi dan koperasi aktif.

B. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tabel 2.62

Persentase UKM non BPR/LKM Aktif di Kota Bogor Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah UMKM yang produktif	8.602	9.655	10.246	11.336

Sumber: Dinas koperasi dan UKM dan di olah dari SIPD

2.3.1.18 PENANAMAN MODAL

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Capaian nilai realisasi investasi di Kota Bogor dapat di lihat dari Tabel 2.59

Tabel 2.63
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun
2015-2018

No	Tahun	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
1	2014	2.805.642.264.788,-
2	2015	3.104.313.574.444,-
3	2016	2.315.438.675.457,-
4	2017	2.947.851.998.320,-
5	2018	3.103.415.375.522.83,-

Sumber: DPMPTSP; Data diolah dari SIPD

Tahun 2018 realisasi Investasi Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibanding Tahun 2017. realisasi investasi Kota Bogor tahun 2017 mengalami peningkatan 27% dari Tahun 2016, nilai investasi Kota Bogor terbesar dalam kurun waktu 2014-2018 adalah tahun 2015 yang mencapai nilai 3.104.313.574.444,-.

2.3.1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Urusan kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berprestasi yaitu dengan memberikan pembinaan dan insentif dalam meningkatkan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.

Data Dinas Pemuda dan olah raga Kota Bogor persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Bogor mencapai 68% selama rentang tahun 2014 – 2018. Sedangkan jumlah cabang olah raga yang di bina sebanyak 42 cabang dengan cakupan pelatih yang bersertifikasi dan hasil pembinaan seperti dalam Tabel 2.60.

Tabel 2.64
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bogor Tahun
2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	68	70	72.5	75	77

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bogor 2018 ; Data diolah dari SIPD

2.3.1.20 STATISTIK

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kota Bogor Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kota Bogor”.

Kedua dokumen tersebut ada di Kota Bogor, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2.65

Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Bogor Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	PDRB Kota Bogor	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Data diolah dari SIPD

2.3.1.21 PERSANDIAN

Persandian terkait dengan:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kota Bogor.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kota Bogor.

2.3.1.22 KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya berwujud abstrak. Urusan kebudayaan ini bertujuan untuk menjadikan warisan budaya sebagai aset kota dan Sasaran urusan tersebut adalah

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya;
2. Terpeliharanya kelestarian warisan budaya;
3. Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya.

Indikator kebudayaan di Kota Bogor dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.66
Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	53	75	63	60
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	0	14	14	14	14

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2018 dan di olah dari SIPD

Penyelenggaraan festival seni dan budaya perkembangannya fluktuatif, meningkatnya kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya menggambarkan semakin besar sektor pariwisata berkembang di Kota Bogor.

2.3.1.23 PERPUSTAKAAN

Perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar cakrawala dalam kegiatan belajar mengajar yang bisa meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Perkembangan perpustakaan di Kota Bogor dapat di lihat dari Tabel 2.88.

Tabel 2.67**Perkembangan Perpustakaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	37,000	49,039	45,011	74,623	25,421
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	44,320	47,620	50,000	53,000	56,000
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	11	11	11	11	11
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	44,320	32,000	34,438	35,397	37,017
5	Jumlah perpustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	4	4	4	4	4

Sumber ; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor dan diolah oleh SIPD

Jumlah pengunjung perpustakaan selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 fluktuatif, pada tahun 2017 terjadi jumlah pengunjung tertinggi yaitu 74.623 pengunjung, dan jumlah pengunjung terendah terjadi di tahun 2018 yaitu 25 421.

Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 37.017. Sedangkan rasio perpustakaan persatuan penduduk selama 5 tahun yaitu 11 perpustakaan per 1000 penduduk. Yang di kelola oleh perpustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat sebanyak 4 orang.

2.3.2.24 KEARSIPAN

Tujuan dari kearsipan adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman, agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan serta untuk menghindari pemborosan waktu dalam mencari arsip yang dibutuhkan disamping untuk menghemat tempat penyimpanan, menjaga kerahasiaan dan kelestarian arsip.

Menurut fungsi dan kegunaanya, arsip dapat dibedakan menjadi:

1. Arsip dinamis, yakni arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran.
2. Arsip dinamis aktif: Arsip ini berada dan berfungsi di unit pengolah yang pada umumnya memiliki nilai simpan satu sampai dengan dua tahun atau sesuai dengan jadwal retensi yang berlaku.
3. Arsip dinamis inaktif: Arsip ini berada pada fase ketiga yang oleh unit pengolah dirasakan atau dinilai sudah kurang atau jarang/tidak diperlukan lagi dalam menunjang proses administrasi sehari-hari, walaupun mungkin masih diperlukan tetapi frekuensinya sangat rendah.
4. Arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.

Tabel 2.68

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bogor Tahun 2014-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	13	28	48	68
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	100	106	106	117

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor 2018 dan diolah oleh SIPD

Dari tabel di atas telah terjadi peningkatan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku yang pada tahun 2015 hanya 13 perangkat daerah menjadi 68 perangkat daerah di tahun 2018. Terjadi pula peningkatan dalam kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu menjadi 117 pada tahun 2018.

2.3.2 LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.1 PARIWISATA

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor pada tahun 2015 sebanyak 4.786.023 orang wisatawan terdiri dari wisatawan nusantara 4.563.516 dan wisatawan mancanegara

222.507. Kota Bogor yang dalam sejarahnya pernah menjadi kota penting di mata dunia memiliki banyak sekali peninggalan sejarah dan kebudayaan, namun demikian berbagai potensi ini belum dikembangkan secara maksimal sebagai destinasi wisata di Kota Bogor. Data sekunder yang tersedia, hanya menyebutkan 23 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kota Bogor termasuk Kebun Raya Bogor yang merupakan ikon legendaris.

Sebagai kota yang memiliki identitas serta karakter yang kuat, Kota Bogor seyogyanya dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata baru tidak harus dilakukan dengan membuat wahana wisata baru, melainkan mengembangkan potensi yang telah dimiliki agar memiliki nilai tambah. Hal ini sekaligus dapat disinambungkan dengan upaya pelestarian dan pengembalian ruh dari peninggalan sejarah.

Tabel 2.69

Daftar Obyek Wisata Alamat dan Daya Tarik Wisata Kota Bogor

OBJEK WISATA	ALAMAT	JENIS OBJEK	LUAS WILAYAH
Kebun Raya Bogor	Jl. Ir. H. Juanda	Alam, Ilmiah, dan Budaya	87 Ha
Istana Kepresidenan Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No. 1	Sejarah dan Budaya	28,8 Ha
Prasasti Batu Tulis	Jl. Batutulis No. 54	Sejarah	21,34 m ²
Plaza Kapten Muslihat	Jl. Kapten Muslihat No. 51	Taman Rekreasi	17.690 m ²
Museum Zoologi Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No. 9	Ilmiah dan Budaya	1500 m ²
Museum Etnobotani (Munasain)	Jl. Ir. H. Juanda No, 22-24	Ilmiah	1600 m ²
Museum Perjuangan Bogor	Jl. Merdeka No 56	Sejarah dan Budaya	650 m ²
Rancamaya Country Golf	Jl. Rancamaya Utama Ciawi Bogor	Taman Rekreasi	400 Ha
Museum dan Monumen PETA	Jl. Jend Sudirman No. 35	Sejarah dan Budaya	9.400 m ²

OBJEK WISATA	ALAMAT	JENIS OBJEK	LUAS WILAYAH
Balai Penelitian Rempah dan Obat	Jl. Tentara Pelajar No. 3	Ilmiah	1 Ha
Museum Tanah	Jl. Ir. H Juanda	Ilmiah	30 m2
Danau Wisata Situ Gede	Jl. Tambakan No. 1	Taman Rekreasi dan Alam	6 Ha
Country Club Cimanggu	Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 1	Rekreasi	3,7 Ha
The Jungle	Bogor Nirwana Residence	Rekreasi	3 Ha
Museum Kepresidenan RI Balai Kirti	Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Bogor	Sejarah dan Budaya	
Taman Sringanis / Tanaman Obat	Kp. Cimanengah No. 29 Ilmiah kel. Cipaku kec. Bogor selatan		1000 m2
Bogor Golf Club	Jl. Dr. Semeru no. 65 Bogor	Rekreasi	18Ha
Kebun Raya Residence sports club	KRR Pasir kuda Bogor 16199	Rekreasi	2000 m
The Jungle fest	Bogor Nirwana Residence	Rekreasi	5,5 HA
Taman perahyangan 1	Jl. Temenggung Wiradireja	Rekreasi	4Ha /
Sagara Swiming pool	Jl. Sumanta Direja No.32 Pamoyanan Bogor	Rekreasi	5100 M2
Yasmin Center	Jl. Ringroad Perum Taman Yasmin	Rekreasi dan Olahraga	21.433 m2

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018 ; Data diolah dari SIPD

Potensi yang telah dimiliki dan salah satu warisan budaya yang paling dikenal adalah Kebun Raya Bogor. Sebagai salah satu kebun raya yang mengoleksi tumbuhan tropis terbesar di dunia, Kebun Raya Bogor menjadi semakin disadari pentingnya baik ditinjau dari kepentingan ekologi maupun ekonomi. Namun demikian, lokasi ini tidak luput dari ancaman pencemaran udara dari lingkungan sekitarnya. Sebagai jalur lalu lintas yang semakin padat, ruas-ruas jalan di sekitar Kebun Raya Bogor menjadi tempat emisi pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor baik berupa gas maupun partikel. Kepadatan kendaraan di sekitar Kebun Raya Bogor sangat berpengaruh terhadap kondisi pohon.

Selain kepadatan kendaraan, pemanfaatan ruang di sekitar Kebun Raya Bogor semakin mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya lahan terbangun. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bangunan-bangunan yaitu pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan berbagai sentra lainnya. Bahkan untuk Kecamatan Bogor Tengah dimana Kebun Raya Bogor berada, terdapat 13 hotel berbintang dari jumlah total 13 hotel berbintang di Kota Bogor¹.

Grafik 2.26

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bogor Tahun 2015–2018



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2018 dan diolah oleh SIPD

2.3.2.2 PERTANIAN

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan yang dilakukan untuk menghasilkan bahan

pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Kontribusi sub sektor Pertanian, dan perikanan terhadap PDRB dapat di lihat dalam tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.70

Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kontribusi sub sektor Pertanian, dan perikanan	0.89	0.83	0.78	0.76	0.73

Sumber: BPS ; Data diolah dari SIPD

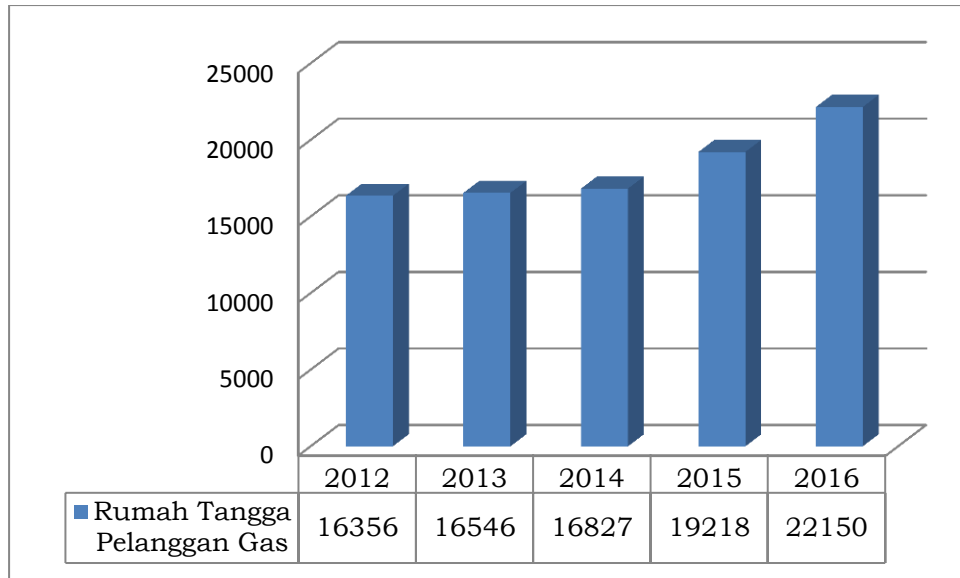
2.3.2.3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. Rumah Tangga /Pelanggan Yang Menggunakan Gas

Sumber energi gas semakin diminati masyarakat Kota Bogor. Peningkatan pelanggan gas di tahun 2014 mencapai 17.308 pelanggan menjadi 19.720 pada tahun 2015 dan sebesar 97,45, % merupakan pelanggan rumah tangga. Pemanfaatan gas di kalangan pelanggan industri ada penurunan dari 420,46 juta kubik di tahun 2014 menjadi 364,70 juta kubik pada tahun 2015 Sedangkan pada kategori komersil meningkat dari 11,98 juta kubik tahun 2014 menjadi 2,10 juta kubik pada tahun 2016. . Penggunaan gas di kalangan industri meningkat 2,46 persen dari 435,7 juta kubik tahun 2011 menjadi 446,4 juta kubik tahun 2012. Sedangkan penggunaan di kalangan pelanggan komersil meningkat sekitar 4,11 persen dari 2.139.922 kubik tahun 2011 menjadi 2.227.820 kubik tahun 2012. Hal ini menyebabkan volume gas yang terjual juga meningkat 2,41 persen dibanding tahun 2011 dengan rata-rata volume gas terjual per bulan sekitar 37,7 juta kubik.

Grafik di bawah ini menggambarkan perkembangan rumah tangga pelanggan gas di Kota Bogor tahun 2012 – 2016

Grafik 2.27
Perkembangan Rumah Tangga Pelanggan Gas di Kota Bogor
2012-2016



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

B. Rumah Tangga /Pelanggan Yang Menggunakan Listrik

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat area Bogor, jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2017 sebanyak 1.149.126 pelanggan. Pengguna listrik di Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,66%. Data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung, Dan Energi Listrik Terjual
Menurut Lokasi Di Kota Bogor, 2017

Jenis Tarif	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (VA)	Energi yang Terjual (Ribu KWH)
1	2	3	4
S (Sosial)	22 330	63 186 100	7 428 354
R (Rumah Tangga)	1 075 574	949 027 350	138 209 687
B (Bisnis)	44 813	341 764 550	44 998 173
I (Industri)	836	705 386 900	164 603 365
T (Traksi/Kereta Api)	5	67 877 879	8 335 500
P (Publik)	5 568	20 005 000	1 656 570
Jumlah/Total	1 149 126	2 147 247 779	365 231 649

Sumber : Data diolah dari SIPD

Tabel 2.72
Jumlah Pelanggan Listrik Kota Bogor

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelanggan	216 896	1 033 162	NA	1 149 126

Sumber: Data diolah dari SIPD

2.3.2.4 PERDAGANGAN

Pelaksanaan urusan perdagangan memiliki sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan jumlah komoditi ekspor. Dalam rangka meningkatkan perdagangan dalam negeri serta mendorong IKM untuk termotivasi dan memiliki mental bersaing, telah dilaksanakan Promosi Perdagangan dalam negeri antara lain keikutsertaan para IKM dalam Pameran yaitu :

1. Pameran INACRAFT 2014-2018
2. Pameran Jatim Trade Expo 2017
3. Pameran Banjarmasin Tourism Trade Investment Expo 2016
4. Jawa Barat Expo 2014 (JABEX)
5. Manado Tourism Trade Investment Expo 2014

Tabel 2.73
Realisasi Nilai Ekspor Kota Bogor Tahun 2014-2017
(dalam US Dollar)

Tahun	Realisasi Nilai Ekspor
2014	121.097.570,27
2015	97.858.860,45
2016	82.118.074,42
2017	85.581.554,59
2018	99.283.771,63

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Data diolah dari SIPD

Tabel 2.74
Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Bogor

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran	18,54	18,50	18,53	18,46	18,34	18,55
2.	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	5,99	4,94	5,27	5,71	5,58	2,99

Sumber : Kota Bogor Dalam Angkat, 2019

2.3.2.5 PERINDUSTRIAN

Mengembangkan iklim ekonomi kreatif dengan sasaran terciptanya iklim industri kreatif dan terjalinnya kemitraan antar pelaku industri kreatif serta terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif merupakan tujuan dari urusan perindustrian.

Kontribusi sub sektor industri pengolahan terhadap PDRB dapat di lihat dalam tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.75
Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi sub sektor industri pengolahan terhadap PDRB	18.54	18.50	18.53	18.46	18.34	18,55

Sumber: BPS ; Data diolah dari SIPD

2.3.3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.3.3.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2	2	2	2	2
4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		90	99.37	98.9	99.74

Sumber: Bappeda Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

2.3.3.2 KEUANGAN

Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 termasuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan mengalami kenaikan predikat pada tahun 2018 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam hal penetapan APBD, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 termasuk kategori Tepat Waktu. Indikator keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.77

Indikator Keuangan Kota Bogor Tahun 2015 – 2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	15,33	15,33	12,23	12,78	10,88
3	Persentase SILPA terhadap APBD	15,33	15,33	12,23	12,78	10,89
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan	-		23,84	21,06	23,49
6	Persentase belanja kesehatan	-	10,75	13,98	14,58	16,54
7	% BTL terhadap total APBD	45.79	46.9	42.77	45.99	43.11
8	% BL terhadap total APBD	54.21	53.1	57.23	54.01	56.89
9	Bagi hasil kabupaten/kota		0	0	0	0
10	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

2.3.3.3 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai Formasi dan Kompetensi merupakan salah satu indikator kepegawaian yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78
Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor
Tahun 2014 – 2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian(%)	90	100	100	100	100
2	Persentase aparatuyang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	50	94.47	95.47	93.59	97.79
3	Persentase proyek perubahan yang di implementasikan oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	NA	-	-	28.05	36.80
4	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	60	61.21	66.92	84.27	91.84
5	persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	NA	100	100	100	100

Sumber: BPKSDA Kota Bogor; Data diolah dari SIPD

2.3.3.4 PENGAWASAN

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pengawasan dapat di lihat dari Tabel 2.74.

Tabel 2.79
Indikator Pengawasan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase temuan yang ditidaklanjuti	100	100	100	100	100
2	Jumlah temuan BPK	15	34	30	16	12

Sumber: Inspektorat Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 semua temuan dapat di tindak lanjuti oleh inspektorat.Sedangkan temuan BPK cenderung menurun dari tahun 2014 34 temuan menjadi 12 temuan pada tahun 2018.

Data dari BKPSDA Kota Bogor Persentase pelanggaran yang di lakukan ASN yang di kenai hanya 0.12 pada tahun 2014, tertinggi persentase pelanggaran pada tahun 2017 yaitu 0.108. Perkembangannya dapat di lihat di Tabel 2.75

Tabel 2.80

Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Bogor 2014 – 2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pelanggaran pegawai	0,12	0,12	0,089	0,108	0,084

Sumber: BKPSDA Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

2.3.3.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. perkembangan Indikator kinerja seperti dalam Tabel 2.80.

Tabel 2.81

Indikator Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	NA	0	0	125	52,5
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	NA	0	54,17	68	42,85
Penerapan SIDA						
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	NA	0	0	45,95	73,68
4	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah	NA	0	0	84,44	87,5

Sumber: Bappeda ; Data diolah dari SIPD

2.3.3.6 SEKRETARIAT DAERAH

A. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bogor. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LAKIP Pemerintah Kota Bogor yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.82

Nilai SAKIP Kota Bogor Tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
NILAI SAKIP	CC	CC	CC	B	B

Sumber: Data diolah dari SIPD

Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan dari CC di Tahun 2014 menjadi BB di tahun 2017-2018. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Bogor semakin baik, akuntabel, dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran.

B. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008.

Hasil evaluasi menggambarkan kinerja dari pemerintah daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas sinya sebagai pelayan

masyarakat. Adapun hasil evaluasi Kota Bogor terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.83
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
NILAI	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Sumber : Data diolah dari SIPD

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 PENGELUARAN PER KAPITA

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84
Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita di Kota Bogor
Tahun 2014-2018

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	pengeluaran per kapita (rupiah)		10.532	10.662	10.940	11.348

Sumber: LKPJ AMJ Walikota Bogor 2015 – 2019 ; Data diolah dari SIPD

Pengeluaran per kapita di Kota Bogor cenderung naik setiap tahunnya akan tetapi kenaikannya melambat. Kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2018 sebesar Rp. 816,00. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) oleh BPS, mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat.

2.4.2. PERSENTASE PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PER KAPITA

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di gunakan sebagai salah satu alat untuk melihat tingkat

kesejahteraan masyarakat. Kondisi untuk Kota Bogor pada tahun 2017 dapat di lihat dalam Tabel 2.80.

Tabel 2.85
Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor
Tahun 2014-2017

No.	URAIAN	2014	2017	Kenaikan	%
1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	222.258	3.058.467	2.836.209	1.376
2	Aneka barang dan jasa	199.042	970.377	771.335	488
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	18.547	183.544	164.997	990
4	Barang tahan lama	15.512	368.344	352.832	2.375
5	Pajak, pungutan dan asuransi	20.089	232.353	212.264	1.157
6	Keperluan pesta, upacara dan kenduri	13.957	74.866	60.909	536
	Jumlah pengeluaran non pangan	489.404	3.583.436	3.094.032	732

Sumber: BPS di olah oleh Bappeda ; Data diolah dari SIPD

Dari tabel di atas terlihat ada kenaikan yang sangat tinggi pada pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor. Rata-rata kenaikan mencapai 1.093 % dari semua jenis konsumsi. Konsumsi pangan tertinggi ada pada biaya pajak, pungutan, dan asuransi, ini menunjukkan identitas masyarakat perkotaan.

2.4.3 KRIMINALITAS

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Iklim berinvestasi dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

Angka kriminalitas yang tertangani diperoleh dari jumlah kriminalitas yang ada di bagi jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Tabel 2.86
Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor
Tahun 2015-2017

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Angka kriminalitas yang tertangani	13.83	14.59	14.59	10,78

Sumber : BPS, Badan Kesbangpol ; Data diolah dari SIPD

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor fuktuatif, ada kenaikan pada tahun 2015 sampai tahun 2017, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017.

A. JUMLAH DEMONSTRASI

Kejadian unjuk rasa yang terjadi di kota berdasarkan jenisnya mengalami peningkatan pada rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2013, kemudian menurun pada tahun 2014. Angka kejadian unjuk rasa tertinggi pada tahun 2014 adalah unjuk rasa bidang politik 61 kejadian (55,96%) diikuti unjuk rasa biddang ekonomi 46 kasus (42,20%) dan hanya 2 kejadian (1,8%) unjuk rasa kasus pemogokan kerja Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa pada dasarnya hanyalah penyampaian aspirasi kepada objek unjuk rasa dalam banyak kasus adalah pemerintah. Meningkatnya kasus unjuk rasa di Kota Bogor, terutama unjuk rasa bidang politik, menggambarkan bahwa beberapa pihak masyarakat Kota Bogor tidak sependapat dengan kebijakan yang ada, baik pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.87
Banyaknya Kejadian Unjuk Rasa di Kota Bogor
Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bidang politik	35	53	61	12	19
2	Ekonomi	47	63	46	85	58
3	Kasus pemogokan kerja	3	7	2	NA	NA
4	Jumlah unjuk rasa	85	123	109	97	77

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018 ; Data diolah dari SIPD

2.4.4 RASIO KETERGANTUNGAN

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan

jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2.88

Rasio Ketergantungan di Kota Bogor Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1.	Rasio ketergantungan (%)	43.51	43.51	42.28

Sumber: BPS Di olah oleh Bappeda ; Data diolah dari SIPD

Rasio ketergantungan di Kota Bogor kurun waktu 2015-2017 berkisar antara 43.51 s/d 42.28. Pada tahun 2017 rasio ketergantungan total sebesar 42.28 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 sampe 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk nonproduktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah pendduk produktif (umur 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

Rasio Ketergantungan Muda merupakan perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Rasio Ketergantungan Muda mengalami penurunan pada selang waktu antara tahun 2014 sampai tahun 2015. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan muda sebesar 36,83; mengalami penurunan menjadi 22.54 pada tahun 2015; ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 36 orang dan 22 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun).

Tabel 2.89
Rasio Ketergantungan Muda Kota Bogor
Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	262708	271944
2	Jumlah Penduduk Usia > 65 tahun	60072	49272
3	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 tahun	741907	759793
4	Rasio Ketergantungan muda	35.41	35.79
5	Rasio ketergantungan tua	8.10	6.48

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Kota Bogor Dalam Angka 2017, 2018, BPS Kota Bogor)

Rasio Ketergantungan Tua merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan tua mengalami kenaikan dalam selang waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2015. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan tua sebesar 5,04; mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 6.74; mengalami kenaikan 1,7%. ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 5 - 7 orang usia tidak produktif.

2.5 PENCAPAIAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014 – 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
A.	MISI 1 : MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
	Tujuan 1 : Membangun Masyarakat yang Cerdas dan Berwasawan Teknologi Informasi dan Komunikasi						
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Government)						
1.	Indeks E-Government	2.19	2,91	NA	2,92	3,03	Tidak Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people)						
1.	Rata-rata Lama Sekolah	10,01	10,20	10,28	10,29	10,30	Tidak Tercapai
2.	APK SD	133.33	110,5	106,57	105,55	112,6	Tidak Tercapai
3.	APK SMP	104.66	108,56	105,55	101,06	104,1	Tidak Tercapai
4.	Nilai Rata-Rata USBN SD	75.47	75,47	75,75	72,12	68,12	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
5.	Nilai Rata-Rata UN SMP	65	65	67	59,62	58,27	Tidak Tercapai
6.	Persentase Sekolah Terakreditasi A	58	60	62	70,26	73,5	Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat							
1.	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil di implementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	NA	NA	NA	NA	100	Tercapai
B.	MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR						
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat							
Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat							
1.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	30	65	67	76,6	95,85	Tidak Tercapai
2.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	72.58	72,88	72,95	73,01	73,21	Tercapai
3.	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	30	106/100.000 kelahiran hidup	115/100.000 kelahiran hidup	29,2/100.000 kelahiran hidup	61/100.000 kelahiran hidup	Tercapai
4.	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	0.54	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	Tercapai
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman							
1.	Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala pengolahan air limbah skala	NA	NA	66,8	72,1	67,21	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
	komunitas/ka wasan/ kota						
2.	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	NA	82	86,92	90,55	91,98	Tidak Tercapai
3.	Prosentase luasan kawasan kumuh sedang	NA	0,42	0,42	0,42	0,42	Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat							
1.	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	61,7	63,4	64,2	65,2	66	Tidak Tercapai
2.	Tingkat kepatuhan penerapan KTR	22.49	100	100	100	100	Tercapai
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor							
Sasaran 1 : Berkurangnya tingkat pengangguran							
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	9.48	11,03	10,1	9.57	9,28**	Tidak Tercapai
2.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	8.87	57,84	31,62	60,88	56,52	Tercapai
Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kemiskinan							
1.	Angka kemiskinan		7,6	7,29	7,11	5,93	Tercapai
2.	Indeks gini ratio	0.36	0,47	0,43	0,43	0.41*	Tidak Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat							
Tujuan 3 : Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Masyarakat							
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi							
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	2013 = 5.86 ; 2014 =NA	6,14*	6,73**	6,12	6,14*	Tidak Tercapai
2.	Nilai investasi	2,805 T	3,104 T	2,315 T	2.9 T	3.1 T	Tercapai
3.	Pertumbuhan jumlah komoditi ekspor	121.097.570,27 (Realisasi Nilai Ekspor)	21	23	30	30	Tercapai
4.	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	23.12	30,88**	33,25**	37,18	37,99	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
C.	MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN						
	Tujuan 1 : Mempertahankan Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Kota Bogor						
	Sasaran 1 : Terkendalnya tata ruang kota Bogor						
1.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW)	75	NA	80	86	88	Tercapai
2.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang)	75	NA	80	86	89	Tercapai
	Sasaran 2 : Berkurangnya tingkat kemacetan						
1.	Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor (150 ruas jalan arteri dan kolektor)	2	24,65	26,1	34,84	35,39	Tercapai
	Sasaran 3 : Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau						
1.	Prosentase ruang terbuka hijau publik	5,58	5,7	5,73	5,79	5,89	Tidak Tercapai
	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan						
1.	Prosentase volume sampah terangkut ke TPA	70,37	72,2	74	74,34	75,85	Tercapai
2.	Prosentase reduksi sampah	3,2	3,2	3,2	4,1	6,26	Tercapai
	Sasaran 5 : Terkendalnya kualitas lingkungan						
1.	Indeks kualitas air	52	50	27,33	34,44	49,67	Tidak Tercapai
2.	Indeks kualitas udara	NA	70,56	78,56	85,3	85,86	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
D.	MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF						
	Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat						
	Sasaran 1 : Berkembangnya sektor kepariwisataan						
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	4.350.930	4.786.023	5.310.072	6.106.582	7.965.987	Tercapai
	Sasaran 2 : Berkembangnya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif						
2.	Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif	NA	NA	40	148	57	Tercapai
E.	MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI						
	Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani public secara prima						
	Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel						
1.	Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC	CC	CC	B	B	Tidak Tercapai
2.	Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1	3,1	3,1	3,1	3,1	Tercapai
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	NA	B	B	Tercapai
4.	Opini BPK (Hasil pemeriksaan BPK)	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	Tercapai
5.	Level Maturitas SPIP	1	1	1	1	1	Tidak Tercapai
	Sasaran 2 : Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	3,1	3,2	3,21	3,31	Tidak Tercapai
F.	MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI						
	Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebhinekaan						
	Sasaran 1 : Meningkatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat						
1.	Angka kriminalitas	0.142	0,142	0,143	0,144	<0,145	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
2.	Prevalensi HIV/AIDS	5	0,29	0,36	0,15	0,15	Tercapai
3.	Prosentase penurunan kasus narkoba	NA	6,32	23,78	21,99	21,99	Tercapai
Sasaran 2 : Meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat							
1.	Prosentase tanggap penanganan bencana	100	100	100	100	100	Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan keharmonisan antar umat beragama, antar suku,ras, dan golongan							
1.	Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA	100	100	100	100	100	Tercapai
3.	Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	100	100	100	100	100	Tercapai

Sumber: LAKIP Kota Bogor 2014 – 2018 ; Data diolah dari SIPD

2.6 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

2.6.1 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2016

2.6.1.1 LINGKUNGAN HIDUP

Realisasi pencapaian SPM yang sudah dicapai oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan air. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.90

Realisasi pelayanan pencegahan pencemaran air

No	Jenis Layanan	Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	73,3	78,05	100	100	67,5	61,25

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan tabel diatas bahwa Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2015 sebanyak 27 kegiatan usaha (67,5 %) dari target 40 kegiatan usaha (100%).

Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase pencapaian kinerja pada tahun 2016 terhadap indikator tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair terealisasi 153,1% atau kategori tercapai. Angka tersebut didapatkan dari hasil pemantauan kualitas limbah cair pada 40 perusahaan didapatkan 11 perusahaan yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dan dari hasil pemantauan kualitas sarana sanitasi masyarakat pada 40 titik pantau didapatkan 38 titik pantau yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan udara dari sumber tak bergerak. Adapun target

dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.91
Realisasi pelayanan pencemaran udara dari sumber Tak Bergerak

No	Jenis Layanan	Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak	64	94	100	100	100	100

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Pengujian dan Analisa Kualitas Udara sumber tidak bergerak/ cerobong dilakukan di 7 (tujuh) lokasi titik sampel di Kota Bogor dengan rincian lokasi pengambilan sample sebagaimana Tabel 2.87.

Tabel 2.92
Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara sumber tidak bergerak

No	Lokasi	Jumlah Sample	Ket
1.	PT. Nutrifood Indonesia	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
2.	PT. Goodyear	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
3.	PT. Unitex	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
4.	PT. Coast Rejo	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
5.	PT. Boehringer Ingelheim	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
6.	PT. Astra Daihatsu	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
7.	PT. Tanah Sumber Makmur	1 (Satu)	1 (Satu) Kali

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Hasil dari pengujian dan analisa udara dari sumber tidak bergerak bahwa Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang berasal dari cerobong seperti: NH₃, Cl₂, HCl, HF, NO₂, Opasitas, Partikel, SO₂, H₂S dan logam berat (Hg, As, Sb, Cd, Zn dan Pb) masih berada dibawah baku mutu sehingga masih tergolong dalam kategori baik.

3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibandingkan dengan luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.93

Realisasi pelayanan informasi status kerusakan Lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa

No	Jenis Layanan	Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk prosuksi biomassa	0	0	0	0	0	100

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Dari data hasil analisa kesuburan tanah seluruh titik sampling yang di lakukan pada berbagai peruntukan tanah di kota bogor dikategorikan subur. Hasil analisa logam berat potensial yang dianalisis, memperlihatkan hasil dari seluruh titik sampling yang dilakukan nilainya rendah. Mengacu pada PP RI No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, berbagai indikator dari parameter-parameter yang dianalisa masih pada ambang batas yang diperkenankan. Hasil analisis tanah di kota bogor dari berbagai kriteria masih digolongkan baik, belum mengalami kerusakan. Namun kegiatan ini belum dapat menggambarkan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa, karena belum dapat dihitung luasan lahan yang telah rusak di daerah produksi biomassa. Kegiatan ini hanya mengukur tingkat pencemaran per titik lokasi.

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.94

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya Dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan

No	Jenis Layanan	Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan	100	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

2.6.2 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2017

2.6.2.1 PENDIDIKAN

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pendidikan yakni (1) pendidikan dasar; dan (2) pendidikan anak usia dini. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.95

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pelayanan Dasar	2017
1. Pendidikan Dasar	109,01%
2. Pendidikan Anak Usia Dini	

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Pernyataan standar pelayanan minimal untuk pendidikan dasar adalah setiap warga negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar

nasional pendidikan. Sampai dengan semester 1 tahun 2017, capaian pelayanan ini sebesar 109,01%. Capaian ini diperoleh dari jumlah warga kota Bogor usia 7 s.d. 15 tahun sebanyak 168.463 orang, sedangkan warga usia 7 s.d. 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor sebanyak 183.648 orang. Capaian yang melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang berasal dari luar kota Bogor, namun bersekolah di Kota Bogor.

2.6.2.2 KESEHATAN

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat dua belas jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.96

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
1) Pelayanan kesehatan ibu hamil	50,76%
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin	49,98%
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	55,85%
4) Pelayanan kesehatan balita	59,72%
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	75,65%
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif	11,01%
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	72,45%
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	19,81%
9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	26,08%
10) Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	63,96%
11) Pelayanan kesehatan orang dengan	100%

TB	
12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	89%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

2.6.2.3 PEKERJAAN UMUM

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pekerjaan Umum yakni (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.97

**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
Tahun 2017**

Pelayanan Dasar	Capaian
1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,55%
- Non Perpipaan	1,82%
- Perpipaan (PDAM)	88,73%
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	72,1%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 90,55% dari target sebesar 90,03%. Capaian tersebut diperoleh melalui pelayanan air bersih non perpipaan sebesar 1,82% dan perpipaan sebesar 88,73%. Pelayanan air bersih melalui jaringan non perpipaan merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pembangunan infrastruktur jaringan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terlayani perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pembangunan infrastruktur jaringan air bersih sampai

dengan tahun 2017 telah mencapai 19.332 SR, dimana 67 SR merupakan hasil pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Kencana.

Sedangkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan merupakan hasil pelayanan yang dilaksanakan oleh PDAM. Sampai dengan tahun 2017 penduduk kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 900.862 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 974.603 jiwa atau sebesar 88,73% dari total proyeksi jumlah penduduk kota Bogor tahun 2017 sebanyak 1.098.397 jiwa. Upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan diantaranya penanganan produksi dan penanganan distribusi.

Penanganan produksi dilakukan diantaranya melalui penambahan kapasitas produksi di instalasi pengolahan air Dekeng 1 dan 2; pengadaan dan pemasangan meter induk produksi; penanganan permasalahan sampah melalui pemasangan screen sampah; serta pengadaan IPA Portable di Kota Batu dengan kapasitas 30 liter/detik. Sedangkan penanganan distribusi dilakukan diantaranya melalui penggantian meter induk distribusi; pemasangan alat level control di Reservoir; pengadaan Air Valve dan Reservoir Portable; pembentukan Distric Metering Area (DMA); serta pemasangan Tangki Hydrant Umum (TAHU).

B. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dapat terealisasi sebesar 72,1% dari target sebesar 67%. Data tersebut diperoleh dari jumlah rumah tangga yang memiliki sarana jamban (septic tank) sampai dengan tahun 2017 mencapai 185.214 SR, dan 133.534 diantaranya telah terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Sistem

jaringan dan pengolahan air limbah diselenggarakan melalui 3 sistem yakni sistem onsite individual, sistem komunal, serta sistem intermediate. Pengolahan air limbah domestik melalui sistem onsite (setempat) yaitu pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan menggunakan sistem pelayanan on call (berdasarkan permintaan/kebutuhan masyarakat), dimana pada tahun 2017 telah terlayani sebanyak 130.565 SR. Sarana penyedotan lumpur tinja yang dioperasikan adalah 4 unit vacuum truk tinja dengan kapasitas 2-3 m³, 2 unit motor tanki dengan kapasitas 0,4 m³, serta 1 unit bus toilet. Lumpur tinja hasil penyedotan dari septic tank diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tegal Gundil, untuk kemudian dilakukan pengujian kualitas effluent air limbah sebagai audit internal di laboratorium UPTD Pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi ketentuan baku mutu air limbah domestic.

Pengolahan air limbah domestik melalui sistem komunal merupakan sistem pengolahan berbasis masyarakat dimana pelaksanaannya yang dimulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2017 telah dilakukan pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis komunal sebanyak 855 SR di 14 lokasi, dimana pembiayaannya bersumber dari Islamic Development Bank (IDB) melalui APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian apabila dikumulatifkan sampai dengan tahun 2017 telah terbangun infrastuktur pengolahan air limbah berbasis komunal sebanyak 2.547 SR.

Sedangkan sistem pengolahan air limbah domestik intermediate (terpusat) yaitu pelayanan perpipaan air limbah untuk sambungan rumah yang dikumpulkan dan dialirkan dengan sistem pemompaan dan gravitasi untuk kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tegal Gundil. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penambahan cakupan wilayah pelayanan berupa penyediaan jaringan perpipaan air limbah, sambungan rumah, dan bangunan pelengkap pada sistem intermediate sebanyak 16 SR. Sehingga apabila dikumulatifkan sampai dengan tahun 2017 pelayanan air limbah domestik melalui sistem intermediate telah mencapai 422 SR.

2.6.2.4 PERUMAHAN RAKYAT

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.98
Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%
2. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota	100%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

Tahun 2017 terdapat 2 KK yang menjadi korban bencana dengan 11 anggota keluarga. Pada tanggal 13 November 2017 korban bencana tersebut telah difasilitasi untuk menempati rumah susun milik Pemerintah Kota Bogor. Sehingga pada tahun 2017 kinerja pelayanan dasar ini mencapai 100%.

B. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota

Tahun 2017 terdapat 1 KK yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota dan telah difasilitasi untuk menempati 2 unit hunian di rumah susun milik Pemerintah Kota Bogor.

2.6.2.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Namun dikarenakan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan kelima jenis pelayanan dasar tersebut, maka dalam laporan ini masih menjelaskan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan (2) penanggulangan bencana kebakaran. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.99

Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar	Capaian
1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	
a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	78,95%
b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%
c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	100%
2. Penanggulangan bencana kebakaran	
a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	125%
b. Tingkat waktu tanggap	95%
c. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	54%
d. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	167%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Pada tahun 2017 jumlah pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau sebanyak 152 kasus. Dari total kasus tersebut, 78,95% atau 120 kasus dapat diselesaikan.

2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Pada tahun 2017 terdapat masing-masing 1 kelompok di 6 kecamatan. Seluruh kelompok tersebut melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebanyak 3 kali/hari, sesuai dengan target SPM yang ditetapkan.

3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat

Sampai dengan tahun 2017 terdapat 3739 orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan 3563 RT di wilayah Kota Bogor. Sehingga setiap RT memiliki minimal 1 orang petugas Linmas. Jumlah tersebut telah sesuai dengan target SPM.

b. Penanggulangan bencana kebakaran

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Luas Kota Bogor adalah 11850 ha, dan seluruhnya termasuk ke dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Capaian tersebut telah melebihi target SPM yang hanya sebesar 80%.

2. Tingkat waktu tanggap

Sepanjang tahun 2017 terjadi kasus kebakaran di WMK sebanyak 28 kejadian, dan 20 kejadian diantaranya (71,43%) dapat ditangani dalam waktu tanggap. Sehingga untuk pelayanan dasar ini baru mencapai 95% dari target SPM sebesar 75%.

3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Pemerintah Kota Bogor memiliki 72 orang aparatur pemadam kebakaran, namun baru 33 orang (45,83%)

diantaranya yang telah memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi. Capaian tersebut baru sebesar 54% dari target SPM dimana minimal 85% aparaturnya pemadam kebakaran harus memenuhi standar kualifikasi.

4. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK

2.6.2.6 SOSIAL

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.100

Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	87,56%
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	96,10%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

Tahun 2017 total jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 193 orang, dan 169 orang (87,56%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

Tahun 2017 total jumlah anak terlantar sebanyak 131 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

Tahun 2017 total jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 150 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Tahun 2017 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 233 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Pada tahun 2017 terdapat 7000 orang korban bencana, dan 6727 orang diantaranya telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

2.6.3 PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL (SPM) TAHUN 2018

2.6.3.1 PENDIDIKAN

Pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pendidikan yakni (1) pendidikan dasar; dan (2) pendidikan anak usia dini. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.101

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pelayanan Dasar	Tahun 2018
Pendidikan Dasar	103,38%
Pendidikan Kesetaraan	27,93%
Pendidikan Anak Usia Dini	47,90%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar

Capaian pelayanan ini sebesar 103,38%. Capaian ini diperoleh dari jumlah warga kota Bogor usia 7 s.d. 15 tahun sebanyak 172.817 orang, sedangkan warga usia 7 s.d. 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor sebanyak 178.654 orang. Capaian yang melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang berasal dari luar kota Bogor, namun bersekolah di Kota Bogor.

b. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan di Kota Bogor pada Tahun 2018 mencapai 27,93% dari target pada SPM sebesar 100%. Dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan adanya penurunan warga belajar di non-formal, diprediksi melanjutkan ke pendidikan formal.

c. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bogor pada Tahun 2018 mencapai 47,90% dari target SPM sebesar 100%. Dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Hal ini disebabkan kenaikan APK PAUD, dikarenakan masyarakat sudah memahami akan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini.

2.6.3.2 KESEHATAN

Terdapat dua belas jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.102
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	2018
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	99,60%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	96,05%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,70%
4	Pelayanan kesehatan balita	90,10%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100,00%
10	Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	100,00%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100,00%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	96,00%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan ketidak tercapaian SPM tersebut di atas adalah:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2018 tercapai sebesar 99,60%, hal ini disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki penyakit lain sehingga terjadi komplikasi hingga kematian. Pencegahan komplikasi penyakit penyerta pada ibu hamil harus dilakukan dengan meningkatkan program KB pada

wanita usia subur yang menderita penyakit penyerta untuk mencegah atau menunda kehamilan pada wanita tersebut. Upaya lain yang harus dilakukan adalah deteksi dini dan penanganan penyakit penyerta melalui pelayanan Antenatal Care Terpadu sesuai standar yang melibatkan disiplin medis lainnya (Spesialis Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, dll) sehingga dapat melakukan penatalaksanaan yang baik untuk penyakit penyerta nya.

- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin tercapai sebesar 96,05%, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di faskes rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif (ICU).
- c. Pelayanan kesehatan balita tercapai 90,10%, upaya yang perlu dilakukan salah satunya adalah dengan peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD dan peningkatan pelayanan imunisasi dasar lanjutan dengan meningkatkan sweeping imunisasi, juga didukung dengan kegiatan bulan pemantauan tumbuh kembang balita yang dilaksanakan di puskesmas, posyandu maupun PAUD/ TK se Kota Bogor dengan melibatkan lintas sektor yaitu PKK, kader posyandu, kecamatan dan kelurahan serta guru PAUD/TK yang sudah dilatih Simulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sehingga seluruh balita dapat terpantau tumbuh kembangnya melalui kegiatan SDIDTK.
- d. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tercapai sebesar 96,00%, hal ini disebabkan karena :
 1. Penemuan kasus masih sulit terutama untuk komunitas dan kalangan ekonomi menengah ke atas, dikarenakan faktor sosial budaya, stigma dari masyarakat dan akses layanan untuk kalangan ekonomi menengah atas masih bervariasi dan tertutup.
 2. Masih banyak Rumah Sakit di Kota Bogor yang belum membuka layanan HIV. Dari 20 Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor, 6 Rumah Sakit sudah memberikan layanan HIV, 8 Rumah Sakit memberikan layanan PDP.
 3. Masih banyak Ibu hamil ODHA yang menyembunyikan statusnya karena sulit untuk mendapatkan perawatan

persalinan di layanan kesehatan, jika mereka membuka statusnya.

4. Masih banyak ODHA yang tidak memeriksakan rutin kondisi CD 4 nya.
5. Masih ada sekolah, universitas, instansi pemerintah dan swasta yang menolak untuk diberikan pengetahuan tentang HIV/AIDS.
6. Kemauan kelompok resiko untuk memeriksakan HIV ke sarana kesehatan masih kurang.
7. Sulit untuk menjangkau sasaran pada populasi kunci.
8. Kemauan wanita penaja seks (WPS) untuk menggunakan kondom kurang karena kondom tidak nyaman, kualitas kondom tidak baik.
9. Pasien belum siap untuk minum obat Anti Retro Viral (ARV) karena pengetahuan klien terhadap ARV belum optimal.
10. Pasien menghilang setelah diketahui positif HIV, dikarenakan masih banyak pasien yang belum menerima terhadap kondisi yang dihadapinya.

2.6.3.3 PEKERJAAN UMUM

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pekerjaan Umum meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.103

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Tahun 2018

Pelayanan Dasar	Capaian
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	91,98%
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	67,21%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 91,98% dari

target sebesar 94,62%. Sampai dengan tahun 2018 penduduk kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 1.064.362 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 1.064.362 jiwa atau sebesar 91,98% dari total proyeksi jumlah penduduk kota Bogor tahun 2018 sebanyak 1.124.539 jiwa.

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Capaian Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun 2018 diperoleh melalui SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Setempat) Individu didapatkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan menggunakan data untuk jumlah rumah yang memiliki jamban yang layak dengan asumsi sudah dilengkapi dengan tanki septik individual dengan memperhatikan standarisasi teknis secara detail, dimana jumlah tangki septik yang telah terdata sebanyak 141.886 Sambungan Rumah. SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Setempat) Komunal, berdasarkan data IPAL Komunal yang terbangun di Kota Bogor baik yang didanai dari APBD Kota maupun dana Bantuan IDB. Sampai tahun 2018 IPAL Komunal yang terbangun di Kota Bogor adalah sebanyak 3.335 Sambungan Rumah (SR). SPALD-T (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Terpusat) Skala Permukiman diwakili oleh jumlah Sambungan Rumah (SR) yang sudah tersambung ke IPAL Tegal Gundil, dimana sampai tahun 2018 telah tersambung sebanyak 422 Sambungan Rumah (SR).

2.6.3.4 PERUMAHAN RAKYAT

SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.104**Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat**

Pelayanan Dasar	Tahun 2018
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kota, dilakukan dengan penyediaan Rumah Susun Sewa Pemerintah Kota Bogor, namun untuk Tahun 2018 tidak dilakukan relokasi, hanya dilakukan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.

2.6.3.5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; dan (2) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.105
Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar	Tahun 2018
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	
Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	
Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	100%
Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	80%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) kasus. Dari total kasus tersebut, 90% atau 71 (tujuh puluh satu) kasus dapat diselesaikan.

4. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada tahun 2018 dilakukan patroli dengan anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) orang di 6 kecamatan, dengan frekuensi patroli sebanyak 3 (tiga) kali/hari untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat. Terdapat 3739 orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang tersebar di 68 Kelurahan se-Kota Bogor.
6. Cakupan pelayanan bencana kebakaran. Luas Kota Bogor adalah 11850 ha, dan seluruhnya termasuk ke dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Capaian yang belum memenuhi target SPM dikarenakan beberapa faktor kondisi di lapangan antara lain :

- a. Kendala dengan kemacetan jalan raya,
- b. Kurangnya Pos Sektor Damkar,
- c. Kurangnya Kendaraan Pemadam kebakaran.
- d. Tingkat waktu tanggap

Sepanjang tahun 2018 terjadi kasus kebakaran di WMK sebanyak 62 kejadian, dan 54 kejadian diantaranya (95%) dapat ditangani dalam waktu tanggap. Sehingga untuk pelayanan dasar ini baru mencapai 80% dari target SPM sebesar 100%.

7. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi. Pemerintah Kota Bogor memiliki 72 (tujuh Puluh dua) orang aparatur pemadam kebakaran, diantaranya sebanyak 30 (tiga puluh) personil sudah tersertifikasi dan terlatih. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK sebanyak 9 (sembilan) unit.

2.6.3.6 SOSIAL

Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban

bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.106
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

Pelayanan Dasar	Tahun 2018
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	22%
2. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	31,94%
3. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	21,53%
4. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	100%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 970 orang dan sebanyak 212 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Sehingga selama tahun 2018 total jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 970 orang, dan 212 orang (22%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

Pada tahun 2018 terdapat anak terlantar sebanyak 288 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 52 orang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses pengangkatan 8 anak / adopsi. Tetapi dalam hal ini 5 (lima) anak belum selesai untuk prosesnya (masih dalam tahap persidangan).

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

Pada tahun 2018 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 313 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 100 orang.

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Pada tahun 2018 terdapat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 195 orang dan yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 42 orang. Sehingga selama tahun 2018 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 42 orang, dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Pada tahun 2018 terdapat 7.029 orang korban bencana, dan 7.029 orang diantaranya telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

2.7 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasar pada hasil analisis tiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bogor dengan total sebesar 199 indikator yang terdiri dari 4 pencapaian yakni tercapainya target nasional (SS), indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), indikator ada data tetapi belum ada dalam target (TT) serta belum terdapat data terkait (NA). Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada setiap pilar yaitu sebagai berikut.

2.7.1 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 91 indikator.

Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.107

Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Sosial

No	Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
1	Dinas Sosial	3	0	0	6	9
2	Dinas Kesehatan	8	3	1	16	28
3	Dinas PPKB	2	3	0	6	11
4	Dinas Pendidikan	4	6	0	7	17
5	Disdukcapil	0	0	0	1	1
6	BPBD	1	1	0	7	9
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	1	0	0	0	1
8	PLN	0	0	0	1	1
9	Dinas Ketahanan Pangan	1	0	2	2	5
10	BPJS	0	1	0	0	1
11	dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak	3	0	0	3	6
12	PUPR	0	2	0	0	2
	Jumlah	23	16	3	49	91

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan tabel di atas, ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari total 91 indikator di pilar sosial, terdapat 23 indikator atau 25,27 % yang mencapai target nasional dalam RPJMD Kota Bogor. Sebanyak 16 indikator atau 17,58 % belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 3 indikator atau 3,30 % indikator yang tidak memiliki data dan 49 indikator ada data tetapi tidak ada dalam target.

Dari 12 OPD tersebut, Dinas kesehatan merupakan OPD yang memiliki target indikator TPB paling banyak pada pilar sosial yaitu sebanyak 28 indikator.

2.7.2 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 44 indikator. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.108**Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada
Pilar Ekonomi**

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
dispenda	0	2	0	1	3
Disnaker	1	2	0	1	4
UMKM	0	0	2	0	2
Disparbud	0	1	2	2	5
Indag	2	1	0	2	5
Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	2	2
Dinas Sosial	1	1	0	1	3
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	3	3
BPJS	1	0	0	0	1
Diskominfo	1			3	4
disdukcapil	0	0	0	1	1
BPS	1	0	1	4	6
Pemerintah Daerah	0	0	0	2	2
Jumlah	7	7	5	22	41

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan tabel di atas, ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar ekonomi. Dari total 41 indikator di pilar ekonomi, terdapat 7 indikator atau 17,07 % yang mencapai target nasional. Sebanyak 7 indikator atau 17,07% belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 22 indikator atau 53,66% indikator belum memiliki data.

**2.7.3 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah
Pilar Lingkungan**

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 41 indikator. Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada table berikut. Berdasarkan capaian per OPD pilar lingkungan, ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar lingkungan.

Dari total 44 indikator di pilar lingkungan, terdapat 3 indikator yang mencapai target, 9 indikator dilaksanakan belum mencapai target (SB), 2 indikator ada data tidak ada target (TT) dan 27 indikator tidak ada data (NA). Persentase capaian indikator dalam pilar lingkungan disajikan pada diagram berikut ini.

Tabel 2.109
Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian
Indikator Pilar Lingkungan

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
PDAM	1	1	0	0	2
Dinas Perumahan dan Permukiman	0	4	0	4	8
PUPR	0	2	0	1	3
Dinas Perhubungan	0	0	1	2	3
Dinas Lingkungan Hidup	0	2	1	4	7
Indag	0	0	0	1	1
Disnaker	0	0	0	1	1
Bappeda	0	0	0	6	6
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	1	1
BPBD	2	0	0	5	7
Kepolisian	0	0	0	2	2
Jumlah	3	9	2	27	41

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

2.7.4 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah **Pilar Hukum dan Tata Kelola**

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Total untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 22 indikator. Capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian
Indikator Pilar Hukum Dan Tata Kelola

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
Kepolisian	0	0	1	2	3
dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak	1	0	2	2	5
dispenda	1	0	0	1	2
LPSE	0	0	0	2	2
BPS	2	0	0	4	6
Disdukcapil	1	1	0	2	4
Jumlah	5	1	3	13	22

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

2.8 PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

2.8.1 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (Perumda BPR Bank Kota Bogor) adalah salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor (BUMD) yang bergerak dibidang perbankan yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (PD BPR Bank Pasar Kota Bogor) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP-66/KR.02/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor Menjadi Izin Usaha Atas Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor.

Adapun tujuan pendirian Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah untuk menyelenggarakan pelayanan dalam bidang jasa perbankan kepada masyarakat (PNS, Karyawan, Pensiunan, UMKM) yang berada di wilayah Kota Bogor, selain itu memiliki tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, menunjang pembangunan daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lembaga ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor saat ini telah menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik, Secara garis besar dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.111**Perkembangan Usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor**

(dalam Ribuan Rupiah)

Perkiraan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018*
Volume Usaha	82.889.690	94.888.643	122.787.108	140.636.496	162.127.586
Kredit yang Diberikan	67.702.464	73.398.753	88.524.475	105.050.527	108.749.807
Saldo Tabungan	15.593.143	18.450.369	24.801.825	33.696.929	37.901.882
Saldo Deposito Berjangka	8.153.500	12.957.000	25.307.800	23.306.100	43.688.842
Saldo Antar Bank Pasiva	750.000	1.250.000	4.200.000	4.500.000	500.000
Modal disetor	30.000.000	30.000.000	30.000.000	39.300.000	39.300.000
Pinjaman yang Diterima	13.344.444	14.068.819	15.788.983	13.041.674	9.750.000
Pendapatan Operasional	18.203.942	21.863.052	25.702.822	29.053.264	34.034.053
Beban Operasional	9.699.276	13.320.624	15.978.497	18.385.083	22.797.561
Pendapatan Non Operasional	150.290	179.335	169.106	147.768	145.872
Beban Non Operasional	67.056	90.471	114.068	138.623	399.069
Laba Sebelum Pajak	8.587.900	8.631.292	9.779.364	10.677.325	10.983.296
Taksiran Pajak Badan Ps. 25	1.867.609	1.960.465	2.311.117	2.547.692	2.553.021
Laba Setelah Pajak	6.720.291	6.670.828	7.468.246	8.129.633	8.430.274
Bagian Laba Pemda	1.213.971	2.688.117	2.668.331	3.734.123	4.064.817

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Perumda BPR Bank Kota Bogor pada tahun buku 2018 telah bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik “Richard Risambessy & Rekan”. Pada Audit atas laporan Keuangan Tahun Buku 2017 Perumda BPR Bank Kota Bogor, Kantor Akuntan Publik memberikan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja keuangan, disajikan dalam bentuk data Rasio Tingkat Kesehatan Bank. Dengan memperhatikan target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, maka pencapaian Rasio Tingkat Kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.112**Tingkat Kesehatan Bank**

RASIO	Satuan	Standar BI	Target 2018	Realisasi 2018
CAR	%	≥ 8	92,93	51,37
KAP	%	≤ 10,35	0,95	1,94
PPAP	%	≥ 81,0	100,00	100,00
ROA	%	≥ 1,215	7,38	7,39
BOPO	%	≤ 93,52	66,11	66,98
LDR	%	≤ 94,75	88,39	72,84
Cash Ratio	%	≥ 4,05	27,12	38,26
Non Performing Loan (Gross)	%	-	1,98	2,38

RASIO	Satuan	Standar BI	Target 2018	Realisasi 2018
Non Performing Loan (Net)	%	-	0,93	1,18

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Dari data diatas dapat diketahui bahwa rasio Tingkat Kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor masih dalam ambang batas standar rasio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian secara keseluruhan tingkat kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor masih dalam predikat “SEHAT”.

2.8.2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor adalah salah satu Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor. Beberapa peraturan yang mendasari pembentukan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977, diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor. Dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
5. Peraturan Walikota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor; dan

6. Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor.

Potensi pengembangan yang dapat dikelola dan yang telah dikelola oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, diantaranya :

- a. Kapasitas Air Baku

Sumber air baku yang masih bisa diandalkan untuk penambahan kapasitas Produksi adalah sungai Cisadane.

- b. Daerah Pelayanan

Daerah pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor meliputi wilayah Kota Bogor yang telah mengalami perluasan wilayah pada tahun 1995 sehingga tanggung jawab PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor semakin bertambah. Dengan adanya perluasan wilayah tersebut, terdapat wilayah Kota Bogor yang dilayani oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan jumlah layanan mencapai 15.186 SL atau 91.116 jiwa. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah menjangkau enam wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, dan Kecamatan Tanah Sereal dengan jumlah pelanggan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 159.290 sambungan yang tersebar pada enam wilayah kecamatan terdiri dari kelompok Sosial, Kelompok Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Niaga dan Industri.

Sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah mampu mengalir ke zona-zona pelayanan air minum, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.113
Sumber Air Baku & Kapasitas Produksi Air Bersih
PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2018

No.	Sumber	Lokasi	Tahun	Kapasitas (Liter/detik)			Keterangan
				Terpasang Awal	Terpasang Saat Ini	Produksi	
1	Mata Air	Kota Batu	1918	70	69,00	67,36	
2	Mata Air	Bantar Kambing	1969	170	152	152,09	
3	Mata Air	Tangkil	1974	170	114	113,64	
4	IPA	Cipaku 1 & 2	1988	120			
		Cipaku 3	1995	60	280	282,44	Mengoptimalkan IPA
		Cipaku 4	2003	60			
5	IPA	Dekeng 1	1997	600			
		Dekeng 1	2005	Up-Rating	1.000	831,89	
		Dekeng 1	2011	2 Unit Filter			
6	IPA	Dekeng II	2013	400	800	763,36	Mengoptimalkan IPA
7	Mata Air	Palasari	2008	30	13	12,81	
8	IPA	Palasari	2008	20	20	18,60	
9	IPA	Cikereteg	2015	40	40	20,00	
	Jumlah			1.740	2.486	2.262,19	

Sumber : Laporan SPM

Tabel 2.114
Perkembangan Jumlah Pelanggan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kec. Bogor Utara	20.632	22.345	28.465	25.019	26.081
2	Kec. Bogor Selatan	24.145	26.150	16.141	30.030	30.838
3	Kec. Bogor Barat	22.880	25.015	20.200	27.950	29.256
4	Kec. Bogor Timur	13.996	15.246	23.521	16.975	17.257
5	Kec. Tanah Sareal	25.060	27.658	26.443	30.751	32.150
6	Kec. Bogor Tengah	19.727	20.052	29.377	20.458	20.627
7	Kab. Bogor	2.872	2.946	2.947	2.949	2.955
Jumlah Pelanggan Per Kecamatan		129.312	139.412	147.094	154.132	159.290

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Tabel 2.115
Jumlah Pelanggan Per Golongan Tarif

No.	Jenis Golongan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
a.	Pelanggan Domestik				
	Rumah Tangga :				
	Rumah Tangga R1	1.526	1.498	1.472	186
	Rumah Tangga R2	17.190	21.239	23.814	22.727
	Rumah Tangga R3	41.700	43.188	44.113	46.357
	Rumah Tangga R4	27.235	28.051	30.020	32.691
	Rumah Tangga R5	20.529	21.088	21.728	23.047
	Rumah Tangga R6	15.486	16.187	16.957	17.867
	Rumah Tangga R7	4.928	4.959	5.062	5.360
	Rumah Tangga R8	2.495	2.495	2.499	2.508
	Sub Jumlah Pelanggan Domestik	131.08 9	138.70 5	145.66 5	150.74 3
b.	Pelanggan Non Domestik				
	Sosial Umum / S1	1.277	1.263	1.274	1.299
	Sosial Umum / S2	807	849	883	842
	Instansi Pemerintah	364	368	367	376
	Niaga Kecil N1	1.586	1.579	1.595	1.673
	Niaga Kecil N2	3.680	3.719	3.753	3.811
	Niaga Besar N3	530	532	516	466
	Niaga Besar N4	70	70	70	72
	Industri / I-1	3	3	3	2
	Industri / I-2	6	6	6	6
	Sub Jumlah Pelanggan Non Domestik	8.323	8.389	8.467	8.547
	Jumlah	139.41 2	147.09 4	154.13 2	159.29 0

Sumber : Laporan SPM

Tabel 2.116
Jumlah Pelanggan dan cakupan Pelayanan Tahun 2014- 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pelanggan	129.312	139.412	147.094	154.132	159.290
2	Cakupan Pelayanan	78,41%	82,79%	85,85%	88,73%	91,44%

Sumber : Laporan SPM

Dalam upaya membantu peningkatan kinerja pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, pihak Pemerintah Kota Bogor telah memberikan bantuan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel 2.117**Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak**

No	Tahun	Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak	Pembagian Laba Bersih	Penyertaan Modal
1	2014	35.983.297.589,45	19.790.814.000,00	31.073.447.956,00
2	2015	45.815.256.978,42	25.198.391.000,00	10.921.110.161,00
3	2016	39.891.073.742,43	21.940.091.000,00	52.898.242.000,00
4	2017	33.325.544.280,00	18.329.049.400,00	10.934.000.000,00
5	s/d Nopember 2018	60.704.745.896,84		
	Jumlah	215.719.918.487,14	85.258.345.400,00	105.826.800.117,00

Sumber : Laporan SPM

Tabel 2.118**Perolehan Laba dari Tahun 2014 s/d 2018**

No.	Tahun	Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak dan Audit
1	2014 Audit	Rp. 35.983.297.589,45
2	2015 Audit	Rp. 45.815.256.978,42
3	2016 Audit	Rp. 39.891.073.742,43
4	2017 Audit	Rp. 33.325.544.280,00
5	s/d Nopember 2018 (Un Audit dan Sebelum pajak)	Rp. 60.704.745.896,84
	Jumlah	Rp. 215.719.918.487,14

Sumber : Laporan SPM

2.8.3 PD. Pasar Pakuan Jaya

PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang nyaman, bersih dan teratur, mendorong perekonomian daerah, menunjang pembangunan daerah, meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PD Pasar Pakuan Jaya dibentuk pada tanggal 7 Juli 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

Sampai dengan tahun 2018 PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor mengelola 11 pasar yang tersebar di beberapa tempat yaitu Pasar Gunung Batu, Sukasari, Taman Kencana, Kebon Kembang (Blok A, B, B1, F & G), Padasuka, Devries, Jambu Dua, Baru Bogor, Merdeka, Pamoyanan dan Tanah Baru. Pasar-pasar tersebut telah diserahkan kepada PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melalui Perda Nomor 7 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Selain itu PD Pasar Pakuan Jaya juga mengelola satu pasar tambahan yaitu Plaza Bogor sesuai dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukan PD Pasar Pakuan Jaya Sebagai Pengelola Pasar Di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

PD Pasar Pakuan Jaya telah mengelola sebanyak 6.738 Kios dan Los, yang terdiri atas 5.598 Kios dan 1.140 Los. Dari total 6.738 kios dan los tersebut baru sebanyak 3.500 kios dan los atau 51.94% saja dari total kios dan los yang aktif/buka.

Tabel 2.119
Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)
Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Sampai
dengan Tahun 2018

	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
I.Penerimaan		45,000,000,000
	Penerimaan PMP Tahun 2010	5,000,000,000
	Penerimaan PMP Tahun 2012	7,500,000,000
	Penerimaan PMP Tahun 2013	5,000,000,000
	Penerimaan PMP Tahun 2014	15,000,000,000
	Penerimaan PMP Tahun 2016	7,500,000,000
	Penerimaan PMP Tahun 2017	5,000,000,000
II.Realisasi Penggunaan		27,534,155,405
Tahun 2010	A.Biaya Pra Operasional Selama Tahun 2010	5,000,000,000
31 Des 2013	B.Pembiayaan Revitalisasi	20,920,578,250
	Total Pusat	187,474,500

	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
	Total PSR BB	13,179,745,000
	Total PSR KKB	98,810,000
	Total PSR SKR	380,921,000
	Total PSR GNB	4,897,180,750
	Total PSR JD	74,507,000

Sumber : Laporan SPM

2.8.4 Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT)

Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 pada tanggal 12 April 2007 tentang “Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor” yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008.

Modal Dasar Perusahaan Daerah JasaTransportasi (PDJT) Kota Bogor menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang telah terealisasikan seluruhnya hingga 31 Desember 2014. Dan berdasarkan hasil kajian investasi daerah Nomor 102/BEST-BS/lap.FS/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor diberikan penyertaan modal sebesar Rp 5.519.390.000,- (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2015 tentang “Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor.

Operasional bus Trans Pakuan pada tahun 2017 tidak berjalan secara optimal, hal ini dimulai sejak awal tahun atau bulan Januari 2017 pada saat posisi keuangan perusahaan sudah tidak stabil dimana antara kas dan pendapatan operasional tidak lagi mampu menutupi semua biaya operasional termasuk pembayaran gaji pegawai. Selama bulan Januari dan Februari Trans pakuan masih melakukan operasi khususnya pada jalur 1 & 2 Bubulak – Baranangsiang dan Baranangsiang – Bellanova, namun operasional tidak berjalan secara optimal dikarena ada kekecewaan dari karyawan yang disebabkan belum menerima pembayaran gaji secara

optimal, hingga pada akhirnya karyawan melakukan mogok operasional secara total pada tanggal 28 Februari 2017.

Selama masa mogok operasional sempat diadakan pertemuan intern antara karyawan dan manajemen untuk mencari solusi awal penanganan kondisi perusahaan, sempat terjadi kesepakatan antara karyawan dan manajemen untuk beroperasi kembali pada minggu kedua bulan Maret 2017 dengan kesepakatan bagi hasil atau persentase dari hasil pendapatan operasional setiap harinya. Dan kembali lagi operasional pun tidak bisa berjalan seperti yang direncanakan;

1. Karyawan sudah enggan melakukan operasi karena hasil yang diperoleh dari operasional belum bisa menutupi kebutuhan karyawan.
2. Kondisi kendaraan yang semakin memburuk dikarenakan tidak ada perbaikan kendaraan khususnya kerusakan yang memerlukan pembiayaan besar dan tidak ada pembelanjaan spare part mengingat posisi keuangan yang tidak stabil.
3. Masih belum jelasnya kapan proses pembayaran gaji dilakukan.
4. Isu-isu yang berkembang terkait pembubaran perusahaan (likuidasi), yang membuat suasana diperusahaan semakin tidak kondusif.

Semua hal-hal tersebut berujung pada demo karyawan kepada Walikota Bogor, dengan beberapa permintaan diantaranya tidak ada pembubaran perusahaan (likudasi), dan permintaan kepada Direktur PDJT untuk mengundurkan diri dari jabatan karena dinilai tidak mampu untuk mengelola perusahaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proses pembayaran gaji karyawan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 05 Mei 2017 secara resmi Direktur PDJT Bapak Krisna Kunchahyo, SE., AK., M.Si, mengundurkan diri dari jabatannya.

Koridor Barangsiang (Cidangiang) – Bellanova (Sentul City) merupakan jalur yang masih eksis sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampe dengan saat ini. Koridor ini merupakan jalur potensial yang dilayani oleh bus Trans Pakuan, mengingat tidak ada angkutan pesaing yang melayani operasional pada koridor ini.

Keuangan Perusahaan saat ini tidak bersumber dari Anggaran Pemerintah (PMP), semua sumber dana yang dimiliki bersumber dari pendapatan operasional bus Trans Pakuan pada Koridor Baranangsiang – Bellanova (Sentul City) yang dikelola untuk semua pembiayaan baik operasional kendaraan, penggajian atau honor pegawai dan pembiayaan lain perusahaan.

2.9 KERJA SAMA DENGAN DAERAH LAIN

2.9.1. Kerjasama Antar Daerah

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Ketentuan itu tertuang di dalam pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Sepanjang tahun 2014-2018 telah dihasilkan 780 Perjanjian Kerjasama dan 67 Kesepakatan Bersama. Adapun perjanjian kerjasama dan Kesepakatan bersama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 896 buah.

Adapun kerjasama antar daerah yang dijalin pada tahun 2015-2018 dan masih berlaku sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 19 kerjasama dan Kesepakatan Antar Daerah sebanyak 14 KB.

1. Perjanjian Kerja sama Nomor 119/KK.11-Kerja sama/2017 antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Kerja sama Antar Daerah dengan jangka waktu perjanjian 1 tahun;
2. Perjanjian kerja sama Nomor 119/KK.19-Dishub/2017 antara Kaban. Pengelolaan Transportasi Jakarta dengan Djarot Saiful Hidayat (Gubernur DKI Jakarta), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Wahidin Halim (Gubernur Banten) Bima Arya (Walikota Bogor), Nurhayanti (Bupati Bogor), KH. Mohammad Idris (Walikota Depok), Arief R. Wirmasyah (Walikota Tangerang), Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang), Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), H. Rahmat Effendi (Walikota Bekasi) tentang Rencana Induk Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
3. Perjanjian Kerjasama antara Bupati Bogor dengan Wali Kota Bogor Nomor 060/KK.20-Bag.Kerja sama/2017 tentang Kerja sama antar Daerah Dalam Pelayanan Publik;
4. Perjanjian Kerjasama Bima Arya Wali kota Bogor dengan Nurhayati Bupati Bogor, Mohammad Idris (Walikota Depok), Mohamad Muraz (Walikota Sukabumi), Marwah Hamami (Bupati Sukabumi), Herman Suherman (Plh. Bupati Cianjur) tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal;
5. Perjanjian Kerjasama Nomor 900/KK.37-BPKAD/2017 Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) dengan Wiwiek Sisto Widayat selaku Pihak ke II dan Nurhayanti (Bupati Bogor), Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), Mohammad Idris (Walikota Depok), H. Marwan Hamami (Bupati Sukabumi), Mohamad Muraz (Walikota Sukabumi), H. Irvan Rivano muchtar (Bupati Cianjur), Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi), Rahmat Effendi (Walikota Bekasi), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Imas

Aryumningsih (Bupati Subang), Sunjaya Purwadisastra (Bupati Cirebon), Nasrudin Azis (Walikota Cirebon), Anna Sophanah (Bupati Indramayu), Acep Purnama (Bupati Kuningan), Sutrisno (Bupati Majalengka), Dadang M. Naser (Bupati Bandung), M. Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Ajay Muhammad Priyatna (Walikota Cimahi), Abu Bakar (Bupati Bandung Barat), Eka Setiawan (Bupati Sumedang), Rudy Gunawan (Bupati Garut), UU Ruzhanul Ulum (Bupati Tasikmalaya), Budi Budiman (Walikota Tasikmalaya), Ade UU Sukaesih (Walikota Banjar), Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran) selaku Pihak ke III tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Jawa Barat;

6. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/KK.2-Bappeda/2018 Anies Baswedan dengan Ahmad Heryawan; H.Wahidin Halim; Hj.Nurhayanti; Bima Arya; K.H.Mohammad Idris; Rahmat Effendi; Hj.Neneng Hasanah Yasin; Irvan Rivano Muchtar; H.Arief R. Wismansayah; A. Zaki Iskandar; Airin Rachmi Diany tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bidang Transportasi Dan Perhubungan, Sumberdaya Air, Lingkungan Hidup, Energi,Pariwisata, Ketahanan Pangan, Investasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil, Serta Penataan Ruang Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Dan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
7. Perjanjian Kerjasama Nomor 060/KK.1-Bag.Kerja Sama/2018 H. Irvan Rivano Muchtar, Bupati Cianjur dengan Bima Arya, Walikota Bogor tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik;
8. Perjanjian kerjasama No.475.1/Perj.28-Disakersostrans/2015 antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Sarana Pemukiman (SP) 3 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satai Lestari Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015;

9. Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/62/PKS/KS/III/2018 antara Drs. H. Herdi, M.Si. KA. Satpol PP Kab. Bogor dengan Drs. Herry Karnadi, M.Si. Ka. Satpol PP. Kota Bogor tentang Penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan;
10. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/85/PKS/KS/IV/2018 E. Rupali, SH, MH. KADIS Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dengan Drs. Herry Karnadi, M. Si. Kepala Sat.Pol.PP Kota Bogor tentang Penanganan Bencana Kebakaran Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor;
11. Perjanjian Kerja sama Nomor 119/163/PKS/KS/IX/2018 Drs. Rahmat Surjana, Kadis Pariwisata Kabupaten Bogor dengan H. Sahlan Rasyidi, SE. MM. Kadis Disparbudpar Kota Bogor tentang Pengembangan Kepariwisata, Ekonomi kreatif, kebudayaan dan kesenian Bogor;
12. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/59/PKS/KS/III/2018 antara Ir. H. Joko Pitoyo, CES, Ka. DPMPTSP Kabupaten Bogor dengan H. Denny Mulyadi, SE. Ka. DPMPTSP Kota Bogor tentang Penanaman Modal;
13. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/70/PKS/KS/IV/2018 antara Ir. Hj. Siti Farikah, M.M. Kadis. Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dengan Drs. Irwan Riyanto, M.Si. Kadis. Distan Kota Bogor tentang Pengembangan Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan;
14. Perjanjian Kerjasama Ahmad Heryawan dengan Hj. Nurhayanti (Bupati Bogor), Dr. Bima Arya (Wali Kota Bogor), Mohammad Idris (Wali Kota Depok) tentang Pelayanan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Regional Nambo untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok;
15. Perjanjian Kerjasama Nomor Nurhayanti Bupati Bogor dengan DR. Bima Arya Walikota Bogor tentang Hibah Tanah seluas + 363 m² Beserta Bangunan Diatasnya Seluas + 243 M² milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Pemerintah Kota Bogor Untuk Perluasan SMPN 2 Kota Bogor Terletak Di Jalan Gedong sawah IV Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;

16. Perjanjian Kerja sama KEP-243/WPB.13/BD.03/2016 Nomor Yuniar Yanuar Rasyid,Ak., MM. dengan Dr. Bima Arya tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
17. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/132/PKS/KS/XI/2016 Nurhayanti dengan Bima Arya tentang Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
18. Perjanjian Kerja sama 591/Perj.50-DPKAD/2016 Ahmad Heryawan dengan Dr. Bima Arya tentang tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di jalan raya pajajaran Nomor 121 Bogor.

Selain 18 Perjanjian tersebut diatas sudah dijalin juga kerjasama dengan Kantor Lembaga dan Pemerintah Pusat yaitu:

1. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN);
2. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN);
3. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Yohana Yembise Menteri Negara PPPA RI tentang Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak Kota Bogor;
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Komando Distrik tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian;
5. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian tentang Kerja Sama mewujudkan kota Bogor Sebagai Kawasan Inovasi Teknologi Pertanian;
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Bogor;

7. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan BPPT Pusat tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Di Pemerintah Kota Bogor;
8. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Pengembangan, pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah;

2.9.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik; kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; kerjasama investasi; dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada pertimbangan efisien, efektivitas, pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom.

Sepanjang Tahun 2014- 2018 kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan pihak ketiga telah terjalin dan masih berlaku sampai dengan tahun 2018 sebanyak 869 perjanjian Kerja sama yang terbagi menjadi

- 1) 67 dokumen Perjanjian Kerja Sama di bidang Kesehatan dengan Rumah Sakit di wilayah Kota, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta. Serta Perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Bogor. Adapun ruang lingkup utama dari perjanjian tersebut ialah pemberian bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Bogor;

- 2) 652 dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ke III di bidang Sewa menyewa Barang Milik Pemerintah Kota Bogor, Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kota, dan persetujuan sewa pemakaian tanah milik Pemerintah Kota Bogor;
- 3) 7 Dokumen Perjanjian Kerjasama bidang Kependudukan meliputi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Rumah Sakit dan Program Pelayanan Isbat Nikah Terpadu Bagi Masyarakat Kota Bogor dan lain-lain;
- 4) 11 Dokumen Perjanjian Kerjasama dibidang Pendidikan meliputi kerjasama pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan dari keluarga tidak mampu, Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID, dan Penerimaan Siswa Baru, Mutasi Siswa dan Pembinaan Kesiswaan serta penanganan Penyimpangan Perilaku Siswa dan lain-lain;
- 5) 3 Dokumen Perjanjian Kerjasama dibidang Pertanian meliputi kerjasama pendidikian, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, Budidaya Jahe Merah dan lomba Taman Obat Keluarga dan kerjasama Pelaksanaan Bursa Hewan Qurban;
- 6) 18 Dokumen Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum dan HAM yaitu kerjasama pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dalam Didag Perdata dan Tata Usaha Negara dan lain-lain;
- 7) 8 Dokumen Perjanjian Kerja sama bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu kerja sama dengan Rumah Sakit dalam pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP) dan lain-lain;
- 8) 4 Dokumen Perjanjian Kerjasama di bidang Komunikasi dan Informatika yaitu kerjasama dalam penyediaan layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat 112 di Kota Bogor, dan pemanfaatan saluran khusus televise kabel dan jaringan Hybrid Fiber Coaxial;
- 9) 14 Dokumen Kerja sama bidang Pengelolaan Keuangan yaitu kerjasama dalaam pengembangan dan penggunaan aplikasi SIMDA-Keuangan dalam rangkaa pencairan SP2D secara

Online di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, pengelolaan rekening kas Umum Daerah Kota Bogor, penunjukan sebagai penyimpan kelebihan uang kas daerah Rekening Giro Pemerintah kota Bogor pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Bogor dan lain-lain;

- 10) 3 Dokumen kerjasama dibidang Lingkungan Hidup yaitu kerjasama dalam pengembangan dan Pembangunan ECO CITY di Kota Bogor, dan pelaksanaan Program perumusan dan pengintegrasian strategi ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim;
- 11) 4 Dokumen kerjasama dibidang pengembangan Sumber Daya Aparatur yaitu kerjasama dalam penyelenggaraan psikotes dan wawancara perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Penyediaan Sarana-prasarana Pelaksanaan Seleksi Calon PNS dengan metode CAT dan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat;
- 12) 7 Dokumen Kerjasama bidang Penanaman Modal yaitu kerjasama dalam Layanan Pembayaran Retribusi Perizinan, Pembangunan Web portal Pusat Informasi Perizinan Usaha, Pemanfaatan Data Perizinan Kota Bogor melalui Web Service dan Pengintegrasian program jaminan sosial kesehatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
- 13) 2 Dokumen Kerjasama bidang Tenaga Kerja yaitu kerjasama dalam Program pengurangan Pekerja Anak di Kota Bogor, dan Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 14) 2 Dokumen Kerja Sama bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu kerjasama dalam pembinaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga koperasi, dan Perluasan kepesertaan dan peningkatan kesadaran kepatuhan bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro kecil menengah dan pedagang kaki lima dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kota Bogor;

- 15) 5 Dokumen Perjanjian Kerja sama bidang Perencanaan Pembangunan yaitu kerja sama dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan Univ IBN Khaldun Bogor;
- 16) 3 Dokumen Kerjasama bidang Perdagangan yaitu kerjasama dalam bantuan Sertifikasi Jaminan Halal dan Penggunaan Instalasi Standar Uji Meter Gas Untuk Pelaksanaan Tera Dan / Atau Tera Ulang Meter Gas Diafragma;
- 17) 2 Dokumen Kerjasama bidang Penanggulangan bencana yaitu kerjasama Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Wilayah Perbatasan Dan Daerah;
- 18) 2 Dokumen Kerja sama bidang Pariwisata yaitu kerja sama Pengembangan kepariwisataan, ekonomi, kreatif, kebudayaan dan kesenian Bogor dan pengembangan promosi dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan & kebudayaan Bogor

Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor baik dengan daerah lain, instansi pemerintah maupun pihak ketiga diapresiasi oleh Provinsi Jawa Barat melalui penghargaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Award Tahun 2018. Penilaian didasarkan pada 5 kriteria yaitu Leadership (bobot 25), Stategic Planning (bobot 20), Customer Focus (bobot 15), People Focus (bobot 15) serta Performance Measurement (bobot 10) bersaing dengan 8 Kota dan 19 Kabupaten lain di Jawa Barat, Kota Bogor berhasil mendapatkan penghargaan Juara II TKKSD Award 2018.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Bogor terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Gambaran umum capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realisasi Belanja baik berupa Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung serta capaian pembiayaan.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah.

3.1.1.KINERJA PELAKSANAAN APBD

Kinerja pelaksanaan APBD meliputi perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah. Jelasnya dapat di lihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2018 Kota Bogor

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	376,487,551,008	398,435,398,328	492,138,653,391	555,475,409,588	592,978,746,862	9.79
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	77,167,650,951	46,219,894,849	62,727,631,456	49,043,299,929	48,418,070,315	(5.50)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,681,532,602	28,807,740,268	33,107,211,225	29,949,487,128	26,772,427,406	3.29
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,498,973,693	154,134,016,696	195,900,091,147	343,729,545,302	244,028,726,706	40.38
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	544,835,708,254	627,597,050,141	783,873,587,219	978,197,741,947	912,197,971,289	11.63
1.2	DANA PERIMBANGAN						
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	89,831,370,015	68,503,716,916	96,843,148,408	90,543,462,995	94,958,394,936	3.20
1.2.2	Dana Alokasi Umum	732,337,058,000	737,833,158,000	806,089,544,000	791,929,143,000	791,929,143,000	1.65
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	33,477,500,000	8,616,560,000	194,681,619,028	190,013,867,775	179,875,196,265	415.48
	Transfer Pemerintah Provinsi			199,830,168,384			
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	855,645,928,015	814,953,434,916	1,297,444,479,820	1,072,486,473,770	1,066,762,734,201	7.32
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,034,000,000	4,875,000,000	14,106,000,000	9,000,000,000	87,142,218,371	278.57
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	175,444,557,860	200,623,100,069		221,019,088,491	236,569,329,408	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	157,301,111,000	202,799,344,000				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23,436,076,711	62,362,474,910	56,946,015,847	8,656,058,467	26,031,179,400	54.67
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	357,215,745,571	470,659,918,979	71,052,015,847	238,675,146,958	349,742,727,179	45.86
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,757,697,381,840	1,913,210,404,036	2,152,370,082,886	2,289,359,362,675	2,328,703,432,669	5.89

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
2.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	726,175,854,412	792,640,665,276	868,927,388,610	813,887,212,647	873,107,978,517	3.94
2.1.2	Belanja Bunga	352,457,562	2,415,905,429	2,646,198,572	5,685,279,325	6,598,058,978	145.18
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah	35,272,291,000	42,891,089,240	26,636,028,500	75,813,412,400	118,993,313,285	45.06
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	14,654,510,975	30,872,505,105	29,748,900	28,383,948,000	38,774,816,900	19,071.83
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	852,232,538	999,621,220	999,621,220	3,371,939,614	3,716,867,124	52.97
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,533,275,000	3,855,084,200	5,370,006,482	2,270,085,956	1,557,079,950	0.47
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	779,840,621,487	873,674,870,470	904,608,992,284	929,411,877,942	1,042,748,114,754	6.10
2.2	BELANJA LANGSUNG						
2.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	124,035,291,258	164,327,724,558	175,103,589,795	216,228,428,193	235,582,060,172	14.30
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299,750,681,278	384,060,724,979	483,099,789,155	666,457,980,054	672,795,038,324	18.56
2.2.3	Belanja Modal	499,335,882,425	440,919,551,227	552,484,517,036	433,491,716,724	455,461,723,593	(0.57)
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	923,121,854,961	989,308,000,764	1,210,687,895,986	1,316,178,124,971	1,363,838,822,089	8.38
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,702,962,476,448	1,862,982,871,234	2,115,296,888,270	2,245,590,002,913	2,406,586,936,843	7.25
	SURPLUS / (DEFISIT)	54,734,905,392	50,227,532,802	37,073,194,616	43,769,359,762	(77,883,504,174)	(58.86)
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	294,245,909,954	300,704,906,314	339,661,575,600	304,817,138,216	330,288,545,978	2.65
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	7,000,000,000				55,640,573,400	
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	936,048,000	500,000,000	936,048,000	936,048,000	2,742,383,089	46.72
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah						
3.1.7	Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja						
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	302,181,957,954	301,204,906,314	340,597,623,600	305,753,186,216	388,671,502,467	5.93
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	54,934,179,256	10,921,110,161	71,917,632,000	19,234,000,000	8,700,000,000	70.08

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	777,777,776				45,523,415,589	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	500,000,000	936,048,000	936,048,000			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	56,211,957,032	11,857,158,161	72,853,680,000	19,234,000,000	54,223,415,589	108.77
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	245,970,000,922	289,347,748,153	267,743,943,600	286,519,186,216	334,448,086,878	6.78
	PEMBIAYAAN NETO	245,970,000,922	289,347,748,153	267,743,943,600	286,519,186,216	334,448,086,878	6.78
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	300,704,906,314	339,575,280,955	304,817,138,216	330,288,545,978	256,564,582,704	(2.25)

PAD selama kurun waktu 2014-2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 11.63%. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen PAD kecuali komponen retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pajak Daerah dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 9.79% dan komponen Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 40.38%.

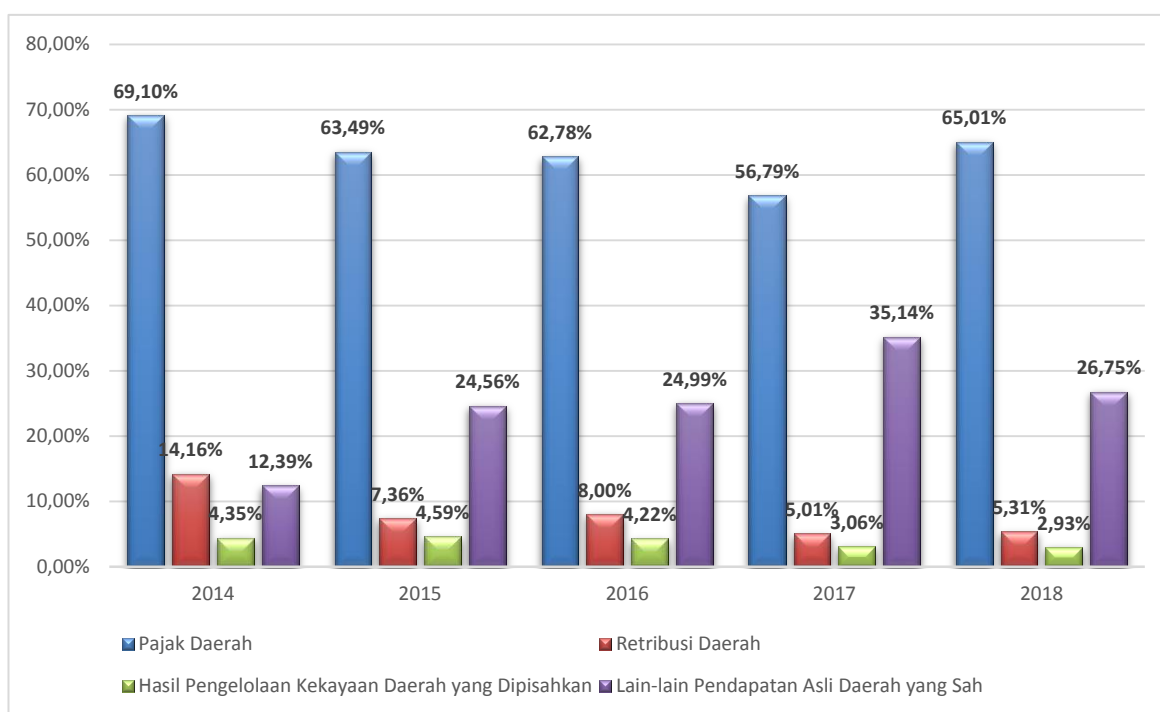
Selain itu Pajak Daerah juga menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata diatas 60 % dari Total PAD. Penerimaan Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah antara lain :

1. Mempertahankan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menggali potensi pajak melalui regulasi dan penerapan insentif dan disinsentif

Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah berturut-turut adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 65.01% dari total PAD 2018
- b. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak daerah yaitu sebesar 26.75% dari total PAD 2018
- c. Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebesar 5.31% dari Total PAD 2018
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 2.93 dari total PAD 2018.

Grafik 3.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018



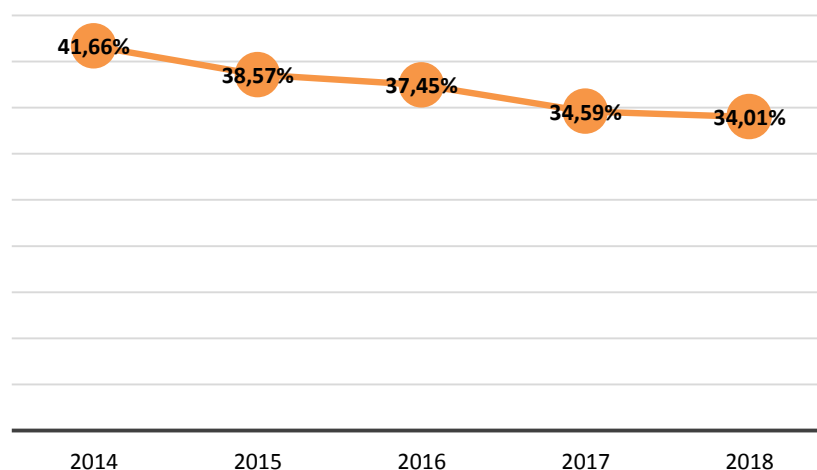
Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Dari sisi kebijakan, ada 3 (tiga) komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya-upaya intensifikasi yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan kebijakan eksternal.

Dari tabel 3.1 Kota Bogor, terlihat masih besar ketergantungan terhadap dana perimbangan, ini menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara.

Pada tahun 2014 - 2018, rata-rata kontribusi DAU terhadap APBD Kota Bogor sebesar 37.26%. Namun demikian kecenderungan yang terjadi persentase DAU terhadap pendapatan Kota Bogor dari tahun 2014-2018 cenderung semakin menurun. Pada Tahun 2018, persentase penerimaan DAU terhadap total pendapatan kota Bogor berkisar 34.01%. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Grafik 3.2.
Persentase Penerimaan DAU terhadap Total Pendapatan Kota Bogor Tahun 2014-2018

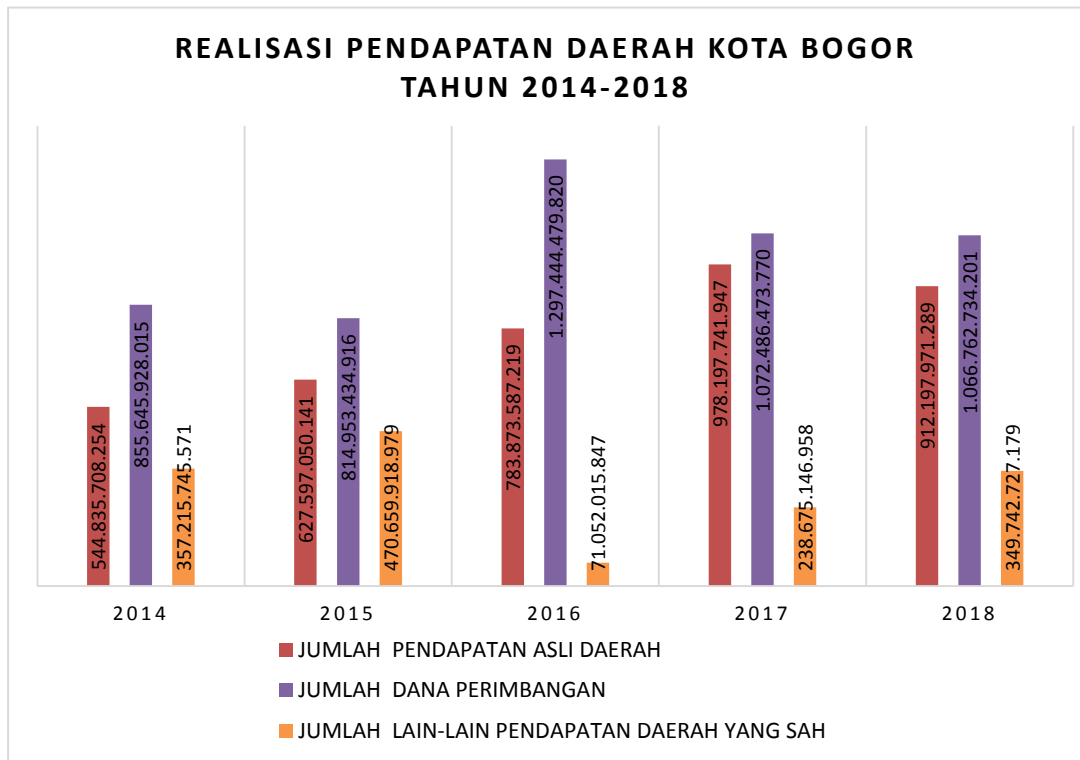


Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan realisasi pendapatan Kota Bogor tahun 2014-2018.

Grafik 3.3.

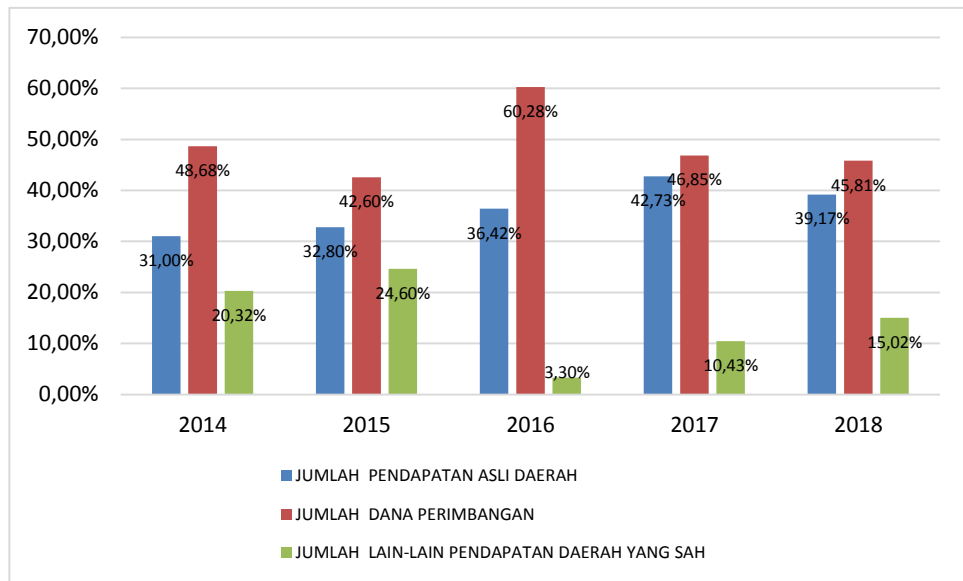
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Dari gambaran tabel diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan kota Bogor dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan dari pusat. Proporsi kedua yang menopang pendapatan daerah kota Bogor adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Kota Bogor dari tahun 2014-2018 menunjukkan tren positif, dimana persentase kontribusinya terhadap total pendapatan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, kontribusi PAD terhadap Total pendapatan Kota Bogor masih berkisar 31.00% dan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 mencapai kisaran 39.17%. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.4.
Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2014-2018



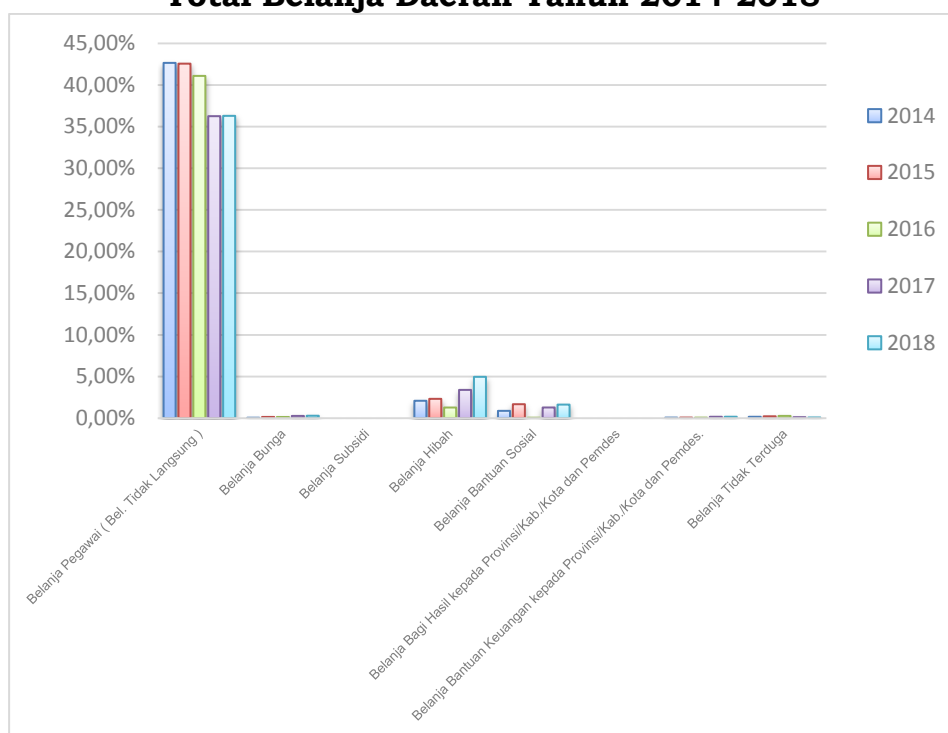
Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Belanja Daerah terdiri dari dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Dari data pada tabel 3.1 realisasi belanja tidak langsung Tahun 2014-2018 terlihat bahwa total Belanja tidak langsung dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama peningkatan setiap tahun terjadi pada komponen Belanja Pegawai. Peningkatan belanja pegawai sejalan dengan penambahan jumlah pegawai yang ada di kota Bogor dan perubahan administrasi kepegawaian secara berkala. Lain halnya dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, besarnya mengalami fluktuasi setiap

tahunnya karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan kebijakan umum terhadap prioritas anggaran tahun bersangkutan.

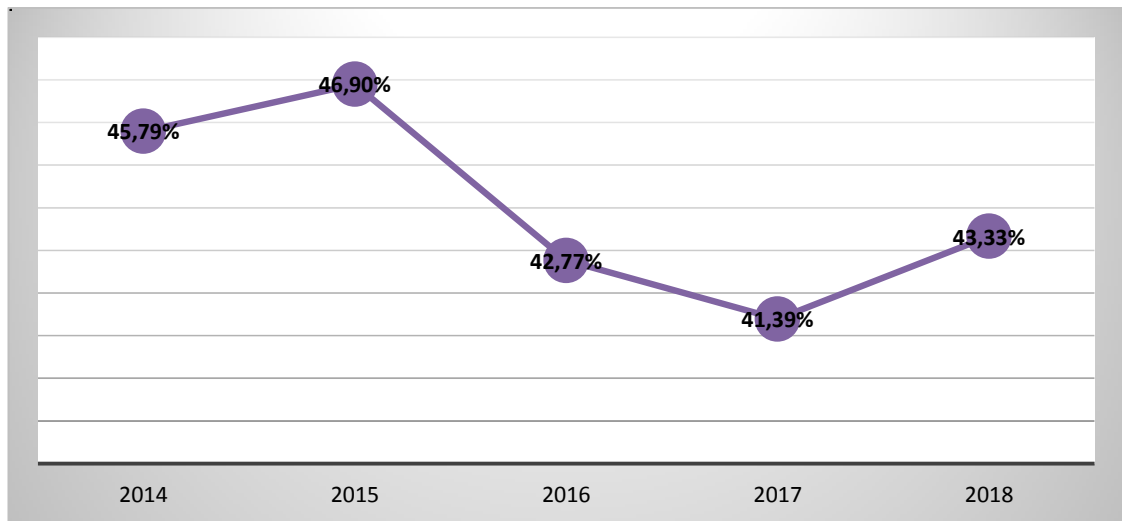
Grafik 3.5.
Proporsi Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Rata-rata proporsi Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan pegawai yang termasuk dalam kategori Belanja tidak langsung terhadap total Belanja Daerah berkisar 39.76%, sementara secara umum rata-rata proporsi total realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total realisasi Belanja Daerah berkisar 44.03%. Angka ini secara tidak langsung menunjukkan masih lebih besar keberpihakan pemerintah Kota Bogor untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang dapat membawa hasil (*outcome*) bagi kepentingan masyarakat. Persentase realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah tahun 2014-2018 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini :

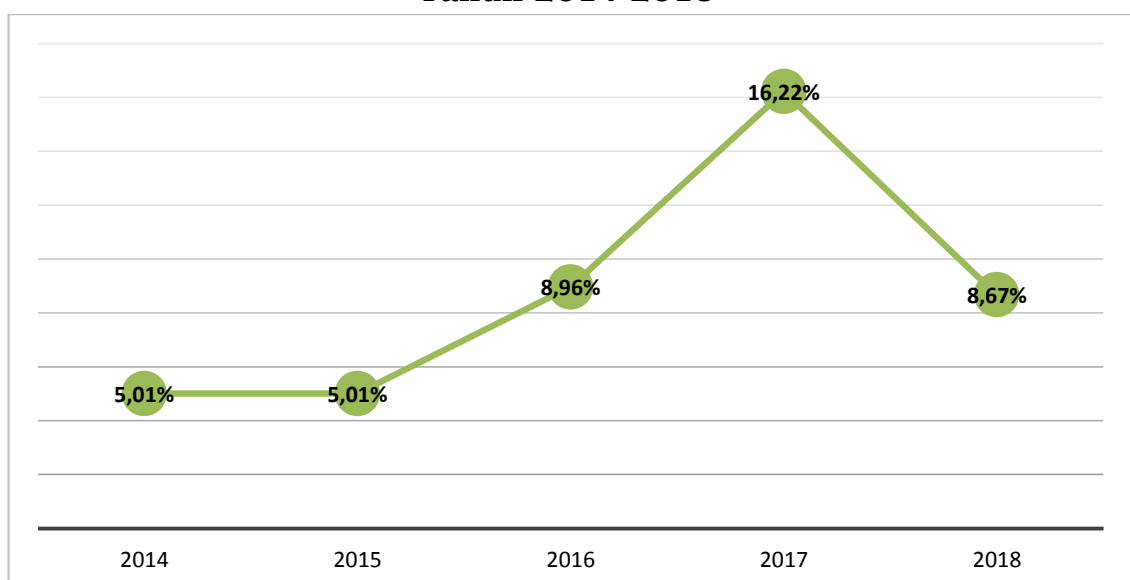
Grafik 3.6
Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap
Total Belanja Daerah Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2014-2018 terdapat permasalahan bahwa sisa lebih anggaran belanja pegawai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada Tahun 2018, sisa lebih anggaran Belanja Pegawai berkisar 8,69% dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran belanja pegawai belum dilakukan secara akurat.

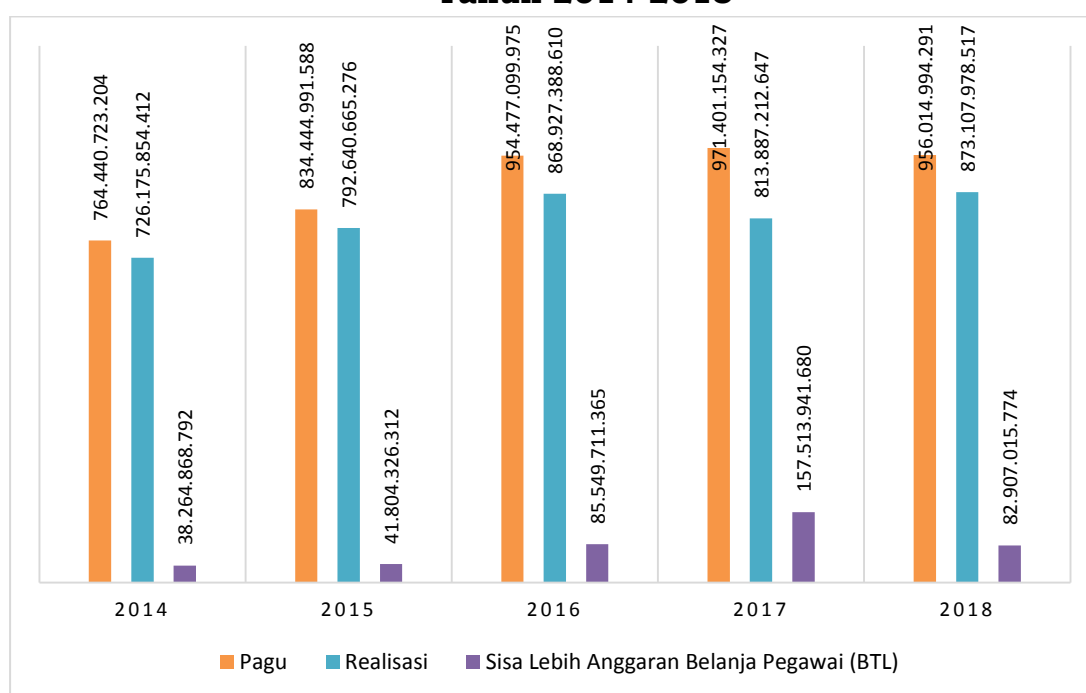
Grafik 3.7.
Persentase Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja
Tidak Langsung
Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Untuk menghindari kekurangakuratan perencanaan penganggaran belanja pegawai sudah seharusnya integrasi antara sistem infomasi/ data pegawai dan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan belanja pegawai perlu dilakukan. Berikut ini adalah gambaran perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2014-2018.

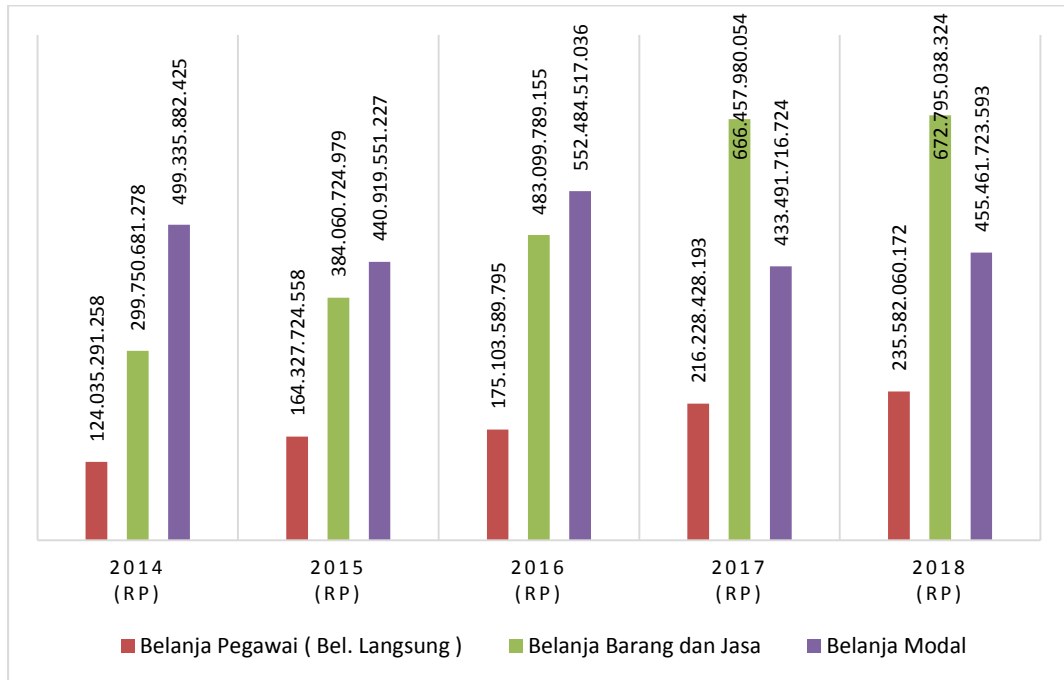
Grafik 3.8
Perbandingan pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengukur capaian prestasi kerja dari belanja langsung dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai. Belanja Langsung terdiri atas tiga komponen utama yang menjadi prioritas, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

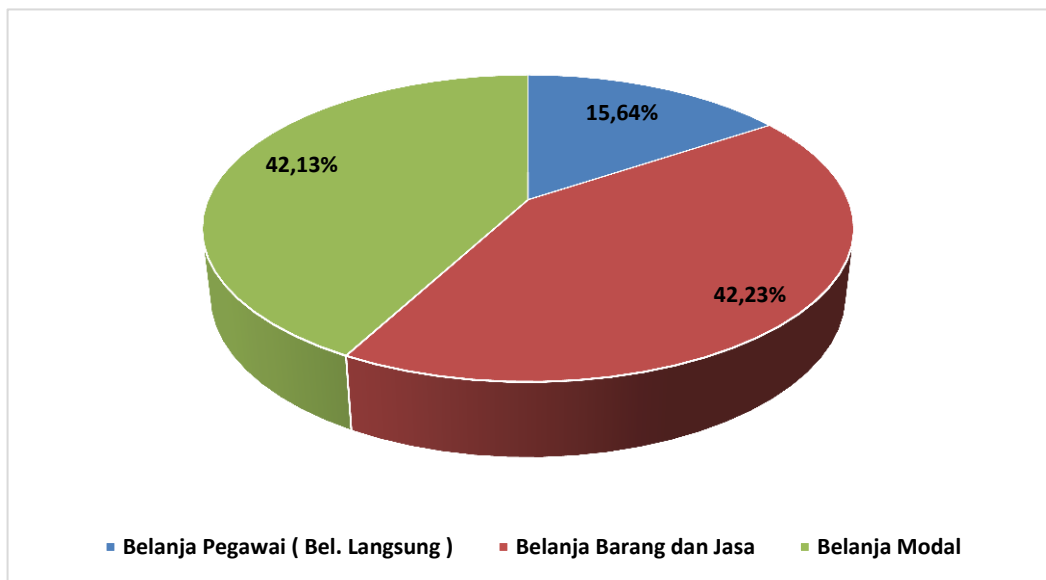
Grafik 3.9
Pertumbuhan Realisasi Belanja Langsung Daerah
Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Apabila dilihat pada Tabel 3.9. tentang Realisasi Belanja Langsung 2014-2018, terlihat bahwa proporsi belanja pegawai pada komponen belanja langsung masih cukup tinggi yaitu berkisar antara 13 – 17 % dari total Belanja Langsung, sementara proporsi Belanja Modal berkisar antara 33-54% dari Belanja langsung sedangkan proporsi Belanja Barang dan Jasa berkisar rata-rata 32-49% dari Belanja Langsung. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat kecenderungan penurunan proporsi belanja modal terhadap belanja langsung dari tahun 2014-2018. Sementara sebaliknya terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja barang dan jasa setiap tahunnya.

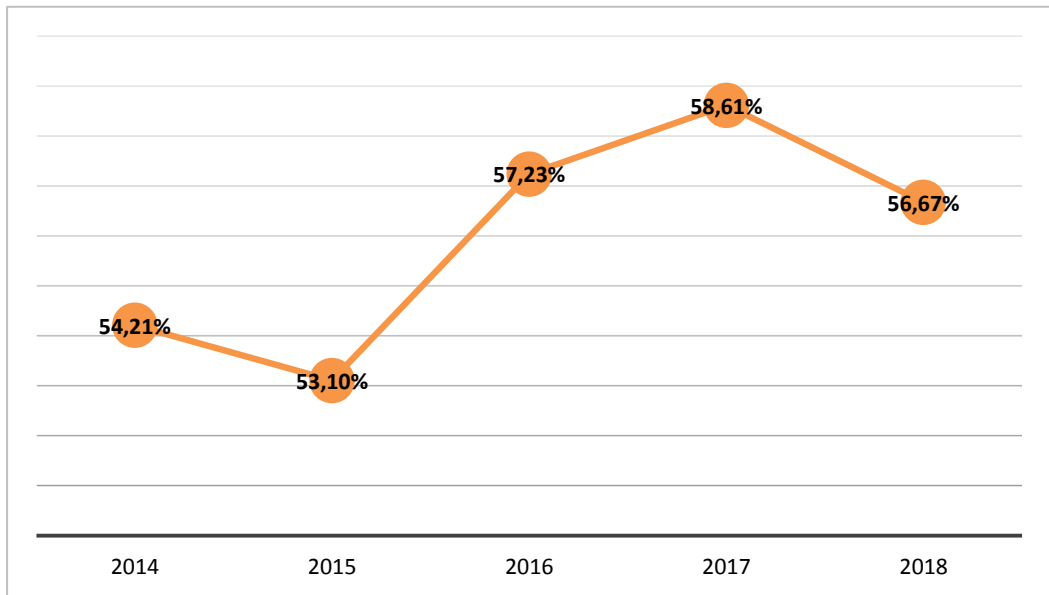
Grafik 3.10
Rata-Rata Perbandingan antara Komponen-Komponen Belanja
pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Apabila kita lihat tren realisasi belanja langsung dan realisasi total belanja daerah dari tahun 2014-2018, maka dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi belanja langsung terhadap total belanja daerah masih berkisar 55,97%. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi Belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah yang hanya berkisar 44,03%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan APBD Kota Bogor masih lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pegawai/aparatur. Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

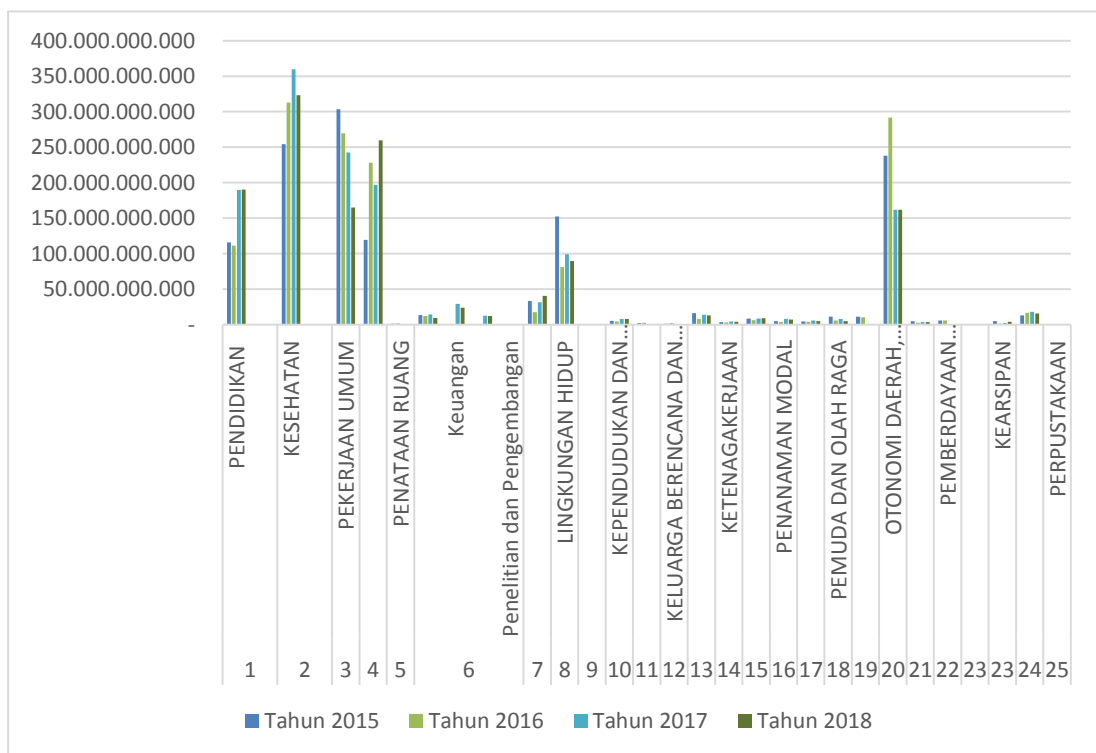
Grafik 3.11.
Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Berikut ini adalah tren pagu anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bogor, APBD Propinsi Jawa Barat maupun Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat Tahun 2015-2018 yang dialokasikan untuk setiap urusan pemerintahan :

Grafik 3.12.
Tren Pagu Anggaran Belanja Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2015-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2018

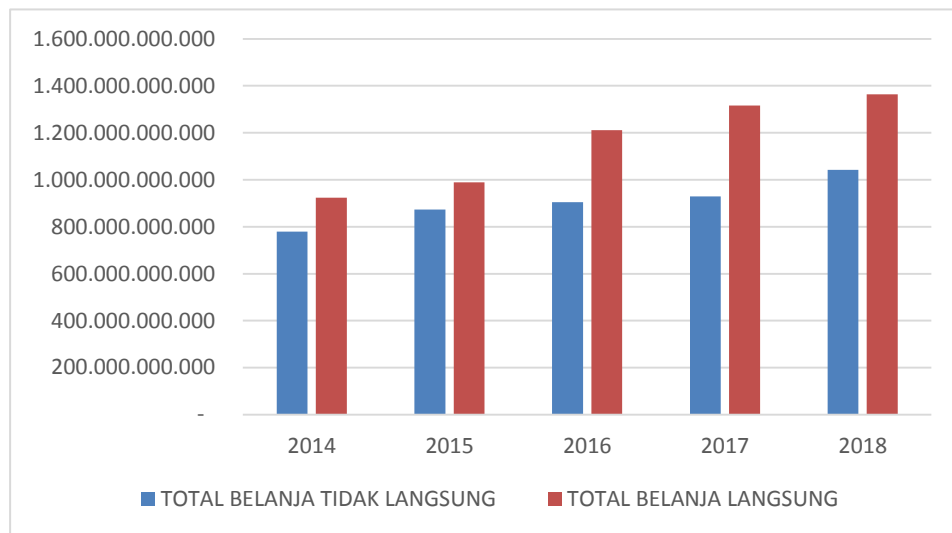
Tabel 3.2
Realisasi Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
terhadap Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Persentase Realisasi BTL terhadap Total Belanja Daerah	45.79%	46.90%	42.77%	41.39%	43.33%	44.03%
2	Persentase Realisasi BL terhadap Total Belanja Daerah	54.21%	53.10%	57.23%	58.61%	56.67%	55.97%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

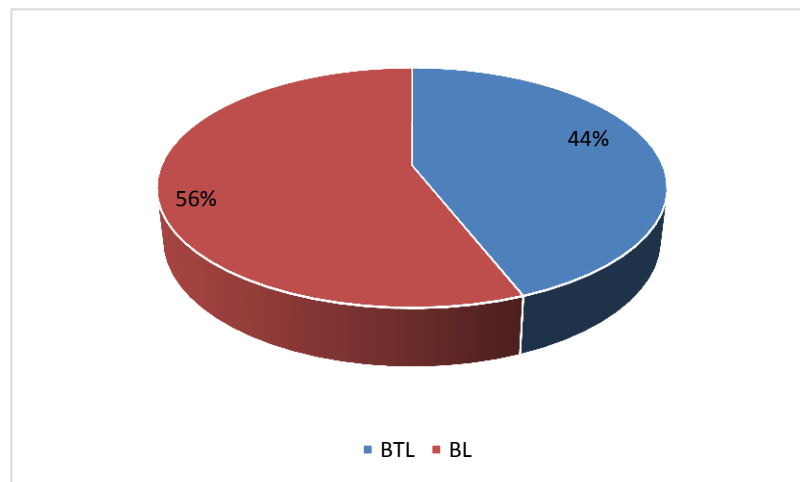
Apabila dilihat pada Tabel 3.2 tentang realisasi Belanja Kota Bogor tahun 2014-2018, terlihat bahwa rata-rata rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 56 % : 44%. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan publik yang telah direncanakan dalam bentuk pelaksanaan urusan dan program pembangunan lebih besar dibanding kebutuhan lainnya berupa belanja gaji pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan belanja tidak terduga. Tren yang menggambarkan rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2014-2017 tergambar pada diagram berikut ini :

Grafik 3.13
Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Grafik 3.14
Persentase Komposisi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Sementara apabila dianalisa lebih detail lagi rasio antara total belanja pegawai yang terdapat dalam komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan belanja lainnya yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan publik/ kebutuhan non pegawai adalah berkisar 48-49% untuk belanja pegawai dan 51-52% untuk belanja pemenuhan kebutuhan publik. Dan terlihat kecenderungannya dari tahun ke tahun terdapat penurunan proporsi belanja pegawai dibanding belanja pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap prioritas pemenuhan kebutuhan publik.

1.1.2 NERACA DAERAH

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Di sisi neraca daerah, total aset pemerintah Kota Bogor yang tercatat pada tahun 2013 sebesar Rp 5.438.033.205.130,55 Aset yang paling besar peningkatannya adalah pada aset tanah yang mengalami peningkatan sebesar Rp 250.572.365.606 atau mengalami peningkatan sebesar 9,52 persen dibanding tahun 2012.

Berikut ini adalah perkembangan kondisi neraca daerah dalam kurun waktu 2014-2018 yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Kondisi Neraca Daerah Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (audited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
11	ASET LANCAR						
11101	Kas di Kas Daerah	289,565,303,000	324,780,908,786	288,028,518,947	300,431,310,181	241,211,999,533	(2.91)
11102	Kas di Bendahara Penerimaan	22,250,000	2,985,000	8,522,500	5,760,000		(6.70)
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,649,800,802	309,243,753	137,561,674	694,504,515	549,961,149	47.40
11104	Kas di BLUD	5,131,020,928	5,442,572,901	2,898,752,122	14,350,183,959	1,854,238,462	53.46
11105	Kas di Bendahara FKTP	3,484,964,453	10,624,410,125	14,393,911,340	14,442,219,555	12,656,415,139	45.66
11106	Kas Lainnya	79,101,520	92,212,151	152,340	9,722,841	173,631,664	1,576.98
11107	Kas di Bendahara BOS Pusat		2,610,967,858	1,383,988,995	553,021,703	417,961,220	-
11108	Setara Kas						
112	Investasi Jangka Pendek						

NO	URAIAN	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (audited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
113	Piutang Pendapatan	201,683,610,623	234,263,525,081	228,710,549,332	266,562,258,467	290,103,493,941	7.83
114	Piutang Lainnya	178,881,402,224	196,077,941,115	217,830,975,789	156,355,315,478	192,470,717,640	3.12
115	Penyisihan Piutang	0	(134,562,670,943)	(210,479,082,190)	(150,642,870,026)	(168,778,975,776)	-
116	Beban Dibayar Dimuka	0	543,537,332	624,085,970	628,357,288	540,978,634	-
117	Persediaan	21,343,218,214	26,475,086,576	21,633,622,895	25,902,278,249	26,708,887,745	5.72
11801	R/K SKPD						
JUMLAH ASET LANCAR		703,840,671,765	666,660,719,735	565,171,559,713	629,292,062,210	597,909,309,350	(2.83)
12	INVESTASI JANGKA PANJANG						
121	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
12101	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya						
12102	Investasi dalam Obligasi						
12103	Investasi dalam Proyek Pembangunan						
12104	Dana Bergulir	63,742,100	63,742,100	63,742,100	63,742,100	63,742,100	0.00
12105	Deposito Jangka Panjang						
12106	Investasi Non Permanen Lainnya						

NO	URAIAN	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (audited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
122	Investasi Jangka Panjang Permanen						
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	377,200,142,940	414,813,899,454	480,145,325,043	495,500,265,059	504,092,523,552	6.13
12202	Investasi Permanen Lainnya						
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		377,263,885,040	414,877,641,554	480,209,067,143	495,564,007,159	504,156,265,652	6.13
13	ASET TETAP						
131	Tanah	2,966,049,533,007	3,798,390,467,269	4,777,034,955,270	4,708,114,761,107	4,749,339,012,962	10.65
132	Peralatan dan Mesin	373,664,663,395	373,807,735,084	482,687,944,551	526,574,545,751	627,792,307,268	11.50
133	Gedung dan Bangunan	641,444,980,505	690,549,117,290	811,933,746,981	796,074,327,217	1,064,887,956,866	11.41
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,013,583,750,943	1,239,288,612,328	1,599,063,331,888	1,781,248,778,912	1,904,629,267,613	13.92
135	Aset Tetap Lainnya	18,348,602,332	19,566,866,046	15,238,592,504	13,835,356,165	9,114,028,408	(11.76)
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	10,438,201,945	20,144,534,718	62,721,423,609	114,545,306,676	58,417,911,301	67.59
137	Akumulasi Penyusutan	0	(927,377,840,579)	(1,302,449,283,874)	(1,355,566,488,044)	(1,608,771,628,637)	-
JUMLAH ASET TETAP		5,023,529,732,127	5,214,369,492,155	6,446,230,710,929	6,584,826,587,784	6,805,408,855,781	6.58
14	DANA CADANGAN						
141	Dana Cadangan						
JUMLAH DANA CADANGAN							
15	ASET LAINNYA						
151	Tagihan Jangka Panjang	1,884,686,569	1,835,834,279	1,357,186,175	3,477,148,757	3,350,792,857	24.78

NO	URAIAN	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (audited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	127,572,732,768	127,572,732,768	127,572,732,768	127,572,732,768	52,526,184,310	(11.77)
153	Aset Tak Berwujud	8,641,753,030	11,092,553,493	13,100,114,798	13,038,019,187	12,720,633,782	8.71
154	Aset Lain-lain	20,696,537,766	134,027,089,084	132,281,197,032	150,808,465,200	168,763,333,169	114.44
155	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud				(10,680,822,599)	(10,831,140,342)	-
JUMLAH ASET LAINNYA		158,795,710,133	274,528,209,624	274,311,230,773	284,215,543,312	226,529,803,775	11.22
JUMLAH ASET		6,263,429,999,065	6,570,436,063,068	7,765,922,568,559	7,993,898,200,466	8,134,004,234,560	5.56
2	KEWAJIBAN						
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,003,003,979	1,575,717,459	727,852,898	463,359,376	118,059,579	(21.51)
212	Utang Bunga					0	
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2,333,333,328	0	1,708,622,235	103,477,778	0	-
214	Pendapatan Diterima Dimuka	0	3,477,777,580	23,401,719,615	517,737,454	1,657,035,105	-
215	Utang Beban	0	12,334,600,489	6,050,701,870	7,696,678,003	7,843,210,475	-
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	14,244,219,020	52,861,101	30,552,980,707	9,683,558,774	23,424,617,827	11,534.51
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		17,580,556,327	17,440,956,629	62,441,877,325	18,464,811,385	33,042,922,986	53.15
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
221	Utang Dalam Negeri	89,745,233,774	89,297,790,559	85,255,834,996	85,013,875,740	82,271,492,651	(1.71)

NO	URAIAN	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (audited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
222	Utang Jangka Panjang Lainnya						
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		89,745,233,774	89,297,790,559	85,255,834,996	85,013,875,740	82,271,492,651	(1.71)
JUMLAH KEWAJIBAN		107,325,790,101	106,738,747,188	147,697,712,321	103,478,687,125	115,314,415,637	3.87
3	EKUITAS						
311	Ekuitas	6,156,104,208,964	6,463,697,315,880	7,618,224,856,238	7,890,419,513,341	8,018,689,818,923	5.61
JUMLAH EKUITAS		6,156,104,208,964	6,463,697,315,880	7,618,224,856,238	7,890,419,513,341	8,018,689,818,923	5.61
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6,263,429,999,065	6,570,436,063,068	7,765,922,568,559	7,993,898,200,466	8,134,004,234,560	5.56

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Tabel 3.4

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bogor Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2014			TAHUN ANGGARAN 2015			TAHUN ANGGARAN 2016			TAHUN ANGGARAN 2017			TAHUN ANGGARAN 2018		
		ANGGARAN	REALISASI	Proporsi realisasi belanja thd belanja	ANGGARAN	REALISASI	Proporsi realisasi belanja thd belanja	ANGGARAN	REALISASI	Proporsi realisasi belanja thd belanja	ANGGARAN	REALISASI	Proporsi realisasi belanja thd belanja	ANGGARAN	REALISASI	Proporsi realisasi belanja thd belanja
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
2.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	764,440,723,204	726,175,854,412	42.64%	834,444,991,588	792,640,665,276	42.55%	954,477,099,975	868,927,388,610	41.08%	971,401,154,327	813,887,212,647	36.24%	956,014,994,292	873,107,978,517	36.28%
2.1.2	Belanja Bunga	6,603,600,000	352,457,562	0.02%	4,952,483,331	2,415,905,429	0.13%	4,938,951,956	2,646,198,572	0.13%	5,685,279,327	5,685,279,325	0.25%	7,000,000,000	6,598,058,978	0.27%
2.1.3	Belanja Subsidi		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%
2.1.4	Belanja Hibah	40,099,104,000	35,272,291,000	2.07%	46,687,048,729	42,891,089,240	2.30%	27,656,752,500	26,636,028,500	1.26%	81,832,872,400	75,813,412,400	3.38%	122,276,492,285	118,993,313,285	4.94%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	31,180,229,000	14,654,510,975	0.86%	57,070,197,500	30,872,505,105	1.66%	50,000,000	29,748,900	0.00%	31,518,018,840	28,383,948,000	1.26%	43,759,144,900	38,774,816,900	1.61%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	900,000,000	852,232,538	0.05%	1,207,251,155	999,621,220	0.05%	1,115,203,192	999,621,220	0.05%	6,960,762,926	3,371,939,614	0.15%	5,157,216,192	3,716,867,124	0.15%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7,759,147,281	2,533,275,000	0.15%	19,309,977,788	3,855,084,200	0.21%	23,255,577,341	5,370,006,482	0.25%	28,079,575,767	2,270,085,956	0.10%	19,876,006,034	1,557,079,950	0.06%
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	850,982,803,485	779,840,621,487	45.79%	963,671,950,091	873,674,870,470	46.90%	1,011,493,584,964	904,608,992,284	42.77%	1,125,477,663,587	929,411,877,942	41.39%	1,154,083,853,703	1,042,748,114,754	43.33%
2.2	BELANJA LANGSUNG			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
2.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	123,981,461,298	124,035,291,258	7.28%	178,638,138,090	164,327,724,558	8.82%	181,772,153,544	175,103,589,795	8.28%	230,978,702,104	216,228,428,193	9.63%	239,955,040,235	235,582,060,172	9.79%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	343,688,262,703	299,750,681,278	17.60%	481,022,426,081	384,060,724,979	20.62%	530,892,764,217	483,099,789,155	22.84%	733,911,053,849	666,457,980,054	29.68%	749,808,967,659	672,795,038,324	27.96%
2.2.3	Belanja Modal	674,174,836,139	499,335,882,425	29.32%	688,722,043,107	440,919,551,227	23.67%	701,582,651,180	552,484,517,036	26.12%	507,090,025,022	433,491,716,724	19.30%	512,432,788,564	455,461,723,593	18.93%
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,141,844,560,140	923,121,854,961	54.21%	1,348,382,607,278	989,308,000,764	53.10%	1,414,247,568,941	1,210,687,895,986	57.23%	1,471,979,780,975	1,316,178,124,971	58.61%	1,502,196,796,458	1,363,838,822,089	56.67%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,992,827,363,625	1,702,962,476,448	100.00%	2,312,054,557,369	1,862,982,871,234	100.00%	2,425,741,153,905	2,115,296,888,270	100.00%	2,597,457,444,562	2,245,590,002,913	100.00%	2,656,280,650,161	2,406,586,936,843	100.00%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Gambaran tentang realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bogor yang menginformasikan kebutuhan belanja aparatur selama tahun 2014-2018, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	628,667,475,086	683,220,310,370	710,723,908,975	466,850,472,154	460,118,149,976
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72,719,690,300	83,714,425,000	128,193,906,419	315,056,595,870	372,130,781,375
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,377,165,000	4,395,120,000	4,565,370,000	8,619,700,000	15,216,625,000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	17,176,262,666	19,390,598,280	22,655,139,708	22,536,365,039	19,127,250
B	Belanja Langsung					
1	Belanja Honorarium PNS**)	61,782,809,635	48,714,560,477	48,119,025,550	35,564,828,100	24,837,943,110
2	Belanja Uang Lembur**)	1,367,329,000	1,874,684,600	2,497,153,500	4,246,925,500	3,041,619,000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	87,000,000	142,250,000	-	113,000,000	112,800,000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	5,465,422,200	6,242,219,800	7,323,230,807	6,405,699,760	4,841,418,009
5	Belanja premi asuransi kesehatan	879,100,000	4,475,020,070	20,255,938,500	27,416,500,000	36,183,593,000
6	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	3,147,583,500	2,238,747,845	5,604,530,025	3,564,321,237	3,489,123,671
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1,006,016,300	1,327,686,550	1,354,797,400	1,637,617,870	2,352,855,815
8	Belanja perjalanan dinas**)	31,422,799,144	44,464,215,821	64,649,885,367	80,414,518,068	92,804,807,934
9	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	492,283,600,325	440,919,551,227	552,484,517,036	433,491,716,724	455,461,723,593
	TOTAL	1,320,382,253,156	1,341,119,390,040	1,568,427,403,287	1,405,918,260,322	1,470,610,567,733

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Gambaran tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Bogor yang menginformasikan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2014-2018, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	28,667,475,086.0	83,220,310,370.0	10,723,908,975.0	66,850,472,154.0	460,118,149,976.0	-4.61
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72,719,690,300.0	83,714,425,000.0	128,193,906,419.0	315,056,595,870.0	372,130,781,375.0	46.43
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,377,165,000.0	4,395,120,000.0	4,565,370,000.0	8,619,700,000.0	15,216,625,000.0	33.92
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	17,176,262,666.0	19,390,598,280.0	22,655,139,708.0	22,536,365,039.0	19,127,250.0	-14.14
B	Pembiayaan Pengeluaran						
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	8,700,000,000	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	54,934,179,256	10,921,110,161	71,917,632,000	19,234,000,000	-	61.03
3	Pembayaran Pokok Utang	777,777,776	-	-	-	45,523,415,589	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	500,000,000	936,048,000	936,048,000	-	-	-
							-
	Total (A+B)	779,152,550,084.0	802,577,611,811.0	938,992,005,102.0	832,297,133,063.0	901,708,099,190.0	3.40

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh pendanaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan dicerminkan dari proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja keseluruhan dan proporsi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Tabel 3.7

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2018	1,470,610,567,733	2,444,795,700,609	60.15%
2	Tahun Anggaran 2017	1,405,918,260,322	2,038,979,286,716	68.95%
3	Tahun Anggaran 2016	1,568,427,403,287	2,188,150,568,270	71.68%
4	Tahun Anggaran 2015	1,341,119,390,040	1,874,840,029,395	71.53%
5	Tahun Anggaran 2014	1,320,382,253,156	1,759,174,433,480	75.06%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan,

realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya.

Tabel 3.8

Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,757,697,381,840	1,913,210,404,036	2,152,370,082,886	2,289,359,362,675	2,328,703,432,669
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,702,962,476,448	1,862,982,871,234	2,115,296,888,270	2,245,590,002,913	2,406,586,936,843
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	56,211,957,032	11,857,158,161	72,853,680,000	19,234,000,000	54,223,415,589
A	Defisit riil	(1,477,051,640)	38,370,374,641	(35,780,485,384)	24,535,359,762	(132,106,919,763)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	294,245,909,954	300,704,906,314	339,661,575,600	304,817,138,216	330,288,545,978
5	Pencairan Dana Cadangan					
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	7,000,000,000	0	0	0	55,640,573,400
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	936,048,000	500,000,000	936,048,000	936,048,000	2,742,383,089
9	Penerimaan Piutang Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	302,181,957,954	301,204,906,314	340,597,623,600	305,753,186,216	388,671,502,467
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	300,704,906,314	339,575,280,955	304,817,138,216	330,288,545,978	256,564,582,704

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan

yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan

Grafik 3.15.
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

A. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 persen agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Proyeksi pendapatan dan belanja Kota Bogor tahun 2020-2024 melihat dari tren realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir dengan memperhitungkan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan aspek-aspek lainnya, disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	746,283,073,756	791,000,000,000	878,500,000,000	976,000,000,000	1,087,000,000,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	54,652,762,400	43,456,221,010	43,882,205,885	44,307,436,864	44,756,246,858
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36,044,034,570	52,844,433,499	64,380,872,224	65,125,883,135	65,934,801,092
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	253,728,493,231	240,466,523,506	254,612,785,701	263,730,847,897	267,781,588,771
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,090,708,363,957	1,127,767,178,015	1,241,375,863,810	1,349,164,167,896	1,465,472,636,721
1.2	DANA PERIMBANGAN					
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	98,922,509,977	100,033,892,767	101,145,275,557	102,256,658,347	103,368,041,138
1.2.2	Dana Alokasi Umum	849,969,036,585	867,491,441,897	885,013,847,210	902,536,252,522	920,058,657,835
1.2.3	Dana Alokasi Khusus					
	Transfer Pemerintah Provinsi					
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	948,891,546,562	967,525,334,664	986,159,122,767	1,004,792,910,869	1,023,426,698,973
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
1.3.1	Pendapatan Hibah	99,105,548,855	79,791,736,536	79,791,736,536	79,791,736,536	79,791,736,536
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	260,913,746,977	281,200,174,533	301,486,602,089	321,773,029,645	342,059,457,201

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya					
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	370,019,295,832	370,991,911,069	391,278,338,625	411,564,766,181	431,851,193,737
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,409,619,206,351	2,466,284,423,748	2,618,813,325,202	2,765,521,844,946	2,920,750,529,431
2	BELANJA DAERAH					
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	1,055,816,245,067	1,085,024,186,261	1,115,243,579,491	1,146,527,836,409	1,178,934,516,494
2.1.2	Belanja Bunga	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	73,000,000,000	48,823,090,105	51,505,219,435	54,115,558,931	56,918,738,478
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	59,964,767,000	60,467,889,640	63,789,733,874	67,022,665,674	70,494,431,822
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	9,655,750,907	10,052,013,904	10,604,228,056	11,141,661,653	11,718,798,408
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,206,551,966,166	1,212,482,383,102	1,249,257,964,049	1,286,922,925,859	1,326,181,688,394

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
2.2	BELANJA LANGSUNG					
2.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	235,568,646,482	239,880,104,371	253,058,079,430	265,883,333,001	279,656,058,179
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	709,648,730,708	722,636,964,348	762,335,512,579	800,971,490,047	842,461,718,423
2.2.3	Belanja Modal	483,801,682,530	492,656,386,296	519,720,796,611	546,060,801,315	574,346,686,188
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,391,664,506,051	1,433,287,535,108	1,541,859,106,170	1,645,650,936,619	1,758,299,153,043
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,598,216,472,217	2,645,769,918,210	2,791,117,070,219	2,932,573,862,478	3,084,480,841,437
	SURPLUS / (DEFISIT)	(188,597,265,866)	(179,485,494,462)	(172,303,745,017)	(167,052,017,532)	(163,730,312,006)
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	213,597,265,866	204,485,494,462	197,303,745,017	192,052,017,532	188,730,312,006
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.1.7	Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	219,094,298,124	209,982,526,720	202,800,777,275	197,549,049,790	194,227,344,264
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	30,497,032,258	30,497,032,258	30,497,032,258	30,497,032,258	30,497,032,258
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	188,597,265,866	179,485,494,462	172,303,745,017	167,052,017,532	163,730,312,006
	PEMBIAYAAN NETO					
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor

PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.10

Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Bogor Tahun 2020-2024

URAIAN	PROYEKSI				
	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	213,597,265,866	204,485,494,462	197,303,745,017	192,052,017,532	188,730,312,006

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor

2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib Dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2020 - 2024 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2014-2018, sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3.11**Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Kota Bogor Tahun 2020-2024**

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	1,055,816,245,067	1,085,024,186,261	1,115,243,579,491	1,146,527,836,409	1,178,934,516,494
2	Belanja Bunga	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192
4	Belanja Hibah	73,000,000,000	48,823,090,105	51,505,219,435	54,115,558,931	56,918,738,478
5	Belanja Bantuan Sosial	59,964,767,000	60,467,889,640	63,789,733,874	67,022,665,674	70,494,431,822
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
6	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
7	Pembayaran Pokok Utang	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258
	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama	1,227,393,247,517	1,232,927,401,455	1,269,150,768,250	1,306,278,296,464	1,344,959,922,244

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor

3. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.12

Tabel 3.12 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan	2,409,619,206,351	2,466,284,423,748	2,618,813,325,202	2,765,521,844,946	2,920,750,529,431
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	213,597,265,866	204,485,494,462	197,303,745,017	192,052,017,532	188,730,312,006
	Total penerimaan	2,623,216,472,217	2,670,769,918,210	2,816,117,070,219	2,957,573,862,478	3,109,480,841,437
	Dikurangi:					
3	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama	1,227,393,247,517	1,232,927,401,455	1,269,150,768,250	1,306,278,296,464	1,344,959,922,244
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	1,395,823,224,700	1,437,842,516,754	1,546,966,301,968	1,651,295,566,014	1,764,520,919,192

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor

KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.18.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhannya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung operasional Perangkat Daerah dan pemenuhan pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pencapaian target SPM urusan wajib pelayanan dasar.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah termasuk janji janji politis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung yang wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku

Tabel 3.13

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bogor

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	1,395,823,224,700	1,437,842,516,754	1,546,966,301,968	1,651,295,566,014	1,764,520,919,192
2	Prioritas 1	390,656,627,146	479,817,809,654	568,636,420,113	648,713,972,880	627,513,131,707
3	Prioritas 2	794,499,772,473	771,969,872,058	795,756,200,759	787,929,506,800	923,093,493,181
4	Prioritas 3	210,666,825,081	186,054,835,041	182,573,681,096	214,652,086,333	213,914,294,305

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor

3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Bogor dan terbatasnya sumber – sumber penerimaan konvensional mendorong pemerintah Kota Bogor untuk mencari alternative pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative pembiayaan pembangunan diantaranya : APBN (Dana Transfer), APBD Provinsi, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Sumber Pendanaan Lainnya (PHLN & Obligasi).

3.4.1. APBN (Dana Transfer)

Dana APBN yang masuk ke Pemerintah daerah terdiri dari dana: Transfer ke Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah, dan Dana Insentif Daerah (DID), serta Tambahan DAU untuk dana Kelurahan.

Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bogor agar pemanfaatan Dana Transfer di daerah dapat terwujud di antaranya :

Pertama, Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Kedua, DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. "Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas.

Ketiga adalah pemberian dana insentif kepada daerah untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, dan pelayanan pemerintahan umum.

Keempat, Tambahan Dana Alokasi Umum untuk dana kelurahan diarahkan untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3.4.2 Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya bersumber dari pendanaan Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah Lainnya.

1. Dana APBD Provinsi yang masuk ke Pemerintah Daerah terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.
2. Dana dari Provinsi DKI Jakarta yang masuk ke Pemerintah Daerah terdiri dari dana Bantuan Keuangan dan atau hibah dari Provinsi DKI Jakarta

3.4.3 Peran Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Dalam Penganggaran Pembangunan Daerah

Sumber pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 selain berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud diatas, potensi pendapatan daerah juga berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, dan lingkungan. Implementasi CSR/TJSLP di Kota Bogor disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Bogor.

Tabel 3.14
Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bogor

No	Nama Perusahaan	2016	2017	2018
1	Perumda BPR Bank Kota Bogor	104,282,000		183,900,000
2	Bank BJB Cabang Bogor		948,260,000	15,000,000
3	PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor			350,000,000
4	PT. Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom)/ Telkom Group	10,000,000	15,000,000	
5	PT. Metrasat (Telkom Group)	15,000,000	20,000,000	
6	The 101 Hotel Bogor Suryakencana	10,000,000	67,250,000	124,464,600
7	Universitas Ibn Khaldun Bogor	19,600,000	180,000,000	
8	PT. Bank Mandiri (Persero) TBK		2,969,300,000	
9	Yogya Bogor Junction		14,000,000	
10	Rumah Makan Gurih 7		13,920,000	
11	The Mirah Hotel (PT Mirah Segar)			197,226,850
12	PT Taspen (Persero)			242,500,000
13	PT Bogor Anggana Cendekia (Botani Square)			233,000,000
14	PT Adev Natural Indonesia			231,153,000
15	PT Baruna Bangun Sentosa (Damara Village)			16,500,000
16	Yayasan Inspirasi Anak Bangsa dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			300,000,000
17	PT Agricon			300,000,000
	TOTAL	158,882,000	4,227,730,000	2,193,744,450

Sumber : Bappeda Kota Bogor

Peran perusahaan/sector swasta dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada tahun 2019-2024 akan diarahkan untuk :

1. Pembangunan Sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan social melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
3. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
5. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
6. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
7. Sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang perencanaan pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui :

1. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kota Bogor
2. Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSLP.
4. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSLP.
5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSLP. Berdasarkan upaya-upaya diatas diharapkan adanya peningkatan mitra CSR Jawa Barat serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.

3.4.4 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan

menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).

2. Menjamin kualitas pelayanan karena *performance* diperjanjikan dalam kontrak.
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *Availability Payment/AP* Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam *debottlenecking*, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta *best practice* KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri

1. Kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika),
2. Kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan
3. Kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

3.4.5 Obligasi Daerah

Selama ini Pemerintah Daerah mengandalkan dana pemerintah berupa APBN, APBD I dan APBD II untuk membiayai pembangunan daerah. Perolehan sumber pembiayaan yang bersifat konvensional tersebut menyebabkan daerah memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dalam penyediaan infrastruktur. Oleh karenanya untuk percepatan pembangunan daerah diperlukan terobosan-terobosan untuk mencari alternative sumber-sumber pembiayaan lainnya. Penerbitan obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternative instrument pembiayaan pembangunan daerah yang menjadi inovasi Kepala Daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan yang akan berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond); Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis index bond yaitu Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan index tertentu dari nilai nominal.

3.4.5.1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN OBLIGASI DAERAH

1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
5. UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
6. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
9. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. PMK. No. 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah;
11. PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK No 111/PMK.07/2012 tentang Tatacara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;
12. Paket Peraturan Ketua Bapepam-LK terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah. (KEP-63/BL/2007, KEP-64/BL/2007, KEP-65/BL/2007, KEP-66/BL/2007, KEP-67/BL/2007 dan KEP-68/BL/2007).

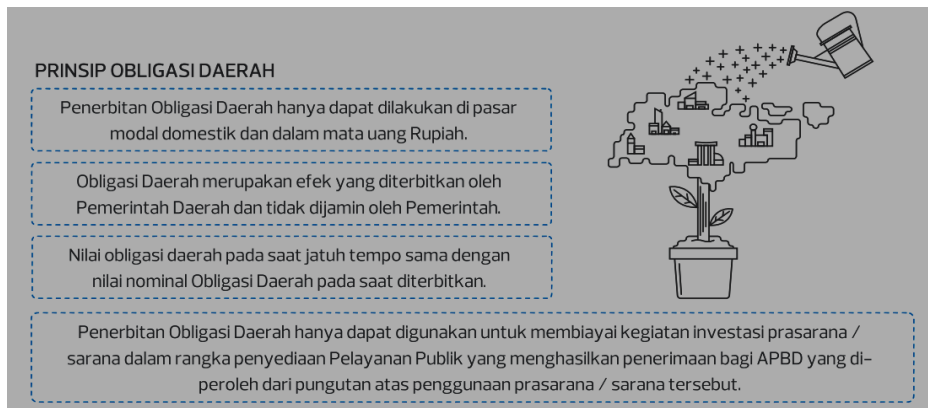
3.4.5.2 Prinsip Umum Penerbitan Obligasi Daerah

Ada 4 (empat) prinsip umum yang harus diperhatikan dalam penerbitan Obligasi Daerah yaitu:

3. Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
4. Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah.
5. Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
6. Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana/sarana dalam rangka

penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana/sarana tersebut.

Gambar 3.1
Prinsip Obligasi Daerah



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

3.4.5.3 Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah

Terdapat Tiga Tahapan yang harus dilalui Pemerintah Daerah dalam penerbitan Obligasi Daerah. Tahap tersebut meliputi persiapan penerbitan, tahapan penerbitan dan kewajiban pasca penerbitan. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

3.4.5.4 Rencana Program Pembangunan Infrastruktur Strategis Kota Bogor yang akan didorong melalui skema pembiayaan Obligasi Daerah Tahun 2020-2024

Dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur Kota Bogor 5 (lima) tahun ke depan, ada beberapa program pembangunan infrastruktur strategis yang sangat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat Kota Bogor, serta sekaligus berdampak pada peningkatan penerimaan bagi APBD Kota Bogor yang akan didorong melalui skema pembiayaan Obligasi daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Program Pembangunan Infrastruktur Strategis Kota Bogor 2020-2024 melalui Skema Pembiayaan Obligasi Daerah

No.	PROJECT	Lokasi	Rencana Anggaran (Rp.)
3.	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Kota Bogor	Rp.300.000.000.000,-
4.	Pembangunan Transportasi Berbasis Rel	Kota Bogor	Rp. 400.000.000.000,-
5.	Pembangunan Gedung RSUD Tahap III (4 Blok)	Kota Bogor	Rp. 449.973.490.000,-
1.	Pembangunan WTP Palasari 50 Liter/Detik, Reservoir Kapasitas 1000 M3, Jaringan Distribusi Utama	Kota Bogor	Rp. 16.000.000.000,-
2.	Pembangunan WTP Cikereteg 200 Liter/Detik, Reservoir Kapasitas 4000 M3, Jaringan Distribusi Utama	Kota Bogor	Rp. 68.000.000.000,-
TOTAL			Rp. 1.233.973.490.000,-

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bogor. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sementara isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kota Bogor. Pembangunan daerah Kota Bogor ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi, dan masalah keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah di Kota Bogor bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor; meningkatnya kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat.

Agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, pemerintah harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah

strategis yang saat ini masih menjadi kendala untuk mewujudkan Kota Bogor yang lebih baik. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Selanjutnya, hasil identifikasi potensi permasalahan tersebut dipetakan menjadi permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah. Permasalahan Pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Selanjutnya penyebab yang spesifik dari permasalahan pokok sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebagai permasalahan. Sementara, perumusan akar masalah dilakukan dengan mencari beberapa penyebab dari permasalahan yang lebih rinci.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kota Bogor 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, ada 4 permasalahan pokok yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bogor untuk mencapai tujuan akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yakni :

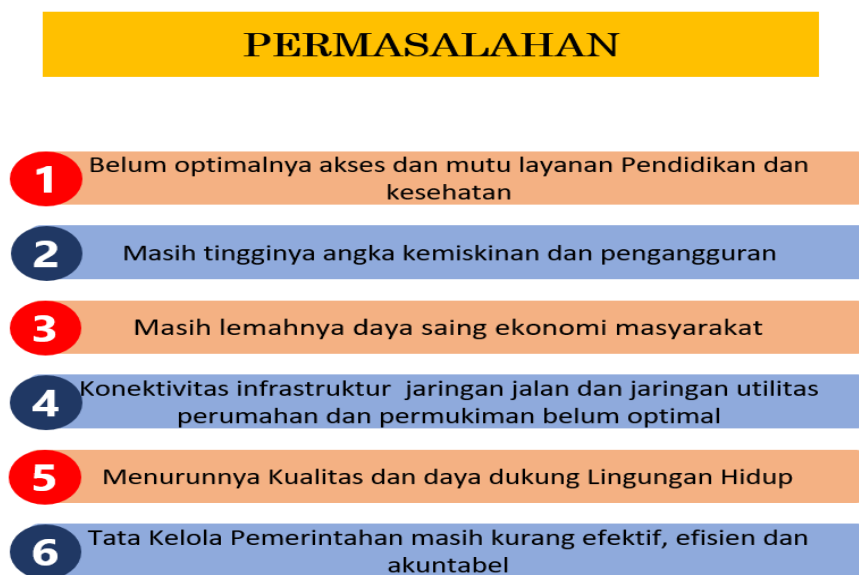
1. Permasalahan Pembangunan Manusia (IPM, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan gender, Perlindungan Sosial Masyarakat, dan Ketahanan Keluarga)
2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi (Laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat)
3. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan (Permasalahan Kapasitas dan kualitas infrastruktur dan Prasarana Sarana Utilitas permukiman, Permasalahan infrastruktur kebencanaan, Permasalahan konektivitas infrastruktur dan manajemen transportasi, serta Permasalahan Penataan Ruang dan pengelolaan lingkungan hidup)

4. Permasalahan Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (8 area perubahan dalam reformasi birokrasi).

Dari empat Permasalahan Pokok sebagaimana dimaksud diatas, ada enam masalah yang lebih rinci harus diselesaikan dalam periode tahun 2019-2024 yaitu :

Gambar 4.1

Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bogor 2019-2024



Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

Selanjutnya permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas akan diuraikan akar masalahnya berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

4.1.1 URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan menjadi permasalahan yang paling dominan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017, IPM Kota Bogor memang sudah berada diatas IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat, dimana IPM Kota Bogor adalah 75.16, sedangkan IPM Nasional 70.81 dan IPM Provinsi Jawa Barat 70,69. Meskipun demikian, kualitas SDM di Kota Bogor harus

tetap ditingkatkan mengingat SDM merupakan faktor penentu bagi pembangunan daerah agar menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi kota Bogor dalam urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Masih belum tuntasnya melek huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke Atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2014-2017. Capaian angka melek huruf Kota Bogor selalu mengalami trend peningkatan. Angka melek huruf di Kota Bogor pada tahun 2016 adalah sebesar 98.83 % dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 99,20%.

Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2016, tercatat bahwa 1 orang dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas masih buta huruf (1,17% penduduk Kota Bogor masih buta huruf). Dari angka tersebut, ditemukan perempuan yang buta huruf sebesar 2.22% atau 15 kali lipat dibandingkan laki-laki buta huruf yaitu sebesar 0,15%. Sementara persentase terbesar penduduk buta huruf di Kota Bogor justru berada pada kuintil 3 yaitu sebesar 2.84% dari penduduk di kuintil 3, sementara hanya 0.96% penduduk di kuintil 1 (penduduk miskin) yang buta huruf.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Kemampuan Membaca Dan Menulis

KARAKTERISTIK	HURUF LATIN	HURUF ARAB	HURUF LAINNYA	BUTA HURUF
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	99,59	62,61	5,14	0,15
Perempuan	96,93	64,28	4,46	2,22
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	98,03	56,47	3,41	0,96
Kuintil 2	98,36	64,10	4,54	0,97
Kuintil 3	96,40	74,29	2,51	2,84

KARAKTERISTIK	HURUF LATIN	HURUF ARAB	HURUF LAINNYA	BUTA HURUF
Kuintil 4	98,69	63,21	3,16	1,1
Kuintil 5	99,78	58,37	9,99	NA
Kota Bogor	98,27	63,44	4,80	1,17

Sumber : BPS, Tahun 2018

Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun cenderung tidak terlalu besar, hal ini disebabkan karena capaian kinerja sudah mendekati 100%. Walaupun demikian, di tahun 2017 masih ada masyarakat Kota Bogor yang buta huruf (0,8%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

2. Masih adanya penduduk miskin usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah (0.3%)

Sekitar 26,88% penduduk Kota Bogor usia 7-24 tahun sudah tidak bersekolah lagi. Kondisi ini menjadi salah satu potensi penyumbang angka pengangguran terbuka di Kota Bogor. Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2017, tercatat 27 dari 100 penduduk berusia 7-24 tahun sudah tidak bersekolah lagi. Sementara apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan, ternyata persentase laki-laki usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi lebih besar (27,53%) dibanding persentase perempuan usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi (26,19%). Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan persentase Penduduk usia 7-24 tahun menurut Karakteristik dan status pendidikan, 2017 (Statisik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2017).

Tabel 4.2
Penduduk Kota Bogor Usia 7-24 Tahun Berdasarkan Status
Bersekolah

KARAKTERISTIK	TIDAK /BELUM PERNAH BERSEKO LAH	TIDAK/BELUM PERNAH BERSEKOLAH			TIDAK BERSEKO LAH LAGI	JUMLAH
		SD/ SEDE RAJAT	SMP/ SEDER AJAT	SMA/ SEDER AJAT		
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	0,28	32,59	14,93	24,68	27,53	100,00
Perempuan	0,32	29,69	16,08	27,71	26,19	100,00
Kuintil Pengeluaran						
Kuintil 1	0,64	37,38	18,58	14,54	28,86	100,00
Kuintil 2	0,64	32,66	10,15	28,07	28,48	100,00
Kuintil 3		33,90	18,08	24,28	23,75	100,00
Kuintil 4		26,10	12,36	29,22	32,32	100,00
Kuintil 5		22,70	18,91	39,69	18,70	100,00
Kota Bogor	0,30	31,18	15,49	26,16	26,88	100,00

Sumber : BPS, 2018

- Angka Partisipasi Sekolah Penduduk miskin usia 5-6 Tahun masih sangat rendah (APS PAUD)

Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2017, tercatat Angka Partisipasi sekolah anak usia 5-6 tahun pada rumah tangga miskin (kuintil 1 dan Kuintil 2) masih sangat rendah yaitu < 50%.

- Angka Partisipasi Sekolah Penduduk miskin usia 16-18 Tahun masih rendah (APS SMA)

Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2017, tercatat Angka Partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun pada rumah tangga miskin terutama di kuintil 1 masih sangat rendah yaitu < 50% dan di Kuintil berkisar 66.44%.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017 (Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2017).

Tabel 4.3**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017**

KARAKTERISTIK	5 - 6 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun	16 - 18 Tahun
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	20,63	NA	95,95	68,46
Perempuan	25,87	NA	94,54	77,14
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	34,63	NA	91,10	41,38
Kuintil 2	26,29	NA	95,41	66,44
Kuintil 3	31,32	NA	94,79	80,97
Kuintil 4	NA	NA	99,05	80,39
Kuintil 5	NA	NA	NA	NA
Kota Bogor	23,39	NA	95,22	72,56

Sumber : BPS Kota Bogor, 2018

5. Mutu/kualitas anak didik masih belum menunjukkan tingkat daya saing siswa yang tinggi.

Hal ini dapat dilihat dari tren rata-rata nilai hasil Ujian Nasional siswa SMP dan SD masih belum sesuai dengan yang telah ditargetkan.

6. Pendidikan karakter sejak usia dini masih belum mampu secara optimal mengantisipasi pengaruh globalisasi.

Adapun akar masalah dari kondisi permasalahan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. Belum meratanya mutu/kualitas layanan pendidikan
2. Belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal
3. Belum terpenuhinya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik/guru sesuai dengan standar
4. Kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara belum optimal
5. Belum optimalnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya untuk pendidikan nonformal; Konsep *link and match* antara dunia pendidikan dengan lapangan pekerjaan masih belum menjadi salah satu target pembelajaran terutama untuk pendidikan nonformal;

6. Pendidikan karakter di sekolah belum mampu secara efektif mengimbangi Kecepatan perubahan lingkungan sebagai dampak globalisasi
7. Ketidakberdayaan penduduk miskin dalam mengakses pendidikan.
8. Masih belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Bogor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Angka Kesakitan yang masih cukup tinggi

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya). Apabila dilihat dari data statistik kesehatan berdasarkan gender terlihat bahwa angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibanding dengan angka kesakitan laki-laki. Sementara apabila dilihat berdasarkan tingkat kesejahteraan, angka kesakitan penduduk di kuintil 5 (penduduk dengan tingkat kesejahteraan tinggi) ternyata lebih besar dibanding dengan angka kesakitan penduduk miskin. Hal ini kemungkinan besar dipicu oleh makin meningkatnya gangguan penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh pola hidup dan konsumsi makanan yang tidak sehat. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kondisi angka kesakitan di kota Bogor tahun 2017 (berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat, BPS, 2017).

Tabel 4.4
Angka Kesakitan Kota Bogor Tahun 2017

KARAKTERISTIK	ANGKA KESAKITAN	RATA-RATA LAMA SAKIT (HARI)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	13,36	5,33
Perempuan	15,62	5,08
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	14,33	6,52
Kuintil 2	13,82	5,49
Kuintil 3	14,85	5,99
Kuintil 4	14,17	3,68
Kuintil 5	15,2	4,30
Kota Bogor	14,47	5,20

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2018

2. Kasus BBLR masih cukup tinggi yaitu sekitar 19,88%

Dari angka tersebut kasus BBLR paling banyak terjadi pada kelompok masyarakat miskin (kuintil 1) dengan persentase hampir 32,93%. Berikut ini adalah data statistik berdasarkan hasil survey BPS tahun 2017.

Tabel 4.5
Persentase Bayi Lahir Berdasarkan Berat Badan Saat Lahir

KARAKTERISTIK	< 2,5 KG	≥ 2,5 KG	TIDAK DITIMBANG / TIDAK TAHU	JUMLAH
Jenis Kelamin KRT				
Laki-Laki	19,72	78,17	NA	100,00
Perempuan	23,96	NA		100,00
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	32,93	67,07		100,00
Kuintil 2	NA	77,03	NA	100,00
Kuintil 3	NA	89,07		100,00
Kuintil 4	NA	91,78		100,00
Kuintil 5	30,43	69,57		100,00
Pendidikan Tertinggi KRT				
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	NA	80,31		100,00
SD Dan Sederajat	NA	70,78		100,00
SMP Dan Sederajat	NA	76,44		100,00
SMA Ke Atas	14,82	81,40	NA	100,00
Kota Bogor	19,88	78,09	NA	100,00

Sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2018

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menyebutkan bahwa persentase kasus BBLR terhadap seluruh kasus komplikasi

pada bayi baru lahir memang terus menurun tetapi tingkat penurunannya belum signifikan. Selain kasus BBLR, kasus-kasus lainnya yang berpotensi menjadi pemicu kematian bayi adalah kasus asfiksia pada bayi baru lahir, kasus penumenonia pada bayi, dan kasus diare pada bayi. Berikut ini adalah Data kasus-kasus kesehatan yang berpotensi memicu kematian pada bayi yang terjadi di Kota Bogor pada tahun 2015-2018 :

Tabel 4.6

Kasus Kesehatan Yang Berpotensi Memicu Kematian Pada Bayi

Tahun	2015	2016	2017	s.d. Oktober 2018
Persentase Kasus BBLR	19.8	18	16.9	17.2
Persentase Kasus Asfiksia	5.8	3	4.7	5.3
Kasus Kelainan Kongenital	2.9	4	4.7	2.9
Jumlah Kematian Bayi karena Diare per 1000 kelahiran	1	0	2	
Jumlah Kematian Bayi karena pneumonia per 1000 kelahiran	2	3	4	

Sumber : Laporan Evaluasi Renstra Dinkes, 2018

3. Permasalahan Status Gizi Bayi Dan Balita.

Berikut ini adalah beberapa data permasalahan terkait gizi bayi dan balita berdasarkan hasil pemantauan dinas kesehatan tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Data Permasalahan Terkait Gizi Bayi Dan Balita 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	s.d. Oktober 2018
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (Under weight)	5.78	5.62	5.72	
Persentase Balita Wasting (kurus dan kurus sekali)	2.57	2.44	2.38	
Persentase stunting (Balita Pendek dan pendek sekali)	8.62	7.62	6.58	

Sumber : Data Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan, 2018

Permasalahan tersebut diatas, antara lain dipicu karena asupan makanan bayi sejak dalam kandungan dan setelah lahir masih belum optimal. Hal ini dapat dipicu karena masih adanya Ibu Hamil yang mengalami Kekurangan Energi kronik (KEK) dan atau menderita anemia, serta masih rendahnya kualitas pemberian ASI pada bayi. Data-data yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 4.8

Penyebab Masalah Gizi Pada Bayi Dan Balita Tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	s.d. Oktober 2018
Persentase Ibu Hamil KEK	5.4	6.9	5.9	4.41
Persentase Ibu Hamil Anemia	8.7	11	15	7.85
Persentase Pemberian ASI Eksklusif	53.7	49.5	49.5	38.18
Persentase bayi baru lahir mendapatkan layanan Insiasi Menyusu Dini (IMD)		53.6	64.8	

Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2018

BPS mencatat pada tahun 2017, baru 86.16 % penduduk berusia 0-23 bulan yang mendapatkan ASI. Rata-rata bayi pada penduduk miskin dan rentan miskin (kuintil 1 dan kuintil 2) hanya diberikan ASI selama 11 bulan sementara pada penduduk di kuintil 3-5 sudah lebih dari 12 bulan. Data BPS juga mencatat bahwa latar belakang Pendidikan Ibu juga sangat mempengaruhi pola pemberian ASI pada baduta. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9**Cakupan Pemberian Asi Pada Baduta Tahun 2017**

KARAKTERISTIK	PERSENTASE BADUTA PERNAH DIBERI ASI	RATA-RATA LAMA PEMBERIAN ASI (BULAN)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	76,65	13,44
Perempuan	95,04	11,65
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	66,59	11,68
Kuintil 2	93,67	12,59
Kuintil 3	93,27	11,80
Kuintil 4	100,00	12,99
Kuintil 5	82,40	13,00
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	100,00	10,84
SD Dan Sederajat	64,99	13,11
SMP Dan Sederajat	91,30	13,84
SMA Ke Atas	91,96	12,22
Kota Bogor	86,16	12,42

Sumber : BPS, Tahun 2017

4. Permasalahan Imunisasi juga sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan balita.

Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap baru sekitar 17.06 %. Sementara untuk imunisasi dasar, Dinas Kesehatan mencatat bahwa persentase pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi sudah mencapai angka 93.9 % pada tahun 2017.

Tabel 4.10**Cakupan Pemberian Imunisasi Pada Balita Tahun 2017**

KARAKTERISTIK	MEMILIKI KARTU IMUNISASI	MENDAPAT IMUNISASI LENGKAP
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	92,48	19,23
Perempuan	85,92	14,75
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	88,67	14,76
Kuintil 2	85,59	22,11
Kuintil 3	98,85	32,33
Kuintil 4	83,51	NA
Kuintil 5	91,00	NA

KARAKTERISTIK	MEMILIKI KARTU IMUNISASI	MENDAPAT IMUNISASI LENGKAP
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	97,66	NA
SD Dan Sederajat	95,95	19,99
SMP Dan Sederajat	79,18	15,65
SMA Ke Atas	88,09	16,05
Kota Bogor	89,30	17,06

Sumber : BPS, 2017

- Masih cukup tingginya persentase proses kelahiran pada penduduk miskin (kuintil 1 dan kuintil 2) yang ditangani bukan di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data statistik masih ada lebih dari 10% proses kelahiran pada kelompok penduduk miskin yang ditangani bukan di fasilitas kesehatan. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Proses Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Bukan Fasilitas Kesehatan Tahun 2017

KARAKTERISTIK	FASILITAS KESEHATAN*	BUKAN FASILITAS KESEHATAN
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	89,37	NA
Kuintil 2	86,02	NA
Kuintil 3	100,00	
Kuintil 4	100,00	
Kuintil 5	100,00	
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	100,00	
SD Dan Sederajat	90,25	NA
SMP Dan Sederajat	95,79	NA
SMA Ke Atas	96,41	NA
Kota Bogor	95,17	NA
*Fasilitas Kesehatan : RS Pemerintah, RS Swasta, Puskesmas, Pustu, Polides, Tempat Praktek Tenaga Kesehatan		

Sumber : Data BPS, 2017

- Masih banyaknya ibu hamil pada usia yang terlalu tua atau terlalu muda, dan ibu hamil dengan jarak kehamilan terlalu

dekat atau terlalu banyak anak yang berpotensi terhadap tingginya faktor resiko kematian ibu.

Berdasarkan hasil evaluasi dari dinas kesehatan, kasus-kasus kehamilan yang mempunyai resiko tinggi terhadap kematian ibu dapat digambarkan melalui table berikut ini :

Tabel 4.12
Kasus Kelahiran dengan Resiko Tinggi Tahun 2018

Tahun	2015	2016	2017	s.d. Oktober 2018
Persentase Kehamilan pada Ibu Umum < 20 Tahun	3.8	3.8	3.8	2.4
Persentase Kehamilan pada Ibu umur > 35 Tahun	5.3	5.3	5.3	4.4
Persentase Kehamilan pada Ibu dengan jumlah anak > 4	2.7	2.7	2.7	1.9
Persentase Kehamilan pada Ibu dengan Jarak Kehamilan < 2 tahun	1.5	1.5	1.5	1.2

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

- Masih cukup tingginya komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan yang beresiko tinggi memicu kematian Ibu diantaranya disebabkan karena komplikasi ketuban pecah dini (KPD) dan komplikasi karena hipertensi.

Berikut ini adalah data hasil evaluasi Dinas Kesehatan terhadap kasus kasus komplikasi pada saat kehamilan :

Tabel 4.13.
Kasus Komplikasi saat Kehamilan Tahun 2018

Tahun	2015	2016	2017	s.d. Oktober 2018
Persentase komplikasi ketuban pecah dini (KPD)	24	26	29	21.6
Persentase komplikasi Hipertensi dalam kehamilan (HDK)	20	23	21.4	28.9

Sumber : Data Dinas Kesehatan, Tahun 2018

8. Adanya Kecenderungan masih cukup tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Apabila dilihat dari hasil evaluasi Dinas kesehatan, masih ada sepuluh penyakit utama yang dominan terjadi pada penduduk usia 5-44 tahun di Kota Bogor. Berdasarkan data dari laporan LB1 Puskesmas, tahun 2017, 10 penyakit utama tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Sepuluh Penyakit Utama di Kota Bogor Tahun 2017

No	Nama Penyakit	Kasus Penyakit	
		Jumlah	%
1.	Nasopharyngitis Akut (Common Cold)	72.692	33,86
2.	Hypertensi	47.373	22,07
3.	Pharyngitis Akut	18.187	8,47
4.	Diare dan Gastroenteritis	16.505	7,69
5.	Gastritis	14.954	6,97
6.	Diabetes Mellitus Tidak tergantung Insullin (NIDDM)	14.590	6,80
7.	Influenza	10.435	4,86
8.	Dermatitis Kontak	8.345	3,89
9.	Cephalgia	6.184	2,88
10.	Scabies	5.411	2,52

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2018

Selain 10 penyakit tersebut diatas, berdasarkan laporan Seksi P3MS Dinas Kesehatan, ada beberapa penyakit menular yang perlu diwaspadai karena kasus-kasus tersebut masih cukup banyak ditemui di kota Bogor sampai dengan tahun 2017, yaitu antara lain :

Tabel 4.15
Sepuluh Penyakit Utama di Kota Bogor Tahun 2017

	Nama Penyakit	Jumlah	Jumlah Kasus Terbanyak
1.	Kasus Pneumonia pada balita	5.308 kasus	Bogor Barat
2.	Suspect Tuberkolusis paru (TBC Paru)	5.570 kasus	Bogor Barat
3.	Demam Berdarah Dengue	855 kasus	Bogor Utara
4.	HIV Aids	273 kasus	80 orang kasus meninggal
5.	Kusta	19 kasus	Penduduk urban

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Dinas Kesehatan juga menemukan adanya kecenderungan peningkatan gangguan kejiwaan pada masyarakat dari tahu 2015-2018, dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.16
Tren Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Kejiwaan
Tahun 2015-2027

Tahun	2015	2016	2017	s.d. Oktober 2018
Gangguan Kejiwaan		869	1172	1030

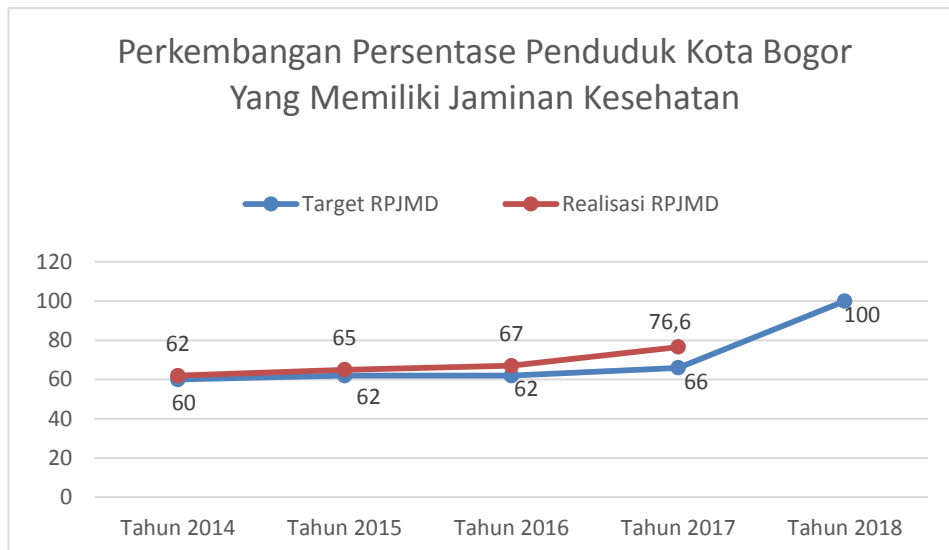
Sumber data : Dinas Kesehatan, 2018

9. Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Sebagaimana dimantakan, bahwa salah satu sasaran pokok dalam RPJMN 2015-2019 adalah terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan dengan target pada tahun 2019 mencapai 95%. Sesuai dengan target Nawacita tersebut dalam RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019, Pemerintah Kota Bogor telah menargetkan bahwa pada tahun 2018, cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk kota Bogor sudah harus mencapai 100%.

Perkembangan peningkatan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Kota Bogor dalam kurun waktu tahun 2014-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 4.1
Perkembangan persentase penduduk Kota Bogor yang memiliki
Jaminan Kesehatan



Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Kota Bogor, 2018

Namun demikian, sampai saat ini upaya pemerintah Kota Bogor untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin melalui program JKN masih belum dapat terealisasi dengan optimal. Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor yang menggunakan jaminan Kesehatan untuk berobat jalan masih sangat rendah. Berdasarkan survey dari BPS pada tahun 2017, persentase penduduk kota Bogor yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan baru berkisar 56,96 %. Dari angka tersebut, persentase penduduk miskin di kuintil 1 yang menggunakan jaminan kesehatan baru sekitar 39,88%. Berikut ini adalah data persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan berdasarkan data BPS dalam Statistik Kesejahteraan rakyat tahun 2017.

Tabel 4.17
Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan
untuk berobat jalan, Tahun 2017

KARAKTERISTIK	MENGUNAKAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK BEROBAT JALAN	JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BEROBAT JALAN			
		BPJS KESEHATAN PBI	BPJS KESEHATAN NON PBI	JAMKES DA	ASURANSI SWASTA ATAU PERUSAHAAN / KANTOR
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	56,52	19,02	25,62		11,88
Perempuan	57,32	23,90	25,99		7,42
Kuintil Pengeluaran					
Kuintil 1	39,88	23,73	13,13		NA
Kuintil 2	51,65	31,87	15,59		NA
Kuintil 3	62,26	30,23	32,03		0,00
Kuintil 4	63,99	12,97	43,51		NA
Kuintil 5	67,30	11,78	26,16		29,36
Kota Bogor	56,96	21,72	25,83		9,41

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan rakyat tahun 2017

10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih belum optimal

Dari data BPS tahun 2017, dicatat bahwa masih ada 30.72 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok, dan rata-rata tertinggi penduduk merokok tersebut berpendidikan SD dan sederajat dan penduduk yang tidak tamat SD. Berikut adalah data sebaran penduduk berusia 15 tahun ke atas yang merokok:

Tabel 4.18
Persentase Penduduk yang merokok, Tahun 2017

KARAKTERISTIK	PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG MEROKOK	RATA-RATA BATANG ROKOK YANG DIHISAP PER MINGGU
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	31,69	55,72
Kuintil 2	32,91	70,29
Kuintil 3	37,55	70,17
Kuintil 4	30,34	77,30
Kuintil 5	21,75	86,33
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	32,21	61,28
SD Dan Sederajat	32,02	76,18
SMP Dan Sederajat	30,79	61,89
SMA Ke Atas	29,68	75,68
Kota Bogor	30,72	71,52

Sumber : BPS, tahun 2017

Terkait dengan akses masyarakat ke jamban yang sehat, pada tahun 2017 BPS mencatat bahwa 74.35 dari rumah tangga memiliki akses membuang limbah domestic ke tangka septic/IPAL/SPAL. Data penduduk mendapatkan akses pembuangan limbah domestic dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 4.19
Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke jamban sehat, Tahun 2017

KARAKTERISTIK	MENGUNAKAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK BEROBAT JALAN					JUMLAH
	TANGKI SEPTIK/IPAL/SPAL	KOLAM/S AWAH/SU NGAI/DAN AU/LAUT9	LUBANG TANAH	PANTAI /TANAH LAPANG /KEBUN	LAINNYA	
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	75,11	20,62	23,85	NA		100,00
Perempuan	70,82	27,39	NA		NA	100,00
Kuintil Pengeluaran						
Kuintil 1	66,25	29,12	NA			100,00
Kuintil 2	71,20	24,00	NA	NA		100,00
Kuintil 3	65,10	29,35	3,57	NA	NA	100,00
Kuintil 4	70,09	27,88	NA			100,00
Kuintil 5	93,14	4,10	2,76			100,00
Pendidikan Tertinggi KRT						
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	69,00	26,50	NA	NA	NA	100,00
SD Dan Sederajat	66,42	29,52	3,05	NA		100,00
SMP Dan Sederajat	71,45	26,39	NA			100,00
SMA Ke Atas	80,64	15,27	4,09			100,00
Kota Bogor	74,35	21,82	3,32	0,34	0,17	100,00

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan rakyat tahun 2017.

Sementara, dalam hal akses pelayanan air bersih, berdasarkan data dari BPS tahun 2017, 85.11% masyarakat telah mendapatkan air minum yang bersih dan 43.92 % mendapatkan air minum yang layak, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.20**Persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum bersih dan akses air minum layak, Tahun 2017**

KARAKTERISTIK	SUMBER AIR MINUM BERSIH	SUMBER AIR MINUM LAYAK
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	85,64	43,73
Perempuan	82,57	44,81
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	74,45	48,51
Kuintil 2	81,79	48,22
Kuintil 3	82,01	48,24
Kuintil 4	89,87	52,24
Kuintil 5	92,91	26,39
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	80,28	42,85
SD Dan Sederajat	75,67	48,08
SMP Dan Sederajat	89,62	58,01
SMA Ke Atas	89,92	37,23
Kota Bogor	85,11	43,92

Sumber : Data BPS, 2017

11. Ketersediaan sumber daya kesehatan Belum Memadai

a. Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia di bidang kesehatan menjadi salah satu permasalahan penting di Kota Bogor mengingat :

- 1) Pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sesuai dengan standar. Mutu tenaga kesehatan belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri.
- 2) Regulasi untuk mendukung upaya pengembangan tenaga kesehatan masih terbatas.
- 3) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang memadai. Rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang menyeluruh belum disusun sesuai

yang diharapkan, sehingga belum sepenuhnya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

- 4) Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan/pendidikan berbagai jenis tenaga kesehatan. Kajian jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan tersebut belum dilakukan sebagaimana mestinya. Kualitas hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada umumnya masih kurang memadai. Masih banyak institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum terakreditasi dan memenuhi standard. Hal ini akan berdampak terhadap kompetensi dan kualitas lulusan tenaga kesehatan. Permasalahan pendidikan tenaga kesehatan pada umumnya bersifat sistemik, antara lain terdapat ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, lemahnya kerjasama antara pelaku dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan, lebih dominannya pendidikan tenaga kesehatan yang berorientasi ke Rumah Sakit dibandingkan dengan Primary Health Care.
- 5) Dalam pendayagunaan tenaga kesehatan, pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Pengembangan profesi yang berkelanjutan (Continue Professional Development/CPD), serta Training Need Assesment (TNA) masih perlu dikembangkan.
- 6) Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan masih terbatas pada tenaga dokter dan dokter gigi. Sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-perundangan di bidang pengembangan tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara memadai.
- 7) Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan masih terbatas. Sistem informasi tenaga

kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. Dukungan sumber daya pembiayaan dan lain-lain sumber daya belum memadai.

b. Sarana prasarana Kesehatan

1. Kondisi sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum terpenuhi di puskesmas dan rumah sakit.
2. Tingkat kepatuhan rumah sakit dalam pemenuhan perijinan
3. Mutu layanan di beberapa puskesmas dan rumah sakit belum dipenuhi dengan SOP
4. Respon kesiapsiagaan dalam Sistem penanganan kegawadaruratan belum semua terlaksana dengan baik di rumah sakit
5. Masih adanya Kesulitan mengakses fasilitas kesehatan rujukan di Rumah Sakit
6. Informasi ketersediaan layanan kesehatan di Rumah Sakit belum optimal
7. Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sistem rujukan belum semua terpenuhi.

c. Obat dan Makanan

1. Manajemen pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, serta penggunaan obat serta pengelolaan system informasi pengelolaan obat) di sarana kesehatan dasar masih belum optimal.
2. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kefarmasian di pelayanan kefarmasian.
3. Semakin maraknya peredaran bahan pangan yang tidak sehat

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Sub Bidang Penataan Ruang

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di sub bidang Penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RDTR) sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) yang telah ditetapkan
- b. Rencana Pemanfaatan Ruang belum optimal dilaksanakan sesuai dengan tahapannya (inkonsistensi rencana pemanfaatan ruang)
- c. Alih Fungsi Lahan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan secara optimal
- d. Sinergitas perencanaan dan pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan (kabupaten/kota)
- e. Belum optimalnya kerjasama pemerintah dan private dalam percepatan pencapaian rencana struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

2. Sub Urusan Pekerjaan Umum

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di sub bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Belum tercapainya 100% cakupan pelayanan air minum sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena:
 - Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
 - Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih;
 - Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; Air baku yang tersedia diluar wilayah Kota

Bogor (perlu adanya peran Pemerintah Pusat dan Provinsi);

- Sungai di Kota Bogor sebagai salah satu sumber air baku juga sudah mengalamipencemaran (belum memenuhi baku mutu, baik kualitas, kuantitas, serta konituitas) sehingga memerlukan biaya tinggi untuk pengolahannya menjadi air minum yang layak dan aman;
 - Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum
 - Belum tersedia infrastruktur perkotaan yang terintegrasi untuk sistem penyediaan air minum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Bogor
- b. Belum tercapainya 100% cakupan pelayanan air limbah sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - c. Konektivitas infrastruktur jalan belum optimal sehingga terjadi penumpukan volume kendaraan di pusat-pusat kegiatan karena jalan alternative menuju pusat kegiatan belum terhubung.
 - d. kapasitas jalan belum mampu mengikuti pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor (Kinerja jaringan jalan belum optimal sehingga masih menimbulkan banyak titik-titik kemacetan terutama pada jam jam sibuk),
 - e. Kualitas jalan masih belum optimal (cukup banyak ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya).
 - f. Masih cukup banyak jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yaitu masih berkisar 50% dari keseluruhan jaringan irigasi yang ada. hal ini disebabkan karena umur jaringan irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan akibat kejadian bencana alam.
 - g. berkurangnya kapasitas drainase primer yang menyebabkan kapasitas daya tampung sungai, situ dan sumber air lainnya menurun sehingga mengakibatkan pada daerah daerah tertentu masih terjadi kerawanan terhadap resiko banjir. Hal ini disebabkan karena terjadinya pendangkalan sungai

- akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
- h. belum terintegrasinya saluran drainase,
 - i. belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier disebabkan karena tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang belum sesuai dengan standar;
 - j. Masih cukup tingginya potensi terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir karena bangunan infrastruktur yang ada di lokasi rawan bencana belum seluruhnya disiapkan dengan baik.
 - k. Jaringan Infrastruktur permukiman belum seluruhnya terbangun sesuai dengan standar perumahan permukiman yang layak.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Masih belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh sesuai dengan 7 indikator kumuh yang telah ditetapkan;
2. Masih cukup luas kawasan yang berpotensi menjadi kumuh apabila tidak dilakukan intervensi pencegahan;
3. Belum semua pelayanan PSU perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang memenuhi NSPM, sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman;
4. Belum semua pelayanan PSU perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak pada dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas PSU menjadi sangat terbatas mengingat PSU tersebut belum menjadi aset pemerintah;

5. Persentase rumah tidak layak huni masih cukup tinggi mengingat ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
6. Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RTRW/RDTR;
7. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
8. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) masih belum mengarah pada TPU Hijau;
9. Kebutuhan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum seluruhnya terpenuhi;
10. Pengelolaan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum sepenuhnya mengarah pada penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Fungsi deteksi dini terhadap potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih belum optimal
2. Peningkatan potensi ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan) terhadap stabilitas politik dan keamanan, hal ini menjadi krusial mengingat banyaknya ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang datang dari dalam dan luar negeri. Selain itu pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin menurun dipengaruhi oleh globalisasi dan kebebasan pada masa demokrasi;
3. Penanganan gangguan ketenteraman dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih belum optimal

4. Belum semua peraturan daerah yang ditetapkan dapat ditegakkan secara konsisten
5. Pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang ke-pamong praja-an belum efektif
6. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda yang seharusnya dilakukan oleh PPNSD belum dilaksanakan secara efektif dan menimbulkan efek jera bagi pelanggar perda.
7. Sumber daya manusia yang tersedia sebagai PPNSD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum memenuhi harapan yang diinginkan berdasarkan kepada integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi serta kualitas maupun kuantitas yang memadai.
8. Keterbatasan sarana & prasarana PPNSD di Satpol PP belum mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
9. Hubungan PPNSD dengan Satpol PP dan Penyidik Polri selaku pembina dan koordinator pengawas PPNSD dan Satpol PP belum konsisten;
10. Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban belum dilaksanakan secara efektif, sehingga hasilnya masih belum optimal.

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN DAN KEBENCANAAN

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sub urusan Kebakaran dan Kebencanaan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana di Kota Bogor berada pada level sedang, sehingga potensi terjadinya bencana harus terus diantisipasi;
2. Program pencegahan dan mitigasi bencana belum sinergis lintas sector;
3. Tingkat kesiapsiagaan dan adaptasi masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana (kebakaran dan bencana lainnya) masih belum optimal;
4. Kecepatan waktu tanggap untuk penanganan bencana baik kebakaran maupun bencana lainnya masih perlu

ditingkatkan dalam rangka meminimalisir kehilangan jiwa, mengurangi beban penderitaan korban bencana, meminimalisir kerusakan harta benda dan kehilangan sumber daya ekonomi ;

5. Program rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana masih belum terkoordinasi, benturan kewenangan pusat dan daerah pada pelayanan di lokasi dampak bencana. Belum adanya percepatan penanganan oleh instansi terkait dengan optimal sehingga memakan waktu yang cukup lama.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Permasalahan terkait bidang sosial adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan karena belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program;
2. Kemandirian dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan social meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah, dan korban NAPZA masih rendah;
3. Jumlah kasus korban tindak kekerasan semakin meningkat;
4. Aksesibilitas penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social untuk mendapatkan pelayanan dasar masih belum terlayani secara optimal;
5. Intervensi pemerintah untuk perlindungan social masih seringkali belum tepat sasaran karena kualitas data terpadu masih rendah;
6. Masih adanya kerentanan terhadap konflik social di masyarakat; dan
7. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

8. Penanganan social terhadap korban bencana masih belum optimal;
9. Diskriminasi terhadap kaum penyandang masalah kesejahteraan social masih sering terjadi.

4.1.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Permasalahan terkait bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih relatif rendah yaitu sebesar 61.13 persen di tahun 2017;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sangat tinggi yaitu sebesar 9.57 persen di tahun 2017;
3. Produktivitas Tenaga Kerja masih belum optimal;
4. Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja masih belum optimal.

Berikut adalah gambaran kondisi angkatan kerja pada tahun 2017 berdasarkan data BPS dalam Buku Kota Bogor Dalam Angka tahun 2018.

Tabel 4.21
Gambaran kondisi Angkatan Kerja Kota Bogor, Tahun 2017

RINCIAN	2017
<i>Angkatan Kerja / Economically Active</i>	
1. Bekerja / <i>Working</i>	448386
<i>2. Pengangguran Terbuka / Unemployment</i>	
a. Pernah Bekerja / <i>Ever Work</i>	18467
b. Tidak Pernah Bekerja / <i>Never Worked</i>	28971
c. Jumlah / <i>Total</i>	47438
<i>Jumlah Angkatan Kerja / Total Economically Active</i>	
<i>Bukan Angkatan Kerja / Not Economically Active</i>	
1. Sekolah / <i>Attending School</i>	82781
2. Mengurus Rumah Tangga / <i>House Keeping</i>	203150
3. Lainnya / <i>Others</i>	29363
4. Jumlah / <i>Total</i>	315294
<i>Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas / Total Of Poppulation Aged 15 Years And Over</i>	
<i>% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja / % Working To Economically Active</i>	
	90,43
<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) / Employment Rate (%)</i>	
	9,57
<i>% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja / % Economically Active to Working Age Population</i>	
	61,13

Sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2018

Lebih lanjut dari hasil evaluasi diperoleh identifikasi akar masalah yang menyebabkan TPT Kota Bogor sangat tinggi yaitu :

1. Keterampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Bogor setiap tahunnya.

Pembangunan perekonomian Kota Bogor bertumpu pada sektor-sektor non produksi, sektor jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Pembangunan sektor jasa membutuhkan skill masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan. Namun demikian, apabila melihat data pada tahun 2017, peningkatan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja masih di dominasi dari sector industry pengolahan yaitu meningkat sebesar 22.93% sementara peningkatan penyerapan sector jasa lainnya hanya sebesar 15.97 %.

Berikut ini adalah data penyerapan tenaga kerja berdasarkan sector lapangan kerja utama yang dipublikasi oleh BPS dalam buku Kota Bogor dalam Angka tahun 2018.

Tabel 4.22

Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Kota Bogor menurut sector lapangan pekerjaan , Tahun 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	2015			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	4138	843	4981	2674	545	3219
Industri Pengolahan	44330	14086	58416	53432	18393	71825
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	82701	38101	120802	93500	61206	154706
Jasa Kemasyarakatan	74649	44477	119126	57771	47610	105381
Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)	87389	10269	97658	101471	11784	113255
Jumlah	293207	107776	400983	308848	139538	448386

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2018

Oleh karena itu, selain mendorong tingkat pendidikan masyarakat, maka keterampilan dan kecakapan para pencari kerja harus menjadi focus untuk diintervensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang mampu berdaya saing di sector unggulan yang ada di Kota Bogor yaitu sector Jasa.

2. Tingginya angka pengangguran lulusan SMA/SMK

Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain bahwa lulusan SMA/SMK pada umumnya belum memiliki ketrampilan khusus yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, atau dengan kata lain lulusan SMA/SMK pada umumnya tidak memiliki keahlian untuk bersaing di dunia kerja. Pendidikan vokasi menjadi sangat penting ditingkatkan untuk menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Selain itu program peningkatan pendidikan non formal menjadi sangat penting untuk dikembangkan dengan syarat harus mengikuti tren kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Jumlah pekerja yang bekerja tidak penuh masih cukup tinggi

Jumlah pekerja tidak penuh adalah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu). Kondisi ini sebenarnya memicu terjadinya kondisi pengangguran semu karena sebenarnya mereka berstatus sebagai pekerja, tetapi ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah.

4. Adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan kerja

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah pencari kerja di Kota Bogor adalah sebesar 3.904 orang dimana sebanyak 57.27 % adalah laki laki dan 97.51 % berlatar belakang Pendidikan SMA ke atas. Sementara jumlah lowongan pekerjaan pada tahun 2017 hanya sebanyak 2.082 orang dimana lowongan terbanyak adalah

dari sector perdagangan yaitu sebanyak 1269 orang dan dari sector jasa sebanyak 638 (sumber data : Kota Bogor Dalam Angka, 2018).

5. Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bogor masih rendah

Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah;
2. Angka partisipasi sekolah perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan Laki-laki;
3. Masih adanya tren perkawinan usia dini (< 18 tahun);
4. Persentase perempuan lansia lebih tinggi dibandingkan laki laki (perbandingan laki-laki : perempuan = 40% : 60%);
5. Masih cukup tingginya kasus penyalahgunaan NAPZA pada perempuan (55,6% perempuan penghuni lapas terjerat hukum karena kasus NAPZA);
6. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam berpolitik dan terlibat dalam organisasi social dan politik;
7. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak;
8. Masih banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Faktor yang menentukan ketahanan pangan daerah salah satunya adalah ketersediaan bahan pangan. Penataan, penyediaan, dan distribusi bahan pangan di Kota Bogor belum terkelola dengan cukup baik. Dampak dari hal tersebut diatas, adalah masih terdapat kasus penduduk rawan pangan di Kota

Bogor. Persentase Penduduk rawan Pangan di kota Bogor Tahun 2018 berkisar 18.3% yang tersebar di 17 kelurahan.

Permasalahan kerawanan pangan yang terjadi di kota Bogor antara lain adalah :

1. Cadangan pangan Kota Bogor masih belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan.KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Sesuai perhitungan jumlah cadangan pangan yang tercantum dalam Permentan tersebut, Pemerintah Kota Bogor dalam rangka penguatan cadangan pangan diharuskan menyediakan pangan ekuivalen beras minimal 80,72 ton setiap tahunnya.
2. Informasi distribusi bahan pangan (beras) belum merata atau diketahui oleh seluruh kalangan masyarakat.
3. Masih ada sekitar 8,47% produk pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang tidak aman dan layak konsumsi, dalam arti mengandung pengawet berbahaya (boraks dan formalin), pewarna buatan (Rhodamin B, Methil Yellow), Bahan Tambahan Pangan (Benzoat dan Nitrit) melebihi ambang batas aman, cemaran mikroba dan mengandung residu pestisida.
4. Konsumsi Kalori pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah di Kota Bogor adalah 1.681,89 Kkal, sedangkan konsumsi kalori untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah adalah 2.233,33 Kkal dan konsumsi kalori pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas adalah 2.559,20 Kkal. Ini berarti masih ada sekelompok orang yaitu di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang konsumsi kalorinya dibawah standar 2.150 Kilo kalori/kapita/hari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, konsumsi protein perkapita kota Bogor pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah tersebut adalah 45,65 gr, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah adalah 64,64 gr dan pada kelompok 20 persen teratas adalah 80,83 gr. Ini berarti masih ada sekelompok orang yaitu di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang

konsumsi proteinnya dibawah standar 57 gram/kapita/hari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari sisi pengeluaran baik untuk makanan maupun non makanan (data Susenas 2018 Kota Bogor), pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, persentase pengeluaran untuk makanan adalah 62,87% dari total pengeluaran. Kemudian pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah, persentase pengeluaran untuk makanan adalah 51,95% dari total pengeluaran dan kelompok pengeluaran 20 persen teratas persentase pengeluaran untuk makanan adalah 32,37% dari total pengeluaran. Dari data-data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah belum dapat dikatakan sejahtera karena persentase pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dibandingkan dengan persentase pengeluaran non makanan. Selain itu dengan pengeluaran untuk makanan yang lebih besar pun masih belum dapat memenuhi Angka Kecukupan Gizi.

KONSUMSI DAN PENGELUARAN



Berikut ini adalah data rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2018

Tabel 4.22a
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran, Tahun 2018

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terendah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
1 Padi-padian	51767	69314	77937
2 Umbi-umbian	19709	6992	12335
3 Ikan/udang/cumi/kerang	17535	39983	86043
4 Daging	19709	38977	94567
5 Telur dan susu	25184	51199	75627
6 Sayur-sayuran	30622	46613	63830
7 Kacang-kacangan	7970	11831	17809
8 Buah-buahan	15721	33693	67969
9 Minyak dan kelapa	11085	13567	20331
10 Bahan minuman	14922	21341	28074
11 Bumbu-bumbuan	7697	12524	21030

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
12 Konsumsi lainnya	10385	16214	23589
13 Makanan dan minuman jadi	123929	262305	418289
14 Rokok dan tembakau	56344	93144	85344
Jumlah Makanan	397014	717697	1092776
15 Perumahan dan fasilitas rumah tangga	153276	378196	1089209
16 Aneka barang dan jasa	55340	175297	666629
17 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	12029	33349	72714
18 Barang tahan lama	3217	30420	255612
19 Pajak, pungutan, dan asuransi	9891	36025	158922
20 Keperluan pesta dan upacara/kenduri	706	10408	40283
Jumlah Bukan Makanan	234459	663695	2283369
Jumlah	631473	1381392	3376144

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018

Tabel 4.22b

Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita, Tahun 2018

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
1. Padi-padian	768,64	854,98	765,53
2. Umbi-umbian	27,23	30,94	39,23
3. Ikan/udang/cumi/kerang	25,30	42,99	61,26
4. Daging	48,66	84,87	151,97
5. Telur dan susu	62,05	96,76	129,94
6. Sayur-sayuran	20,86	30,33	36,46
7. Kacang-kacangan	40,69	46,98	67,18
8. Buah-buahan	21,75	43,00	71,22
9. Minyak dan kelapa	216,57	280,10	356,28
10. Bahan minuman	60,66	83,06	99,15
11. Bumbu-bumbuan	6,88	10,91	18,97
12. Konsumsi lainnya	58,39	82,81	109,90
13. Makanan dan minuman jadi	324,21	545,59	652,11
14. Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1681,89	2233,32	2559,20

Sumber : Statistik Kesejahteraan rakyat

Tabel 4.23
Rata-Rata Konsumsi Protein Per Kapita, Tahun 2018

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
1. Padi-padian	18,07	20,13	18,12
2. Umbi-umbian	0,28	0,37	0,56
3. Ikan/udang/cumi/kerang	4,68	7,90	11,23
4. Daging	3,01	5,40	10,27
5. Telur dan susu	3,33	5,07	7,07
6. Sayur-sayuran	1,14	1,61	1,94
7. Kacang-kacangan	3,97	4,62	6,42
8. Buah-buahan	0,26	0,52	0,86
9. Minyak dan kelapa	0,02	0,08	0,16
10. Bahan minuman	0,40	0,53	0,70
11. Bumbu-bumbuan	0,26	0,43	0,73
12. Konsumsi lainnya	1,20	1,66	2,09
13. Makanan dan minuman jadi	9,03	16,32	20,68
14. Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00
Jumlah	45,65	64,64	80,83

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018

Akar permasalahan dalam urusan pangan, antara lain:

- a Aspek ketersediaan pangan di daerah perkotaan diperoleh melalui impor dari daerah lain yang dijual di toko-toko bahan pangan. Ketersediaan pangan daerah perkotaan ditunjukkan dengan jumlah toko bahan pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah sangat tinggi karena produksi dalam Kota Bogor tidak memenuhi kebutuhan penduduknya. Sehingga rawan terjadi kelangkaan bahan pangan jika terjadi ketidakstabilan harga pangan.
- b Aspek akses pangan sangat penting bagi daerah perkotaan yang tidak memiliki ketersediaan pangan domestik. Masyarakat perkotaan dapat mengakses pangan dengan baik apabila memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli semua kebutuhannya. Pengangguran dan kemiskinan menjadi dua indikator penting dalam akses pangan. Pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kota Bogor terutama pada kelompok pengeluaran 40% terbawah yaitu Rp 631.473,00 per kapita per

bulan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan pasti akan menjadi pengeluaran utama di rumah tangga sehingga kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya ditujukan untuk membeli makanan. Dampak selanjutnya dari rendahnya terhadap akses pangan adalah tingkat kematian bayi menjadi relatif tinggi.

- c Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman). Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh padi-padian serta kurangnya konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah. Selain akibat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pola konsumsi pangan B2SA, faktor lain yang erat kaitannya dengan konsumsi pangan penduduk adalah pendapatan, pengeluaran pangan, jumlah anggota keluarga dan pekerjaan kepala rumah tangga.
- d Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesehatan dan produktivitas rumah tangga.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Permasalahan pada Bidang pertanian, antara lain :

1. Masih cukup banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan, dan sengketa peruntukan/penggunaan lahan
2. Masih belum tuntasnya penyelesaian penetapan batas wilayah administrative baik batas wilayah administrative kabupaten kota maupun batas wilayah administrative kecamatan dan kelurahan.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup. Permasalahan-pemmasalahan yang mempengaruhi tingkat daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas udara ambien;

2. Meningkatnya emisi gas rumah kaca;
3. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan;
4. Menurunnya kualitas DAS Ciliwung Cisadane;
5. Menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air;
6. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
7. Belum terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau public sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil;
9. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum berjalan secara sinergis sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Permasalahan pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor, yaitu:

1. Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Bogor cukup tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli Kota Bogor dan penduduk non permanen di Kota Bogor. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS;
2. Ketersediaan infrastruktur pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal;

3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk urusan administrasi kependudukan;
4. Belum optimalnya kinerja aparaturnya pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan terutama dalam hal penyediaan kualitas dan kuantitas SDM;
5. Belum optimalnya penggunaan fasilitas teknologi informasi berbasis SIAK;
6. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk keperluan intervensi program/kegiatan pembangunan daerah
7. Belum optimalnya Akurasi Data dan Ketepatan waktu penyediaan data kependudukan.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi:

1. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa
2. Program/kegiatan pembangunan daerah yang berlokasi di kelurahan masih belum terintegrasi lintas sektor.
3. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong
4. Kecenderungan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Masih belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Permasalahan yang dihadapi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi
2. Tingkat kelahiran pada usia remaja masih cukup tinggi, pada tahun 2017 angka kelahiran pada usia remaja berada

dikisaran 11,82 per 1000 kelahiran, sementara pada tahun 2018 sudah menurun menjadi 11,62 per 1000 kelahiran.

3. Sulitnya mempertahankan kesertaan ber-KB
4. Tingkat Kesertaan BerKB dengan MKJP masih rendah yaitu sekitar 22% pada tahun 2018 sehingga berpotensi untuk terjadinya kehamilan yang tidak terencana.
5. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera masih cukup banyak.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Permasalahan yang dihadapi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya integrasi simpul-simpul transportasi untuk pergerakan orang dan barang yang berdampak pada infektivitas dan inefisiensi dalam sector transportasi;
2. Belum optimalnya kinerja pelayanan angkutan umum baik dari sisi jenis moda transportasi (transportasi massal), integrasi antar moda (penyediaan fasilitas alih moda di simpul masih terbatas), sarana dan prasarana, waktu tempuh yang cukup lama, jumlah penumpang yang melebihi kapasitas angkut, tingkat kenyamanan yang rendah, sistem jaringan yang kurang memadai serta jangkauan aksesibilitas angkutan umum untuk daerah daerah tertentu;
3. Pengaturan parkir dan hambatan samping masih belum dapat dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan; parking meter belum optimal pemanfaatannya dan belum tersedianya fasilitas parkir off street yang memadai, berupa lahan parkir, bangunan parkir, dan atau park and ride;
4. Pola perjalanan masih cenderung memusat ke Central Business District (CBD);
5. Belum optimalnya sarana prasarana bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan tidak bermotor;
6. Masih belum optimal penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan;

7. Masih cukup tinggi persentase jumlah kendaraan yang tidak laik jalan;
8. Tingkat kedisiplinan pengguna jalan masih rendah.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Permasalahan yang dihadapi dibidang Komunikasi dan Informatika adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan amanat peraturan perundangan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena :

1. Kebijakan internal dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik baik dalam hal tata kelola SPBE maupun dalam hal layanan SPBE sebagian besar masih dalam bentuk konsep dan belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
2. Penerapan proses bisnis dan rencana induk SPBE belum dipantau dan dievaluasi secara berkala;
3. Masih banyak aplikasi berbasis web yang belum terintegrasi dengan suatu layanan SPBE lain;
4. Masih adanya keterbatasan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika;
5. Belum adanya standar keamanan informasi;
6. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TI; dan
7. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam peningkatan perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain :

a. UMKM dan IKM belum berdaya saing tinggi

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah menjadi keniscayaan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari UMKM dan IKM harus mampu berdaya saing dengan produk-produk dari

luar negeri. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah :

1. Produktivitas UMKM masih belum optimal
2. Kualitas produk UMKM masih belum mampu berdaya saing dengan kualitas produk industri besar;
3. Inovasi belum secara optimal tergali
4. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah tingkat kesulitan mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama.

5. Terbatasnya akses permodalan (Access to Finance)

6. Terbatasnya kemampuan penetrasi pasar

Usaha kecil pada umumnya mempunyai permasalahan terkait lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, karena pada umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

7. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

8. Terbatasnya sarana prasarana usaha

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM cenderung kurang cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalannya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

b. Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga masyarakat masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya.

Untuk mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu :

1. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif
2. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah.
3. Terbatasnya akses permodalan
4. Terbatasnya akses pemasaran produk,
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
6. Terbatasnya akses mendapatkan bahan baku,
7. Terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan
8. Terbatasnya akses informasi dan teknologi.

c. Daya saing koperasi masih rendah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi di Kota Bogor sangat berkaitan dengan daya saing koperasi yang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :

1. Kualitas SDM Koperasi masih rendah

2. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah,
3. Manajemen koperasi belum profesional, terutama banyak terjadi di koperasi-koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
4. Pengembangan kerjasama antar usaha koperasi masih belum optimal.
5. Terbatasnya akses permodalan
6. Terbatasnya akses teknologi dan informasi
7. Terbatasnya akses pemasaran produk

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal yaitu :

1. Realisasi investasi belum merata di setiap wilayah pelayanan (WP) sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031;
2. Realisasi investasi masih terpusat pada investasi konstruksi dan ada kecenderungan investasi di sector bukan konstruksi/infrastruktur cenderung menurun.
3. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN;
4. Investasi Belum Mengacu pada Potensi dan Daya Saing Wilayah;
5. ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, kebijakan investasi, dan ketersediaan SDM berkualitas masih menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan investasinya di Kota Bogor; dan
6. Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun iklim investasi yang kondusif masih belum optimal.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Permasalahan bidang kepemudaan, yaitu:
 1. Daya saing pemuda masih rendah karena tingkat pendidikan;

2. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan kewirausahaan masih rendah;
 3. Tingkat pengangguran pemuda masih cukup tinggi;
 4. Angka kelahiran pada remaja masih cukup tinggi;
 5. Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda masih belum optimal;
 6. Masih terbatasnya kesempatan kerja dan kesempatan berpolitik bagi pemuda perempuan (gender);
 7. Masih terbatasnya kesempatan bagi pemuda disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan kesempatan berpolitik;
 8. Masih belum optimalnya kreativitas dan inovasi pemuda.
- Permasalahan bidang keolahragaan, yaitu:
 1. Masih terbatasnya SDM Keolahragaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
 2. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga masih belum memenuhi standar pelayanan;
 3. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga yang berpengaruh pada tingkat kebugaran masyarakat;
 4. Belum optimalnya pola pembinaan dan pembibitan atlet dalam rangka mencetak prestasi atlet daerah di bidang olahraga.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan data statistik sektoral.
2. Belum efektifnya pengelolaan data statistik dalam sistem portal satu data;
3. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral;
4. Belum adanya regulasi penyelenggaraan statistik sektoral;

5. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial;
6. Masih lemahnya analisa data statistic sektoral sehingga pemanfaatan data tersebut menjadi kurang efektif dan berdaya guna;
7. Ketepatan waktu dalam penyediaan data statistic sektoral dari sumber data yang menyebabkan terhambatnya penyajian data statistic untuk pengguna;

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan system keamanan informasi (security awarness)
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi;
3. Belum adanya Security Operating Centre (SOC) yang dapat memonitor lalu lintas data/informasi
4. Belum terbangunnya system pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Permasalahan pada urusan kebudayaan, diantaranya adalah:

1. Semakin kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya local yang berpotensi melunturkan warisan budaya yang ada terutama pada generasi muda sehingga berdampak pada semakin menurunnya kharakter budaya anak bangsa;
2. pengembangan dan pelestarian budaya belum dilakukan secara terpadu;
3. Belum optimalnya peran pemerintah, tokoh budayawan, organisasi seni budaya, pelaku seni budaya dan tokoh tokoh masyarakat lainnya dalam mendorong pengembangan pelestarian budaya terutama budaya lokal;

4. Belum optimalnya perlindungan dan apresiasi terhadap budaya lokal;

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat
2. Keragaman buku baru koleksi perpustakaan belum mampu memenuhi permintaan pengunjung
3. Ketersediaan sarana prasarana perpustakaan masih belum memenuhi standar
4. Ketersediaan SDM pengelola perpustakaan (pustakawan) masih belum memenuhi standar

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Pengelolaan arsip perangkat daerah masih belum tertib sesuai dengan standar pengelolaan kearsipan
2. Organisasi Kearsipan belum berfungsi secara optimal
3. Kuantitas dan kualitas SDM Kearsipan belum sebanding dengan jumlah kebutuhan perangkat daerah dan unit kerja sesuai standar
4. Sarana prasarana pengelolaan kearsipan belum memenuhi standar baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.1.3 URUSAN PILIHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan, diantaranya adalah:

1. Terbatasnya lahan perikanan;
2. Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
3. Belum optimalnya penguasaan teknologi pengelolaan dan pengolahan perikanan;

4. Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) perikanan;
5. Belum optimalnya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;
6. Pemasaran hasil perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir
7. Masih rendahnya kegemaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan hasil olahan ikan lainnya.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Permasalahan pada urusan bidang pariwisata, diantaranya adalah:

1. Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif
2. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan belum terpadu/ sinergis dari hulu ke hilir sehingga jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan performa yang sesuai dengan potensinya. Hal ini disebabkan karena :
3. Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata.
4. Terbatasnya atraksi di destinasi wisata sehingga belum mampu mendorong peningkatan lama kunjung wisatawan.
5. Belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat.
6. Kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata masih sangat terbatas
7. Kesiapan SDM sektor pariwisata dan dukungan dari masyarakat
8. Teknologi Informasi, Komunikasi dan Publikasi di sector pariwisata masih belum optimal dikembangkan di Kota Bogor
9. Belum terstrukturnya data potensi pariwisata yang dapat mendorong masuknya Investasi.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Permasalahan pada urusan pemerintahan bidang pertanian, diantaranya adalah :

1. Produksi Pertanian mengalami tren perlambatan/penurunan karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan, dan belum optimalnya penggunaan dan penyediaan sarana prasarana pertanian, serta belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pertanian ;
2. Masih rendahnya upaya diversifikasi dan peningkatan daya saing produk pertanian yang dapat mengandalkan pada ketersediaan lahan yang terbatas.
3. Masih adanya potensi munculnya wabah penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosa). Penyakit zoonosa merupakan penyakit atau infeksi pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit yang tergolong dalam zoonosa, misalnya, antraks, rabies, brucellosis, avian influenza, dan lain-lain.
4. Masih adanya potensi bahan pangan asal hewan yang belum memenuhi kriteria ASUH karena hygiene dan sanitasi belum sepenuhnya diterapkan pada unit unit usaha pengolahan dan pemasaran bahan pangan asal hewan.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang perdagangan, diantaranya adalah:

1. Gejolak Inflasi yang cukup tinggi
2. Belum optimalnya perumusan kebijakan di sector perdagangan yang berorientasi pada penerapan Transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE)
3. Masih lemahnya pengendalian perizinan usaha perdagangan
4. Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bogor.
5. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di Kota Bogor

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang perindustrian , diantaranya adalah masih rendahnya daya saing industry Kecil dan Menengah yang disebabkan karena:

1. Masih rendahnya kapabilitas SDM pelaku IKM
2. Masih Lemahnya kemampuan dan inovasi pemanfaatan teknologi produksi oleh IKM.
3. Proses Produksi yang Inefisien karena faktor penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya daya saing harga produk.
4. Masih terbatasnya model dan strategi bisnis yang dikembangkan oleh pelaku IKM
5. Masih terbatasnya kemampuan pemasaran karena kekurangmampuan pelaku IKM membangun jejaring pemasaran.
6. Masih Rendahnya Produktivitas Industri Kecil dan menengah.
7. Masih Rendahnya Kualitas Produksi Industri Kecil Dan Menengah.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang transmigrasi, diantaranya adalah tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, permasalahannya diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

4.1.4 URUSAN FUNGSI PENUNJANG

A. URUSAN PERENCANAAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah baik itu sinergitas antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah, sinergitas antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan

perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) dan sinergitas antara perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD). Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Perencanaan 5 tahunan masih sangat tergantung dari political will kepala daerah terpilih sehingga ada kemungkinan belum optimal sinergitasnya dengan tahapan perencanaan 5 tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka Panjang daerah (RPJPD);
2. Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;
3. pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;
4. dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum disusun dengan SMART (spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)
5. Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;
6. Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;
7. Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;
8. Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;

9. rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya , indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah;
 10. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah
 11. Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;
 12. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja rencana sektoral.
- b. Belum optimalnya capaian kinerja RPJMD 2015-2019, yang disebabkan karena :
1. Target kinerja dalam dokumen perencanaan belum ditetapkan dengan baik berdasarkan data dan informasi yang akurat;
 2. Kualitas evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab program/kegiatan belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program;
 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dimanfaatkan untuk kebijakan perencanaan penganggaran dan untuk pemberian reward dan punishment bagi perangkat daerah penanggung jawab program/kegiatan.

B. URUSAN KEUANGAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pendapatan daerah Kota Bogor terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;

3. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
5. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja.

C. URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan , diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan;
3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan kewenangan PD lain;
4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum;
5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa PD;
6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu;
7. Masih adanya beberapa data pegawai yang belum akurat.
8. Masih belum terpenuhinya kewajiban peningkatan kompetensi bagi seluruh ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan.

D. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan , diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan pemerintah kota yang disebabkan karena :

2. Masih lemahnya kapasitas lembaga Pemerintah Daerah pelaksana fungsi litbang;
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kelitbangan.;
4. Belum sinergisnya program-program berbasis kelitbangan antar Perangkat Daerah;
5. Masih terbatasnya kolaborasi instansi/lembaga kelitbangan daerah dengan akademisi/pakar, pemerintah, badan usaha, masyarakat;
6. Masih kurangnya hasil kelitbangan yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
7. Masih terbatasnya akses informasi kepada masyarakat tentang hasil kelitbangan Kota Bogor.
8. Masih lemahnya tumbuh kembang inovasi daerah yang disebabkan karena :
 9. Pelaksanaan inovasi di daerah masih bersifat parsial, belum menjadi kebijakan Pemda secara luas dan masif;
 10. Belum terbangunnya kerangka kebijakan Pemda yang berorientasi menciptakan situasi yang kondusif untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi;
 11. Belum terbangunnya infrastruktur inovasi daerah;
 12. Adanya gap implementasi inovasi di daerah.

E. URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola, diantaranya mencakup 1) fungsi pengawasan, dan 2) fungsi pendukung/Sekretariat Daerah

Permasalahan yang dihadapi urusan penunjang lainnya pada fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan antara lain karena :
 - a. Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum seluruhnya mendapat penilaian baik;
 - b. belum ditindaklanjutinya semua rekomendasi laporan hasil reuiu LKPD;

- c. Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif;
 - d. Rekomendasi temuan BPK, temuan Inspektorat Propinsi dan APIP belum secara optimal ditindaklanjuti oleh perangkat daerah;
 - e. Penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah masih rendah;
 - f. Prosentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK masih rendah;
 - g. belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria pengawasan.
2. Belum optimalnya kapabilitas APIP
 3. belum meratanya kompetensi APIP.

4.2 ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA BOGOR

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan.

Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Isu Strategis dari penelaahan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. Isu Strategis Nasional dan Propinsi Jawa Barat;
- c. Isu strategis dari penelaahan kebijakan pembangunan Kota Bogor yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Bogor;
- d. Isu Strategis dari penelaahan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
- e. Dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Bogor.
- f. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Bogor.

4.2.1 Penelaahan Terhadap Isu Strategis Kebijakan Yang Berkaitan

Berikut ini adalah hasil penelaahan terhadap ke enam unsur yang akan menentukan isu strategis pembangunan kota Bogor 5 (lima) tahun ke depan.

A. Isu Strategis Dari Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah :

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Dari ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, hampir semuanya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah kota Bogor untuk pencapaian tujuan dimaksud kecuali Tujuan ke-14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dari pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di Kota Bogor. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan melalui identifikasi dan analisis:

1. Kondisi umum daerah (DDDT, geografis, demografis, aspek pelayanan Umum, aspek daya saing daerah dan keuangan daerah)
2. Analisis Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan;
3. Analisis kontribusi Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun Isu Strategis yang dirumuskan berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan kesejahteraan masyarakat
2. Kemiskinan dan pengangguran
3. Konektivitas pembangunan infrastruktur
4. Aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan

B. PENELAAHAN TERHADAP RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah: “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat

- Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
 4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
 - Pangan dan pertanian
 - Energi, mineral, dan pertambangan
 - Kelautan dan kemaritiman
 - Pariwisata
 - Ekonomi kreatif dan digital
 - Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:

- Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
 4. Pembangunan Infrastruktur:
 - Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
 5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

C. PENELAAHAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

Ada 5 Isu Strategis yang telah dirumuskan dalam RPJMD Propinsi Jabar 2018-2023 yaitu : (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Secara umum dari 5 (lima) isu strategis diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Isu strategis dalam

peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia di Jawa Barat meliputi :

- a) Peningkatan Kualitas pendidikan,
- b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan
- c) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Selain itu pengangguran juga merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan di Jawa Barat mengingat tingkat pengangguran di Jawa Barat masih jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sampai dengan saat ini dikategorikan dalam

kondisi cukup baik meskipun di beberapa tempat masih perlu penanganan yang maksimal. Penataan sistem transportasi perlu segera ditingkatkan terutama di wilayah perkotaan, dikarenakan Pemenuhan sarana transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertumbuhan dan pergerakan orang, barang dan jasa. Revitalisasi jaringan kereta api, pembangunan jalan dan jembatan serta pelabuhan dan bandar udara, penyediaan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi fokus lima tahun kedepan. Komunikasi dan telekomunikasi menjadi daya dukung untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran. Fokus utama lainnya adalah mengantisipasi dampak dari perubahan iklim dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat meningkatkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama penyebaran dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan air limbah domestik harus dikelola secara tepat guna. Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan tetap menjadi perhatian utama untuk lima tahun kedepan.

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif (35,97%), pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil. Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada bidang ketahanan pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat masih di bawah rata-rata nasional, hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, keanekaragaman konsumsi pangan masih rendah, Ketidakstabilan harga pangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal tersebut disebabkan oleh produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistic, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

5. Reformasi birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai

dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

- Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.
- Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Program Unggulan dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat merupakan janji-janji kampanye gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2018 – 2023. Program unggulan ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Program unggulan 2018 - 2023, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. Satu Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layad rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. Satu kabupaten/kota satu destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembangan SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren

- d. Satu pesantren satu produk (trenmarket)
- 6. Infrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta antar kota
 - c. Pengembangan transportasi massal perkotaan
 - d. Pembangunan pelabuhan dan transportasi sungai
- 7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. Satu desa satu Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
- 8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
- 9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
 - a. Provinsi pintar (E-planning, E-budgeting, E-monev, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

D. PENELAAHAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BOGOR 2005-2025

Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumberdaya local
2. Penataan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang berkelanjutan
3. Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia
4. Pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum

Visi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 adalah :

“KOTA JASA YANG NYAMAN DENGAN MASYARAKAT MADANI DAN PEMERINTAHAN AMANAH” yang terdiri dari empat misi yaitu :

1. Berkembangnya Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada;
2. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman (Beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera;
4. Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor merupakan penjabaran dari Misi yang terdapat dalam RPJPD Kota Bogor. Terdapat 21 sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kota Bogor yang dapat dilihat pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24

Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025

MISI RPJPD KOTA BOGOR	SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR
Misi 1. Berkembangnya Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pada seluruh sektor ekonomi terutama sektor jasa yang menjadi basis aktifitas ekonomi
	Meningkatnya kompetensi, produktifitas, penempatan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
	Meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem yang produktif
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor
	Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem

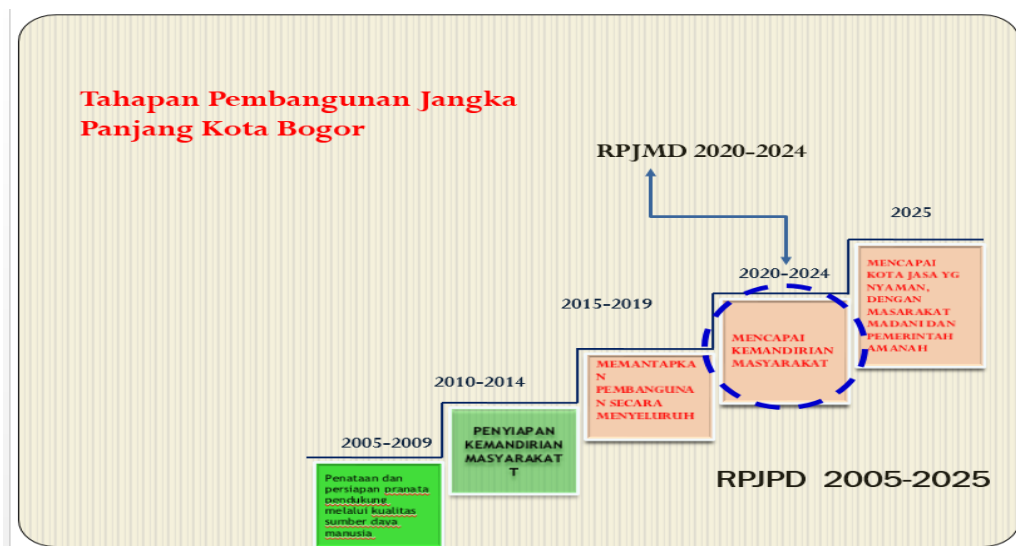
MISI RPJPD KOTA BOGOR	SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR
	<p>informasi yang handal</p> <p>Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai tingkat kesejahteraan pada tahun 2025</p>
<p>Misi 2. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman (Beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan</p>	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat</p> <p>Terbangunnya konsep pembangunan yang nyaman dan berwawasan lingkungan</p> <p>Meningkatnya penataan ruang dan pertanahan</p> <p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk perlindungan masyarakat dari bencana</p> <p>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota</p> <p>Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah</p>
<p>Misi 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera</p>	<p>Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki watak dan perilaku yang berbudi pekerti luhur, cerdas, toleran, gotong royong, dinamis dan berorientasi iptek</p> <p>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM)</p> <p>Meningkatnya peran serta pemuda dalam semua sektor pembangunan dan IPTEK</p> <p>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender</p>
<p>Misi 4. Terwujudnyapemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum</p>	<p>Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis serta meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi secara partisipatif, akuntabel di dalam pelaksanaan pemerintahan</p> <p>Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur berdasarkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil dan masyarakat politik</p> <p>Terciptanya supremasi hukum serta</p>

MISI RPJPD KOTA BOGOR	SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR
	tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukung kondisi politik yang demokratis berbasiskan etika

Tahapan pembangunan jangka panjang terbagi menjadi lima tahapan dan RPJMD tahun 2020-2024 merupakan RPJMD Daerah tahapan keempat. Dalam tahapan ini ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik.

Gambar 4.2

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor 2005-2025



Tabel 4.25

Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memantapkan sektor tersier sebagai sektor unggulan. ➤ PDRB Rp. 7.849.788,84 (juta) ➤ Indeks Daya Beli 74,12

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
2	<p>Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.</p>	<p>➤ Terpeliharanya peningkatan jejaring antar wilayah sentra ekonomi, secara fisik, permodalan dan inovasi</p>
3	<p>Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)</p>	<p>➤ Pengelolaan dan Pemanfaatan pusat bisnis</p> <p>➤ Peningkatan promosi dan pemasaran pusat bisnis</p>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah.	
4	Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi ➤ Mempertahankan iklim investasi yang kondusif ➤ Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi ➤ Peningkatan promosi investasi, agar Kota Bogor menjadi salah satu tujuan investor
5	Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerapan pengelolaan tenaga kerja secara madani oleh pemberi kerja
6	Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan dan peningkatan produktivitas ➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja ➤ Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi. ➤ Meningkatkan Pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah
7	Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	<p>tambah daya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan</p>
8	<p>Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri ➤ Pengelolaan wilayah industri yang berwawasan lingkungan
9	<p>Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama Jasa Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa Angkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan serta jasa lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terpeliharanya keberlanjutan kawasan bisnis dan perdagangan
10	<p>Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penciptaan dan pelestarian kesan dan citra kota Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
11	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memantapkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM ➤ Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar

Berikut arahan pembangunan dalam RPJPD Kota Bogor 2005 – 2025 untuk periode RPJMD 2020-2024.

MISI 1: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN TITIK BERAT PADA JASA YANG MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADA.

No	Arah Pembangunan	2020-2024
1	Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memantapkan sektor tersier sebagai sektor unggulan. ➤ PDRB Rp. 7.849.788,84 (juta) ➤ Indeks Daya Beli 74,12

No	Arah Pembangunan	2020-2024
2	<p>Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.</p>	<p>➤ Terpeliharanya peningkatan jejaring antar wilayah sentra ekonomi, secara fisik, permodalan dan inovasi</p>
3	<p>Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkandaya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah.</p>	<p>➤ Pengelolaan dan Pemanfaatan pusat bisnis</p> <p>➤ Peningkatan promosi dan pemasaran pusat bisnis</p>

No	Arah Pembangunan	2020-2024
4	Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi ➤ Mempertahankan iklim investasi yang kondusif ➤ Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi ➤ Peningkatan promosi investasi, agar Kota Bogor menjadi salah satu tujuan investor
5	Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerapan pengelolaan tenaga kerja secara madani oleh pemberi kerja
6	Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan dan peningkatan produktivitas ➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja ➤ Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi. ➤ Meningkatkan Pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah
7	Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan

No	Arah Pembangunan	2020-2024
8	Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri ➤ Pengelolaan wilayah industri yang berwawasan lingkungan
9	Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama Jasa Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa Angkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan serta jasa lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terpeliharanya keberlanjutan kawasan bisnis dan perdagangan
10	Kepariwisatahan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penciptaan dan pelestarian kesan dan citra kota Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas
11	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memantapkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM ➤ Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar

No	Arah Pembangunan	2020-2024
	hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.	

MISI 2: MEWUJUDKAN KOTA YANG BERSIH, INDAH, TERTIB DAN AMAN (BERIMAN) DENGAN SARANA PRASARANA PERKOTAAN YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

No	Arah Pembangunan	2020-2024
1	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang dan pertanahan yang terintegrasi secara nasional, regional, maupun lokal menuju kota metropolitan yang nyaman	➤ Pengendalian tata ruang terutama untuk menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan
2	Mewujudkan penataan kota secara menyeluruh untuk membentuk wajah dan lingkungan kota yang beridentitas dan berbudaya yang mendukung kenyamanan dan daya tarik wisata	➤ Pemantapan penataan kota yang beridentitas dan berbudaya
3	Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyelenggaraan transportasi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta bersinergi dengan tata ruang	➤ Pemantapan angkutan umum ➤ Pemantapan rekayasa lalu lintas

No	Arah Pembangunan	2020-2024
4	Mewujudkan kelestarian sistem ekologi kota yang memperhatikan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan serta pengamanan kota dari bencana melalui perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terintegrasi secara regional.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan ruang terbuka hijau ➤ Perlindungan Kawasan Resapan Air ➤ Penataan bantaran sungai
5	Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui pembangunan perumahan permukiman yang sehat dengan mengutamakan pembangunan secara vertikal dan memperhatikan daya dukung lahan, konservasi sumber daya air serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan pemukiman ➤ Perwujudan lingkungan permukiman yang berkualitas ➤ Pengelolaan dan pengembangan rusun
6	Mewujudkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana informasi telekomunikasi modern untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kegiatan perkotaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Integrasi jaringan utilitas kota dilakukan secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan layanan kualitas air minum ➤ keterpaduan jaringan utilitas Kota
7	Meningkatkan sistem layanan persampahan melalui modernisasi pengolahan dan peningkatan partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan kinerja layanan persampahan ➤ Pemantapan pengembangan pengelolaan persampahan

No	Arah Pembangunan	2020-2024
	masyarakat	<p>skala kawasan dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perluasan jaringan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat ➤ Pemantapan Pengelolaan TPA
8	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan model partisipasi swasta dalam investasi dibidang infrastruktur dan sarana kota

MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERKETERAMPILAN, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.

No	Arah Pembangunan	2020-2024
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IPM Kota Bogor 86.85
2	Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Penduduk 1.500.000 jiwa ➤ LPP 2 %
3	Terciptanya sistem administrasi kependudukan yang tertib guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan sistem administrasi kependudukan

No	Arah Pembangunan	2020-2024
4	Pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya pendidikan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas berketerampilan dan berdaya saing dengan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bebas Buta ➤ RLS 15.00 ➤ Peningkatan kualitas lulusan pendidikan non formal
5	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AHH 79.5
6	Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian disertai peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya peningkatan pembiayaan, pembinaan, pengawasan pengendalian dan Penilaian dalam pelayanan kesehatan serta pemantapan kemandirian masyarakat
7	Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya pemantapan, pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat
8	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi sumber	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Sosial (34.86%)

No	Arah Pembangunan	2020-2024
	kesejahteraan sosial.	
9	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak anak-anak yang dilaksanakan secara integral lintas sektor dan lintas wilayah.	➤ Menurunnya Jumlah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (0%)
10	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat.	➤ Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak (40%)
11	Pembangunan daerah harus memperhatikan pengarusutamaan gender yaitu setiap kebijakan publik haruslah memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki.	➤ Pemantapan kebijakan publik yang memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki
12	Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan.	➤ Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan (100%) ➤ Pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
13	Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga dan budaya olahraga di kalangan masyarakat.	➤ Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM.

No	Arah Pembangunan	2020-2024
1	Memantapkan dan mendukung proses demokrasi secara berkelanjutan pada berbagai aspek, yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan pembangunan Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan dan penguatan pemahaman partisipasi politik masyarakat yang demokratis
2	Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang amanah pada semua tingkat pemerintahan serta mendekatkan pola pelayanan masyarakat yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat
3	Terwujudnya kualitas masyarakat dan aparatur yang mempunyai kesadaran hukum dan menjunjung tinggi hukum serta memperkuat penegakan hukum tanpa diskriminatif dengan sanksi hukum yang tegas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan budaya hukum masyarakat dengan tersedianya produk hukum daerah yang responsif ➤ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penegakan hukum ➤ Peningkatan kompetensi aparatur
4	Memperkuat peran serta masyarakat melalui bentuk kelembagaan yang lebih efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan
5	Terwujudnya sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan
6	Memantapkan peran media massa yang profesional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan bertanggungjawab dengan menjadikan media massa sebagai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan peran Media yang profesional dan bertanggungjawab sebagai alat kontrol

	alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik	
7	Terciptanya kesetaraan gender dalam segala aspek tatanan kehidupan	➤ Pemantapan program, anggaran, kerjasama yang berbasis gender

E. PENELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Pada tahun 2016, Kota Bogor telah melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031. Proses evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dilakukan secara menyeluruh termasuk evaluasi Perda No.8 Tahun 2011 sebagai produk hukum resmi RTRW Kota Bogor. Kegiatan evaluasi RTRW Kota Bogor dilaksanakan karena

terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya. Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi kebijakan, strategi, rencana dan program yang ada atau akan memperkuat kebijakan, strategi, rencana dan program yang telah ada.

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi evaluasi RTRW Kota Bogor diantaranya:

- a. Peraturan yang dikeluarkan di tingkat pusat atau propinsi terkait dengan substansi dalam rencana tata ruang, misalkan adanya UU, PP, Permen, Perda Propinsi, Perda Kota dan lain-lain
- b. Kebijakan dan rencana regional dari kementrian/lembaga di pusat dan propinsi yang terkait dengan rencana tata ruang Kota Bogor, yang berakibat kepada adanya perubahan:
 - Perubahan rencana struktur ruang, yaitu sistem pusat dan rencana infrastruktur
 - Perubahan rencana pola ruang
- c. Rencana tata ruang wilayah tetangga (Kabupaten Bogor) dan rencana yang telah disepakati dengan wilayah tetangga (Kabupaten Bogor).

Di samping faktor eksternal, kegiatan evaluasi RTRW Kota Bogor dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhinya. Faktor internal ini sebagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi kebijakan, strategi, rencana dan program yang ada atau akan memperkuat kebijakan, strategi, rencana dan program yang telah ada. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi evaluasi RTRW Kota Bogor diantaranya:

- a) Rencana dan Kajian Sektoral

Dalam perjalanan realisasi RTRW Kota Bogor, beberapa rencana dan kajian sektoral telah disusun setelah RTRW diperdakan. Hasil dari rencana dan kajian tersebut merupakan turunan dari rencana tata ruang dengan pendetaian sesuai kebutuhan sektor. Pendetailan tersebut guna menjabarkan rencana tata ruang serta menyelesaikan

permasalahan dan kebutuhan sektor pada masa mendatang. Maka dari itu dalam evaluasi RTRW ini, hasil rencana dan kajian sektor perlu dipertimbangkan guna mengevaluasi apakah rencana yang ada masih relevan untuk dilanjutkan atau terdapat rencana dan targetan sektor yang baru yang perlu diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

b) Isu Strategis Penegasan Batas Kota

Batas kota yang saat ini digunakan oleh Kota Bogor, mulai tahun 2014 disempurnakan batas batasnya di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya peta batas Kota Bogor yang telah disempurnakan pada tahun 2014 dan yang akan digunakan untuk segala keperluan administrasi batas kota termasuk dalam RTRW Kota Bogor. Kondisi ini akan menyebabkan perlunya diperbaiki peta dasar maupun peta tematik yang ada dalam RTRW Kota Bogor, yaitu peta dengan batas yang paling aktual.

c) Isu Strategis baru transportasi

Aspek transportasi merupakan aspek penting sebagai pembentuk kota. Dalam mewujudkan rencana tata ruang Kota Bogor, dalam kurun 5 tahun terakhir ini terdapat beberapa isu strategis transportasi yang akan mempengaruhi transportasi Kota Bogor. Isu strategis ini akan turut menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan, strategi, rencana dan program transportasi.

Beberapa isu strategis transportasi Kota Bogor:

1. Transportasi Massal
 - Rencana pengembangan transpakuan
 - Rencana pengembangan angkutan berbasis rel : LRT, Monorel
 - TOD Sukaresmi
2. Terminal Baranangsiang
 - Terminal tipe A
 - Stasiun LRT
3. Rencana Terminal Tanah Baru
 - Terminal tipe A

- Stasiun LRT/monorel
 - Terminal barang
 - TOD / mixed use
4. Skywalk
- Baranangsiang – Suryakencana
 - Sukaresmi
 - Air Mancur – Sempur
- d) Isu Strategis Perbedaan Pola Ruang Eksisting dengan Rencana

Dari hasil evaluasi RTRW 2011-2031 yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 tersebut merekomendasikan untuk dilanjutkan dengan penyusunan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor 2011-2031.

Ada beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penataan ruang Kota Bogor 2011-2031, yaitu :

1) Keterkaitan Kota Bogor Dengan Wilayah Sekitarnya

Kota Bogor secara geografis terletak di kawasan Jabodetabek di mana secara struktur Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam PKN Bodebek. Posisinya yang strategis sebagai bagian dari metropolitan Jakarta maka dalam perkembangan kotanya banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan kegiatan dari sistem metropolitan Jabodetabek. Perencanaan Kota Bogor tidak mungkin hanya melihat Bogor sebagai suatu kota tunggal namun harus diperhatikan pula posisinya dalam lingkup regional.

Sebagai bagian dari PKN Bodebek, Kota Bogor merupakan salah satu penyangga Jakarta yang bersama dengan Kota/Kab Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor harus dapat berbagi peran dalam pengembangan PKN ini. Keterkaitan Kota Bogor dengan kota/kab di sekitar Jakarta ini meliputi sistem jaringan jalan terutama menyangkut jalan tol dan arteri primer serta menyangkut sistem kota dan pola ruang. Sebagai penyangga

Jakarta beberapa fungsi penunjang Jakarta dilimpahkan pula di kawasan penyangga tersebut termasuk di Kota Bogor.

Dalam hal kependudukan, diproyeksikan penduduk Kota Bogor akan mencapai 1 juta jiwa pada tahun 2011 maka secara klasifikasi kota Kota Bogor akan meningkat dari Kota Besar menjadi Metropolitan. Sebagai Kota Metropolitan maka konsentrasi penduduk akan berpusat pada kota tersebut. Di mana dengan berubahnya menjadi Kota Metropolitan maka kebutuhan pengembangan dan kegiatan yang harus diwadahi di Kota Bogor mengalami perubahan pula. Hal ini perlu diantisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang untuk masa 20 tahun ke depan ini.

Keterkaitan struktur dan ketergantungan Kota Bogor dalam lingkup regional meliputi:

Sistem kota, sebagai bagian dari PKN Bodebek maka Kota Bogor merupakan kota satelit Jakarta yang diarahkan pengembangannya menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan dan jasa. Beberapa fasilitas minimum dari PKN dapat disediakan oleh Kota Bogor, namun demikian perlu adanya koordinasi dengan kawasan Bodebek lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih fasilitas yang disediakan.

Jaringan jalan, dalam merencanakan sistem jaringan jalan Kota Bogor maka sistem regional perlu dipertimbangkan dan dijadikan masukan dalam rencana terutama dalam hal jaringan jalan Tol, arteri primer dan kolektor primer. Beberapa jaringan jalan yang perlu dipertimbangkan diantaranya Rencana Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), Rencana Jalan Bogor Outer Ring Road (BORR), rencana Tol Ciawi-Sukabumi, dan Bogor Inner Ring Road.

Kereta api, merupakan salah satu moda yang digunakan oleh para komuter dalam menempuh perjalanannya ke Jakarta. Frekwensi perjalanan kereta api dalam sehari sangat tinggi dengan jumlah penumpang harian rata-rata 30.000 penumpang. Kondisi saat ini perlintasan jaringan jalan kereta api dan jalan raya kebanyakan masih sebidang, hal ini menjadi salah satu faktor

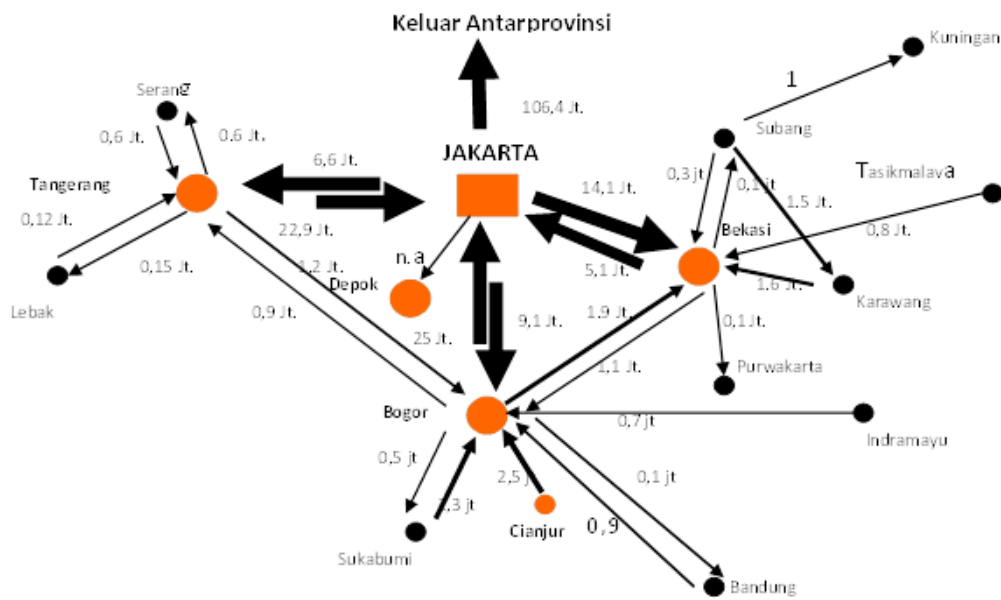
penyebab kemacetan lalu lintas Kota Bogor pada beberapa titik perlintasan. Pengembangan moda kereta api menjadi penting guna menunjang pergerakan penduduk Kota Bogor dan kawasan sekitarnya menuju Jakarta namun perlu pula diperhatikan kondisi perlintasan yang ada. Di masa mendatang perlintasan kereta api dan jalan raya sebaiknya tidak sebidang.

Sebagai kota satelit Jakarta, maka perkembangan pola ruang Kota Bogor lebih banyak diarahkan kepada perumahan dan mulai pula berkembang kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang perumahan. Perumahan yang dibangun di Kota Bogor terutama yang berlokasi di bagian utara lebih untuk memenuhi kebutuhan perumahan baik para pekerja di Jakarta. Saat ini perkembangan perumahan untuk pasar pekerja di Jakarta mulai merambah ke bagian timur dan selatan, hal ini perlu diantisipasi aspek transportasinya karena seringkali perumahan hanya merencanakan pembangunan di dalam areal perumahan tanpa memikirkan sistem transportasi penunjang keluar dari perumahan menuju tempat kerja (dalam hal ini ke arah Jakarta).

Dalam lingkup Bogor Raya, Kota Bogor akan tetap menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi, pusat layanan transportasi dan pusat perdagangan khususnya terhadap wilayah-wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor. Mengingat hal tersebut maka dalam perencanaan fasilitas pelayanan terutama di kawasan pinggiran penduduk kawasan pinggiran perlu diperhatikan serta akses menuju fasilitas dari kawasan pinggiran.

Dalam hal utilitas, Kota Bogor memiliki ketergantungan kepada Kabupaten Bogor dalam hal penyediaan sumber air dan TPA. Agar kebutuhan akan sumber air serta lahan untuk TPA dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penduduk Kota Bogor maka dalam merencanakan sistem utilitas kota, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor.

Gambar 4.3
Keterkaitan Antarkota PKN Metropolitan Jabodetabek-Punjur
(Eksisting)



Sumber: RTRW Kota Bogor, 2011

2) Peran dan Fungsi Kota Bogor

Dalam konteks Jabodetabek Punjur, Kota Bogor dan Kota Depok sebagai kota satelit, pemanfaatannya diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, serta perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor). Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam.

Sebagai kawasan yang berada di bagian hulu, Bopunjur diarahkan sebagai kawasan lindung. Dengan peran Bopunjur yang demikian, Kota Bogor dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan tersedianya daerah-daerah resapan air berupa waduk, ruang terbuka hijau dan lain-lain yang mampu menampung limbah air permukaan.

Peningkatan pemanfaatan jalur KA yang menghubungkan Kota Bogor dengan DKI Jakarta serta peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Citayam Depok dengan jalan lingkar luar Jakarta (JORR) akan meningkatkan interaksi antara DKI Jakarta dengan Kota Bogor. Peningkatan aksesibilitas antara Jakarta dengan Bogor harus dimanfaatkan oleh Kota Bogor sebagai peluang membangun kesalingtergantungan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang sosial ekonomi.

Dalam sistem kota-kota di Jabodetabekpunjur, Jakarta diposisikan sebagai kota inti dan Bodetabek serta kota lainnya seperti BSD sebagai satelit. Hal ini tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki kota-kota tersebut. Berdasarkan potensi dan posisi geografis yang dimilikinya, kota-kota dalam lingkup Bodetabek selayaknya dapat menjadi kota yang mandiri yang pada akhirnya menumbuhkan interaksi yang positif dan saling menguntungkan.

Potensi yang dimiliki Kota Bogor memungkinkan untuk tidak sepenuhnya menjadi satelit Jakarta karena apabila ini berlangsung terus justru akan saling merugikan. Yang perlu diciptakan adalah kesalingtergantungan sehingga di antara keduanya tercipta interaksi yang positif dan saling menguntungkan. Kota Bogor perlu menggunakan potensinya (dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekologis) untuk menampung limpahan perkembangan Kota Jakarta sehingga kegiatan ekonominya lebih berkembang, tercipta lapangan kerja yang lebih banyak, dan terwujud kemandirian dari segi pembiayaan pembangunan.

Pemanfaatan ruang Kota Bogor dan Kota Depok sebagai kota satelit diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, serta perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor). Kawasan permukiman kepadatan tinggi di Kota Bogor perlu dipertimbangkan hanya di kawasan-kawasan tertentu mengingat fungsinya sebagai kawasan resapan air dalam ekosistem Jabodetabek Punjur.

Pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam. Arah pemanfaatan ruang bagi kedua kabupaten ini memberi peluang bagi Kota Bogor untuk berperan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi. Kota Bogor dengan posisi geografis dan akses yang dimilikinya juga memungkinkan untuk berperan sebagai pusat perdagangan berskala regional.

3) Daya Dukung Dan Daya Tampung Ruang

Wilayah Kota Bogor merupakan wilayah yang secara topografi cukup datar dan sedikit bergelombang pada bagian selatan. Kondisi ini sangat cocok untuk pengembangan kegiatan perkotaan berupa permukiman dan prasarananya serta kegiatan ekonomis lainnya seperti industri, perdagangan dan jasa. Disamping itu wilayah Kota Bogor yang termasuk dalam konstelasi Kawasan Jabodetabek terhubung dengan kota inti yaitu DKI Jakarta melalui jejaring transportasi yang baik sehingga menyebabkan pergerakan penduduk antara kedua kota tersebut menjadi sangat mudah. Kondisi tersebut didukung dengan kebijakan perwilayahan yang memberikan peran pengembangan kegiatan perumahan dan sarana pendukungnya serta industri di Kota Bogor sebagai kota satelit dalam konstelasi Jabodetabek.

Di sisi lain kondisi fisik dasar lahan Kota Bogor relatif tidak mempunyai masalah untuk dikembangkan sepenuhnya untuk kegiatan perkotaan. Hanya beberapa daerah yang mempunyai hambatan berupa kondisi topografi lahan yang memiliki keterbatasan yang curam sehingga sulit dibangun dan lahan kawasan resapan air potensial yang memerlukan pengaturan dan pengendalian dalam hal pemanfaatannya untuk kegiatan perkotaan.

Perkembangan teknologi dengan penggunaan lahan secara intensif dapat menjadi solusi untuk menampung pertambahan

jumlah penduduk tersebut. Namun hal tersebut tidak mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ketersediaan prasarana pendukung perkotaan. Oleh karena itu perlu dihitung kemampuan lahan Kota Bogor dalam menampung pertambahan jumlah penduduk dengan memperhitungkan kualitas lingkungan dan prasarannya sehingga penduduk yang tinggal di Kota Bogor memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktifitas di Kota Bogor. Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan menggunakan kebutuhan data dan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri PU No.20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Analisis Daya dukung lahan menitikberatkan pada analisis kondisi fisik wilayah mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dikembangkan pada wilayah tersebut ditinjau dari kondisi fisiknya. Hasil akhirnya berupa Wilayah Kesuaian yang dapat dijadikan acuan dasar untuk penataan Ruang.

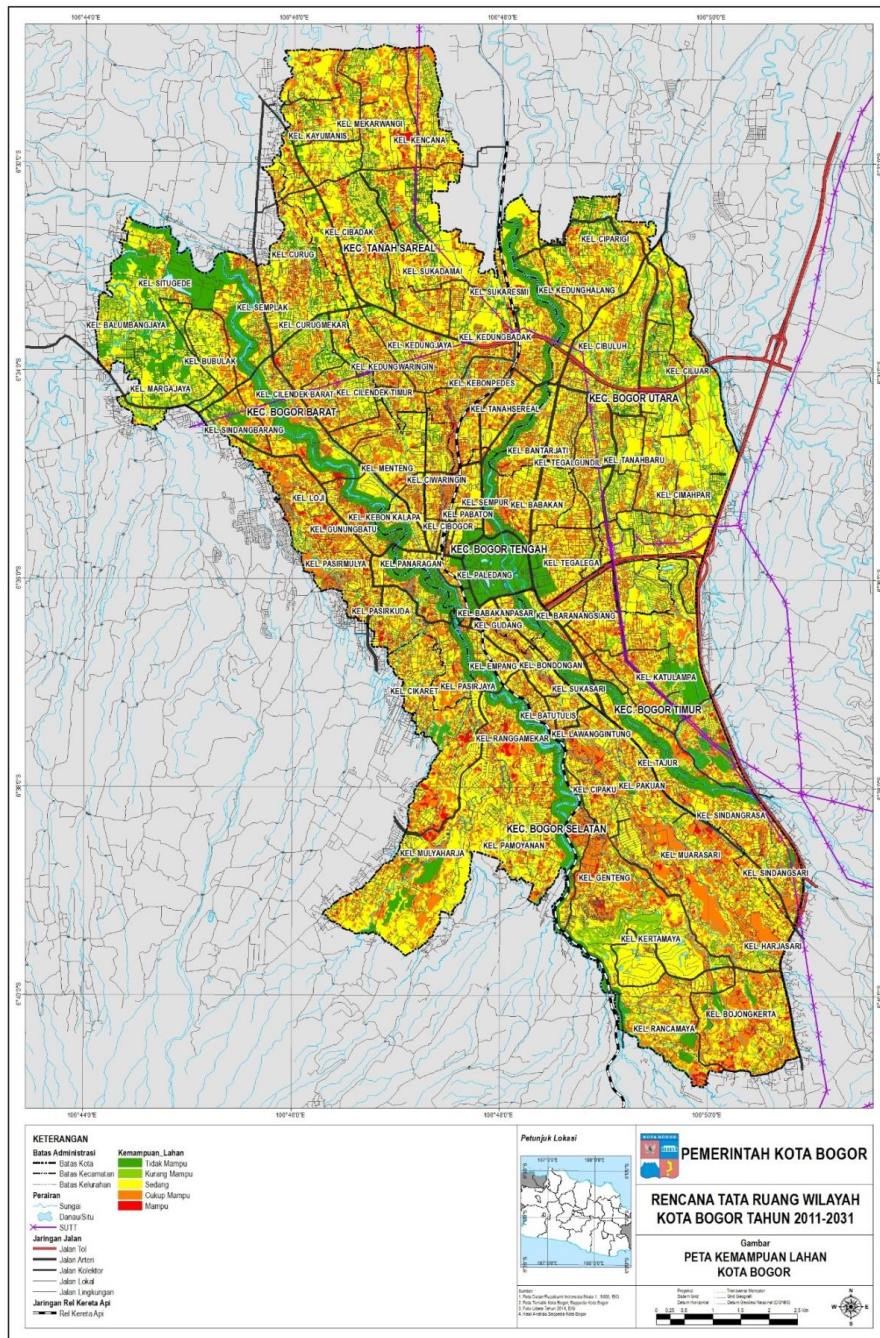
Sebelum mengetahui kemampuan dan kesesuaian lahan dilakukan analisis – analisis seperti analisis satuan kemampuan lahan morfologi, analisis satuan kemampuan lahan lereng, analisis satuan kemampuan lahan pondasi, analisis satuan kemampuan lahan ketersediaan air, analisis satuan kemampuan daerah resapan air, analisis satuan kemampuan lahan untuk drainase analisis satuan kemampuan lahan terhadap erosi, analisis satuan kemampuan lahan pembuangan limbah, dan analisis satuan kemampuan lahan bencana alam. Setelah dilakukan hasil analisis semua satuan kemampuan lahan kembali dianalisis menggunakan analisis superimpose untuk menunjukkan kemampuan lahan di wilayah atau kawasan perencanaan secara keseluruhan. Dari hasil analisis kemampuan lahan, wilayah Kota Bogor cenderung memiliki kemampuan lahan di kelas sedang jika akan dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Maka dari itu, Kota Bogor dapat diarahkan menjadi kawasan yang memiliki fungsi untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.26
Kemampuan Lahan Kota Bogor

Wilayah Pelayanan	Kemampuan Lahan					Total
	Tidak Mampu	Kurang Mampu	Sedang	Cukup Mampu	Mampu	
A	310,171	53,571	705,624	501,635	86,699	1657,7
B	301,477	90,547	664,497	318,567	67,312	1442,4
C	280,101	178,419	1418,248	740,658	107,156	2724,58
D	123,493	252,157	1036,901	390,631	12,578	1815,76
E	363,585	223,134	1557,453	1200,540	157,038	3501,75
Total						11142,2

Sumber : Hasil Analisis 2018

Gambar 4.4
Peta Kemampuan Lahan Kota Bogor



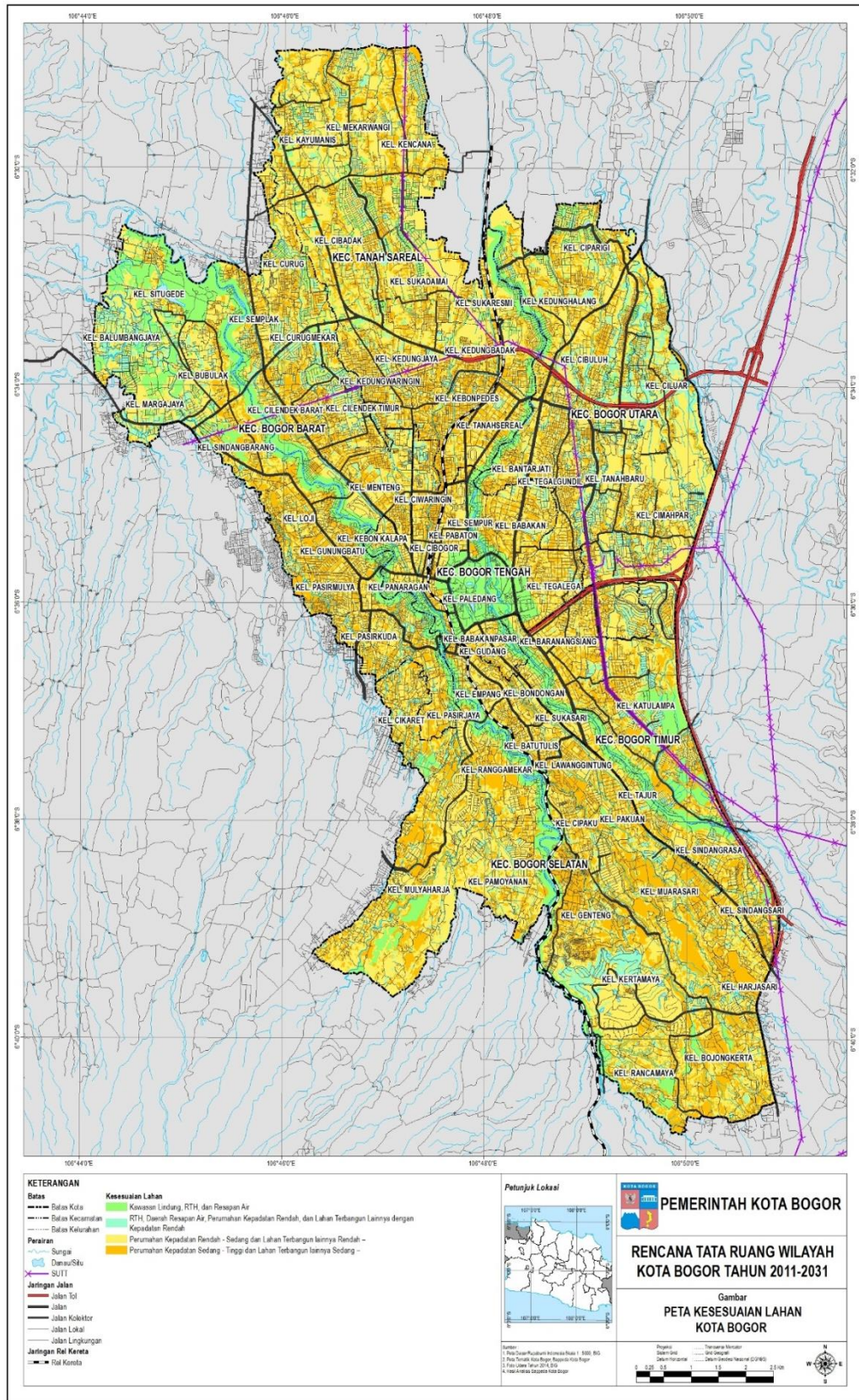
Setelah mendapatkan kemampuan lahan di Kota Bogor, kemudian dapat ditentukan potensi pengembangan wilayah yang memungkinkan untuk dikembangkan di Kota Bogor. Sebagai contoh, saat ini di wilayah pelayanan D dikembangkan sebagai permukiman dan setelah dilakukan analisis didapatkan bahwa wilayah pelayanan D cocok dikembangkan sebagai perumahan kepadatan rendah hingga sedang dan sebagai lahan terbangun lainnya dengan kepadatan rendah hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pelayanan B memiliki potensi kesesuaian lahan sebagai kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan resapan air paling besar diantara wilayah pelayanan lainnya dalam hal kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan resapan air.

Tabel 4.27
Kesesuaian Lahan Kota Bogor

Kesesuaian Lahan	Wilayah Pelayanan					Total
	A	B	C	D	E	
Kawasan Lindung, RTH, dan Resapan Air	310,171	301,477	280,101	123,493	363,585	1378,8
RTH, Daerah Resapan Air, Perumahan Kepadatan Rendah, dan Lahan Terbangun Lainnya dengan Kepadatan Rendah	53,571	90,547	178,419	252,157	223,134	797,8
Perumahan Kepadatan Rendah - Sedang dan Lahan Terbangun lainnya Rendah - Sedang	705,624	664,497	1418,448	1036,901	1557,453	5382,7
Perumahan Kepadatan Sedang - Tinggi dan Lahan Terbangun lainnya Sedang - Tinggi	588,335	385,879	847,814	403,209	1357,578	3582,8
Total						11142,2

Sumber : Hasil Analisis 2018

Gambar 4.5
Peta Kesesuaian Lahan Kota Bogor



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031

4) Struktur Ruang Kota

Dengan proyeksi jumlah penduduk yang mencapai 1,7 juta jiwa pada tahun 2031 (berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031, maka struktur ruang yang ada saat ini (1 pusat kota yang berkembang secara linear ke pinggiran jalan-jalan utama) dinilai tidak akan mampu untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman. Orientasi penduduk yang berjumlah mencapai 1,8 juta ke pusat kota akan menyebabkan permasalahan transportasi seperti kemacetan lalu lintas tidak terhindarkan pada ruas jalan-jalan utama kota yang menuju pusat kota.

Dengan demikian perlu adanya penyesuaian bentuk struktur ruang untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan kota agar terjadi keseimbangan pemanfaatan ruang. Penyesuaian struktur ruang dilakukan dengan mengubah sistem pusat yang dinilai tidak akomodatif lagi jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan dan perkembangan kota. Perubahan sistem pusat ini akan didasarkan atas hasil analisis mengenai perkembangan kota dalam 20 tahun serta kebutuhan ruang dan infrastruktur penduduknya.

Sebagai kota metropolitan perlu adanya redistribusi kegiatan dan fasilitas pelayanan ke setiap wilayah kota secara hirarkis serta pengurangan beban pusat kota. Hal ini tentunya perlu ditunjang dengan jaringan jalan yang merata ke seluruh wilayah kota serta penyesuaian hirarki fungsi jalan yang seharusnya. Perubahan sistem pusat tersebut tentunya harus diikuti dengan persiapan kelengkapan fasilitas untuk masing-masing pusat sesuai dengan arahan peran dan tema pengembangan pusat tersebut. Pada pusat-pusat yang direncanakan di wilayah perbatasan, pengadaan fasilitasnya perlu memperhatikan keberadaan fasilitas-fasilitas yang ada dan direncanakan di wilayah perbatasan yang termasuk di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama antarwilayah dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas terutama pada wilayah perbatasan.

5) Sistem Transportasi

Aksesibilitas pergerakan yang ada di Kota Bogor belum merata, hal ini disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dari jaringan jalan yang ada. Sistem jaringan yang ada saat ini masih bertumpu pada pusat kota. Berkumpulnya beban pada pusat kota ini yang kemudian menyebabkan berbagai masalah transportasi. Selain itu, untuk jangka waktu sampai akhir masa perencanaan, pengembangan jaringan transportasi perlu mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk dan kemungkinan kegiatan yang tumbuh di Kota Bogor.

Isu-isu lain adalah adanya pembangunan dan peningkatan jalan (arteri dan kolektor) pada wilayah baru dilakukan mendahului atau sejalan dengan pengembangan kawasan baru. Perlunya pengembangan terminal tipe A yang representatif dengan luas lahan yang memadai sebagai terminal tipe A, sesuai dengan perkembangan Kota Bogor saat ini dan masa datang. Kota Bogor juga dipandang sudah memerlukan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terintegrasi, nyaman dan terjangkau. Angkutan massal ini tidak hanya melayani internal Kota Bogor namun harus pula merupakan bagian dari sistem transportasi massal regional.

Isu yang tak kalah penting, namun sering diabaikan dalam rencana pengembangan transportasi adalah mengakomodasi pengguna jalan pejalan kaki. Dalam perencanaan 20 tahun mendatang, perencanaan yang dilakukan haruslah yang berpihak kepada masyarakat termasuk kepada pejalan kaki tidak hanya untuk mereka yang menggunakan kendaraan bermotor. Saat ini pedestrian di Kota Bogor belum semua ruas jalan dilengkapi dengan pedestrian yang memadai. Prioritas pengembangan pedestrian perlu diarahkan pada pusat-pusat kegiatan baik di pusat kota maupun pusat bagian kota lainnya dan sekitar Kebun Raya.

Isu lain adalah menyangkut moda kereta api. Tingginya frekuensi kereta api serta persimpangan yang masih sebidang antara jalan dan rel kereta api, menyebabkan sering terjadi kemacetan pada persimpangan tersebut. Perlintasan tidak

sebidang dalam perencanaan ke depan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan jaringan kereta api.

6) *Ketersediaan Infrastruktur*

Isu-isu strategis terkait dengan infrastruktur adalah air minum, air limbah, drainase, persampahan, listrik, telekomunikasi dan gas. Dari beberapa infrastruktur yang disebutkan terdapat kesamaan pada isu mengenai upaya penyediaan infrastruktur yang dapat melayani jumlah penduduk sampai tahun 2029. Penyediaan infrastruktur yang dimaksud juga tidak terlepas dari penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan (*green infrastructure*). Infrastruktur yang berbasis lingkungan adalah infrastruktur yang sistem penyediaan dan pengoperasiannya yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Paradigma penyediaan infrastruktur yang identik dengan penyediaan oleh pemerintah juga harus diubah. Pemerintah daerah yang dalam ini adalah pemerintah kota dapat membuka peluang bagi masuknya pihak-pihak lain yang berminat dalam penyediaan infrastruktur. Ini dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk itu rancangan mengenai pola kemitraan penyediaan infrastruktur menjadi penting.

Isu spesifik per infrastruktur meliputi masih kurangnya prasarana air minum (saat ini tingkat pelayanan air bersih baru mencapai 47% dengan pelayanan belum optimal), perlunya optimalisasi dan pengembangan pelayanan IPAL, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui program 3R dan pengolahan sampah berbasis komunitas, pentingnya keterpaduan sistem drainase jalan dan lingkungan perumahan.

Isu mengenai penataan dan pemanfaatan tower bersama telekomunikasi menjadi salah satu isu penting pengembangan infrastruktur dalam konteks semakin berkembangnya telekomunikasi nirkabel. Isu lain adalah mengenai kebutuhan jaringan distribusi gas untuk mendukung program kendaraan berbahan bakar gas. Untuk menciptakan keserasian dalam

pemenuhan infrastruktur kota, maka hal yang perlu direncanakan adalah pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya yaitu sistem terpadu jaringan bersama di bawah tanah (*ducting system*).

7) Pola Ruang Kota

Ruang kota yang terbatas tidak hanya menuntut adanya optimasi pemanfaatan lahan tetapi juga menuntut keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk keberlanjutan pengembangan kota dalam jangka panjang. Perkembangan pola ruang eksisting kota secara umum dilihat dari perkembangan pemanfaatan lahan komersial, perumahan, industri dan kawasan lindung. Pemanfaatan lahan komersial di Kota Bogor umumnya terjadi pada jalur-jalur utama kota yang semula memiliki fungsi sebagai perumahan golongan menengah ke atas dengan kapling besar menjadi kegiatan komersial yang tidak berskala pelayanan lingkungan atau lokal, tetapi berskala pelayanan kota atau regional. Contoh yang terjadi adalah di sepanjang Jl. Raya Pajajaran, Jl. Tajur, Jl. Bangbarung Raya dan Jl. Pandu Raya.

Kebijakan mengenai luas lahan minimum yang dapat dikembangkan menjadi lahan perumahan berakibat pada tumbuhnya praktek pemecahan luas lahan menjadi kavling yang siap dibangun. Akibatnya terjadinya pertumbuhan perumahan dengan luas kavling kecil yang minim atau bahkan tidak didukung dengan ketersediaan fasilitas umum dan sosial serta hanya dengan dukungan utilitas yang minim.

Isu-isu mengenai kegiatan industri meliputi perlunya untuk membatasi lokasi penambahan industri dan menata kawasan di sekitar lahan industri yang ada. Hal ini karena faktor kecocokan lahan terhadap prasyarat minimum prasarana pendukung industri seperti jalan yang dapat dilalui kendaraan besar.

Untuk kawasan lindung, terdapat beberapa hal seperti alih fungsi lahan sempadan dan pendangkalan sungai. Alih fungsi lahan sempadan terjadi akibat makin terbatasnya lahan yang ada

di perkotaan. Sedangkan jika terdapat ketersediaan lahan dapat dipastikan memiliki nilai lahan yang tinggi. Pendangkalan sungai timbul dari adanya tingkat erosi yang tinggi sebagai akibat dari tidak berfungsinya kawasan Konservasi di Wilayah Bogor Selatan. Lumpur dan tanah akibat erosi mengalir ke sungai Cisadane dan Ciliwung dan pada akhirnya sungai ini menjadi dangkal dan dapat menimbulkan banjir. Khusus berkaitan dengan kawasan lindung setempat muncul persoalan kurangnya ruang terbuka hijau, hutan kota, taman kota, taman bermain, ruang olahraga, dan lain-lain.

Optimasi penggunaan lahan dalam konteks Kota Bogor adalah dengan melakukan pembangunan yang berbasis pada peningkatan manfaat lahan melalui konsep pengembangan vertikal. Pengembangan secara vertikal dilakukan terutama pada kawasan pusat kota dengan kondisi tingginya harga lahan dan terbatasnya luas sediaan lahan. Keseimbangan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya diwujudkan dalam pengembangan yang melindungi kawasan-kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan yang memiliki fungsi lindung, baik sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, kawasan lindung geologi maupun kawasan lindung lainnya, seperti kawasan perlindungan plasma nutfah.

8) Ruang Publik

Yang dimaksud dengan ruang publik dalam tata guna lahan atau pemanfaatan ruang wilayah/area perkotaan adalah ruang terbuka (open space) yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah kota yang bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktivitas sosial (rekreasi, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan) seluruh warganya. Sedangkan wujud dari ruang terbuka (open space) adalah berupa lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan; ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak-anak,

pekuburan dan daerah hijau pada umumnya. Daerah hijau pada umumnya meliputi median jalan; sempadan jalan, sungai, pantai, jalur Kereta Api atau area dibawah SUTET. Demi untuk menjamin kepentingan sosial bagi semua golongan/strata warga kotanya maka semestinya semua ruang publik tersebut adalah milik Pemerintah Kota.

F. PENELAAHAN TERHADAP RPJMD DAERAH LAINNYA

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Bogor adalah satu-satunya daerah perbatasan yang melingkupi wilayah Kota Bogor. Dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, ada beberapa isu strategis yang ditetapkan dalam dokumen tersebut antara lain adalah :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan
3. Peningkatan pelayanan kesehatan
4. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
5. Peningkatan daya saing dan produktivitas perekonomian daerah
6. Peningkatan investasi daerah
7. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
9. Pengelolaan kebencanaan
10. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
11. pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
12. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
13. Peningkatan pelayanan publik.

Kerjasama Kabupaten – Kota Bogor menjadi salah satu isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor dan RPJMD Kota Bogor sehingga perencanaan jangka menengah kabupaten-kota Bogor dapat secara sinergis dirumuskan dalam rangka penanganan permasalahan-permasalahan baik social, ekonomi maupun pengembangan infrastruktur wilayah terutama di wilayah-wilayah perbatasan.

G. PENELAAHAN TERHADAP ISU STRATEGIS RANCANGAN KLHS RPJMD KOTA BOGOR 2019-2024

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Bogor merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan Isu Strategis PB dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data -data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan berdasarkan pada identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian-kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (stakeholders) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Bogor, baik atas nama individu maupun lembaga.

Rumusan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan merupakan hasil identifikasi dari capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP. 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Secara umum Hasil identifikasi terhadap capaian TPB Kota Bogor untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional.
2. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional.
3. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional.

Sedangkan untuk indikator TPB yang telah ada dalam RPJMD dan telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kota Bogor, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

4.2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan; Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka yang termasuk dalam pilar ini antara lain kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Dalam tabel 4.33 berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar sosial di Kota Bogor.

Tabel 4.28

Rumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pilar Sosial

TPB PILAR SOSIAL	ISU STRATEGIS DARI INDIKATOR TPB YANG BELUM MENCAPAI
Tujuan 1 mengentaskan segala bentuk kemiskinan	1) Prosentase Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi 2) pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin melalui program JKN belum optimal; 3) Penanganan kawasan permukiman
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	1) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 2) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	1) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	1) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

4.2.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan Tujuan 17 menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 4.29

Rumusan Isu Strategis TPB Pilar Ekonomi Di Kota Bogor

TPB PILAR EKONOMI	ISU STRATEGIS DARI INDIKATOR TPB YANG BELUM MENCAPAI
Tujuan 8 mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua	Jumlah wisatawan mancanegara (Jumlah kunjungan wisata)
Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur (industri Pengolahan) terhadap PDB dan perkapita
Tujuan 10 mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara	1) Indeks koefisien gini masih tinggi 2) Tingkat kemiskinan masih tinggi

4.2.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk

mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dan Tujuan 15 pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan.

Berikut ini adalah rumusan isu strategis TPB pilar lingkungan di Kota Bogor

Tabel 4.30

Rumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pilar Lingkungan

TPB PILAR LINGKUNGAN	ISU STRATEGIS DARI INDIKATOR TPB YANG BELUM MENCAPAI TARGET
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif aman, tangguh dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal didaerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. 2) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 3) Persentase sampah perkotaan yang tertangani 4) ProsentasePelayanan/Prosentase Volume Sampah Terangkut Ke TPA 5) ProsentasePelayanan/Prosentase 6) Volume Sampah Terangkut Ke TPA 7) Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%)

4.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2020-2024

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Identifikasi permasalahan dan Isu Strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan yang terkait sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat 4 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bogor tahun 2019-2024. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor 2020-2024, dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 4.6
Sinergitas antara Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas
Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024



Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

Isu-isu sebagaimana dimaksud diatas pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penganganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 4.7
Keterkaitan antar Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor
Tahun 2019-2024



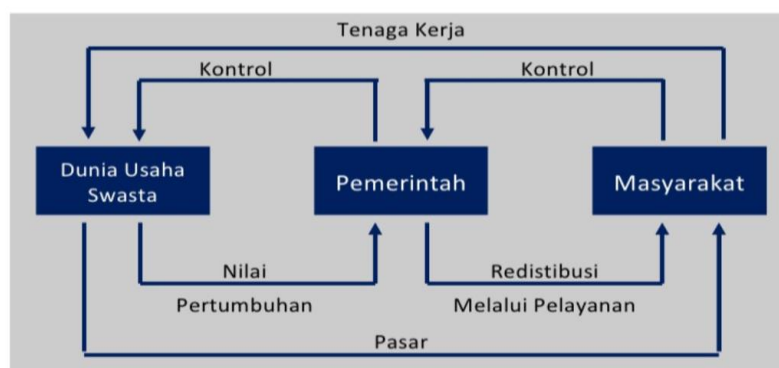
Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

Lebih lanjut, pembangunan daerah dilaksanakan mengarah pada terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dimana hanya dapat dilakukan apabila ada keseimbangan peran dari 3 (tiga) pilar yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah berperan menjalankan dan menciptakan arah kebijakan dan regulasi yang mendorong berkembangnya unsur-unsur lainnya, sedangkan dunia usaha berperan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara masyarakat sendiri mengambil peran dalam menciptakan interaksi social, ekonomi dan politik.

Melihat interaksi 3 (tiga) pilar tersebut diatas, oleh karenanya Reformasi Birokrasi menjadi isu strategis yang sangat fundamental untuk mendorong penyelesaian isu-isu strategis lainnya.

Gambar 4.8
Interaksi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam
Pembangunan Kota Bogor
Pelaku Pembangunan: Paradigma
Governance

- Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

Secara umum dari 4 (empat) isu strategis sebagaimana dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

A. ISU STRATEGIS 1 : PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKEADILAN

Untuk mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkeadilan, terdapat 7 aspek yang menjadi isu strategis kota Bogor yaitu :

- a. Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
- b. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
- c. Perluasan Kesempatan Kerja
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pengarusutamaan Gender
- f. Perlindungan social masyarakat, dan
- g. Ketahanan Keluarga

Pemenuhan standar dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan sangat menentukan kualitas SDM suatu daerah. Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, kualitas dari SDM sendiri harus terus ditingkatkan agar mampu menciptakan daya saing yang tinggi, yang dapat diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan agar seluruh masyarakat Kota Bogor memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sehingga mempunyai peluang yang besar menuju pada akses pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Tantangan lainnya yaitu menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antarwilayah, dan antargender.

Pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk menurunkan disparitas akses dan mutu layanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan dasar dan rujukan. Selain itu, tantangan utamanya adalah meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyiapkan provider dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional. Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan. Apabila merujuk pada arah pembangunan sektor kesehatan tahun 2020-2024 yang tertuang dalam RPJPD Kota Bogor tahun 2020-2024, dalam kurun waktu tahun 2020-2024 diharapkan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor dengan target pencapaian AHH 79,5 tahun. Kondisi tersebut dapat diupayakan melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin.

Melihat kondisi tahun 2017, AHH Kota Bogor baru mencapai 73.01 tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun hanya berkisar 0,07 tahun, maka untuk mencapai target AHH tahun 2024 di angka 79.5 tahun memang diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal melalui program-program di sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Terbatasnya lapangan kerja, keterampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya merupakan beberapa faktor yang menyebabkan jumlah pengangguran terus meningkat di Kota Bogor.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil survey BPS yang telah dipublikasi per Agustus 2017, dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dikelompokkan berdasarkan kelompok jenjang pendidikan. TPT untuk kelompok penduduk dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain dan diikuti dengan TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan.

Berdasarkan hasil survey dan publikasi BPS dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, TPT Kota Bogor terbilang sangat tinggi dan melebihi TPT nasional dan TPT Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2017, TPT nasional adalah sebesar 5.5 sementara TPT provinsi Jawa Barat sebesar 8,22 persen sedangkan TPT Kota Bogor sebesar 9,57 yang berarti dari 100 angkatan kerja di Kota Bogor masih terdapat sekitar 9 hingga 10 orang pengangguran. Walaupun demikian, TPT Kota Bogor sudah dapat ditekan dari angka tahun sebelumnya pada tahun 2015 yaitu berkisar 11.08 menjadi 9,57.

Pola pertumbuhan inklusif harus diciptakan di Kota Bogor untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Upaya lain untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan pekerjaan baru menjadi salah satu sarana untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bogor, mengingat sangat terbatasnya kesempatan kerja di sector-sector industry pengolahan maupun sector jasa lainnya. Salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor ekonomi kreatif untuk bisa memiliki daya saing yang kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bogor yang masih rendah juga menjadi salah satu aspek yang berpotensi memicu peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bogor. Produktivitas Tenaga Kerja yang rendah menjadi salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Sikap kerja, seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (shift work), dapat menerima tambahan tugas,

bekerja dalam suatu tim, kesediaan ditempatkan di luar kota tempat asal, dan sebagainya.

2. Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam manajemen supervise serta keterampilan dalam tehnik industri
3. Hubungan tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (Quality control circles)
4. Manajemen produktivitas, yaitu : manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas
5. Efisiensi tenaga kerja, seperti : perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas.
6. Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam berusaha.

Perlindungan sosial terhadap pekerja informal juga harus ditingkatkan. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diperoleh kelompok penduduk tersebut masih kurang memenuhi standar hidup yang layak dan berkesinambungan. Diperlukan keterpaduan berbagai instansi sosial untuk mendukung penduduk yang kurang mampu agar dapat mengelola berbagai resiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar penduduk yang kurang mampu memperoleh penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang memadai.

B. ISU STRATEGIS 2 : Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis pada Potensi Lokal

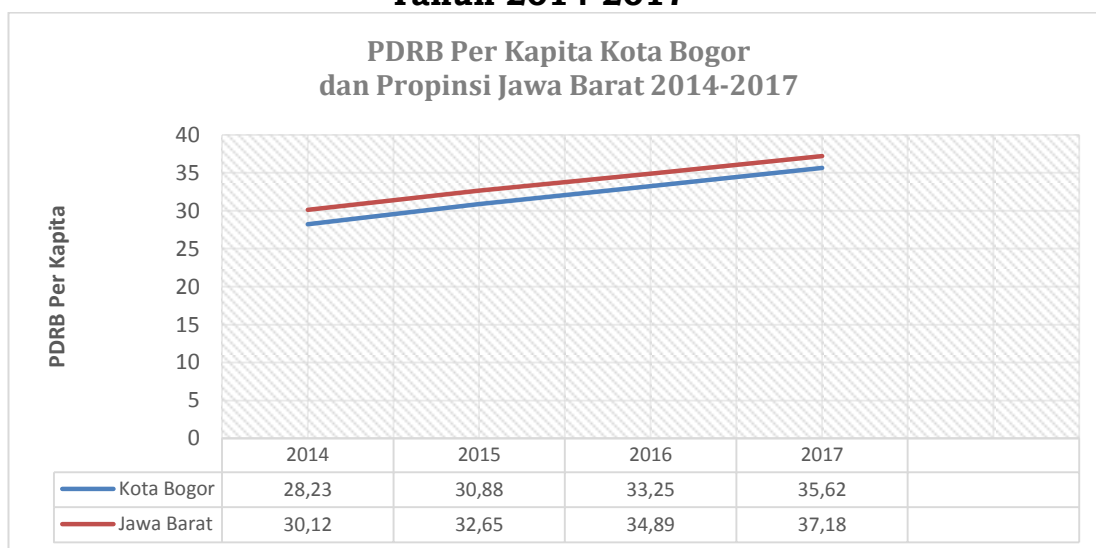
Isu Strategis berkaitan dengan Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi local mempunyai 3 aspek yakni :

1. Pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan social dan ekonomi (Indeks Gini rasio)
2. Penurunan Angka Kemiskinan
3. Penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, sector ekonomi kreatif, industry dan perdagangan, serta pariwisata berbasis pada potensi local.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2017 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 37.18 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 6.5 persen. Namun apabila kita lihat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota Bogor dari tahun 2012-2017 menggambarkan kecenderungan yang makin menurun.

Grafik 4.2
PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2017



Sumber : hasil olaan Bappeda Kota Bogor Tahun 2018

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita, tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

Tabel 4.31
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang, 2017

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
1. Padi-padian	51767	69314	77937
2. Umbi-umbian	4144	6992	12335
3. Ikan/udang/cumi/kerang	17535	39983	86043
4. Daging	19709	38977	94567
5. Telur dan susu	25184	51199	75627
6. Sayur-sayuran	30622	46613	63830
7. Kacang-kacangan	7970	11831	17809
8. Buah-buahan	15721	33693	67969
9. Minyak dan kelapa	11085	13567	20331
10. Bahan minuman	14922	21341	28074
11. Bumbu-bumbuan	7697	12524	21030
12. Konsumsi lainnya	10385	16214	23589
13. Makanan dan minuman jadi	123929	262305	418289
14. Rokok dan tembakau	56344	93144	85344
Jumlah Makanan	397014	717697	1092774
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	153276	378196	1089209
16. Aneka barang dan jasa	55340	175297	666629
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	12029	33349	72714
18. Barang tahan lama	3217	30420	255612
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	9891	36025	158922
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	706	10408	40283
Jumlah Bukan Makanan	234459	663695	2283369
Jumlah	631473	1381392	3376143

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial, Tahun 2018

Apabila dilihat dari table diatas, kesenjangan antara pengeluaran perkapita penduduk di kuintil 5 dengan penduduk di kuintil 1 dan 2 masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor masih sangat sulit diturunkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu masih berkisar di angka 0,4.

Kondisi sebagaimana dijelaskan diatas sangat disebabkan karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (*powerlessness*) masyarakat miskin dalam hal:

1. memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation);
2. melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan unproductiveness);
3. menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi(inaccessability);
4. menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif;
5. membebaskan diri dari mental dan budaya miskin

Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Propinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

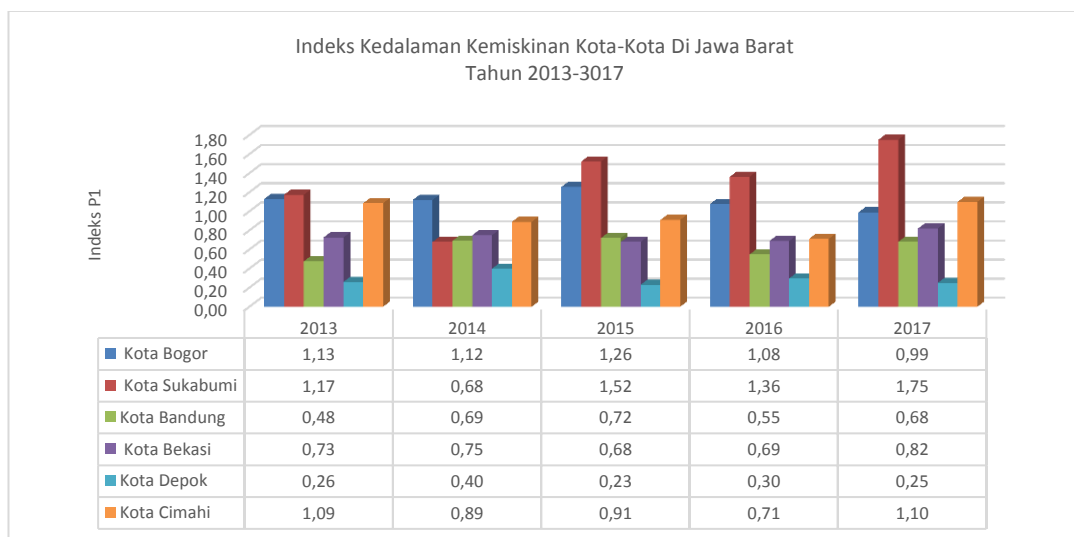
1. Angka Kemiskinan
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis

kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
4. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Berdasarkan publikasi dari BPS Tahun 2016, berikut ini adalah gambaran indikator indikator kemiskinan yang ada di Kota Bogor dapat digambarkan dari grafik-grafik berikut ini :

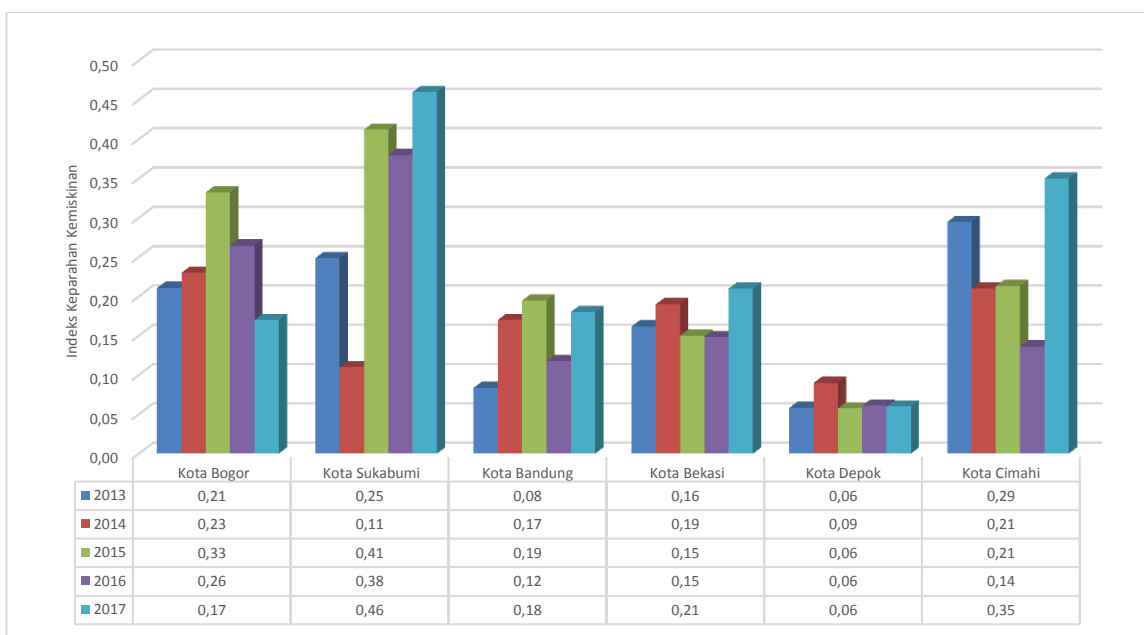
Grafik 4.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota-Kota di Jawa Barat,
2013-2017



Grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya Kota Bogor telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2017 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai indeks dibawah satu yaitu di angka 0.99. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan Lain halnya dengan kondisi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kota Depok, Kota Bandung dan Kota Bekasi, walaupun angka kesenjangan sudah berada dibawah 1 namun setiap tahun mengalami fluktuasi nilai indeks.

Grafik 4.4

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota-Kota di Jawa Barat, 2013-2017



Rata-Rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 memang lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi. Namun demikian kecenderungannya sejak tahun 2015 -2017 cenderung menurun dan pada tahun 2017 bahkan lebih rendah dibanding Indeks P2 dari Kota Bandung dan Kota Bekasi. Hal ini

menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bogor selama tahun 2015-2017 cenderung menurun.

Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah menjadi keniscayaan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari UMKM dan IKM harus mampu berdaya saing dengan produk-produk dari luar negeri. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah :

a. Produktivitas

Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu UKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat produktivitas yang dicapai UKM merupakan indikator seberapa efisien UKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya saat ini. Anis, Nandiroh, Supriyanto (2007) menyatakan bahwa “Usaha peningkatan produktivitas harus direncanakan secara baik dan sistematis sehingga berhasil apabila diaplikasikan kedalam suatu perusahaan. Tahap pengukuran, evaluasi, perencanaan dan perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing perusahaan.” Selanjutnya menurut Anis et.al pada umumnya terdapat 5 strategi yang dapat digunakan dalam menyusun usaha perbaikan produktivitas UKM, yaitu:

1. Meningkatkan input dan output, dimana perubahan/peningkatan output > daripada input.
2. Menurunkan input dan output, dimana perubahan/penurunan input > daripada output.
3. Input tetap output meningkat.
4. Input turun, output tetap.
5. Input turun, output meningkat.

Apabila usaha perbaikan produktivitas telah dilakukan, maka manfaat peningkatan produktivitas yang dapat diperoleh UKM yaitu:

1. Peningkatan keuntungan bagi UKM.
2. Peningkatan kualitas produk.

3. Peningkatan upah kepada buruh.
4. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan perbaikan tingkat pendidikan dan keahlian manajerial.

b. Inovasi

Tidak terhindarkan lagi bagi suatu daerah yang ingin maju dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing selalu bertumpu kepada iptek sebagai penggerak pembangunan, berarti kata “Inovasi” selalu menjadi tema utama dalam setiap pengambilan kebijakan disektor ekonomi. Inovasi menjadi semakin menentukan dalam pembangunan menuju kemandirian daerah yang berdaya saing tinggi, terutama ketika menghadapi era keterbukaan dan kebebasan perdagangan dalam kawasan tanpa batas. Pada situasi ini, usaha kecil dituntut meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melakukan inovasi produk melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Untuk itu usaha kecil harus mengenal jauh lebih dekat konsumennya sehingga mereka betul betul dapat mengetahui kebutuhan pasar dan dapat menyediakan kebutuhan tersebut melalui inovasi dan keratifitasnya.

c. Iklim Usaha yang Kondusif

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah tingkat kesulitan mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal lainnya adalah seringkali kebijakan perekonomian Pemerintah dinilai belum secara maksimal memihak kepentingan usaha kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

d. Akses permodalan (Access to Finance)

Masalah mendasar usaha kecil yang paling menonjol menyangkut menyediakan pembiayaan usaha alias modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin

memulai usaha baru. Alhasil, biasanya bila motivasinya kuat, seseorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan modal seadanya.

Pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk berkembang. Masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.

Lembaga keuangan bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan bank, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang feasible atau layak usaha dan menguntungkan. Disamping itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus bankable alias dapat memenuhi ketentuan bank. Inilah persoalannya. Akibat bank berlaku prudent atau hati-hati, maka makin mempersulit usaha kecil untuk mengakses sumber modal. Usaha kecil yang sulit mengakses bank akan mencari jalan pintas. Kemana lagi kalau bukan kepada para pelempar uang alias rentenir tetapi usaha kecil harus rela dengan biaya uang yang mencekik.

Ada anggapan keliru. Seolah olah, usaha kecil tidak mempermasalahkan biaya bunga yang tinggi dari rentenir. Adalah anggapan yang sangat keliru. Mereka terpaksa memakai uang rentenir karena terpaksa akibat sulit mengakses modal dari bank. Usaha kecil yang berhasil menembus kendala akses modal, pasar dan informasi. Kendala beralih pada yang lebih advance. Seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, melakukan ekspor, hingga mempertahankan kualitas produk dan kuantitas produksi.

e. Kemampuan Penetrasi Pasar

Selanjutnya Produktivitas UKM melalui pemberian kredit untuk investasi dan modal kerja akan menjadi sia-sia bila produk

yang dihasilkan tidak dipasarkan dengan benar, meskipun produk tersebut memiliki nilai jual dan kualitas yang tinggi.

Usaha kecil pada umumnya mempunyai permasalahan terkait lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, karena pada umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

Pemasaran (Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Ada empat komponen pemasaran yaitu:

1. Product (produk)
2. Price (harga)
3. Place (tempat, termasuk juga distribusi)
4. Promotion (promosi)

f. Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

g. Sarana Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan

kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga masyarakat masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya.

Gambar 4.9

Pilar-Pilar Pendukung produktivitas Ekonomi Kreatif



Untuk mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu :

1. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya

kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif

2. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah.
3. Permasalahan lainnya adalah permodalan dan pemasaran produk, Sumber Daya Manusia (SDM), Bahan baku, infrastruktur dan teknologi.

Gambar 4.10

Permasalahan Utama yang mempengaruhi daya saing ekonomi kreatif



Sumber: Survei diolah oleh tim Bank Dunia (2014)

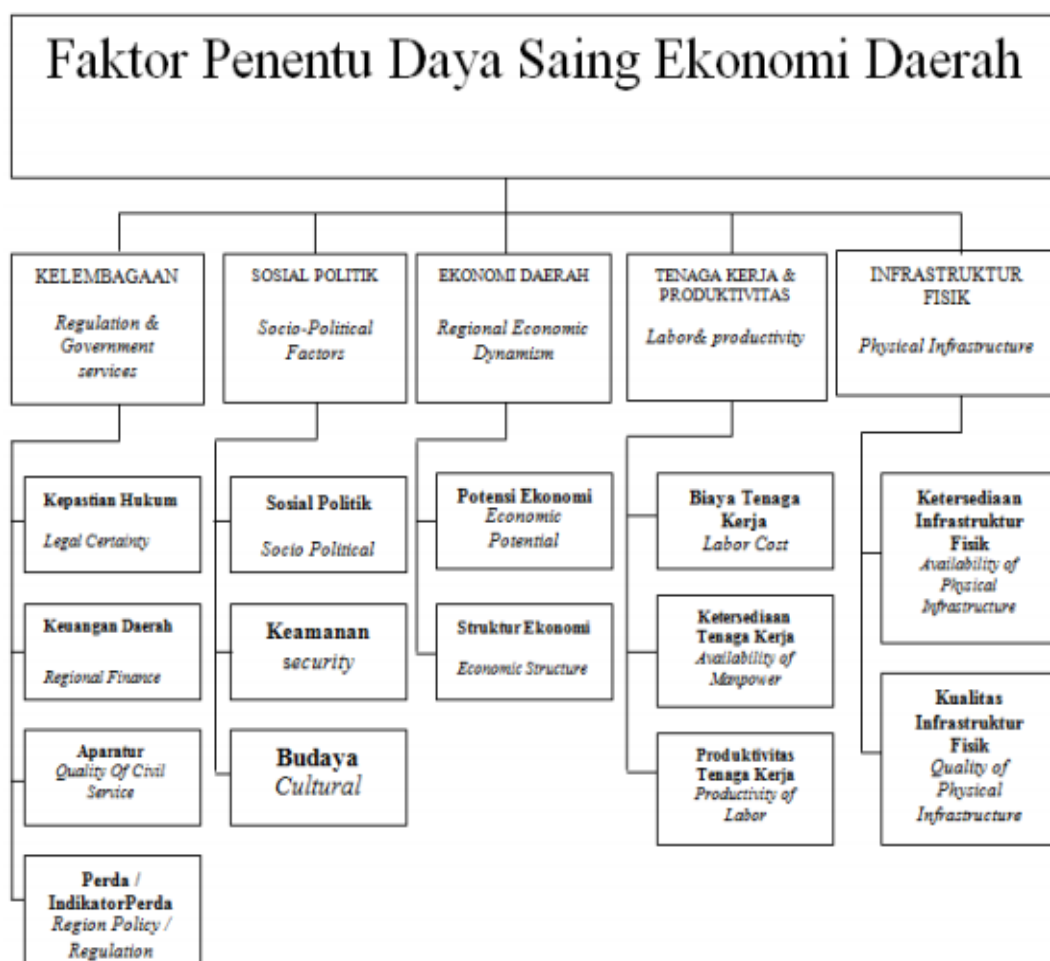
Potensi dan Daya Saing Wilayah

Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu maka sangat penting membangun iklim investasi yang ramah bagi investor (business friendly), karena dengan demikian akan mampu menarik investor-investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi local di setiap wilayah harus digali untuk menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi masyarakat di setiap wilayah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Gambar 4.11

Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah



Untuk mendorong dan menarik investasi ke daerah, diperlukan Profil Potensi Daerah yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Profil Potensi Daerah ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan

adanya Profil Potensi Daerah, UKM juga dapat mengidentifikasi peluang usaha yang ada.

Dengan Profil Potensi Daerah yang telah memenuhi kriteria, maka diharapkan daerah dapat mempunyai prospek usaha dengan pasar yang jelas serta sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah (Renstrada). Disamping itu profil proyek investasi di daerah juga dapat digunakan sebagai materi utama dalam berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi daerah.

Penguatan daya saing industry dan perdagangan

Sektor industri pengolahan di Kota Bogor memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kota Bogor mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan. Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Bogor, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil mengengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif.

Kota Bogor memiliki potensi pengembangan industri pengolahan yang cukup besar, diantaranya adalah pabrik sepatu/sandal di Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan. Industri kreatif yang cukup menonjol di Kota Bogor diantaranya adalah fesyen, kuliner, dan kerajinan/produk olahan dari bambu yang dibuat menjadi untuk souvenir atau oleh-oleh. Potensi industri pengolahan IKM, UMKM dan industri kreatif sangat strategis untuk dikembangkan, dan tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Begitu pula sebaliknya, perkembangan sektor industri dan industri kreatif mendukung pariwisata Kota Bogor.

Pengembangannya memiliki multiplier effect terhadap perkembangan sektor lain, artinya memberikan efek positif terhadap sektor lain, dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjawab tingginya angka pengangguran di Kota Bogor. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah persaingannya dengan daerah-daerah lain yang dekat secara geografis dan telah dikenal jauh-jauh hari sebelumnya sebagai pusat kreatifitas seperti Kota Bandung.

Penguatan daya saing pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu subsektor yang menggerakkan pertumbuhan sektor tersier di Kota Bogor. Perkembangan pariwisata Kota Bogor akan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor tersier lainnya. Objek wisata yang terdapat di Kota Bogor cukup banyak, mulai dari wisata berbasis alam, berbasis ekonomi kreatif, berbasis sejarah, wisata kuliner, wisata berbasis pendidikan dan atau wisata ilmiah, serta wisata rekreasi. Potensi lain pariwisata Kota Bogor adalah dikembangkannya pariwisata berbasis tematik potensi di setiap wilayah yang selama ini belum secara optimal dikembangkan di Kota Bogor.

Pengembangan pariwisata Kota Bogor ke depan perlu perencanaan yang komprehensif, dengan mengidentifikasi potensi, jenis-jenis pariwisata, dan daya dukung terhadap destinasi wisata, serta sesuai dengan karakter Kota Bogor. Pengembangan wisata yang merubah bentang alam (tidak berbasis sumberdaya alam) sebaiknya tidak dikembangkan di Kota Bogor. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata Kota Bogor perlu ditingkatkan seperti pusat informasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata, termasuk sistem transportasi menuju lokasi objek wisata. Seperti yang diketahui bahwa masalah kemacetan merupakan permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir.

Permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pariwisata Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Infrastruktur
2. Kesiapan SDM sektor pariwisata dan dukungan dari masyarakat
3. Teknologi Informasi, Komunikasi dan Publikasi
4. Kebijakan dan Peraturan Daerah
5. Investasi

C. ISU STRATEGIS 3 : PEMANFAATAN RUANG DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu. Ketersediaan sumberdaya sangat terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Memajukan kesejahteraan generasi sekarang melalui pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kebijakan terpadu dan menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Strategi pengelolaan yang dimaksud yaitu upaya sadar, terencana, dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangansumberdaya secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesadaran bahwa setiap kegiatan selalu berdampak terhadap lingkungan hidup merupakan pemikiran awal yang penting untuk memaksa manusia berpikir lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana wujud dampak tersebut, sehingga sedini mungkin dilakukan langkah penanggulangan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Penataan ruang merupakan satu proses pembangunan yang perlu mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan. Dalam menyusun suatu rencana tata ruang yang baik, nilai-nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pembangunan berkelanjutan mengaitkan tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial budaya,

ekosistem terpadu yang menopangnya harus terjaga dengan baik. Karena itu aspek lingkungan perlu diinternalisasikan ke dalam pembangunan ekonomi. Dengan terjadinya hal tersebut, maka pembangunan ekonomi tidak akan membuat kesenjangan dalam masyarakat sehingga terjadi pemerataan dan kestabilan.

Pembangunan tata ruang yang berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, serta mewujudkan tata ruang kota yang berkualitas. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan memacu kebutuhan ruang bagi permukiman dan segala utilitas serta infratrukturnya. Kota akan tumbuh dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya. Keadaan tersebut harus dihadapi melalui penyiapan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kota kabupaten/kota tersebut. Pembangunan seringkali diiringi dengan inkonsistensi terhadap aturan tata ruang yang telah dibuat. Inkonsistensi yang terjadi menyebabkan kesemrawutan ruang dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Bila hal ini tidak dikendalikan secara terpadu maka dapat menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya alam dan mengganggu keberlanjutan kota.

Dalam aktivitas pemanfaatan ruang, isu strategis yang marak terjadi di Kota Bogor adalah alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun. Kebutuhan akan ruang untuk permukiman menjadi salah satu pemicu terbesarnya. Dengan semakin berkembangnya lahan permukiman dan tuntutan kebutuhan ruang bagi permukiman kedepannya, memunculkan kompleksitas permasalahan yang akan mempengaruhi proses pembangunan dan perkembangan Kota Bogor kedepannya apabila tidak direncanakan strategi penanganannya sejak dini.

Inkonsistensi pemanfaatan ruang terhadap RTRW di Kota Bogor sebagian besar diakibatkan adanya alih fungsi Kawasan lindung menjadi Kawasan budidaya dan pemanfaatan ruang pada Kawasan budidaya yang tidak memenuhi kaidah teknis yang berlaku di Kawasan budidaya tersebut.

Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, arus mobilitas penduduk, arus migrasi dan daya dukung wilayah, dan dengan memperhatikan pembangunan wilayah kabupaten/kota sekitarnya, dalam kurun lima tahun ke depan perlu dipertimbangkan peluang kota Bogor untuk dapat melakukan perluasan wilayah. Selain itu juga, pemekaran wilayah administrative kecamatan juga perlu dikaji dan dipertimbangkan untuk dapat terwujud pada lima pembangunan tahun ke depan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan public bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mempunyai makna dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi mendatang. Pembangunan infrastruktur menyangkut pengembangan tata kelola infastruktur yang baik, sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, aman, dan nyaman, serta peningkatan kualitas penyediaan pelayanan infrastruktur.

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan memacu kebutuhan ruang bagi permukiman dan segala utilitas serta infrastrukturnya. Kota akan tumbuh dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya. Keadaan tersebut harus dihadapi melalui penyiapan perencanaan penataan infrastruktur kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kota kabupaten/kota tersebut.

Transportasi telah menjadi salah satu isu utama di Kota Bogor yang hampir 10 tahun ini terus menjadi perhatian. Masalah transportasi yang menjadi sorotan adalah masih banyaknya titik-titik kemacetan yang ada di Kota Bogor terutama pada jam sibuk, sarana prasarana lalu lintas yang tidak ramah pengguna, dicontohkan dengan kondisi trotoar yang tinggi dan naik turun, halte yang kotor, masih banyak jalan-jalan yang berlubang, dan tingginya angka commuter di Kota Bogor yang tidak didukung dengan transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada ketidaknyamanan para pengguna jalan.

Selanjutnya pengembangan transportasi berkelanjutan juga menjadi salah satu isu strategis yang diangkat menjadi isu kota Bogor sebagai bagian upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem transportasi yang penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan, tingkat keamanan, kemacetan, serta akses sosial dan ekonominya tidak akan menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diantisipasi oleh generasi yang akan datang (Richardson, 2000). Transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) merupakan refleksi dari konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor transportasi.

Berpedoman pada definisi transportasi berkelanjutan di atas, pada dasarnya terdapat tiga aspek dalam transportasi berkelanjutan, yaitu keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Transportasi berkelanjutan dalam aspek ekonomi adalah transportasi yang terjangkau, beroperasi secara efisien, mampu menyediakan berbagai alternatif pilihan moda transportasi, meningkatkan aksesibilitas dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam aspek sosial, transportasi berkelanjutan perkotaan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar individu atau masyarakat secara aman, dan menciptakan keadilan masyarakat saat ini dan masa datang (CST, 1999). Dikatakan pula, transportasi berkelanjutan merupakan transportasi yang dapat meminimalisasi tingkat kecelakaan, dapat meningkatkan keadilan sosial serta tingkat kesehatan dalam komunitas (transportasi yang dapat mendukung terwujudnya lingkungan sosial yang sehat, komunitas yang layak didiami, dan kaya akan modal sosial) (OECD, 1996; NRTEE, 1996). Dengan demikian dalam aspek sosial, transportasi berkelanjutan didefinisikan sebagai sistem transportasi yang mampu menciptakan kesetaraan secara horizontal maupun vertical terhadap penggunaan transportasi, menciptakan transportasi dengan tingkat keselamatan tinggi, serta dapat sistem kelembagaan yang mampu mendukung terciptanya sistem transportasi berkelanjutan.

Keberlanjutan dalam aspek lingkungan dapat didefinisikan dalam hal membatasi emisi dan buangan agar tidak melampaui kemampuan absorbs bumi, meminimumkan penggunaan energi dari sumber yang tak terbarukan, menggunakan komponen terdaur ulang, meminimalisasi penggunaan lahan serta memproduksi polusi suara yang sekecil mungkin (CST,1999) atau transportasi yang tidak membahayakan kesehatan publik dan ekosistem dan menyediakan sarana mobilitas dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui. Dengan kata lain, transportasi yang tidak menimbulkan polusi air, udara, dan tanah dan menghindari penggunaan sumberdaya yang berlebihan (OECD, 1996; NRTEE, 1996). Beberapa hal yang akan dilihat lebih lanjut yang berkaitan dengan transportasi berkelanjutan dalam aspek lingkungan ini antara lain pencemaran udara, tingkat kebisingan, dan tingkat penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti bahan bakar minyak dan juga lahan, bagi kegiatan pada sektor transportasi serta juga minimasi dampak kesehatan masyarakat terkait kegiatan transportasi.

Kriteria yang ditetapkan dalam konsep pengembangan transportasi berkelanjutan dalam 3 aspek dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.32**Konsep Pengembangan Transportasi Berkelanjutan**

Aspek Dalam Transportasi Berkelanjutan	Deskripsi	Kriteria
Ekonomi	Transportasi berkelanjutan pada aspek ekonomi mengupayakan pelayanan sistem transportasi yang dapat menunjang aktivitas ekonomi khususnya perkotaan dengan mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah, menciptakan transportasi yang produktif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas wilayah yang baik • Transportasi yang produktif • Aktivitas transportasi yang efisien
Sosial	Transportasi berkelanjutan pada aspek sosial mengupayakan adanya kesetaraan antara masyarakat secara vertikal maupun horizontal dalam pelayanan transportasi dan terdapatnya kelembagaan-kelembagaan yang menunjang sistem transportasi berkelanjutan, melalui kebijakan/peraturan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Di samping itu juga, pada aspek sosial ini keamanan dan keselamatan transportasi juga mendapat perhatian khusus.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan transportasi yang setara/adil • Keselamatan transportasi yang baik • Terdapat sistem kelembagaan yang menunjang transportasi berkelanjutan
Lingkungan	Transportasi berkelanjutan pada aspek sosial mengupayakan penggunaan sumber daya yang tidak berlebih untuk kepentingan kini dan mendatang, dan juga menciptakan lingkungan yang nyaman tanpa eksternalitas negatif dari aktivitas transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sumber daya pada kegiatan transportasi yang seimbang • Pencemaran lingkungan akibat dampak dari transportasi yang minim

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pencemaran yang banyak terjadi di Kota Bogor adalah yang terkait dengan air (baik air tanah, air permukaan, air sungai, maupun situ) dan udara (polusi udara karena emisi buangan kendaraan bermotor dan debu). Pencemaran air (baik air tanah maupun badan air seperti air sungai) banyak terjadi dikarenakan pengelolaan air limbah, baik limbah cair maupun limbah padat yang belum memadai. Hal ini diperparah lagi dengan kebiasaan masyarakat yang masing sering membuang sampah langsung ke sungai. Timbulan sampah juga merupakan permasalahan pelik yang dihadapi Kota Bogor. Pengelolaan sampah belum optimal, timbulan sampah kota yang cukup besar, serta sarana prasarana pengangkutan sampah yang belum memadai.

Pembuangan sampah secara rutin setiap hari ke TPA merupakan bentuk pengisian kembali (recharge), baik secara infiltrasi maupun perlokasi, merupakan penyebab pencemaran air tanah yang sangat besar terutama air tanah dangkal maupun air sumur gali, sehingga perlu penanganan serius. Pencemaran lingkungan karena polusi udara juga sudah dirasakan akibat

semakin meningkatnya pemakaian sarana transportasi kendaraan bermotor di Kota Bogor. Pencemaran tersebut mengakibatkan menurunnya kenyamanan kota. Salah satu indikator kenyamanan kota adalah kondisi iklim mikro kota itu sendiri. Kota Bogor terkenal sebagai kota hujan yang menjadi tujuan wisata karena berhawa sejuk dan nyaman. Namun, perubahan iklim mikro berupa kenaikan suhu juga mulai terjadi di Kota Bogor. Iklim mikro berpengaruh kuat terhadap kenyamanan termal manusia. Elemen pembentuk iklim mikro yang mempengaruhi kenyamanan kota adalah radiasi matahari, temperatur udara, kelembaban relatif, dan pergerakan udara (angin). Perubahan iklim mikro ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan penduduk kota.

Berdasarkan penelitian, suhu maksimal wilayah Bogor rata-rata sebesar 34,2oC, sedangkan suhu terendah sebesar 20oC1. Pada siang hari, suhu permukaan membentuk pola UHI (Urban Heat Island) yang memusat di Kota Bogor dan menyebabkan hawa panas. Salah satu penyebabnya adalah mulai berkurangnya ruang terbuka hijau. Implikasi dari berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan adalah peningkatan temperatur yang berpotensi menimbulkan fenomena tersebut.

D. ISU STRATEGIS 4 : REFORMASI BIROKRASI

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Perubahan yang disasar mengarah pada 8 (delapan) perubahan yaitu:

1. Mental Aparatur
 2. Pengawasan
 3. Akuntabilitas
 4. Kelembagaan
-

5. Tata Laksana
6. SDM Aparatur
7. Peraturan Perundangan
8. Pelayanan Publik

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2017 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki.

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- c. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan.
- d. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;
- f. Penetapan indikator kinerja daerah dan kementerian/lembaga (K/L) belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antara sistem

perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif.

2. Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan

Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha

b. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari aparat penegak hukum;

c. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien

Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik

d. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif

Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihinggapi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi

e. Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien

Penerapan e-government belum merata pada seluruh

birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi

- f. Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

- g. Inefisiensi penggunaan anggaran Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

- 1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan
- 2) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan

- h. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi

Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.

3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

a. Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien

Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

b. Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi

c. Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;

d. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang beorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Birokrasi pemerintahan di Kota Bogor dibanyak sector masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Bogor memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 2 tahun berturut turut berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 dan Tahun 2018. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja.

4.3.1 Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

Berikut ini digambarkan keterkaitan antara hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Gambar 4.12
Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis dalam
RPJMD 2019-2024



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Tahun 2019

4.3.2 Keterkaitan antara Isu Strategis Pusat, Isu Strategis Propinsi Jawa Barat, Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan kota Bogor harus saling berkaitan dan saling mengisi datu dengan lainnya. Oleh karenanya, berikut ini digambarkan keterkaitan antara isu strategis pusat, propinsi jabar, isu strategis KLHS RPJMD Kota Bogor 2019-2024, dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam table 4.38. Berikut merupakan matriks keterkaitan antara isu strategis nasional, provinsi, KLHS, dan kota.

Tabel 4.33
Sinergitas isu strategis nasional, Provinsi Jawa Barat, dan
Kota Bogor

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bogor
1. Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi - Hankam - Politik	1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi Birokrasi	1. Kemiskinan, Kerawanan Pangan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi 3. Daya saing pariwisata 4. Penanganan dan pencegahan Kumuh 5. Akses universal terhadap Air minum dan Air limbah 6. Pengelolaan Sampah mulai dari sumbernya 7. Pengendalian kualitas Air dan udara 8. Transportasi Berkelanjutan 9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Pembangunan Manusia yang Berkeadilan 2. Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis potensi local 3. Pemanfaatan ruang dan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 4. Reformasi Birokrasi

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

BAB V
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

5.1 Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan brmasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi

keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Konteks mewujudkan Kota yang Ramah keluarga, Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana suatu kota memiliki daya dukung terhadap kehidupan keluarga yang dapat diukur salah satunya dengan melihat seberapa besar ketahanan keluarga yang tinggal dalam lingkungan kota tersebut. Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Selanjutnya, dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas,

masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (small scale system) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (characteristics of the small scale system) yang disebut sebagai Faktor Komunal (Communal Factors). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (large scale system) yang disebut sebagai Faktor Sosial (Societal Factors).

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan

skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan). Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: (1) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (2) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (3) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (4) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan (5) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

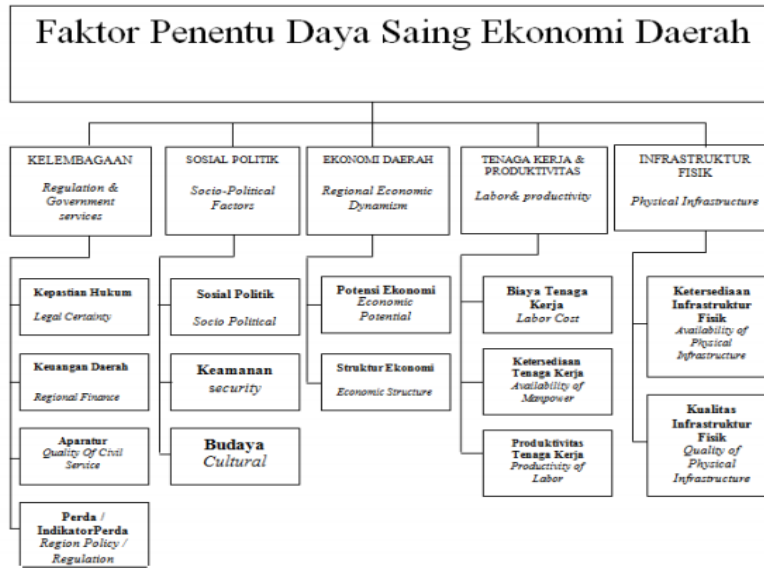
Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong daya saing daerah adalah kelembagaan, sosio-politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur fisik, sebagaimana diuraikan dalam began berikut ini :

Gambar 5.1
Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah



Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, Tahun 2019

5.3 Keselarasan RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan RPJMD Kota Bogor 2019-2024

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan misi RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Keselarasn Misi Pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

MISI RPJPD 2005 – 2025	MISI RPJMD 2019 – 2024
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada.	Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera
Misi 2 : Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman)	Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

MISI RPJPD 2005 – 2025	MISI RPJMD 2019 – 2024
dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera.	Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera
Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas

Sumber : Hasil Olahan Bappeda, 2019

5.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024

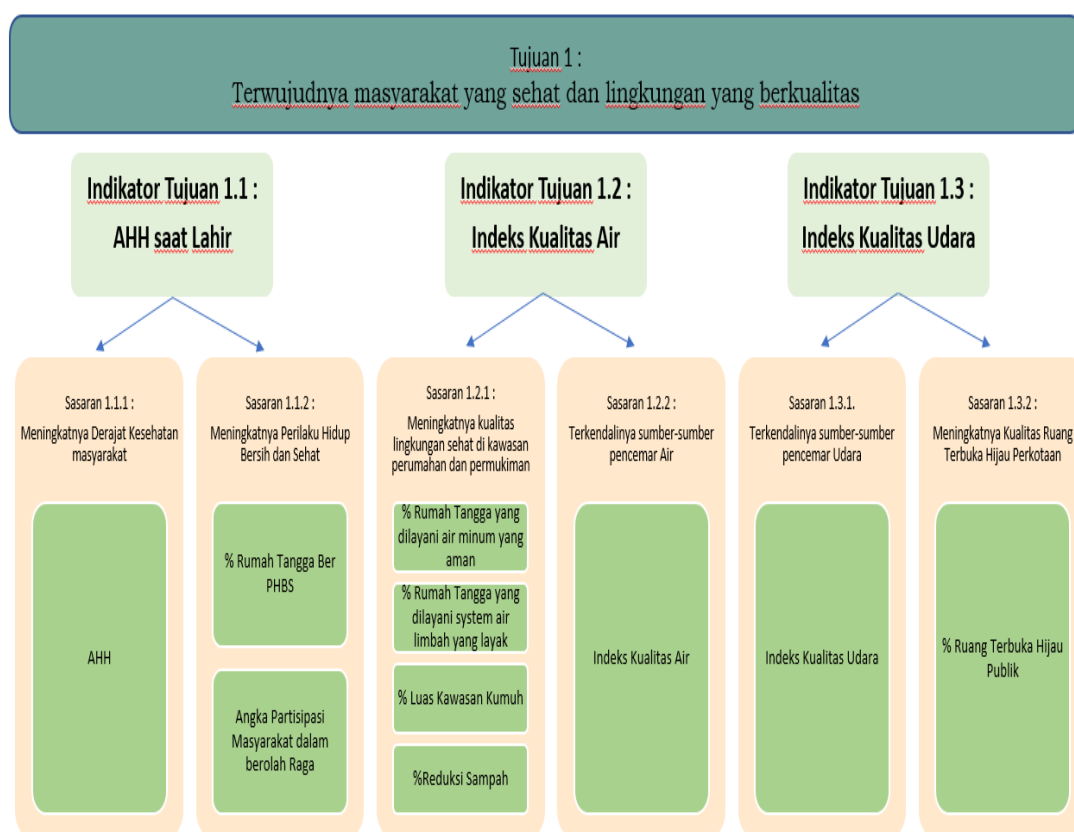
Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 5.2

Penjabaran Misi 1, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

MISI 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT



Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT adalah terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

B. Sasaran

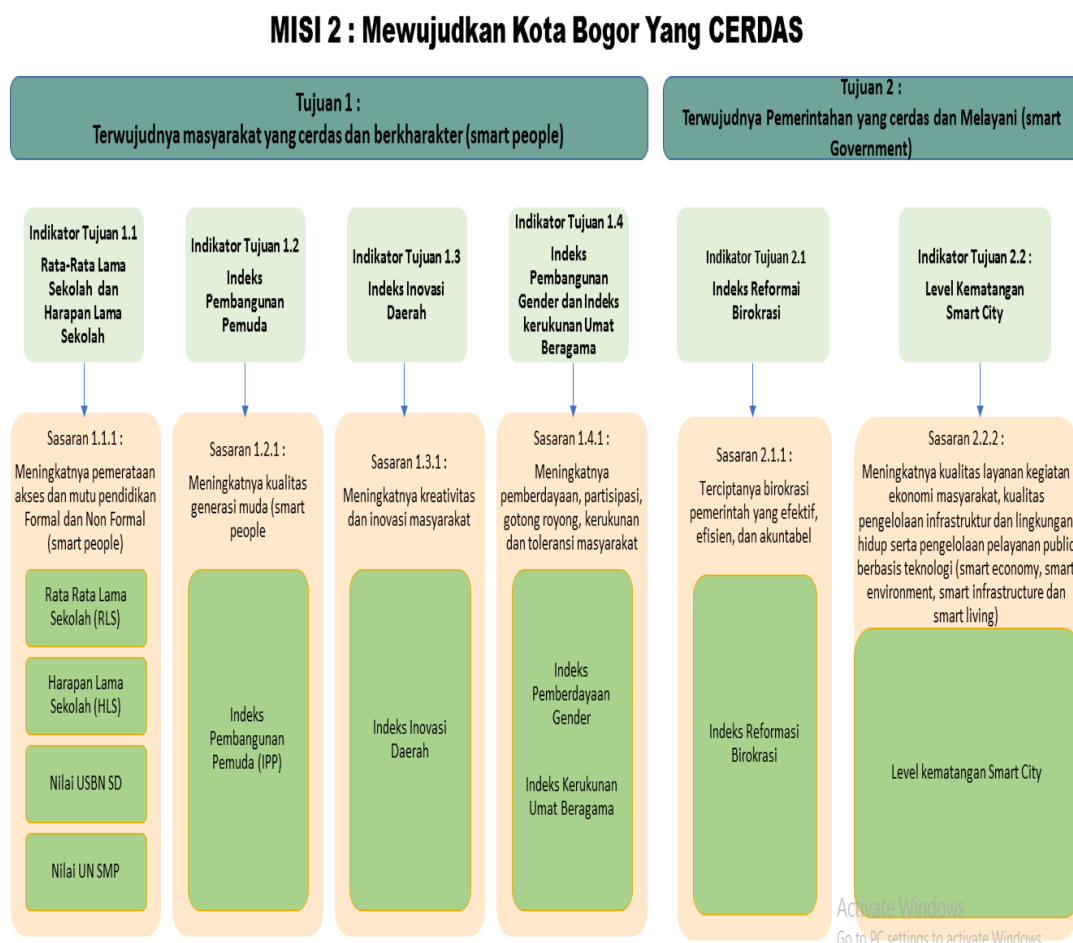
Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 6 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir.
2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Indeks Pembangunan Olahraga.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumahtangga yang dilayani system air limbah yang layak, persentase luasan Kawasan kumuh, dan persentase reduksi sampah.
4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air
5. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.

6. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik

Gambar 5.3
Penjabaran Misi 2, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor
Tahun 2019-2024



Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang CERDAS

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People), yang dapat diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Nilai rata-rata USBN SD, dan Nilai Rata-rata UN SMP.
2. Meningkatnya kualitas generasi muda;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
3. Meningkatnya kreativitas dan Inovasi masyarakat;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Inovasi Daerah.
4. Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan umat beragama.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

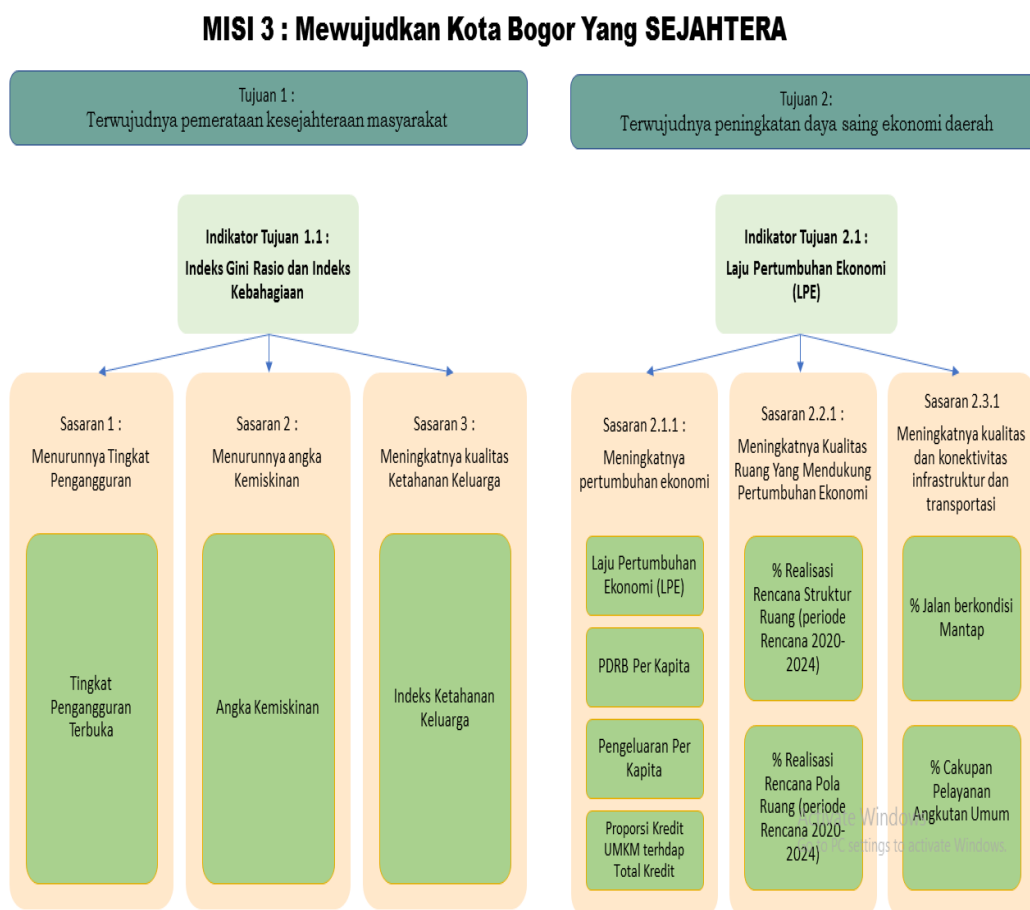
1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Level Kematangan Smart City.

Gambar 5.4
Penjabaran Misi 3, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024



Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA yaitu :

1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan.
2. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Menurunnya tingkat pengangguran;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Menurunnya tingkat kemiskinan;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Angka kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Ketahanan Keluarga (IKK).

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, dan Pengeluaran Per Kapita.

2. Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase realisasi rencana struktur ruang pada periode rencana 2020-2024, dan persentase realisasi rencana pola ruang pada periode rencana 2020-2024.

3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase jalan berkondisi mantap dan persentase cakupan pelayanan angkutan umum.

Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebagaimana dimaksud diatas, berikut dengan tolok ukur dan target kinerjanya dapat dijelaskan pada table 5.2. berikut ini.

Tabel 5.2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
VISI : TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT	Tujuan 1.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.21	73.40	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	74.91
				Indeks Kualitas Air	Point	49.6	49.65	49.67	49.7	49.8	49.9	50	50
				Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85.87	86	86	86,5	86,5	87	87
		Sasaran 1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.21	73.40	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	74.91
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	67	68	69	70	71	72	72
Angka Masyarakat Berolahraga Partisipasi dalam	Point			0.45	0.45	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53	0.53		

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR	
							2019	2020	2021	2022	2023		2024
		Sasaran 1.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	91.98	85	93.15	94.86	96.58	98.29	100	100
				Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	%	67.21	63	67.47	70.42	72.06	72.62	73.03	73.03
				Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan kota	%	2,62	1.43	2,44	2,27	2,12	1,94	1,77	1,77
				Persentase Reduksi Sampah	%	6.26	6.3	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.2
		Sasaran 1.1.4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	Indeks Kualitas Air	Point	49.6	49.65	49.67	49.7	49.8	49.9	50	50
		Sasaran 1.1.5	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85.87	85.9	86	86.1	86.2	86.3	86.3
		Sasaran 1.1.6	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5.89	5.90	5.91	5.92	5.94	5.95	5.96	5.96

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Mewujudkan masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>),	Tujuan 2.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.30	10.40	10.63	10.97	11.31	11.65	12	12
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.50	13.6	13.9	14.2	14.5	15	15
				Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05
				Indeks Inovasi Daerah	Point	600	600	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650	641-650
		Indeks Pemberdayaan Gender	Point	67.37	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	73.5		
		Indeks Kerukunan umat beragama	Indeks	NA	70	70.5	71	71.5	72	72.5	72.5		

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR	
							2019	2020	2021	2022	2023		2024
		Sasaran 2.1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.30	10.40	10.63	10.97	11.31	11.65	12	12
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.50	13.6	13.9	14.2	14.5	15	15
				Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68.12	68.13	76,02	76,04	76,06	76,08	76,10	76,10
				Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58.27	58.29	67,77	67,79	67,81	67,83	67,85	67,85
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	NA	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05
		Sasaran 2.1.3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	Indeks Inovasi Daerah (Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi)	Point	600	600	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650	641-650
		Sasaran 2.1.4	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	73.5
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	NA	70	70.5	71	71.5	72	72.5	72.5

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>),	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	BB	BB	A	A	A	A
				Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart
		Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Point	B	B	BB	BB	A	A	A	A
		Sasaran 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart
3	Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA	Tujuan 3.1	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini Rasio	Point	0.41	0.40	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36
				Indeks Kebahagiaan	Angka	NA	NA	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	74-75

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Sasaran 3.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9.28	9.0	8.47	8.22	7.97	7.8	7.6	7.6
		Sasaran 3.1.2	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	5.93	5.85	5.8	5.78	5.53	5.28	5	5
		Sasaran 3.1.3	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)	Point	NA	NA	73-74	74-75	75-76	76-77	76-77	76-77
		Tujuan 3.2	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.14	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7	7
		Sasaran 3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.14	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7	7
				PDRB Per Kapita	Dalam Juta Rp.	37.99	39	40.36	42.73	45.1	47.47	49.84	49.84
				Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	10.940	11.000	11.124	11.219	11.314	11.409	11.504	11.504
				Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19.68	20	21	22	23	24	25	25

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Sasaran 3.2.2	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0	10	20	40	60	80	100	100
				Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0	10	20	40	60	80	100	100
		Sasaran 3.2.3	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur transportasi dan	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	88.59	89	89	89,25	89,5	89,75	90	90
				Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	45	47.5	50	60	70	80	90	90

5.5 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 - 2024

Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ditetapkan selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kota Bogor Tahap ke IV, hasil evaluasi kinerja RPJMD periode 2015-2019 yang belum mencapai target, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Bogor yang belum tertangani. Penetapan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 juga memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu Rancangan Teknokratis RPJMN Tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Proses Penentuan Prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan;
8. Pencapaian SDGs dan SPM.

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor sebagaimana dimaksud diatas, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.3.

Sasaran dan Pioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) program	1) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	
		3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		4) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	
		5) Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD
		6) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
		7) Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		8) Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
2. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat		9) Program Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
		10) Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	SatpolPP
		11) Kepemudaan dan Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman		12) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		13) Program Lingkungan sehat perumahan 14) Program Peningkatan utilitas perkotaan 15) Program Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan 16) Pengelolaan Areal Pemakaman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		17) Program pemulihan pasca bencana	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR
		18) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 19) Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA 20) Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Dinas Lingkungan Hidup
		21) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	SatpolPP
		22) Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		23)Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 24)Program Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan	BPBD
4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air		25)Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		26)Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 27)Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 28)Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		29)Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 30)Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 31)Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 32)Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 33)Program kemitraan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5. Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara		34)Program Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	Dinas Perhubungan
6. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan		35)Program pengelolaan ruang terbuka hijau 36)Pengelolaan Areal Pemakaman	Dinas Perumahan dan Permukiman

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
7. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;		37)Program peningkatan pendidikan anak usia dini 38)Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 39)Program manajemen layanan pendidikan 40)Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 41)Program pendidikan non formal	Dinas Pendidikan
8. Meningkatnya kualitas generasi muda		42)Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 43)Program pendidikan politik masyarakat 44)Program pengembangan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol
		45)Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	SatpolPP
		46)Program Kepemudaan dan Keolahragaan 47)Program Peningkatan Olah Raga Prestasi	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		48)Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		49)Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 50)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		51)Program Pembinaan Anak Terlantar 52)Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 53)Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 54)Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Dinas Sosial
9. Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat			

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		55)Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat		56)Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
		57)Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak
		58)Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	
		59)Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	
		60)Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
		61)Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	
10.Menurunnya tingkat Kemiskinan		62)Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Dinas Sosial
11.Menurunnya tingkat pengangguran		63)Program Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		64)Program Pembinaan dan penempatan transmigrasi	
12.Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga		65)Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		66)Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		67)Program Pembangunan Keluarga	

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
13. Meningkatkan kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi		68) Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi		69) Program Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	2. Penguatan Daya Saing Ekonomi berbasis potensi local yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) program	1) Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
		3) Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Dinas Perhubungan
		4) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	
		5) Program Peningkatan pelayanan angkutan umum	
16. Meningkatkan kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi		6) Program Perencanaan Tata Ruang 7) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		8) Program Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat 9) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 10) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 11) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 12) Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Koperasi dan UKM

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		13) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		14) Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif	
		15) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DPMPTSP
		16) Program Peningkatan daya saing penanaman modal	
		17) Program Peningkatan Produksi Pertanian	Dinas Pertanian
		18) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	
		19) Program Peningkatan Produksi Perikanan	
20) Program Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan			
21) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
22) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			
23) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
24) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			
25) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
26) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
27) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
18. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	3. Penguatan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) program	1) Program Pengembangan data dan Informasi	Seluruh Perangkat Daerah
		2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
		3) Program Peningkatan kualitas pelayanan public	
		4) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah	SETDA
		5) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfostandi
		6) Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
		7) Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		8) Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam	
		9) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	
		10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
		11) Program Kerjasama Pembangunan	
		12) Program Penelitian dan Pengembangan	
		13) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		14) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Bapenda
		15) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
		16) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		17)Program Penerapan Reformasi Birokrasi 18)Program Pengendalian pembangunan 19)Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20)Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 21)Program Penataan Perundang-undangan 22)Program Kerjasama informasi dengan media massa 23)Program Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 24)Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa 25)Program Pengembangan Data dan Informasi	SETDA
		26)Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah	SETWAN DPRD
		27)Program Peningkatan Pelayanan PATEN	Kecamatan
		28)Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 29)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPSDA

5.6 PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2019 – 2024

Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019-2024 merupakan janji-janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota yang strategis dan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2019 – 2024. Program unggulan ini salah satu arah kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan kota Bogor pada tahun 2019-2024. Program unggulan 2018 - 2023, meliputi:

BOGOR LANCAR

- Konversi Angkot
- Pembangunan jalan protokol alternatif
- Pembangunan flyover di Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes
- Penataan kawasan stasiun kereta api
- Pembangunan gedung aprkir di pusat kota
- Penuntasan sarana terminal Baranangsiang & stasiun LRT

BOGOR MERENAH

- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
- Pembangunan kampung wisata
- Revitalisasi pasar tradisional
- Kampungku bersih dan hijau
- Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

BOGOR KASOHOR

- Pembangunan museum
- Revitalisasi perpustakaan kota
- Pembangunan GOR di setiap Kecamatan

BOGOR MOTEKAR

- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional
- Festival seni & Helaran Budaya

BOGOR SAMAWA

- Sekolah Ibu
- 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
- Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2023
- Pemberian insentif bagi guru ngaji
- Orang Tua Asuh

#AbdiBogor

- Mall pelayanan Publik
- Kunjungan dokter ke keluarga
- Konseling & Call Center 24 Jam
- Layanan Malam Kelurahan
- RSUD Unggul

Selanjutnya, Program Strategis adalah program-program yang bersifat strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi serta janji politik Kepala Daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu Tahun 2019-2024.

Selanjutnya penjabaran program-program prioritas dan program-program unggulan sebagaimana dimaksud diatas akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program pembangunan daerah dan kerangka pendanaannya yang akan disajikan pada Bab VI RPJMD ini.

5.7 Korelasi Isu Strategis dengan Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019-2024

Perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, juga harus didukung dan berkorelasi dengan isu strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini gambaran sinergitas isu strategis dengan perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, sebagaimana dijelaskan pada table berikut ini.

Tabel 5.4.

Sinergitas Isu Strategis Dengan Perumusan Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Isu Strategis	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan
1. Pembangunan Manusia yang Berkeadilan	1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	
		4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	
		5. Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	
		6. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	
	2. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	
		2. Meningkatnya kualitas generasi muda	
		3. Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	
		4. Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	

Isu Strategis	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan
	3. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunnya tingkat pengangguran 2. Menurunnya Kemiskinan 3. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga	1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
2. Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis potensi local	1. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	2. Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis potensi local
3. Pemanfaatan ruang dan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan			
4. Reformasi Birokrasi	3. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>),	1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel 2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi	3. Penguatan Reformasi Birokrasi

Sumber : Hasil Olahan Bappeda, 2018

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bogor periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024 adalah ditujukan untuk ***mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik.***

Selanjutnya tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025 dan penjabarannya pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah disajikan pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1.

Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, Tahun 2019

Selanjutnya pada tahapan pembangunan jangka menengah ke-4 sebagaimana dimaksud diatas, untuk menuju pada terwujudnya kemandirian masyarakat dan dengan memperhatikan tema visi kota Bogor pada tahun 2019-2024, maka disusunlah tahapan pembangunan jangka pendeknya yang akan menjadi fokus/tema pembangunan dalam RKPD pada periode 2019-2024. Fokus/Tema pembangunan jangka pendek sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.2
Fokus/Tema Tahapan RKPD selama Periode RPJMD
Tahun 2019-2024



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, Tahun 2019

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kota Bogor. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Kota Bogor harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat

meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah weakness – opportunity (WO) yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Kota Bogor menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (resources constraints). Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bogor disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kota Bogor Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
VISI : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga				
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sehat				
1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1 Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat	1. Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, professional dan bermutu;	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan; b. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular c. Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan d. Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; e. Peningkatan Ketersediaan sumberdaya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			dengan standar; f. Kolaborasi pembiayaan Kesehatan Masyarakat. g. Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi;	
		2 Menurunkan Angka Kelahiran	a. Penurunan angka kelahiran pada usia remaja b. Peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		3 Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi masyarakat	a. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam b. Peningkatan kecukupan konsumsi energy dan protein pada asupan pangan masyarakat c. Pengendalian cemaran pada bahan pangan dan produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat d. Menjamin Kualitas konsumsi pangan dan Gizi Ibu Hamil, Bayi dan Balita	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif serta penyehatan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; b. Kemitraan dengan Kelompok Kesehatan Masyarakat; c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat; d. Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan. 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		2. Meningkatkan Kebugaran Masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga b. Menjamin ketersediaan sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahraga Prestasi secara Berkelanjutan 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan alternatif sumber air minum yang aman bagi masyarakat di Kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan; b. Meningkatkan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas; c. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat. 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan system air limbah yang layak	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan system air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat. b. Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah. 	
		3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> c. Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan,; d. Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh e. Standarisasi kualitas prasarana 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			sarana perumahan dan permukiman f. Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat g. Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. h. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana i. Akselerasi Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	
		4. Reduksi timbulan sampah	a. Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional; b. Penerapan dan Pengelolaan 3 R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat c. Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah d. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar.	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	1. Meningkatkan pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> a. Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane b. Konservasi sumberdaya Air secara berkelanjutan c. Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA d. Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolan DAS da Konservasi Sumberdaya Air 	
		2. Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar air	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air b. Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air. c. Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air. 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	5. Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	1. Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar udara	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara b. Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara c. Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		2. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> a. penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim b. Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 	
	6. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas b. Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang diteapkan sebagai kawasan 	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang wilayah.</p> <p>c. Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau.</p>	
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Cerdas				
<p>1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)</p>	<p>1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;</p>	<p>1. Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Dasar 9 Tahun</p>	<p>a. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan local sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan enterpreneurship.</p> <p>b. Standarisasi dan pemerataan Mutu Pendidikan Dasar</p> <p>c. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar</p> <p>d. Pengembangan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun.</p> <p>e. Penerapan Sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah</p> <p>f. Penguatan Karakter, Kreatifitas, Inovasi, dan Prestasi Siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi</p> <p>g. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.</p> <p>h. Menjamin Pendidikan Inklusif yang berkualitas.</p> <p>i. Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswa miskin.</p>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		<p>2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal</p>	<p>a. pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara</p> <p>b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Wajib Belajar 12 Tahun (setara SMA/SMK)</p> <p>c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja</p> <p>d. Meningkatkan Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/enterpreneurship dalam rangka percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka</p> <p>e. Penguatan Kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	2. Meningkatnya kualitas generasi muda	1. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak b. Penguatan Daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang c. Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa pada generasi muda d. Membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda e. Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor f. Memerangi penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras pada generasi muda g. Melakukan pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan social (anak jalanan, WTS,dll) secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih berdaya. h. Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan i. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif j. Pengembangan budaya dan minat baca pada generasi muda untuk 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>mendorong/memacu kreatifitas dan inovasi generasi muda</p> <p>k. Revitalisasi Perpustakaan Kota dan pengembangan taman taman bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.</p> <p>l. Memperkuat kharakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti.</p>	
	<p>3. Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat</p>	<p>1. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat</p>	<p>a. Menggali kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdayaguna dan bernilai ekonomis</p> <p>b. Memperkuat jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat</p> <p>c. Berupaya selalu menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan permasalahan pembangunan sehingga tidak terjebak pada rutinitas "Business As Usual"</p> <p>d. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan</p>	<p>Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi lokal</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			kreatif, peningkatan seni dan budaya, dll)	
	4. Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, dan toleransi masyarakat	1. Membangun dan menguatkan budaya partisipatif, gotong royong, kerukunan dan toleransi dalam setiap proses pembangunan daerah Mendorong pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender	a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam setiap proses bisnis pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. b. Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender c. Menumbuhkembangkan kerukunan, toleransi dan perdamaian dalam keberagaman masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
2 Terwujudnya . Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>)	1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level	a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparant (<i>open government</i>) b. Memperkuat perencanaan pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas	Penguatan Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> c. Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah d. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja e. Penguatan system pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien f. Penguatan Kapasitas Aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur g. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan <i>'smart'</i> h. Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai. i. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) j. Penataan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih 	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi	1. Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat b. Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan 	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera				
1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunnya tingkat pengangguran	1. Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar b. Mengembangkan Inkubator Bisnis c. memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja e. Kerjasama hubungan industrial 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja</p> <p>f. Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja</p>	
	2. Menurunnya Kemiskinan		<p>a. Menjamin adanya perlindungan social bagi masyarakat miskin</p> <p>b. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin</p> <p>c. Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Miskin</p>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
	3. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga	1. Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga	<p>a. Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya</p> <p>b. Memastikan adanya kemitraan gender dalam kehidupan berkeluarga</p>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		2. Meningkatkan Ketahanan Fisik Keluarga	<p>a. Menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga</p> <p>b. Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia</p> <p>c. Peningkatan kualitas kesehatan keluarga</p>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			d. Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga	
		3. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pendapatan per kapita keluarga melalui Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga b. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar 12 tahun c. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat berbasis keluarga d. Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera e. Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		4. Meningkatkan ketahanan Sosial Psikologis Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak b. Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak c. Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga d. Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		5. Meningkatkan ketahanan social dan Budaya dalam keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah b. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku social dan seksual menyimpang 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
<p>Terwujudnya</p> <p>2 peningkatan daya saing ekonomi daerah</p>	<p>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</p>	<p>1. Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah</p>	<p>a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local</p> <p>b. penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas</p> <p>c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi.</p> <p>d. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah</p> <p>e. Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional</p> <p>f. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)</p> <p>g. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen</p>	<p>Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi Lokal</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<ul style="list-style-type: none"> h. Revitalisasi pasar tradisional i. Mengembangkan potensi ekonomi local melalui pengembangan kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah j. Mendorong pengembangan BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya. 	
	<p>2. Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing</p> <p>1. Mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan koridor pusat yang terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan</p>	<p>a. Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik.</p> <p>a. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor</p> <p>b. Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>c. Pengembangan ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan</p>	<p>Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi Lokal</p> <p>Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		2. Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> d. Pengendalian pemanfaatan Ruang melalui Pelaksanaan Perijinan, Penegakan Sanki dan Penerapan Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan turunannya. e. Mengkaji Kemungkinan dilakukan perluasan wilayah Kota Bogor dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, arus mobilitas penduduk, arus imigrasi dan daya dukung wilayah f. Pemekaran wilayah administrative kecamatan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat 	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur transportasi	1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalan-jalan alternative/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran b. Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang (Flyover/underpass) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas 	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		wilayah	c. Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.	
		2 Menyediakan jaringan transportasi yang berkualitas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong percepatan tersedianya sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau b. Mengintegrasikan sistem jaringan transportasi perkotaan antar moda c. Melaksanakan percepatan penataan kawasan seputar Stasiun Kereta Api dan simpul-simpul transportasi lainnya dengan pengembangan system <i>Transit Oriented Development</i> (TOD). d. Membangun sarana prasarana simpul transportasi seperti penyediaan gedung parker di pusat-pusat kegiatan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas. e. Penuntasan Sarana Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT 	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

6.2 Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan program pembangunan daerah Kota Bogor juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

**Tabel 6.2 Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 Yang disertai Pagu Indikatif
PENJABARAN MISI 1 : MEWUJUDKAN KOTA SEHAT**

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
1. Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT																			
1.1.	Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,21	73,69		73,96		74,25		74,57		74,91		74,91			
		2	Indeks Kualitas Air	Point	49,6	49,67		49,7		49,8		49,9		50		50			
		3	Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	85,9		86		86,1		86,2		86,3		86,3			
1.1.1	Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,21	73,69		73,96		74,25		74,57		74,91		74,91			
1	Program 1.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Indeks Keluarga Sehat	Point	0,32	0,50	80.046	0,57	85.407	0,64	91.256	0,71	96.056	0,8	97.586	0,8	450.351	Dinas Kesehatan
			2	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	68	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
			3	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	0	24%		31%		38%		44%		51%		51%		
			4	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	95,85	96%		97%		98%		99%		99,5%		99,5%		
			5	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	4	8 % (2 puskk)		16% (4pusk)		20% (5 puskk)		24% (6 puskk)		28% (7pusk)		28% (7pusk)		
2	Program 1.1.1.2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	6	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	60	55	6.300	50	6.650	45	7.000	40	7.350	30	7.700	30	35.000	
			7	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	2,99	2,95		2,94		2,92		2,91		2,9		2,9		
			8	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	3,35	3,35		3,34		3,33		3,32		3		3		
			9	Persentase Ibu Hamil Dengan KEK	%	4,9	3,99		3,67		3,38		3,1		2,86		2,86		
			10	Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia	%	8,3	8,3		8,2		8,1		8		7,9		7,9		
			11	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	%	4,8	4,75		4,7		4,65		4,6		4,55		4,55		
			12	Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)	%	2,08	1,97		1,86		1,75		1,64		1,53		1,53		
			13	Persentase BalitaGizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	%	4,53	4,42		4,31		4,2		4,09		3,98		3,98		
3	Program 1.1.1.3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	14	Persentase kesembuhan TB Paru	%	81,22	86	7.500	86	8.750	87	10.000	87	11.250	87	12.500	87	50.000	Dinas Kesehatan
			15	Prevalensi HIV Aids	%	0,42	<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		
			16	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	66	65		62,5		62		61,5		60		60		
			17	Prevalensi Hipertensi	%	9,67	9,3		9		8,8		8,6		8,4		8,4		
			18	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,4	2,35		2,3		2,25		2		2		2		
			19	Angka Kesakitan ODGJ	%	≤ 0,13	≤ 0,13		≤ 0,13		≤ 0,13		≤ 0,13		≤ 0,13		≤ 0,13		
4	Program 1.1.1.4	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	20	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	70	80%	47.130	84%	74.409	88%	49.405	92%	48.045	96%	45.446	96%	264.435	
			21	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	80	85%		90%		95%		100%		100%		100%		
			22	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0,68	0,66		0,67		0,7		0,7		0,72		0,72		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
		23	Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	%	72	75%		77%		79%		81%		83%		83%		Dinas Kesehatan	
		24	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan	%	70,86	85		87		90		92		95		95			
5.	Program 1.1.1.5	Pengembangan Data dan Informasi	25	Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health	%	50%	65%	900	65%	1000	75%	1100	85%	1200	95%	1300	100%	5500	
6	Program 1.1.1.6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	26	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik	%	35%	50%	700	65%	750	85%	800	95%	850	100%	900	100%	900	
7	Program 1.1.1.7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	27	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	73,5	84,25	91.631	84,5	81.471	84,75	431.129	85	218.570	85,25	175.482	85,25	998.283	RSUD
8	Program 1.1.1.8	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	28	Persentase capaian SPM RSUD	%	93,45	93,75	180.492	93,8	180.308	93,85	200.916	93,9	206.592	94	212.845	94	981.153	
			29	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD	Point	3,66	3,66		3,7		3,72		3,75		3,8		3,8		
9	Program 1.1.1.9	Kesehatan Reproduksi Remaja	30	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Per 1000 Remaja	14,42	14,41	200	14,4	400	14,39	500	14,38	600	14,37	700	14,37	2.400	DPPKB
			31	Persentase PIK R Aktif	%		42,18		43,48		44,59		45,56		46,42		46,42		
10	Program 1.1.1.10	Kependudukan dan Keluarga Berencana	32	CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Tingkat Peserta KB Aktif	%		77,41%	1.860	77,42%	2.600	77,42%	3.250	77,43%	3.600	77,43%	4.050	77,43%	15.360	Dinas Kesehatan
			33	Persentase Peserta KB MKJP pada PUS	%		22,4		22,44		22,48		22,52		22,56		22,56		
11	Program 1.1.1.11	Peningkatan Ketahanan Pangan	34	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Point	84,9	86,9	1.700	87,9	1.905	88,9	2.100	89,9	2.345	90,9	2.600	90,9	10.650	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			35	Konsumsi energi	Kkal/Kapita/Hari	1809	1920		1980		2040		2100		2150		2150		
			36	Konsumsi protein	gr/kapita/Hari	50,8	53		54		55		56		57		57		
			37	Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman	%	91,53	93		93,5		94		94,5		95		95		
12	Program 1.1.1.12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	38	Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun	Kasus	0	3	750	3	820	3	890	3	960	3	1.030	3	4.450	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
		39	Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	%	22,2	22		21		20		19		18		18			
13	Program 1.1.1.13	Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan	40	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	27,28	29,37	300	29,76	350	30,03	400	30,36	450	30,4	500	30,4	2.000	
	SASARAN 2	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	68		69		70		71		72		72		
			2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45		0,47		0,49		0,51		0,53		0,53		
1	Program 1.1.2.1	Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan	41	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS)	%	66	68	10.125	69	10.725	70	10.125	71	10.125	72	12.600	72	53.700	Dinas Kesehatan
			42	Persentase Rumah sehat (%)	%	78,01	79		79,5		80		80,5		81		81		
2	Program 1.1.2.2	Kemitraan Lingkungan Hidup	43	Persentase sekolah adiwiyata (%)	%	30	31	3.000	33	3.020	35	3.050	36	3.080	38	3.100	38	15.250	Dinas LH
			44	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	%	jumlah kerjasama =	10		20		30		40		50		50		
3	Program 1.1.2.3	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	45	Persentase penegakan PERDA KTR	%	90	95	75	95	80	95	85	95	90	95	95	95	425	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Program 1.1.2.4	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	46	Persentase Sekolah Sehat (%)	%	13	15	76	17	78	19	86	22	90	24	90	24	420	Dinas Pendidikan
5	Program 1.1.2.5	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	47	Persentase PAUD Sehat	%	31	32	80	33	85	34	95	35	100	36	110	36	470	
6	Program 1.1.2.6	Kepemudaan dan Keolahragaan	48	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45	1.095	0,47	1.515	0,49	1.320	0,51	1.385	0,53	1.340	0,53	6.655	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			49	Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	Per 916,052 Penduduk	0.001511 : 2.08	0.001552 : 2.08		0.001661 : 2.08		0.001734 : 2.08		0.0011808 : 2.08		0.001887 : 2.08		2,08		
			50	Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	%	33,34	33,34	21.623	50,01	167.598	66,67	49.789	83,33	71.424	100	40.294	100	350.728	
			51	Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	Angka	1	0		1		1		1		1		5		
	SASARAN 3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	91,98	93,15		94,86		96,85		98,29		100,00		100,00		
			2	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	67,21	67,47		70,42		72,06		72,62		73,03		73,03		
			3	Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	2,62	2,44		2,27		2,12		1,94		1,77		1,77		
			4	Persentase Reduksi Sampah	%	6,26	6,4		6,6		6,8		7		7,2		7,2		
1	Program 1.1.3.1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	52	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	91,98	93,15	189.288	94,86	59.000	96,85	8.500	98,29	8.500	100,00	11.000	100,00	276.288	Dinas PUPR
			53	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah yang aman	%	67,21	67,47	12.050	70,42	82.494	72,06	155.850	72,62	95.550	73,03	93.610	73,03	439.554	
2	Program 1.1.3.2	Lingkungan Sehat Perumahan	54	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota	Ha	310,93	289,86	12.889	269,51	9.450	251,14	5.200	230,62	5.841	210,1	13.664	210,1	47.044	Dinas Perumahan dan Permukiman
			55	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi	Ha	54,49	44,82	19.791	34,26	21.770	24	23.945	13,7	26.342	0	28.340	0	120.188	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)		
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)				
			56	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat	Ha	146,42	112,09		89,95		56,4		26,25		0		0		Dinas Perumahan dan Permukiman
			57	Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berondisi baik	%	50,73	63,21		71,25		73,64		75,39		80,73		80,73		
			58	Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berondisi baik	%	28,97	48,59		58,31		62,75		65,4		74,56		74,56		
			59	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh	%	75,45	78,76		85,34		85,72		86,46		89,65		89,65		
			60	Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berondisi baik	%	58,51	63,84		74,97		78,49		82,43		88,59		88,59		
			61	Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh	%	76,93	78,62		81,55		83,54		87,19		90,53		90,53		
			62	Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh	%	56,87	66,05		75,76		77,09		80		83,46		83,46		
			63	Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh	%	23,84	36,55		47,97		50,6		62,56		68,16		68,16		
			64	Luas pencegahan kawasan kumuh Kota Bogor	Ha	365,94	292,71		221,55		144,75		75,18		0		0		
3	Program 1.1.3.3	Peningkatan Utilitas Perkotaan	65	Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU	%	74,03	74,47%	3.550	75%	4.140	75,61%	4.730	76,31%	5.320	77,10%	5.910	77,10%	23.650	
			66	Persentase PJU yang terpelihara	%	81,09	77,09%	48.220	73,05%	53.570	68,99%	58.920	64,91%	64.270	60,84%	69.620	60,84%	294.600	
4	Program 1.1.3.4	Lingkungan Sehat Perumahan	67	Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berondisi baik	%	44,64	52,60	98.400	60,60	98.400	68,58	98.400	76,56	98.400	86,54	98.400	86,54	492.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			68	Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berondisi baik	Km	20,31	24,75		29,18		33,62		38,05		42,49		42,49		
			69	Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	titik	0	30		60		90		120		180		180		
			70	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	Lokasi	745	865		985		1105		1225		1345		1345		
5	Program 1.1.3.5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	71	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	2018 = 11 2019 = 5	2	250	2	275	2	300	2	325	2	350	26	1.500	BPBD
			72	Jumlah Sekolah Aman bencana	Sekolah	2018 = 12 2019 = 4	2	200	2	250	2	300	2	350	2	400	26	1.500	
6	Program 1.1.3.6	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	73	% sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berondisi baik	%	2018 = 34 2019 = 40/26000	50	28.000	60	38.000	70	48.000	80	58.000	90	68.000	90	240.000	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Program 1.1.3.7	Pemulihan Pasca Bencana	74	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	%	40	60	2000	65	2500	70	3000	75	3500	80	4000	80	15.000	Dinas PUPR
			75	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	%	0	2	2.175	2	2.392	2	2.631	2	2.894	2	3.184	10	13.276	Dinas Perumkim

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)				
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)						
8	Program 1.1.3.8	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	76	jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani	Lokasi	27	8	2.100	8	2.300	8	2.520	8	7.541	8	12.668	67	27.129	Dinas PUPR	
9	Program 1.1.3.9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	77	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	%	75,85	76	28.734	76,5	38.506	77	43.761	77,5	49.051	78	54.378	78	214.430	Dinas LH	
			78	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%	195,900 m	48,8		48,8		48,8		48,8		48,8		48,8			48,8
			79	Persentase peningkatan retribusi persampahan	%	9,5 Milyar	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1			2,1
10	Program 1.1.3.10	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	80	Persentase Reduksi Sampah (%)	%	6,26	6,4	3.200	6,6	3.780	6,8	4.406	7,0	5.087	7,2	5.934	7,2	22.407		
			81	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	%	4	4		4,2		4,4		4,6		4,8		4,8			4,8
11	Program 1.1.3.11	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	82	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA	%	98,16	98,16	54.946	98,16	83.324	98,16	84.766	98,16	68.128	98,16	101.763	98,16	392.927		
			83	Kapasitas pengolahan sampah	Ton/hari	931	931		949		966		984		1.002		1.002			1.002
SASARAN 4 : Terkendalinya sumber-sumber pencemar air				Indeks Kualitas Air	Point	49,6	49,67		49,7		49,8		49,9		50		50			
1	Program 1.1.4.1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	85	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	35	36	1.100	37	650	38	700	39	1.400	40	1.100	40	4.950	Dinas LH	
			86	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang ditindaklanjuti	%		100	120	100	150	100	180	100	225	100	270	100	945		
			87	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	%	30	40	300	45	425	50	150	60	175	70	700	70	1.750		
			88	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	%	30	35	1.300	35	850	40	900	45	1.600	50	1.300	50	5.950		
2	Program 1.1.4.2	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	89	Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air	%	10	10	1300	10	900	10	900	10	900	10	900	10	4.900		
3	Program 1.1.4.3	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	90	Persentase saluran Irigasi yang berkeondisi baik (%)	%	45,83	58,75	2.200	60,00	2.500	61,25	2.660	62,50	2.900	63,54	3.000	63,54	13.260	Dinas PUPR	
			91	Persentase saluran/ sungai yang berkeondisi baik (%)	%	90	91,03	19.600	92,06	21.800	93,10	23.000	94,13	25.000	95,16	27.200	95,16	116.600		
SASARAN 5 : Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara			1	Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	85,9		86		86,1		86,2		86,3		86,3			
1	Program 1.1.5.1	Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	92	Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkeondisi baik (%)	%	100	100	375	100	375	100	375	100	375	100	375	100	1.875	Dinas Perhubungan	
			93	Persentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif	%	40	40	0	40	50	50	250	60	250	70	250	70	800		
			94	Persentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	%	87,82	88	150	89	150	90	165	91	165	92	165	92	165		92

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlim Juta)				
					Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)						
		95	Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi	Angka	1	2	2.557	3	1.500	4	1.675	5	1.750	7	975	7	8.457			
2	Program 1.1.5.2	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	96	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	40	50	1.300	55	1.400	60	1.100	65	1.550	70	1.550	70	6.900	Dinas LH	
			97	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			100
			98	Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	%		50		60		70		75		80		80			80
3	Program 1.1.5.3	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	99	Persentase Penurunan Emisi GRK	%		3,92	700	5,87	700	7,11	700	7,72	700	7,98	700	7,98	3.500		
SASARAN 6 :		Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,89	5,91		5,92		5,94		5,95		5,96		5,96				
1	Program 1.1.6.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	Ha		1,8	3.650	1,1	6.550	1	6.020	0,7	4.320	0,7	4.420	5,3	24.960	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			101	Luas RTH Publik yang dikelola dengan baik (Ha)	Ha		43,28	11.345	45,08	13.046	46,18	15.002	47,18	17.252	47,88	67.620	47,88	124.265		
2	Program 1.1.6.2	Pengelolaan Areal Pemakaman	102	Luas TPU Hijau yang dikelola dengan baik (Ha)	Ha		46,27	4.044	46,34	4.449	46,41	4.893	46,48	5.383	46,55	5.921	46,55	24.690	Dinas Perumahan dan Permukiman	
3	Program 1.1.6.3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	103	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha		0,5	1300	0,5	900	0,5	900	0,5	900	0,5	900	2,5	4900	Dinas LH	

PENJABARAN MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA CERDAS

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
2	Misi 2 : MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS																		
2.1.	Tujuan 2.1 :	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,3	10,63		10,97		11,31		11,65		12		12		
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,6		13,9		14,2		14,5		15		15		
			3	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	56.31		59.13		62.09		65.19		67.05		67.05		
			4	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	600-610		611-620		621-630		631-640		641-650		641-650		
			5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	69.5		70.5		71.5		72.5		73.5		73.5		
2.1.1	SASARAN 2.1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,3	10,63		10,97		11,31		11,65		12		12		
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,6		13,9		14,2		14,5		15		15		
			3	Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68.12	76,02		76,04		76,06		76,08		76,1		76,1		
			4	Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58.27	67,77		67,79		67,81		67,83		67,85		67,85		
1	Program 2.1.1.1.	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD	angka	49,04	50	1.173	50,55	1.180	51	1.823	51,5	1.850	52	1.875	52	7.901	Dinas Pendidikan
2	Program 2.1.1.2.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	2	APK SD	angka	112,4	113	44.829	113,05	16.000	113,08	48.000	114	50.000	114,3	52.000	114,3	210.829	
			3	APK SMP	angka	104,1	104,3		104,8		105		105,5		106		106		
			4	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik	%	93,7	94,5	90.786	94,8	92.000	95	94.000	95,5	95.000	96	97.000	96	468.786	
			5	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik	%	94,7	94,8	18.979	95	19.000	95,2	20.000	95,4	21.000	95,6	22.000	95,6	100.979	
			6	Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68.12	76,02	806	76,04	808	76,06	810	76,08	812	76,1	814	76,1	4.050	
			7	Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58.27	67,77	300	67,79	320	67,81	340	67,83	360	67,85	380	67,85	1.700	
3	Program 2.1.1.3.	Pendidikan non formal	8	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi															
			-	Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi	%	33	34	45.370	35	46.000	48.000	48.000	37	50.000	38	55.000	38	244.370	
			-	Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi	%	50	51	470	52	475	53	500	54	520	55	540	55	2505	
			9	Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan	%	0	100		100		100		100		100		100		
4	Program 2.1.1.4.	Manajemen Layanan Pendidikan	10	Prosentase Sekolah terakreditasi A															
			-	TK Terakreditasi A	%	38	39	1.290	40	1300	42	1320	44	1340	46	1350	46	6.600	
			-	SD Terakreditasi A	%	73	74		75		76		77		78		78		
			-	SMP Terakreditasi A	%	73	74		75		76		77		78		78		
5	Program 2.1.1.5.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)	%	67	68,4	7.120	68,9	7.130	69,0	7.150	69,3	7.200	69,8	7.250	69,8	35.850	Dinas Pendidikan
			12	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	%	19	20	510	21	530	23	545	25	570	26	580	26	2.735	
			13	Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	%	53	54	9.100	55	9.150	56	9.200	57	9.250	58	9.270	58	45.970	
			14	Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	%	53	54	3.200	55	3.250	56	3.300	57	3.350	58	3.400	58	16.500	
			15	Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	orang	1	2	430	2	440	2	445	2	450	2	455	10	2.220	
	SASARAN 2 :	Meningkatnya kualitas generasi muda		Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	56.31		59.13		62.09		65.19		67.05		67.05		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024												KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
1	Program 2.1.2.1	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO	15	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	%	2018 = 75 2019 = 76	77	1.200	78	1.300	79	1.400	80	1.500	81	1.600	81	7.000	DPMPPA	
			16	Prevalensi kekerasan terhadap anak	angka	2018 = 0,0240 2019 = 0,0136	0,0133		0,0128		0,0122		0,0117		0,0112		0,0112			
2	Program 2.1.2.2	Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	17	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Peringkat	Madya	Nindya	1.950	Nindya	2.100	Utama	2.250	Utama	2.400	Utama	2.550	Utama	11.250		
3	Program 2.1.2.3	Manajemen Layanan Pendidikan	18	jumlah siswa berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional	orang	61	63	1936	64	1940	65	1945	66	1950	67	1100	67	8.871	Dinas Pendidikan	
4	Program 2.1.2.4	Pengelolaan Keragaman Budaya	19	Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni atau budaya	%	jumlah pelaku seni budaya =	10	950	10	1.065	10	1.215	10	1.270	10	1.330	jumlah pelaku seni budaya =	5.830	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			20	jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasangir i /Lomba/Sayembara Karyaseni	Event	13	15	2557	17	2729	19	3035	21	3239	23	3609	23	15.169		
			21	Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	Angka	100	150	400	150	500	150	600	150	700	150	800	750	3.000		
			22	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	%	Jumlah cagar budaya = jumlah museum = jumlah pelaku pelestarian budaya =	2	1380	2	4730	2	2750	2	1675	2	825	Jumlah cagar budaya = jumlah museum = jumlah pelaku pelestarian budaya =	11.360		
6	Program 2.1.2.6	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	59	Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini	Angka	0,00015	0,00013	150	0,00011	200	0,0009	250	0,0007	300	0,0005	350	0,0005	1.250	Badan Kesbangpol	
7	Program 2.1.2.7	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	60	penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	%	Jumlah tempat menjual miras ilegal = 178	148	140	118	145	98	150	68	155	38	150	38	740	SatpolPP	
			61	Persentase pelanggaran yang ditertibkan	%	70	90	90	90	90	90	90	90	90						
8	Program 2.1.2.8	Manajemen layanan Pendidikan	62	Persentase Pelajar Bebas NAPZA	%	100	100	237	100	240	100	245	100	250	100	255	100	1.227	Dinas Pendidikan	
			63	penurunan kejadian tawuran pelajar	kejadian	20	18	18	17	15	12	12								

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
							2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)		
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)				
9	Program 2.1.2.9	Kepemudaan dan Keolahragaan	64	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	%	jumlah pemuda pengguna NAPZA = 162	0	2.250	5	2.250	5	2.250	5	2.250	5	2.250	25	11.250	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
			65	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	%	Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5	20		40		60		80		100		100			
			66	Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)	Predikat	0%	30 % Menuju KLP		40 % Menuju KLP		50% Menuju KLP		75% Menuju KLP		KLP		KLP			KLP
10	Program 2.1.2.10	Peningkatan Olah Raga Prestasi	52	Jumlah perolehan medali Tk. Internasional	Medali	4	4	3.670	3	3.195	4	23.301	4	3.521	4	4.241	4	37.928		
			53	Jumlah perolehan medali Tk. Nasional	Medali	14	66		16		0		0		66		66			
			54	Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar	Medali	162	64		32		264		35		76		76			
11	Program 2.1.2.11	Pembinaan Anak Terlantar	67	Persentase penurunan anak terlantar	%	Jumlah anak terlantar = 385 orang	19,48	225	38,96	225	58,44	225	77,92	225	97,4	225	97,4	1.125	Dinas Sosial	
12	Program 2.1.2.12	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	68	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	%	Jumlah anjal, gepeng dan WTS = 397	21,41	600	23,92	675	26,44	750	28,96	600	31,48	900	31,48	3.525		
			69	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	%	Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya = 550	8		8		9		9		9		9			9
13	Program 2.1.2.13	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	70	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/taman bacaan	%	jumlah kunjungan ke perpustakaan = 25,421	10	65	35	70	42	75	56	80	76	85	76	375	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah
							2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)	
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)			
14	Program 2.1.2.14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	71	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	%	-	40	6.820	100	9.180	100	200	100	200	100	200	100	16.600	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.1.3	SASARAN 3 :	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masvara	1	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	600-610		611-620		621-630		631-640		641-650		641-650		
1	Program 2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan	38	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	0	2	1700	2	1200	2	2100	2	1050	2	1250	2	7.300	Bappeda
			39	Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	%	0	5,2		10,5		10,5		10,5		10,5		47,2		
				Jumlah Hasil Kelitbangan	angka		10		10		10		10		10		117		
				Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.	%		7		7		7		7		7		77		
2.1.4	SASARAN 4 :	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	69.5		70.5		71.5		72.5		73.5		73.5		
			2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	NA	70,5		71		71,5		72		72,5		72,5		
1	Program 2.1.4.1	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	41	Persentase perempuan berpolitik (%)	%	17	17	1.550	18	1.650	19	1.750	20	1.850	21	1.950	21	8.750	DPMPPA
			42	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	2018 = 70 2019 = 75	78		80		82		84		86		86		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah
							2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)	
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)			
2	Program 2.1.4.2	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	43	Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%)	%	Jumlah panti asuhan / yayasan = 83	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	750	Dinas Sosial
			44	Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi	%	Jumlah Panti Asuhan /Yayasan /Orsos = 83	12,04		24,09		36,14		48,19		60,24		60,24		
3	Program 2.1.4.3	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	45	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	%	Jumlah penyandang disabilitas dan trauma = 970 orang	29,58	325	37,32	420	45,05	450	52,78	450	60,51	450	60,51	2.095	Dinas Sosial
			46	Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	%	2 Kasus	100		100		100		100		100		100		
4	Program 2.1.4.4	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	47	Jumlah lansia yang berdaya	Orang	150	100	300	100	100	100	100	100	100	100	100	650	700	
5	Program 2.1.4.5	Perencanaan Pembangunan Daerah	48	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	20 : 100	20 : 100	750	22 : 100	780	25 : 100	565	27 : 100	590	30 : 100	620	30 : 100	3.305	Bappeda
			49	Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	1 : 100	1 : 100		2 : 100		3 : 100		4 : 100		5 : 100		5 : 100		
			50	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5	6		7		8		9		10		10		
			51	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10	10		10		15		15		20		20		
6	Program 2.1.4.6	Pendidikan Politik Masyarakat	52	Persentase Partisipasi Pemilu	%	Pilwalkot = 75,35% Pilgub = 75,37% Pilpres = 83,87	0	550	0	650	0	750	0	850	81	950	81	3.750	Badan Kesbangpol
			53	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu	%	39,90	0		0		0		60		60				
7	Program 2.1.4.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	54	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif	%	2018 = 45 2019 = 50	55	700	60	725	65	750	70	775	75	800	75	3.750	DPMPPA

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
							2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)		
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)				
			55	Rasio Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Rasio	2018 = 1 : 60 2019 = 1 : 55	1 : 50	7.715	1 : 45	10.123	1 : 40	11.653	1 : 30	13.294	1 : 20	15.049	1 : 20	57.834	DPMPPA	
8	Program 2.1.4.8	Pemberdayaan lembaga Sosial	56	Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	%	43	50	6.898	55	10.123	60	11.653	65	13.294	70	15.049	70	57.017	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
5	Program 2.1.2.5	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	57	Jumlah Konflik SARA	angka	0	0	2.900	0	3.250	0	3.600	0	3.950	0	4.300	0	18.000	Badan Kesbangpol	
			58	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	rasio	3950 orang	12,5		12,75		13		13,25		13,5		13,5			
			59	Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	%	100	100	375	100	1.650	100	1.815	100	1.996	100	2.196	100	8.032	Humas dan Protokol	
2.2	Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>),	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	BB		BB		A		A		A		A			
			2	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered		Integrative		Integrative		Smart		Smart		Smart		Smart	
2.2.1	Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	BB		BB		A		A		A		A			
1	Program 2.2.1.1	Penerapan Reformasi Birokrasi	60	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,31	3,32	1.150	3,35	1.125	3,4	1.075	3,45	1.125	3,5	1.075	3,5	5.550	Bagian Organisasi	
			61	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	Point	B	BB		BB		A		A		A		A			
			62	Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi	Point	3,84	4		4,25		4,5		4,75		5		5			
			63	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	18,92	67,56	53	70,27	18	100	21	100	24	100	27	100	143	Inspektorat	
2	Program 2.2.1.2	Pengendalian pembangunan	64	Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana	%	80	80	688	83	750	85	750	87	750	90	750	90	3688	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan	
			65	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%	75	80	450	85	300	90	300	95	300	100	800	100	2150	Bappeda	
3	Program 2.2.1.3	Perencanaan Pembangunan Daerah	66	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Angka	21	22	300	23	800	24	300	25	300	26	300	26	2000		
4	Program 2.2.1.4	Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam	67	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,7	73	1267	77	1350	80	1750	83	1350	87	1400	87	7117		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah
							2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)	
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)			
5	Program 2.2.1.5	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	68	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,7	73	587	78	590	80	673	83	675	87	738	87	3263	Bappeda
6	Program 2.2.1.6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	69	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,7	73	175	79	195	80	200	83	200	87	200	87	970	
7	Program 2.2.1.7	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Point	3,1	3,12	165	3,15	175	3,17	185	3,2	195	3,22	205	3,22	925	Bagian Administrasi Pemerintahan
			71	Persentase BUMD yang Sehat	%	50	50	475	50	600	50	500	50	600	50	500	50	500	50
8	Program 2.2.1.8	Kerjasama Pembangunan	72	Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	%	70	70	615	75	1.035	80	1.075	85	1.115	90	1.145	90	4.985	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			73	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	10	110	10	120	10	130	10	140	10	150	10	650	Bappeda
9	Program 2.2.1.9	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah	74	Persentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	%	100	100	350	100	1.600	100	2.020	100	1.740	100	1.810	100	7.520	Bagian Administrasi Pemerintahan
				persentase masalah pertanahan yang termediasi	%	100	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100	1.250	
10	Program 2.2.1.10	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	75	Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	%	70	70	400	76	500	81	850	87	600	92	925	92	3.275	
11	Program 2.2.1.11	Penataan Perundang-undangan	76	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	%	90	95	809	95	1.425	95	1.425	95	1.425	95	1.425	95	6.509	Bagian Hukum dan HAM
12	Program 2.2.1.12	Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM	77	Persentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	%	100	100	515	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	4.515	
13	Program 2.2.1.13	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	78	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	100	4.845	100	4.100	100	4.210	100	4.331	100	4.464	100	21.950	Bagian Humas dan Protokol : dan Bagian Umum
14	Program 2.2.1.14	Peningkatan Sadar Tertib Arsip	79	PersentasePD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%)	%	17	17	248	38	250	58	255	79	260	100	265	100	1.278	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15	Program 2.2.1.15	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	80	Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	arsip	100	100	75	100	100	100	125	100	150	100	175	500	625	
16	Program 2.2.1.16	Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah	81	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda	%	80	80	10.297	80	10.297	85	10.297	85	10.297	90	10.297	90	51.485	Setwan

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)		
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)				
			82	Persentase Perda yang Disosialisasikan	%	100	100		100		100		100		100		100		
			83	Persentase Rapat dan Risalah Rapat yang Berkualitas	%	70	80		82		83		84		85		85		
17	Program 2.2.1.17	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	84	Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	%	100	100	11,35	100	11,35	100	11,35	100	11,35	100	11,35	100	56,75	BKPSDA
18	Program 2.2.1.18	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	85	Persentase Pemenuhan Formasi ASN	%	55	60	2.740	63	3.100	66	3.420	69	3.740	72	4.050	72	17050	
			86	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan	%	75	80		83		86		89		92		92		
			87	Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	%	85	90		91		92		93		94		94		
			88	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
19	Program 2.2.1.19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	89	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	%	30	35	5.761	40	5.762	45	5.762	50	5.762	55	5.762	55	28.807	
			90	Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	68	75		77,5		80		82,5		85		85		
			91	Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional	%	60	77		79		81		83		85		85		
			92	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	85	87		89		91		93		95		95		
20	Program 2.2.1.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	93	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	48.223	100	50.095	100	51.345	100	53.041	100	53.458	100	256.162	Seluruh Perangkat Daerah
21	Program 2.2.1.21	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	94	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	60.450	85	55.078	90	51.403	95	32.425	100	26.378	100	225.734	
22	Program 2.2.1.22	Peningkatan Pelayanan PATEN	95	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	%	80	82	55.749	85	75.085	87	55.461	90	53.686	95	54.946	95	294.927	Kecamatan
			96	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	Point	3	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024												KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah
							2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
23	Program 2.2.1.23	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	97	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	125	WTP	150	WTP	165	WTP	175	WTP	185	WTP	800	Inspektorat		
			98	Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan	%	100	100	220	100	225	100	230	100	235	100	240	100	1.150			
			99	Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100			100	
			100	Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100			100	
			101	Level Maturitas SPIP	Level	1	2	200	3	250	3	300	3	350	3	400	3	1.500			
			102	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	%	43,24	45,95		48,65		51,35		54,05		56,76		56,76			56,76	
			103	Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate	Elemen	3	3	350	3	350	4	350	4	350	4	350	4	1.750			
			104	Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM	Angka	7	8		8		8		9		9		9			9	
			105	Jumlah PD berpredikat WBK	%	0	1	84	1	120	1	125	1	150	1	175	5	654			
24	Program 2.2.1.24	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	106	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	%	100	100	3700	100	3700	100	3750	100	3800	100	3800	100	18.750	BPKAD		
25	Program 2.2.1.25	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	107	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80	81	17000	82	5475	83	5750	84	5855	85	6200	85	40.280	BPKAD		
26	Program 2.2.1.26	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	108	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	1.119	90	3.477	95	3.750	95	4.074	100	4.465	100	16.885	Seluruh Perangkat Daerah		
			109	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A				
			110	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100				
27	Program 2.2.1.27	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	111	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,91	2,92	23.740	2,92	14.240	2,93	14.840	2,93	15.265	2,94	15.665	2,94	83.750	Dinas Kominfostandi		
			112	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	%	7	14	9.500	21	4030	28	4080	34	4170	41	4220	41	26.000			
			113	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	80	85	19.060	90	12.365	95	13.902	95	13.260	100	12.704	100	71.291	Seluruh Perangkat Daerah		
			114	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100		100		100		100		100		100				
28	Program 2.2.1.28	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	115	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	NA	Level 1	1.900	Level 1	1.100	Level 2	1.200	Level 3	1.300	Level 3	1.300	Level 3	6.800	Dinas Kominfostandi		
29	Program 2.2.1.29	Penyelenggaraan Statistik Sektor	116	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	70	3.800	73	4.200	76	4.600	79	5.000	82	5.400	82	23.000			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)				
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)						
30	Program 2.2.1.30	Pengembangan Data dan Informasi	117	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55	3.825	60	3.495	65	4.357	70	5.087	75	5.238	75	22.002	Seluruh Perangkat Daerah		
			118	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75				
			119	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		90		95		95		100		100			100	
31	Program 2.2.1.31	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	3,31	3,32		3,35		3,4		3,45		3,5		3,5				
32	Program 2.2.1.32	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa	120	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa	Indeks	8,53	10	1.250	10	2.550	10	2.800	10	3.000	10	3.200	10	12.800	Bagian Pengadaan Barang/jasa		
33	Program 2.2.1.33	Kerjasama Informasi dengan Media massa	121	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	91,9	100	3.881	100	4840	100	5324	100	5856	100	6442	100	26.343	Bagian Humas dan Protokol		
	SASARAN 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	122	Level Kematangan Smart City	Level	Ad Hoc	Initiative		Scattered		Integrative		Integrative		Smart		Smart				
1	Program 2.2.2.1	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	123	persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%			Jumlah UMKM keseluruhan = 11.336	10	600	10	100	15	100	15	100	20	100	20	1.000	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Program 2.2.2.2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	124	Prosentase pemanfaatan E Commerce oleh IKM	%			Jumlah IKM keseluruhan = 1.000 Jumlah IKM yang sudah menggunakan E commerce = 44 Persentase pemanfaatan E commerce = 4,4 %	5,4	695	5,94	400	6,53	340	7,18	425	7,9	475	7,9	2.335	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024												KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)					
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)							
3	Program 2.2.2.3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	125	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya	%	Jumlah IKM keseluruhan = 1.000 Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri = 20 Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi = 2%	2,5	900	3	900	3,5	900	4	900	5	1000	4	4.600			
4	Program 2.2.2.4	Peningkatan Kreatifitas dan daya saing Ekonomi Kreatif	126	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	NA	2	300	3	350	3,5	400	4	450	5	500	5	2.000	Dinas pariwisata dan Kebudayaan		
5	Program 2.2.2.5	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	127	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	Layanan	1	1	750	1	1.300	1	350	1	350	1	750	1	3.500	Dinas LH		
6	Program 2.2.2.6	Pemberdayaan usaha Ekonomi Masyarakat	128	Persentase Pelaku Usaha yang mampu memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	%	2018 = 0 2019 = 11,5	13,5	400	18,5	425	23,5	450	28,5	475	33,5	500	33,5	2.250	DPMPPA		
7	Program 2.2.2.7	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	129	Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi	Layanan	0	1	400	1	400	1	400	1	300	1	300	1	1.800	Dinas PUPR		
			130			0	1	400	1	500	1	150	1	150	1	150	1		Dinas Perumkim		
			131			1	3	5.750	3	7.257	3	7.564	3	8.207	3	8.607	3	37.385	Dinas Perhubungan		
			132			1	1	1.800	1	1.800	1	1.900	1	1.900	1	2.000	1	9.400	Bapenda		
			133			1	1	200	1	250	1	300	1	350	1	400	1	1.500	BPBD		
			134																		Dinas Kesehatan
			135			1	1	818	1	819	1	820	1	830	1	840	1	4.127	Dinas Pendidikan		
			136			Jumlah layanan kehumasan dan keprotokolan	Layanan	91,9	100	721	100	2.750	100	3.025	100	3.327	100	3.660	100	13.483	Humas dan Protokol
8	Program 2.2.2.8	Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan	137	Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	%	100	100	100	100	150	100	200	100	250	100	300	100	1.000	BPBD		
9	Program 2.2.2.9	Pemulihan pasca Bencana	138	Persentase Ketersediaan data dan informasi dampak serta kebutuhan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500	BPBD			
10	Program 2.2.2.10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	139	Rata-Rata Respon time penanganan bencana	Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	800	< 24 Jam	825	< 24 Jam	850	< 24 Jam	875	< 24 Jam	900	< 24 Jam	4.250	BPBD		
11	Program 2.2.2.11	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	140	Respon time penanganan kebakaran	Menit	30	15	400	15	150	14	150	14	200	13	200	13	1.100	SatpolPP		

PENJABARAN MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA SEJAHTERA

No	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024			Target	Rp. (dlm Juta)
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)			
3	MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA																
	Tujuan 3.1 Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1 Indeks Gini Rasio	Point	0.41	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36						
	SASARAN 3.1.1 Menurunnya tingkat pengangguran	2 Indeks Kebahagiaan	Point	NA	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	74-75	74-75						
		1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,28	8,47	8,22	7,97	7,8	7,6	7,6	7,6						
1	Program 3.1.1.1 Perluasan Kesempatan Kerja	1 Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	90,38	91,53	2.806,00	91,87	3.546	92,20	4.253	92,51	4.727	92,81	5.021	92,81	20.353	
		2 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500		
		3 Jumlah KK miskin yang dilatih dan terserap pasar kerja	KK	2018 = 26 2019 = 26	25	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50		
2	Program 3.1.1.2 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1 Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	109.416	120.358	172	132.393	737	145.633	800	160.196	873	176.216	952	176.216	3.534	
		2 Penetapan besaran UMK	Rp	3.557.146	4.149.797	4.481.780	4.840.322	5.227.547	5.645.750	5.645.750	5.645.750	5.645.750	5.645.750	5.645.750	5.645.750		
		3 Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	Program 3.1.1.3 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Juta/pekerja/tahun	63,91	65,78	72	68,59	76	71,52	78	74,57	80	77,76	83	77,76	389	
4	Program 3.1.1.4 Pembinaan dan penempatan transmigrasi	5 Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi	KK	0	2	301	2	303	2	305	2	408	2	411	10	1.728	
5	Program 3.1.1.5 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	6 Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM	orang	-	600	200	600	200	600	200	600	200	600	200	3000	1000	
6	Program 3.1.1.6 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	7 Jumlah Kesempatan kerja baru pada UMKM	orang	Jumlah tenaga kerja UMKM = 39.982	360	2.800	360	2.800	360	2.800	360	2.800	360	2.800	1800	14.000	
7	Program 3.1.1.7 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	8 Jumlah Kesempatan kerja baru pada Koperasi	orang	Jumlah UMKM (wirausaha) baru Koperasi = 500	250	2.750	250	2.750	250	2.750	250	2.750	250	2.750	100	13.750	
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	UMKM	Jumlah UMKM keseluruhan = 23.706	180	6.200	180	6.400	180	6.600	180	6.800	180	7.000	24606	33.000	
8	Program 3.1.1.8 Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif	9 jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	orang	245	30	950	40	950	50	950	60	950	70	950	515	4.750	
9	Program 3.1.1.9 Kepemudaan dan Keolahragaan	10 jumlah wiraswahan muda pemula	orang	-	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	500	750	
	SASARAN 3.1.2 Menurunnya tingkat kemiskinan	1 Angka Kemiskinan	%	5,93	5,8	5,78	5,53	5,28	5	5	5	5	5	5	5		
1	Program 3.1.2.1 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	14 persentase jumlah fakir miskin	%	Jumlah KK Miskin = 72.187 KK jumlah Penduduk Miskin = 321.250 jiwa	5,8	5,980	5,78	5,180	5,53	5,366	5,28	5,540	5	5,570	5	27.636	
		15 persentase jumlah PMKS yang tertangani	%	Jumlah PMKS yang ditangani = 55734. Jumlah PMKS keseluruhan = 60944 (91,45%)	92%	93%	94%	95%	95%	96%	96%	96%	96%	96%	96%		
2	Program 3.1.2.2 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	16 Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	12 Jenis Lembaga	100	2.475	100	2.318	100	2.721	100	3.147	100	3.047	73,46	13.708	
		17 Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	%	relawan yang aktif 268 orang, Total PSKS 1142 orang	27,85	32,22	36,60	40,98	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36		
3	Program 3.1.2.3 Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat	18 Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi	%	2,51	1.500	5,02	1.625	7,53	1.750	10,04	1.875	12,54	2.000	12,54	8.750	DPMPPPA	
4	Program 3.1.2.4 Pendidikan Non Formal	19 Persentase Kelulusan Paket A, B, dan C	%	100	45	100	50	100	55	100	60	100	60	100	100	270	
		20 Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan	%	50	51	52	53	54	55	55	55	55	55	55	55		
		21 Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
5	Program 3.1.2.5 Manajemen Layanan Pendidikan	22 Jumlah besiswa mahasiswa berprestasi miskin	mahasiswa	37	47	518	52	538	57	558	57	578	57	598	57	2.790	
7	Program 3.1.2.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	23 Cakupan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin	%	100	100	5.000	100	4.500	100	4.000	100	3.500	100	3.000	100	20.000	
8	Program 3.1.2.8 Lingkungan Sehat Perumahan	24 Persentase RTLH	%	29,4	25,20%	600	23,21%	660	21,23%	726	19,24%	798,6	17,26%	878,46	17,26%	3663,06	
	SASARAN 3.1.3 Meningkatkan ketahanan keluarga	1 Indeks Ketahanan Keluarga (cara perhitungan mengikuti buku panduan Kementerian PMPPA, 2016)	Point		73-74	74-75	75-76	76-77	76-77	76-77	76-77	76-77	76-77	76-77	76-77		
1	Program 3.1.3.1 Pembangunan Keluarga	26 Persentase Keluarga Sejahtera	%	Jumlah Keluarga Sejahtera = 196.428 Jumlah Keluarga = 212.082 Persentase Keluarga Sejahtera = 92,62%	93,00	713	93,50	1350	94,00	1.450	94,50	1.530	95,00	1.615	95,00	6.658	
		27 Persentase Anggota bina keluarga balita aktif	%	Anggota BKB Aktif = 7.521 Jumlah Anggota BKB Keseluruhan = 9.575 Persentase Anggota BKB Aktif = 78,54%	78,74%	78,94%	79,14%	79,34%	79,34%	79,54%	79,54%	79,54%	79,54%	79,54%	79,54%		
		28 Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif	%	Anggota BKR Aktif = 3.702 Jumlah Anggota BKR Keseluruhan = 4.999 Persentase Anggota BKR Aktif = 74,05%	74,25%	74,45%	74,65%	74,85%	74,85%	75,02%	75,02%	75,02%	75,02%	75,02%	75,02%		

No	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2023		2024		Target	Rp. (djm Juta)			
					Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)					
		29	Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif	%	Anggota BKL Aktif = 5.366 Jumlah Anggota BKL Keseluruhan = 7.290 Persentase Anggota BKL Aktif = 73,60%	73,80%		74,00%		74,02%		74,04%		74,06%			
		30	Jumlah Kelompok UPPKS aktif	angka	22	23		24		25		26		27			
2	Program 3.1.3.2	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan															
		31	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%)	%	2018 - 75 2019 - 76	77	5.250	78	5.500	79	5.750	80	6.000	81	6.500	81	29.000
		32	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,025	0,0107		0,0106		0,0105		0,0091		0,009		0,009	
		33	Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya	%	2018 - NA 2019 - 1	1,5		3,10		4,65		6,20		7,75		7,75	
		34	Persentase Perempuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan	%	2018 - NA 2019 - 0,5	0,9		1,8		2,7		3,6		4,5		4,5	
		35	Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan	%	0,0126	0,0126		0,0127		0,0128		0,0129		0,013		0,013	
3	Program 3.1.3.3	Penataan Administrasi Kependudukan															
		35	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	%	94%	95%	500	96%	500	97%	400	98%	400	100%	400	100%	2.200
		36	Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	31%	33%	500	34%	400	35%	400	40%	350	45%	350	45%	2.000
		37	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	99%	99,30%	500	99,80%	500	100%	600	100%	650	100%	700	100%	2.950
		38	Persentase Penduduk yang memiliki KK	%	100%	100%	250	100%	300	100%	300	100%	350	100%	350	100%	1.550
		39	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	1%	30%	500	40%	500	50%	400	60%	400	70%	400	70%	2.200
4	Program 3.1.3.4	Lingkungan Sehat Perumahan															
		40	Persentase Rumah Layak Huni	%	70,6	74,80%	400	76,79%	440	78,77%	484	80,76%	532,4	82,74%	585,64	82,74%	2442,04
5	Program 3.1.3.5	Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan															
		41	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa	%	76,61	80%	4.300	85%	4.730	90%	5.203	90	5.723	90	6.295,65	90	26.251,65
6	Program 3.1.3.6	Peningkatan Ketahanan pangan															
		42	Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan	%	18,3	16,6	1.600	15,7	1.625	14,9	1.900	14,01	1.925	13,15	2.200	13,15	9.250
		43	Ketersediaan energi	Kkal/Kapita/Hari	2512,8	2400		2400		2400		2400		2400		2400	
		44	Ketersediaan Protein	Gr/Kapita/Hari	89,4	63		63		63		63		63		63	
7	Program 3.1.3.7	Peningkatan Produksi Pertanian															
		45	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	Padi: 5439 Ton Palawija: 11.540 Ton Hortikultura: 28.972 Ton	4	3.948	6	4.415	8	4.033	10	4.305	12	4.226	12	20.927
		46	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	Daging: 5.999 Ton Telur: 93,5 Ton Susu: 1.929.316 Liter	2		4		6		8		10		10	
8	Program 3.1.3.8	Peningkatan Produksi Perikanan															
		47	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	Ikan Konsumsi: 4.980 Ton Ikan Hias: 18.578,560 ekor	3	750	4,5	755	6	810	7,5	865	9	920	9	4.100
	Tujuan 3.2	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah															
	Sasaran 3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi															
		1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,14	6,66		6,75		6,84		6,94		7		7	
		2	PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Dalam Juta Rp.	37,99	40,36		42,73		45,1		47,47		49,84		49,84	
		3	Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	11.348	11.648		11.948		12.248		12.548		12.848		12.848	
		4	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19,68	21		22		23		24		25		25	
1	Program 3.2.1.1	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal															
		50	Nilai Investasi	Tribun Rp.	3,1	2,50	10.150	2,53	11.560	2,55	12.055	2,58	11.825	2,60	11.660	2,6	57.250
		51	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	64	75		85		95		100		100		100	
2	Program 3.2.1.2	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor															
		52	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	%	99.283.771,63	1,1	1650	1,35	1900	1,6	2075	1,85	2375	2,1	2325	2,1	10.325
3	Program 3.2.1.3	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri															
		53	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	%	Tahun 2018 = 2,99 Tahun 2017 = 5,58	5,59	5.903	5,6	15.495	5,61	24.678	5,62	14.111	5,63	14.188	5,63	74.374
4	Program 3.2.1.4	Perlindungan Konsumen dan Pngamanan Perdagangan															
		54	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	%	11630 UTP	95	2885	95,01	755	95,02	835	95,03	1105	95,04	925	95,04	6.505
		55	Laju Inflasi Tahunan (kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)	%	3,69	2,4 %	360	2,4 %	600	2,4 %	600	2,4 %	600	2,4 %	600	2,4 %	2.760
5	Program 3.2.1.5	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah															
		56	Persentase peningkatan IKM yang produktif	%	1000 IKM	2	2970	2,1	2970	2,2	2970	2,3	2970	2,4	2970	2,4	14.850
6	Program 3.2.1.6	Pengembangan Pemasaran Pariwisata															
		57	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.965.987	7.004.033	3.050	7.704.436	3.650	8.474.879	4.250	9.322.366	4.850	10.254.602	5.450	10.254.602	21.250
7	Program 3.2.1.7	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah															
		58	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Rupiah	Jumlah omzet usaha Mikro = 2,3 T	68 M		81 M		95 M		109 M		392 M		3,045 T	
8	Program 3.2.1.8	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima															
		59	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	418	500	3.295	500	1.202	500	1.204	500	1.282	500	1.135	2.918	8.118
		60	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	418	150		150		150		150		150		1.168	
9	Program 3.2.1.9	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi															
		61	Jumlah Koperasi Aktif	unit	528	558	9.100	588	8.850	618	8.850	648	8.900	678	8.900	678	44.600
		62	Jumlah Koperasi berkualitas	unit	44	64		84		104		124		144		144	
10	Program 3.2.1.10	Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif															
		63	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	70	75	400	80	450	85	500	85	550	90	600	90	2.500

No	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah				
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlim Juta)					
					Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)							
11	Program 3.2.1.11	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	64	Persentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang dinidaktakan	%	75	75	325	80	325	85	325	85	325	90	325	90	1.625	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama		
12	Program 3.2.1.12	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	65	Nilai pajak daerah	dalam Juta Rp.	592.978	733.072	11.850	791.000	11.983	878.500	12.361	976.000	12.773	1.087.000	13.743	1.087.000	62.710	Bapenda		
			66	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	18,06	7,90	11,06	11,10	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37		
			67	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dalam Juta Rp.	realisasi 2018 = 912.197.971.288 target 2019 = 944.394.650.807	1.090.708,00	1.127.767,17	1.241.375,86	1.349.164,16	1.465.472,63	1.465.472,63	1.465.472,63	1.465.472,63	1.465.472,63	1.465.472,63	1.465.472,63	1.465.472,63	1.465.472,63	1.465.472,63	
			68	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	%	nilai realisasi PAD tahun 2018 = 912.197.971.288	15,49	3,4	10,07	8,68	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	
Sasaran 3.2.2.	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100				
		2	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
1	Program 3.2.2.1	Perencanaan Tata Ruang	70	Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM	%	0	20	1.550	40	4.100	60	5.400	80	3.200	100	3.550	100	17.800	Dinas PUPR		
			71	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	85	100	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	550	Bappeda
2	Program 3.2.2.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	72	Persentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%) Periode Tahun 2020-2024	%	0	20	250	40	300	60	350	80	400	100	450	100	1.750	Dinas PUPR		
			73	Persentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%) Periode Rencana 2020-2024	%	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	Program 3.2.2.3	Penataan dan Pengaturan Bagunan Gedung	74	Persentase Bangunan Gedung khusus/terentu yang memiliki rekomendasi laik fungsi	%	70	75	1200	78	1300	80	1400	85	1600	90	1600	90	7.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
4	Program 3.2.3.4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	75	Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	%	80	82	2100	84	700	86	800	88	900	90	1000	90	5.500			
			76	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)	%	90	90	90	92	94	94	96	96	98	98	98	98	98	98		
5	Program 3.2.2.5	Pemeliharaan Kanrantrib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	77	Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	%	90	90	290	90	307	90	324	90	341	90	358	90	1.620	SatpolPP		
			78	Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang	kawasan	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		
Sasaran 3.2.3.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	88.59	90	91	92	92	93	93	94	94	94	94	94	94				
		2	Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	45	50	60	70	70	80	80	90	90	90	90	90	90	90			
Program 3.2.3.1	Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian	79	Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah)	Km	268,336	268,336	277.658	270,336	273.850	271,336	296.372	272,336	207.129	273,336	101.708	273,336	1.156.717	Dinas PUPR			
		80	Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km)	Km	78,3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	113,3				
		81	Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	Km	0	0	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5				
		82	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Km	15,14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30,14				
		83	Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan	Angka	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6				
		84	Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%)	%	11	21,8	32,6	43,4	54,2	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
		85	Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan	M	278	0,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	290,3				
		86	Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan (%)	Jalur	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5				
Program 3.2.3.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	87	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	%	88.59	89	57.600	89,25	63.160	89,5	68.720	89,75	74.280	90	79.840	90	343.600				
Program 3.2.3.3	Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	88	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	50	60	1800	70	1700	80	1950	90	2200	100	2450	100	10.100				
Program 3.2.3.4	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	89	Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik	%	70	75	9.700	80	7.900	85	10.900	90	7.900	95	10.450	95	46.850	Dinas Perhubungan			
Program 3.2.3.5	Peningkatan Pelayanan Angkutan	90	Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%)	%	50	50	42.050	60	55.350	70	75.750	80	89.450	90	104.450	90	367.050				
Program 3.2.3.6	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	91	Load Factor Angkutan Umum	%	40	45	650	50	500	55	950	60	500	65	650	65	3.250	Dinas Perhubungan			
		92	Konektivitas transportasi multimoda	Point	2	2	526.871	3	384.948	4	488.828	5	77.898	7	44.408	7	1.522.953				

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial

Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

RTRW Kota Bogor disusun berasaskan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial.

Berpegang pada prinsip bahwa rencana tata ruang adalah perwujudan ruang dari rencana pembangunan daerah maka tujuan penataan ruang Kota Bogor diturunkan dari visi pembangunan kota baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Rencana Jangka Menengah Daerah. Selain berpegang pada RPJPD dan RPJMD, perumusan tujuan penataan ruang juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti hasil analisis penataan ruang Kota Bogor mengenai kondisi internal dan kebijakan pengembangan kota sebelumnya, isu-isu strategis dan peran serta fungsi kota yang dikembangkan pada Kota Bogor untuk jangka waktu 20 tahun. Dengan mempertimbangkan komponen-komponen tersebut, maka tujuan penataan ruang pada RTRW Kota Bogor adalah:

“Terwujudnya ruang Kota Bogor sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai kota pusaka yang berwawasan lingkungan.”

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota Bogor sebagaimana dimaksud diatas, telah dirumuskan Arah kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota Bogor 2011-2031 yaitu :

6.3.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pada bagian berikut dibahas mengenai kebijakan dan strategi penataan ruang untuk Kota Bogor. Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota, sedangkan strategi penataan ruang adalah penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Melihat definisi dari kebijakan penataan ruang yang disebutkan sebelumnya maka kebijakan penataan ruang dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku untuk Kota Bogor.
2. Arahannya jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan.
3. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul pada masa yang akan datang.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kriteria perumusan strategi penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang.
2. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi.
3. Upayanya jelas, realistis dan dapat diimplementasikan sampai 2037 di Kota Bogor secara efisien dan efektif.
4. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kota Bogor.

5. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat pada kriteria yang telah disebutkan maka kebijakan dan strategi perencanaan ruang untuk Kota Bogor meliputi :

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

6.3.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Secara umum kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Mengembangkan 4 wilayah Pelayanan selain Pusat Kota, sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota;
2. Mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan;
3. Pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu;
4. Pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
5. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor;
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum.

Adapun strategi kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Strategi mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - a. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor; dan

- b. Merevitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas dan karakter kota Bogor sebagai Kota Pusaka.
2. Strategi pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:
 - a. Mewujudkan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;
 - b. Mewujudkan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;
 - c. Mewujudkan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran; dan
 - d. Mewujudkan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran.
3. Strategi pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
4. Strategi mengembangkan 4 Wilayah Pelayanan sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:
 - a. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;
 - b. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;
 - c. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa; dan
 - d. Mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina.

5. Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor
 - a. Sinergitas sistem jaringan jalan antara Kota dengan Kabupaten Bogor;
 - b. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;
 - c. Mengembangkan jalan lingkar dan jalan tembus;
 - d. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;
 - e. Mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;
 - f. Mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas;
 - g. Mengembangkan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Kota;
 - h. Mengembangkan terminal penumpang dan angkutan barang;
 - i. Mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda; dan
 - j. Mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya.
6. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:
 - a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b. Melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;
 - c. Mengembangkan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. Mengembangkan jaringan gas;
 - e. Mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
 - f. Mengembangkan jaringan sumber daya air;

- g. Mengembangkan sistem jaringan air minum;
- h. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
- i. Meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- j. Meningkatkan sistem jaringan persampahan kota;
- k. Meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase; dan
- l. Mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana.

6.3.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan dan strategi pola ruang Kota Bogor meliputi:

- 1. Kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan peruntukan lindung; dan
- 2. Kebijakan dan strategi pengembangan peruntukan budi daya.

A. Kebijakan dan Strategi Kawasan Lindung

Kebijakan pengelolaan kawasan lindung ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- 2. Pelestarian kawasan cagar budaya; dan
- 3. Peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota.

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi :

- a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
- b. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
- c. Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi;
- d. Meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
- e. Melakukan penataan pada kawasan lindung.

Strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi :

- a. Mengintegrasikan pelestarian kawasan pusaka dalam kerangka penyelenggaraan Kota Bogor sebagai Kota Pusaka;
- b. Menetapkan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
- c. Meningkatkan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya; dan
- d. Mengembangkan potensi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota meliputi :

- a. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
- b. Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
- c. Meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (landbanking); dan
- d. Mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

B. Kebijakan dan Strategi Kawasan Budaya

Kebijakan pengembangan kawasan budaya ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
2. Pengembangan ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan.

Strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

- a. Mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah pada sebagian WP B dan WP E;
- b. Membatasi pengembangan kawasan PPK;
- c. Mengoptimalkan pengembangan Sub PPK; dan
- d. Membatasi pengembangan kawasan industri skala besar.

Strategi pengembangan ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi :

- a. Menetapkan deliniasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;
- b. Mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD; dan
- c. Mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan.

6.3.4 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota adalah

1. Pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan;
2. Pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
3. Pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi.

Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan meliputi:

- a. Mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan;
- b. Menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;

Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

- a. Mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
- b. Mempertahankan nilai sejarah kawasan;
- c. Menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
- d. Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata.

Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- a. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;
- b. Menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
- c. Mengembangkan kawasan tematik; dan
- d. Mengintegrasikan konsep guna campuran, superblok dan TOD dengan kegiatan ekonomi.

6.3.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Periode Rencana Jangka Menengah Tahun 2019-2024

Adapun arahan pemanfaatan ruang pada periode rencana jangka menengah tahun 2019-2024 dilaksanakan melalui rencana program pemanfaatan ruang sebagai berikut :

Tabel 6.3
Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
I.	WP Samida						
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Samida (WP A) dan proses legalisasi	WP Samida (WP A)					
2	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Samida (WP A)	Pusat Kota Bogor/ PPK Kota Bogor					
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Samida (WP A)	Sub WP Samida (WP A)					
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	TOD Satsiun Bogor					
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	TOD Baranangsiang					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
6	Penataan kawasan TOD Kota Bogor	TOD Stasiun Bogor					
		TOD Baranangsiang					
7	Pengembangan RTH skala kota	PPK WP Samida (WP A)					
8	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)					
9	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur					
10	Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada	WP Samida (WP A)					
11	Penataan Pusat Lingkungan A1, A2	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari					
12	Penataan sektor informal (PKL)	WP Samida (WP A)					
II. WP Pasima							
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi	WP Pasima (WP B)					
2.	Penyusunan Rencana rinci Kawasan Pusat WP Pasima (WP B)	Sub PPK WP Pasima (WP B)					
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP B)	Sub Pusat WP Pasima (WP B)					
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan TOD	Kawasan TOD					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Skala Kota					
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota					
6.	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Pasima (WP B)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang					
7.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang					
8.	Pembangunan RTH skala WP	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang					
9.	Pembangunan Pusat Lingkungan B1 dan B2	Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu					
III.	WP Utara						
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi	WP Utara (WP C)					
2	Penyusunan Rencana Rinci	Yasmin – Pasar					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	Kawasan Pusat WP Utara (WP C)	TU Kemang					
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP C)	Sub Pusat WP Utara (WP C)					
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota					
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota					
6.	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan di Sub PPK C	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin – Pasar TU Kemang					
7.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin – Pasar TU Kemang					
8.	Pembangunan RTH skala WP	WP Utara (WP C)					
9.	Pembangunan Pusat Lingkungan C1, C2, C3, C4	Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat					
IV.	WP Purwa						
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses legalisasi						

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Purwa (WP D)	Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya					
3.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Purwa (WP D)	Sub Pusat WP Purwa (WP D)					
4.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota					
5.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota					
6.	Penyusunan RTBL koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta	Koridor Bogor-Jakarta					
7.	Penataan kawasan Simpang Pomad-perbatasan kota	Simpang Pomad-Perbatasan kota					
8.	Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Purwa (WP D)	WP Purwa					
9.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya					
10.	Pembangunan RTH skala WP	WP Purwa (WP D)					
11.	Pembangunan Pusat Lingkungan D1, D2, D3 dan D4	Kelurahan Kedunghalang, Ciluar,					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Cimahpar, Tegal Gundil					
V.	WP Daksina						
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi	WP Daksina (WP E)					
2.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Daksina (WP E)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – Inner Ring Road					
3.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Daksina (WP E)	Sub Pusat WP Daksina (WP E)					
4.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota					
5.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota					
6.	Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi					
7.	Penyusunan RTBL Koridor Inner Ring Road	Koridor Inner Ring Road					
8.	Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Daksina	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi –					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Sukabumi - Inner Ring Road					
9.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi - Sukabumi - Inner Ring Road					
10.	Pembangunan RTH skala WP	WP Daksina					
11.	Pembangunan Pusat Lingkungan E1, E2, E3, E4	Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja					

Tabel 6.4

Indikasi Program Transportasi

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	Studi dan Kajian						
1	Kajian pola distribusi dan pola perjalanan	Kota Bogor					
2	Penyusunan data base jaringan jalan	Kota Bogor					
3	Penyusunan Masterplan Transportasi	Kota Bogor					
4	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP)	Kota Bogor					
5	Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum	Kota Bogor					
I	Jaringan Jalan						

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
A	Penetapan fungsi jalan	Kota Bogor					
B	Peningkatan Jalan						
1	Jalan kolektor sekunder	Jalan Pajajaran					
		Jalan KS Tubun;					
		Jalan Letjen Ibrahim Adjie;					
		Jalan Mayjen Ishak Djuarsa;					
		Jalan Pangeran Shogiri;					
		Jalan Tumenggung Wiradiredja;					
		Jalan Parung Banteng;					
		Jalan Kayumanis-Cilebut;					
		Jalan Cibeureum;					
		Jalan Kapten Yusuf;					
		Jalan Cipaku;					
		Jalan Warung Nangka;					
		Jalan Mandala Ciluar					
2	Jalan Lokal	Tersebar di Kota Bogor					
3	Perbaiki geometrik simpang	Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Johar					
		Simpang Jalan					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Tentara Pelajar - Jalan Manunggal					
		Simpang Jalan R. Saleh Bustaman - Jalan Pahlawan					
		Simpang Jalan Pomad - Jalan KS. Tubun					
		Simpang Jalan Raya Pemda - Jalan KS Tubun (Talang)					
		Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun					
		Simpang Jalan Pajajaran - Jalan KS Tubun - Jalan Adnawijaya (Warung Jambu)					
		Simpang Jalan Raya Pajajaran - Jalan Lodaya - Jalan Salak					
		Simpang Jalan Raya Pajajaran - Jalan Pangrango					
		Simpang Tol					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Lingkar Bogor - Jalan Pangeran Sogiri					
		Simpang Ahmad Syam - Cimahpar					
		Simpang Jalan Ahmad Syam - Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah)					
4	Pembangunan persimpangan tidak sebidang	Persimpangan Jalan RE Martadinata					
		Persimpangan Jalan MA Salmun					
		Persimpangan Jalan Kebon Pedes					
		Persimpangan Jalan Kapten Muslihat					
		Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya					
5	Peningkatan Jembatan	Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Ahmad Yani					
		Jembatan sungai Ciliwung di					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Jalan KH Sholeh Iskandar					
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Otto Iskandardinata					
		Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat					
		Jembatan ruas jalan lainnya					
C	Pembangunan jalan						
1	Pengembangan jalan tol						
a	Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol	Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BORR)					
		Akses konektivitas ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi)					
2	Pembangunan jalan non tol						
a	Pembangunan jalan arteri primer	Jalan Arteri paralel dengan jalan tol lingkar bogor ruas ciluar kedunghalang (Jalan R2)					
b	Pembangunan jalan arteri	Jalan R3					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	sekunder	Parungbanteng - Wangun					
		Jalan Bogor Inner ring road					
		Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina;					
		Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa					
d	Pembangunan jalan kolektor sekunder						
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Soleh Iskandar (dekat pertigaan Jalan Raya Semplak) – Kel Kencana – Jambu Dipa (Kab. Bogor)					
		Rencana ruas jalan: Jalan Raya Semplak- Jalan KH Sholeh Iskandar – Kel Mekarwangi –					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor)					
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar - Bukit Cimanggu Villa - Jalan Cilebut Raya					
		Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi - Jalan Raya Pemda					
		Rencana ruas jalan Stasiun Sukaresmi -- Jalan Kemang - Kedung Halang (Sholeh Iskandar);					
		Rencana ruas jalan: Jalan Bukit Cimanggu Villa - Kel Mekarwangi					
		Rencana ruas jalan: Jalan Perdana Raya - kel Kencana					
		Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		(samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan Tanah Baru					
		Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya – Jalan P Asogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar);					
		Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri – samping jalan Toll Jagorawi					
		Rencana ruas jalan: Jalan R3 – Kampung Cokondang – samping jalan Toll Jagorawi – Jalan Katulampa					
		Rencana ruas jalan tembus Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar					
		Rencana ruas jalan akses					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor;					
		Rencana ruas jalan akses Bogor Inner Ring Road ke Tol Bocimi					
		Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede					
		Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi					
e	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersebar di Kota Bogor					
3	Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)	Semua WP					
4	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan)	Semua WP					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
5	Pengembangan prasarana dan sarana kendaraan tidak bermotor (jalan pejalan kaki dan jalur khusus sepeda)						
a	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Mayor Oking					
		Jalan MA Salmun					
		Jalan Merdeka					
		Jalan RE Martadinata					
		Jalan Paledang					
		Jalan Kapten Muslihat					
		Jalan KS Tubun					
		Jalan KH Sholeh Iskandar					
		Jalan KH Abdullah Bin Nuh					
		Jalan Brigjen Saptaji					
		Jalan Dr. Sumeru					
		Jalan Mawar					
		Jalan Sempak					
		Jalan Ir. H. Djuanda					
		Jalan Jenderal Sudirman					
		Jalan Jenderal Ahmad Yani					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Jalan Dadali					
		Jalan Jalak Harupat					
		Jalan Pemuda					
		Jalan Suryakencana					
		Jalan Siliwangi					
		Jalan Pajajaran					
		Jalan Otto Iskandardinata					
		Jalan Adnawijaya					
		Jalan Ahmad Sobana					
		Jalan Ahmad Syam					
		Jalan lokal kawasan komersial dan kepadatan tinggi					
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum					
b	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan sepeda						
a	Jembatan penyeberangan orang	Jalan arteri dan kolektor					
b	Underpass penyeberangan orang	Sekitar Kebun Raya Bogor,					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		TOD					
c	Skywalk	Air Mancur – Jl. Pajajaran					
		Jl. Suryakacanca na – Terminal Baranangsiang					
		Kawasan TOD					
II	Terminal						
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang					
2.	Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Barangsiang dan Jalan Tol Jagorawi	Terminal Baranangsiang /Tol Jagorawi					
3	Pembangunan terminal di Kelurahan Tanah Baru yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Kelurahan Tanah Baru					
4	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi					
5	Pembangunan terminal di Kelurahan Bubulak sebagai transfer point yang terintegrasi dengan stasiun kereta ringan	Kelurahan Bubulak					
6	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD					
7	Penyediaan terminal perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi	Wilayah Perbatasan					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	Jawa Barat						
8	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal					
9	Revitalisasi terminal agribisnis	Kelurahan Rancamaya					
10	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru					
III	Parkir						
1	Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir	Pusat-pusat kegiatan					
		PPK					
		Sub PPK					
		Kawasan pengembangan TOD					
		Terminal Penumpang					
		Stasiun KA					
		Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor					
		Kawasan pasar Bogor					
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota					
2		Pembangunan prasarana "park and ride"	Kawasan pengembangan TOD				
	Kawasan Suryakencana						
	Kawasan perbatasan/pi						

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		ntu masuk kota					
3	Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan	Seluruh jalan					
4	Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal	Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya					
		Pool bis wisata Baranangsiang					
5	Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan	Kota Bogor					
IV	Angkutan Umum Massal						
1	Pengembangan angkutan umum massal dalam kota	Koridor angkutan umum massal					
2	Pelngembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor	Koridor angkutan umum massal					
3	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta	Bogor – Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta					
4	Program pengaturan kembali (re-routing) angkutan umum	Route angkutan perkotaan					
5	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Kota Bogor					
6	Penerapan manajemen	Kota Bogor					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan						
7	Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas	Kota Bogor					
8	Penggunaan angkutan umum tenaga listrik	Kota Bogor					
V	Jaringan Lintas						
1	Penetapan rute jaringan lintas	Kota Bogor					
2	Peningkatan kualitas jaringan lintas	Kota Bogor					
3	Pembatasan beban sumbu maksimal	Kota Bogor					
VI	Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota						
1	Penetapan rute angkutan wisata	Kota Bogor					
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka	Kota Bogor					
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Kota Bogor					
VII	Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota						
1	Penetapan rute angkutan sekolah	Kota Bogor					
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute	Kota Bogor					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah						
3	Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Kota Bogor					
B	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki						
1	Kajian pengembangan prasarana pejalan kaki	Kota Bogor					
2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor					
3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Tersebar di Kota Bogor					
4	Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan bagi pejalan kaki dan pesepeda						
a	Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki	Jalan-jalan arteri dan kolektor					
		Jalan-jalan lokal di kawasan komersial dan kawasan perumahan kepadatan tinggi					
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit,					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		dan sarana ibadah					
		Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum					
b	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada	Menyebar di Kota Bogor					
c	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan sepeda	Menyebar di Kota Bogor					
d	Pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki	Menyebar di Kota Bogor					
5	Menyediakan prasarana dan sarana bagi pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Menyebar di Kota Bogor					
6	Penataan pedestrian	PPK					
7	Pembangunan pedestrian	Sub PPK pusat-pusat kegiatan					
8	Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor / sepeda	Menyebar di Kota Bogor					
VIII	Jaringan Kereta Api						
1	Peningkatan jalur kereta api commuter line Bogor - Jakarta	Jalur KA Bogor - Jakarta					
a	Peningkatan jalur kereta api Bogor Sukabumi	Jalan KA Bogor - Sukabumi					
b	Pembangunan jalur kereta ringan dalam kota	Tanah Baru - Sukaresmi - Bubulak - Stasiun Bogor					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		- Mulyaharja - Kertamaya - Wangun - Baranangsiang - Tanah Baru					
2	Pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan kereta ringan dalam kota yang terintegrasi dengan LRT Cawang - Bogor	Sepanjang jalur kereta ringan Kota Bogor					
3	Pengembangan simpul/stasiun kereta ringan	Tanah Baru					
		Sukaresmi					
		Bubulak					
		Kertamaya					
		Mulyaharja					
		Baranangsiang					
		Wangun					
4	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan sekitarnya sebagai kawasan TOD	Stasiun Bogor dan Sekitarnya					
5	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang					
6	Revitalisasi Stasiun Kereta Api Batutulis	Batutulis					
7	Pembangunan Stasiun Kereta Api Genteng	Genteng					
8	Pembangunan Kawasan TOD yang teritegrasi dengan jalur kereta api ringan	Tanah Baru					
		Sukaresmi					
		Bubulak					
		Stasiun Bogor					
		Mulyaharja					
		Kertamaya					

Tabel 6.5

Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
I	Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik						
1.	Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik	Seluruh kota					
2.	Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota						
a	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Seluruh kota					
b	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Seluruh kota					
3.	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Seluruh kota					
4.	Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik	Seluruh kota					
5.	Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota					
6.	Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik	Seluruh kota					
7.	Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk	Seluruh kota					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	mengantisipasi kendala pasokan energi listrik						
II	Pengembangan Sistem Jaringan Gas						
1.	Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya	Seluruh kota					
2.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor	Seluruh kota					
3.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	Seluruh kota					
4.	Pengembangan sistem keamanan jaringan gas	Seluruh kota					
III	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi						
1.	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor					
3.	Pengembangan dan perluasan jaringan internet	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor					
4.	Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor					
5.	Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Peningkatan sistem teknologi telekomunikasi pada kawasan budidaya	Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, serta pelayanan umum					
7.	Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor					
8.	Membangun tower bersama	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor					
9.	WIFI Publik	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor					
10.	Pengembangan micro cell	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor					
11.	Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor					
IV	Sumber Daya Air						
1	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi	Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane					
2	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota	Sungai Cipakancilan Sungai Cibalok					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Sungai Ciangke					
		Sungai Ciomas					
		Sungai Cigede					
3	Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane					
4	Pemeliharaan jaringan irigasi	WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina					
5	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane					
6	Pembangunan sumur resapan di perumahan	Sesuai hasil kajian					
7	Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan	Sesuai hasil kajian					
8	Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air)	Kota Bogor					
9	Peningkatan kualitas air	Kota Bogor					
10	Pencegahan pencemaran air	Kota Bogor					
V	Sistem Jaringan Air Minum						
A.	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan						
1	Penyediaan jaringan air baku untuk air minum						
a.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan	Zona 1					
		Zona 2					
		Zona 3					
		Zona 4					
		Zona 5					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Zona 6					
b.	Peningkatan target pelanggan						
	a. 12.000 SR per tahun	Kota Bogor					
	b. 15.000 SR per tahun	Kota Bogor					
c.	Peningkatan distribusi air bersih	Dari IPA Dekeng ke Reservoir Pajajaran					
		Dari IPA Cipaku ke Reservoir Cipaku					
d.	Pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi air bersih	Dari Mata Air Tangkil ke Reservoir Rancamaya					
		Dari Mata Air Bantar Kambing ke Reservoir Cipaku					
		Dari Mata Air dan IPA Palasari ke Reservoir Palasari					
		Dari Mata Air Kota Batu ke Reservoir Kota Batu					
		intake Ciherang Pondok ke instalasi pengolahan Dekeng					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat						
a.	Pembangunan SPAM	SPAM Katulampa Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur					
		SPAM Palasari Desa Palasari, Kabupaten Bogor					
		SPAM Cikereteg (kapasitas 240 L/dt) Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan					
b.	Pembangunan IPA Cikereteg	Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan					
c.	Optimalisasi IPA Dekeng I dan uprating IPA Dekeng II	Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan					
d.	Pengoperasian dan uprating intake Cipaku	Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan					
e.	Pengadaan dan pemasangan pipa by pass resv Cipaku	Kelurahan Cipaku, Kecamatan					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Bogor Selatan					
3.	Pembangunan reservoir	Reservoir Bantarkambing Kapasitas 2000 M3					
		Reservoir Jabaru Kapasitas 3000 M3					
		Reservoir Merdeka Kapasitas 5000 M3					
		Reservoir Cikereteg Kapasitas 3000 M3					
a.	Penggantian jaringan perpipaan yang sudah lama/usang	Kota Bogor					
4.	Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah pelayanan air bersih dan air minum						
b.	Pengembangan Jaringan Retikulasi	Kota Bogor					
c.	PB MBR	Kota Bogor					
5.	Penurunan tingkat kehilangan air dari produksi dan dari distribusi						
a.	Perbaiki sistem distribusi	Kota Bogor					
b.	Pembangunan DMA	Kota Bogor					
c.	Penggantian Meter Induk	Kota Bogor					
d.	Tera Meter Air	Kota Bogor					
6	Peningkatan kualitas,						

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	kuantitas, kontinuitas; dan keterjangkauan untuk masyarakat						
a.	Pemeliharaan Instalasi Produksi, Bangunan Instalasi dan ME (Biaya)	Kabupaten dan Kota Bogor					
b.	Pengadaan dan Pemasangan Scada System	Kelurahan Genteng dan Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan					
B.	Penyediaan Air Minum Sistem Non Perpipaan						
1	Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat					
2	Perluasan pelayanan sistem non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum	Kota Bogor					
3	Pengembangan fasilitas penampungan air skala lingkungan	Kota Bogor					
4.	Membangun SPAM berbasis masyarakat di daerah yang memiliki potensi air tanah	Kota Bogor, Terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan PDAM. Prioritas Daerah					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Pelayanan Non PDAM					
C.	Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan	Kota Bogor					
D.	Pembukaan peluang bagi pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum kota	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM					
E.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air yang berada di dalam perumahan	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM					
VI	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) komunal pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan					
3	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelurahan Kayumanis					
4	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	Domestik (SPALD)	dan kawasan permukiman					
5	Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S)	Kawasan dengan kepadatan < 200 jiwa/ha, diarahkan ke WP Daksina					
6	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S) dan sarana prasarananya	Kawasan dengan kepadatan >200 jiwa/Ha , diarahkan ke WP Samida dan WP Purwa					
7	Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Bogor					
8.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran	Seluruh Kota Bogor					
9.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Seluruh Kota Bogor					
10.	Pembuatan Rencana Induk Sanitasi yang dilengkapi dengan rencana detilasinya (DED)	Seluruh kota Bogor					
11.	Penetapan sanksi bagi pencemar badan air	Seluruh Kota Bogor					
VII	Persampahan						
1.	Membentuk sekretariat bersama pengelolaan sampah	Kota Bogor dan Kabupaten					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	regional	Bogor					
2.	Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA	TPA Galuga					
3.	Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu	TPA Regional Luna (Lulut dan Nambo)					
4.	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana TPA	Persiapan dukungan pada TPA Luna (Lulut dan Nambo)					
5.	Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar	Ciluar					
6.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle)	Kota Bogor					
7.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah	Kota Bogor					
8.	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru					
9.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota	Kota Bogor					
10.	Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi	Masing-masing kelurahan					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	dengan sistem pengangkutannya						
11.	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor					
12.	Membangun ITF (Intermediate Treatment Facilities)	Kota Bogor					
VIII	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase						
1	Penanganan drainase primer	S. Cisindangbarang, S. Carampulang, S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S.Cipinangding, S.Cibeureum, S.Cinangka, S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, S.Ciliwung, S.Ciseuseupan, S.Ciluar, S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, S.Ciparigi,					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, S.Cipakancilan, S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis.					
2	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbaran g, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkaran luar, Jl,raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh,					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Jl.A.Adnawijaya, Jl.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari.					
3	Penanganan drainase tersier	Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojungkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, Kel.Kencana, drainase lokal.					
4	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan	Kawasan sempadan sungai					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase	Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang, Saluran sekunder Cibuluh, Saluran sekunder Cidepit, Saluran sekunder Ciereng.					
6.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase	Seluruh Kota Bogor					
7.	Normalisasi sungai dan saluran	Kali Kayang					
8.	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai					
9.	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase primer.	Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		(Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang,					
10.	Sertifikasi kepemilikan danau dan situ-situ kecil, misalnya dengan sertifikat BPN.	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor					
11	Mengamankan embung – embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor					
12.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir	Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal					
10	Perumahan baru diarahkan untuk membuat sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep zero run off, eco drainage, dan Low impact development	Kota Bogor					
IX	Jaringan Prasarana Kota Terpadu						
1	Menyusun rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu						
2	Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu						

Tabel 6.6

Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Buku Neraca Tata Ruang Tahunan Kota dan Kecamatan (Profil Pemanfaatan dan Perubahan Pola Ruang, serta ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor, setiap kecamatan					
2	Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Kota 5 tahunan	Kota Bogor					
A	Kawasan Lindung						
I	Kawasan Perlindungan Setempat						
1	Penataan sempadan sungai	Menyebar di kota Bogor					
2	Penataan sempadan danau/situ	Menyebar di kota Bogor					
3	Penataan sempadan kawasan sekitar mata air	Menyebar di kota Bogor					
4	Pembebasan lahan publik di sempadan sungai, danau dan mata air	Menyebar di kota Bogor					
5	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air	Menyebar di kota Bogor					
6	Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung	Menyebar di kota Bogor					
7	Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor					
8	Penghijauan sempadan sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
9	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Pasima	Kelurahan Balumbangjaya , Kelurahan Situgede, Kelurahan Margajaya					
10	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Daksina	Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojong Kerta, Kelurahan Harjasari Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Genteng					
11	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat	Kota Bogor					
II	Kawasan pelestarian alam, perlindungan plasma nutfah eks situ						
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan pelestarian alam dan perlindungan plasma	Hutan Penelitian Dramaga Kebun Raya					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	nuftah eks situ	Bogor					
2	Pengembangan hutan kota baru	WP Pasima (WP B)					
		WP Utara (WP C),					
		WP Purba (WP D)					
		WP Daksina (WP E)					
3	Penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor	Kawasan Sekitar Kebun Raya					
III	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan						
1	Mengidentifikasi bangunan dan kawasan cagar budaya dan melegalsasikan	Menyebar di kota Bogor					
2	Menyusun panduan arsitektur dan rancang kota untuk penanganan kawasan tersebut dan dilegalisasikan	Kota Bogor					
3	Penyusunan kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan serta bentuk insentif-disinsentif terhadap bangunan dan kawasan cagar budaya	Kota Bogor					
4	Sosialisasi lokasi dan aturan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya	Kota Bogor					
5	Melakukan upaya penyelamatan dengan memelihara dan menjaga bangunan dan kawasan cagar budaya yang masih asli serta	Kota Bogor					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	pemberian insentif						
6	Restorasi dan meremajakan bangunan dan kawasan cagar budaya yang telah berubah bentuk aslinya dan mengalami alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan	Kota Bogor					
7	Melakukan perlindungan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya	Kota Bogor					
8	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kota Bogor					
IV	Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana						
1	Identifikasi lokasi rawan bencana, potensi ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor					
2	Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor					
3	Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran	Kota Bogor					
4	Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan	Kota Bogor					
5	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada	Kota Bogor					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi						
6	Penyediaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana	Kota Bogor					
7	Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor					
8	Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci	Kota Bogor					
9	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Kota Bogor					
10	Penanganan kawasan rawan bencana banjir	Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, dan Kelurahan Katulampa					
11	Penanganan kawasan rawan bencana longsor	Di sepanjang sungai Cisadane, sungai Ciomas, saluran Cisadane					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Empang, saluran Cidepit, sepanjang sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan					
12	Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran	Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah.					
13	Sosialisasi program mitigasi bencana	Kota Bogor					
14	Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Kota Bogor					
V	Ruang Terbuka Hijau						
1	Identifikasi potensi RTH Publik	Kota Bogor					
2	Penyusunan Buku Neraca RTH Tahunan (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi)	Kota Bogor					
3	Penyusunan Masterplan RTH Kota	Kota Bogor					
4	Penyusunan sistem informasi	Kota Bogor					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	geografis RTH potensial dan aktual						
5	Pendataan aset Pemda untuk dijadikan RTH Publik						
6	Pengadaan lahan untuk RTH melalui program land banking	Setiap WP					
7	Peningkatan kualitas RTH						
8	Revitalisasi taman topi dan sekitarnya	Taman Topi					
9	Perencanaan dan pembangunan hutan kota	WP Pasima (WP B)					
		WP Utara (WP C),					
		WP Purba (WP D)					
		WP Daksina (WP E)					
10	Perencanaan dan pembangunan taman kota	Di pusat kota dan di setiap Sub PPK					
11	Perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan	Menyebar di seluruh Kota Bogor					
12	Perencanaan dan pembangunan taman tematik	Menyebar di seluruh Kota Bogor					
13	Pembangunan RTH infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor	Rencana jalan-jalan arteri dan kolektor					
14	Revitalisasi RTH infrastruktur yang mengalami menurun fungsi	Kota Bogor					
15	Membangun dan	Daerah					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi	sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi					
16	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam perwujudan RTH publik	Kota Bogor					
17	Penyusunan Buku Neraca TPU Tahunan (profil TPU)	Kota Bogor					
18	Penyusunan Masterplan TPU Kota Bogor	Kota Bogor					
19	Penetapan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	Kelurahan Empang (TPU Dreded) untuk WP Samida					
		Kelurahan Situ Gede (TPU Situ Gede) untuk WP Pasima					
		Kelurahan Kebon Pedes					

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		(TPU Blender) dan Kelurahan Kayumanis (TPU Kayumanis) untuk WP Utara					
		Kelurahan Cimahpar (TPU Cimahpar) untuk WP Purwa					
		Kelurahan Mulyaharja (TPU Mulyaharja), Kelurahan Genteng (TPU Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (TPU Cipaku), dan Kelurahan Katulampa (TPU Katulampa) untuk WP Daksina					
20	Penataan TPU yang telah ada	Tersebar di kota Bogor					
21	Pengembangan TPU baru	Tersebar di kota Bogor					

Tabel 6.7

Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
B	Kawasan Budidaya						
I	Perumahan						
1	Penyusunan Buku Neraca Perumahan Tahunan Kota Bogor dan Kecamatan Bogor dan Kecamatan (profil perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor, setiap Kecamatan					
2	Penyusunan Rencana Induk Sektor Perumahan (neraca perumahan, sarana dan prasarana perumahan)	Kota Bogor					
3	Pengembangan perumahan kepadatan rendah	Sebagian WP Daksina dan sebagian WP Pasima					
4	Pengembangan perumahan kepadatan sedang	Sebagian WP Samida, (WP B), WP Utara (WP C), WP Purba (WP D) dan WP Daksina (WP E)					
5	Pengembangan perumahan kepadatan tinggi	Sebagian WP Samida, (WP B), dan WP Utara (WP C),					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
A.	WP Samida (WP A)						
1	Penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan	WP Samida (WP A)					
2	Revitalisasi kawasan padat penduduk/ kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	kel. Panaragan, Kel Paledang, Kel Kebon Kalapan, Kel Kebonpaya, Kel Bondongan, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur					
3	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	kel. Panaragan, Kel Paledang, Kel Kebon Kalapan, Kel Kebonpaya, Kel Bondongan, Kel Babakan Pasar, Kel					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur					
4	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	kel. Panaragan, Kel Paledang, Kel Kebon Kalapan, Kel Kebonpaya, Kel Bondongan, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur					
5	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	WP Samida					
B	WP Pasima (WP B)						
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP Pasima (WP B)					
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan	WP Pasima (WP B)					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	perumahan						
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	WP Pasima (WP B)					
4	Penataan dan pengendalian perumahan kepadatan rendah	Kel Situgede, Kel Balumbangaya					
5	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kel Gunung Batu, Kel Pasirjaya					
6	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman padat	Kel Gunung Batu, Kel Pasirjaya, Kel Loji, Kel Sindangbarang, Kel Bubulak					
7	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman padat	Kel Gunung Batu, Kel Pasirjaya, Kel Loji, Kel Sindangbarang, Kel Bubulak					
C	WP Utara (WP C)						
1	Penataan dan peningkatan	WP Utara					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	(WP C)					
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP Utara (WP C)					
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	SWP Utara 3 dan SWP Utara 4					
4	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan (join planning dan join development)	SWP Utara 1 dan SWP Utara 2					
5	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kel Kebon Pedes, Kel Kedung Waringin dan Kel Kedungjaya					
6	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kel Kebon Pedes, Kel Kedung Waringin dan Kel Kedungjaya					
7	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman	Kel Kebon Pedes, Kel Kedung Waringin					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	padat	dan Kel Kedungjaya					
D	WP Purwa (WP D)						
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP Purwa (WP D)					
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP Purwa (WP D)					
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	SWP Purwa 1, Purwa 4 dan sebagian Purwa 2					
4	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan (join planning dan join development)	SWP Purwa 2 dan SWP Purwa 3					
5	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kel Bantarjati, Kel Kedunghalang, Kel Ciparigi, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Tegal Gundil					
6	Pembebasan lahan untuk	Kel					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Bantarjati, Kel Kedunghalang, Kel Ciparigi, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Tegal Gundil					
7	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kel Bantarjati, Kel Kedunghalang, Kel Ciparigi, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Tegal Gundil					
E	WP Daksina (WP E)						
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP Daksina (WP E)					
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP Daksina (WP E)					
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	SWP Daksina 1 dan Daksina 2					
4	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan	SWP Daksina 1,					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	dan infrastruktur lainnya antar perumahan (join planning dan join development)	Daksina 2, Daksina 3, Daksina 4					
5	Penataan dan pengendalian perumahan kepadatan rendah	Kel Mulyaharja, Kel Pamoyanan, Kel Genteng, Kel Kertamaya, Kel Rancamaya, Kel Bojongkerta					
6	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kel Lawanggitung, Kel Sukasari, Kel Tajur, Kel Sindangrasa					
7	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman padat	Kel Lawanggitung, Kel Sukasari, Kel Tajur, Kel Sindangrasa					
8	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman	Kel Lawanggitung, Kel Sukasari,					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	padat	Kel Tajur, Kel Sindangrasa					
II	Perdagangan Jasa						
1	Penyusunan Buku Neraca Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor					
A.	WP Samida (WP A)						
1	Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan	Pasar Bogor dsk Pasar Kebon Kembang dsk Pasar Sukasari dsk Pertokoan di kawasan jalan Merdeka – Jembatan Merah					
2	Pengendalian dan pembatasan kegiatan perdagangan jasa pada daerah tertentu	WP Samida di sepanjang koridor jalan utama : Jalan Raya Pajajaran,					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Jalan Ir.H.Juanda, Jalan Suryakencana, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Pahlawan					
4	Revitalisasi Plaza Bogor	Plaza Bogor					
5	Revitalisasi Pasar Sukasari	Pasar Sukasari					
6	Revitalisasi Pasar Bogor	Pasar Bogor					
7	Relokasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor	Pasar Bogor dan Plaza Bogor					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
B	WP Pasima (WP B)						
1	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	WP Pasima (WP B) di sepanjang Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Jalan RE Abdullah, Jalan Aria Surialaga, Jalan Ciomas Raya dan Jalan Abdullah Bin Muhamad Nuh, Jalan Balungbang Jaya, serta rencana jalan inner ring road.					
2	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Pasima (WP B)					
3	Pengembangan pasar	WP Pasima					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP	(WP B)					
C	WP Utara (WP C)						
1	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	WP Utara (WP C) di sepanjang Jalan Sholeh Iskandar dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh					
2	Mengembangkan Pasar Teknik Umum menjadi pasar skala regional (Pasar Induk)	WP Utara (WP C)					
3	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Utara (WP C)					
4	Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP	WP Utara (WP C)					
D	WP Purwa (WP D)						
1	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	WP Purwa (WP D) di sepanjang Jalan Raya					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Pajajaran, Jalan KS. Tubun, Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya Pemda, Jalan Pangeran Sogiri serta rencana jalan-jalan kolektor baru					
2	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP	WP Purwa di sepanjang jalan arteri/frontage Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan pusat WP					
3	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Purwa					
5	Revitalisasi Pasar Jambu Dua	WP Purwa					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
7	Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP	WP Purwa					
E	WP Daksina (WP E)						
1	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di skala kota dan regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP	WP Daksina (WP E) di sepanjang Jalan Raya Tajur, Rencana jalan R3, Rencana jalan inner ring road, Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret					
2	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Daksina					
3	Penataan kegiatan perdagangan dan jasa di koridor Inner Ring Road	koridor Inner Ring Road					
4	Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP	WP Daksina					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
III	Industri						
1	Penyusunan Buku Neraca Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor					
2	Pemantauan pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan	Kota Bogor					
3	Pengendalian dan penataan kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan	Kota Bogor					
4	Pembinaan kegiatan industri kecil dan menengah	Kota Bogor					
5	Pengembangan promosi hasil industri kecil dan menengah Kota Bogor	Kota Bogor					
6	Pengembangan sentra pemasaran hasil industri kecil dan menengah Kota Bogor	Kota Bogor					
IV	Militer						
1	Pemantauan pemanfaatan ruang militer	Kota Bogor					
V	Fasilitas Umum dan Sosial						
1	Kajian kriteria dan	Kota Bogor					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	standar perencanaan dan pembangunan fasilitas umum dan sosial Kota Bogor						
A	Fasilitas pendidikan						
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan)	Kota Bogor					
2	Penyusunan Rencana Penambahan Fasilitas Pendidikan dan Rencana Alokasi Lokasi di Kota Bogor	Kota Bogor					
3	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK	Setiap WP					
4	Penambahan TK negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)					
5	Penambahan SD	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)					
	Penambahan SMP	WP Utara (WP C) , WP					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
		Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)					
	Penambahan SMA/ SMK	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)					
6	Pengembangan pendidikan tinggi	WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina diutamakan pada jalan-jalan arteri dan kolektor					
7	Pemantauan dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi	Kota Bogor					
8	Penertiban fasilitas pendidikan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai dan sesuai dengan ketentuan berlaku	Kota Bogor					
9	Relokasi fasilitas pendidikan dasar dan menengah negeri (jika lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan ajar	Tersebar di Kota Bogor					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	mangajar)						
B	Fasilitas kesehatan						
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor					
2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan	Kota Bogor					
3	Pengendalian dan pengawasan rumah sakit yang telah ada agar dilengkapi dengan prasarana, sarana pengolahan limbah dan fasilitas parkir sesuai standar yang berlaku	Kota Bogor					
4	Penambahan Puskesmas Pembantu	WP Pasima dan WP Utara					
5	Pengembangan klinik dan sarana kesehatan lainnya	WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, WP Daksina					
6	Pemantauan dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan	Kota Bogor					
7	Penertiban fasilitas kesehatan yang tidak dilengkapi dengan standar	Kota Bogor					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	minimal infrastruktur penunjang						
C	Fasilitas peribadatan						
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadatan)	Kota Bogor					
2	Pemantauan pemanfaatan ruang fasilitas peribadatan	Kota Bogor					
3	Penertiban fasilitas peribadatan yang ada yang tidak dilengkapi standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor					
D	Fasilitas Olahraga dan Rekreasi						
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan (profil Fasilitas Olahraga dan Rekreasi)	Kota Bogor					
2	Penataan dan revitalisasi GOR Pajajaran	GOR Pajajaran					
3	Penataan fasilitas olahraga yang ada	Tersebar di kota Bogor					
4	FS penambahan prasarana dan sarana olahraga terpadu skala kota atau skala regional	Kota Bogor					
5	Penambahan prasarana dan sarana olahraga	WP Utara, WP Daksina					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	terpadu skala kota atau skala nasional						
6	Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana olah raga skala WP dan lingkungan	Di setiap WP					
7	Penertiban fasilitas olahraga dan rekreasi yang tidak sesuai dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Di setiap WP					
E	Fasilitas Sosial						
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Sosial Tahunan (profil Fasilitas Sosial)	Kota Bogor					
2	Penataan fasilitas sosial yang ada	Tersebar di kota Bogor					
3	Pengembangan fasilitas sosial	Sub PPK/ Pusat WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina					
4	Pengembangan untuk rumah - rumah panti jompo, panti asuhan, dan ramah anak	Tersebar di Kota Bogor					
VI	Perkantoran						
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan perkantoran						

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	pemerintahan eksisting						
a	Kantor Pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor					
b	Kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor					
2	Penataan kawasan perkantoran	PPK					
3	Penambahan kawasan perkantoran pemerintahan baru skala kota	WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D) dan WP Daksina (WP E)					
4	Pemantauan pemanfaatan ruang pemerintahan	Kota Bogor					
5	Rehabilitasi/ peremajaan bangunan pemerintah	Kota Bogor					
VI	Kawasan Pariwisata						
1	Penyusunan RIPDA Kota Bogor	Kota Bogor					
2	Pengembangan kluster-kluster wisata Kota Bogor	Kota Bogor					
3	Sosialisasi kawasan dan obyek wisata Kota Bogor	Kota Bogor					
4	Pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya	Kota Bogor					
5	Pengembangan wisata	WP Pasima					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	agro, pariwisata MICE dan rekreasi alam	(WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)					
6	Pengembangan gedung kesenian	WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D)					
7	Pengembangan wisata perkemahan	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)					
8	Penataan wisata kuliner dan belanja	Di PPK (kawasan Bogor lama), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)					
9	Penataan kawasan wisata sejarah Batu Tulis	Kawasan Batu Tulis					
10	Penertiban kawasan pariwisata yang tidak dilengkapi dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
VII	Pertanian Kota						
1	Penyusunan profil Lahan Pertanian Kota Bogor	Kota Bogor					
	Penyusunan profil Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kota Bogor					
2	Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas lahan pertanian kota sebagai RTH Kota	Kota Bogor					
5	Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, hidroponik	Kota Bogor					
6	Pengembangan Terminal Agribisnis di Rancamaya	WP Daksina (WP E)					
7	Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional	WP Pasima (WP B)					
8	Berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH	Kota Bogor					
9	Pengembangan kegiatan	Kota Bogor					

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024
	wisata outbound (wisata ruang luar) pada areal pertanian kota untuk memberikan nilai tambah kawasan tersebut						
VIII	Ruang Terbuka Non Hijau						
1	Identifikasi kondisi dan potensi ruang terbuka non hijau Kota Bogor	Kota Bogor					
2	Pengadaan lahan untuk ruang terbuka non hijau	Tersebar di Kota Bogor					
3	Penataan kembali ruang terbuka non hijau yang telah mengalami degradasi secara fungsi maupun kualitas	Tersebar di Kota Bogor					
4	Pemanfaatan RTNH untuk kegiatan sosialisasi masyarakat	Kota Bogor					
5	Perencanaan dan pembangunan ruang terbuka non hijau di lokasi-lokasi strategis dengan standar penyediaan luasan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.	Di setiap WP					

6.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka rencana dan target kinerja untuk penerapan SPM pada 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 6.8

Rencana Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Bogor Tahun 2019-2024

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk peserta didik PAUD	Peserta didik PAUD usia 5- 6 TAHUN	Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang Paud yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Jenjang Paud	100%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan dasar	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk peserta didik SD dan SMP	Peserta didik SD usia 7 - 12 (SD)	Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang SD/MI yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Jenjang SD dan SMP	100%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%

			Peserta didik usia 13 - 15 (SMP)	Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang SMP/MTs yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Jenjang SD dan SMP	100%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk warga belajar PKBM	Warga belajar kesetaraan 7 - 18 Tahun	Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang kesetaraan yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Kesetaraan	100%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar	Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan K4	ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas	ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
		<p> pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki surat tanda register (str) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. </p>									

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR SESUAI STANDAR ADALAH PELAYANAN YANG DIBERIKAN PADA BAYI USIA 0-28 HARI DAN MENGACU KEPADA PELAYANAN NEONATAL ESENSIAL SESUAI YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG UPAYA	Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
		KESEHATAN ANAK, DILAKUKAN OLEH BIDAN DAN ATAU PERAWAT DAN ATAU DOKTER DAN ATAU DOKTER SPESIALIS ANAK YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTER (STR)									

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
4	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR ADALAH PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK BERUSIA 0-59 BULAN DAN DILAKUKAN OLEH BIDAN DAN ATAU PERAWAT DAN ATAU DOKTER/DLP DAN ATAU DOKTER SPESIALIS ANAK YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTER (STR) DAN	balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
		DIBERIKAN DI FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH MAUPUN SWASTA, DAN UKBM									
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR ADALAH PENJARINGAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR,	usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
		MINIMAL SATU KALI PADA KELAS 1 DAN KELAS 7 YANG DILAKUKAN OLEH PUSKESMAS.									
6	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar	usia lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
7	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar	Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta	orang dengan tuberkulosis	Jumlah pasien TB BTA positif yang sembuh dibagi jumlah pasien baru TB BTA positif yang diobati kali seratus persen	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
8	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelkes yang diberikan kpD ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan LP, dilakukan oleh NAKES sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan	orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
		Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.									
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun sesuai standar	usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
10	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
11	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.	penderita diabetes melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Penduduk ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar	orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Sesuai dengan standar air minum	Setiap warga negara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun	93,15	94,86	96,85	98,29	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Sesuai dengan standar air limbah domestik	Setiap warga negara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun	67.47	70.42	72.06	72.62	73.03

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Sesuai dengan standar rumah layak huni	Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Sesuai dengan standar rumah layak huni	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh disabilitas terlantar di luar panti	Penyandang g disabilitas terlantar	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh anak terlantar di luar panti	Anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh lanjut usia terlantar di luar panti	Lanjut usia terlantar	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Gelandangan dan pengemis	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Korban bencana kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dapat diketahui dari prosentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota	100%	Setiap Tahun	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Urusan Wajib pelayanan dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan informasi rawan bencana	a. prosedur operasional penanggulangan bencana; b. sarana prasarana penanggulangan bencana; c. peningkatan kapasitas personil/sumber	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	daya manusia; dan d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	a. prosedur operasional Penegakan PERDA b. sarana prasarana Penegakan PERDA c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan d. pelayanan Warga Negara yang terkena dampak dari penegakan PERDA dan PERKADA	Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	a. prosedur operasional Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran b. sarana	Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
		prasarana Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan d. pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Warga Negara yang terkena bencana Kebakaran									

6.5 Beberapa Proyek Strategis Propinsi Jawa Barat di Kota Bogor

Sebagaimana telah direncanakan dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat, ada beberapa rencana strategis Propinsi Jawa Barat Yang akan dilaksanakan di Kota Bogor pada tahun 2019-2023. Beberapa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 6.9
Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Yang akan dilaksanakan di Kota Bogor pada tahun 2019-2023

No	Kegiatan Strategis	Tahun Rencana				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penataan Alun-Alun					
2.	Penataan Pasar Rakyat : Ps. Jambu Dua					
3.	Pembangunan Gedung Creative Centre					
4.	Penataan Destinasi Wisata					
5.	Pembangunan Pusat Budaya					

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Rencana program perangkat daerah Kota Bogor untuk periode Tahun 2019 berjumlah 141 program yang tertuang pada Tabel 7.2, sementara untuk periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 berjumlah 123 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kota Bogor, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 7.3 sampai dengan Tabel 7.38.

Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2019 (RP)	PROYEKSI				
			2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	620,894,818,419	746,283,073,756	791,000,000,000	878,500,000,000	976,000,000,000	1,087,000,000,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	47,559,782,875	54,652,762,400	43,456,221,010	43,882,205,885	44,307,436,864	44,756,246,858
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32,609,812,282	36,044,034,570	52,844,433,499	64,380,872,224	65,125,883,135	65,934,801,092
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	243,330,237,231	253,728,493,231	240,466,523,506	254,612,785,701	263,730,847,897	267,781,588,771
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	944,394,650,807	1,090,708,363,957	1,127,767,178,015	1,241,375,863,810	1,349,164,167,896	1,465,472,636,721
1.2	DANA PERIMBANGAN						
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96,957,077,000	98,922,509,977	100,033,892,767	101,145,275,557	102,256,658,347	103,368,041,138
1.2.2	Dana Alokasi Umum	813,779,065,000	849,969,036,585	867,491,441,897	885,013,847,210	902,536,252,522	920,058,657,835

NO	URAIAN	2019 (RP)	PROYEKSI				
			2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus						
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	1,039,371,277,000	948,891,546,562	967,525,334,664	986,159,122,767	1,004,792,910,869	1,023,426,698,973
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
1.3.1	Pendapatan Hibah	86,269,600,000	99,105,548,855	79,791,736,536	79,791,736,536	79,791,736,536	79,791,736,536
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	239,370,189,517	260,913,746,977	281,200,174,533	301,486,602,089	321,773,029,645	342,059,457,201
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41,073,011,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya						
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	366,712,800,517	370,019,295,832	370,991,911,069	391,278,338,625	411,564,766,181	431,851,193,737

NO	URAIAN	2019 (RP)	PROYEKSI				
			2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,350,478,728,324	2,409,619,206,351	2,466,284,423,748	2,618,813,325,202	2,765,521,844,946	2,920,750,529,431
2	BELANJA DAERAH						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
2.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	1,053,553,078,053	1,055,816,245,067	1,085,024,186,261	1,115,243,579,491	1,146,527,836,409	1,178,934,516,494
2.1.2	Belanja Bunga	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
2.1.3	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	60,155,000,000	73,000,000,000	48,823,090,105	51,505,219,435	54,115,558,931	56,918,738,478
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	48,570,456,200	59,964,767,000	60,467,889,640	63,789,733,874	67,022,665,674	70,494,431,822
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	5,157,216,192	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	9,655,750,907	10,052,013,904	10,604,228,056	11,141,661,653	11,718,798,408
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,184,435,750,445	1,206,551,966,166	1,212,482,383,102	1,249,257,964,049	1,286,922,925,859	1,326,181,688,394

NO	URAIAN	2019 (RP)	PROYEKSI				
			2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
2.2	BELANJA LANGSUNG						
2.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		235,568,646,482	239,880,104,371	253,058,079,430	265,883,333,001	279,656,058,179
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		709,648,730,708	722,636,964,348	762,335,512,579	800,971,490,047	842,461,718,423
2.2.3	Belanja Modal		483,801,682,530	492,656,386,296	519,720,796,611	546,060,801,315	574,346,686,188
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,423,243,649,860	1,391,664,506,051	1,433,287,535,108	1,541,859,106,170	1,645,650,936,619	1,758,299,153,043
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,607,679,400,305	2,598,216,472,217	2,645,769,918,210	2,791,117,070,219	2,932,573,862,478	3,084,480,841,437
	SURPLUS / (DEFISIT)	(257,200,671,981)	(188,597,265,866)	(179,485,494,462)	(172,303,745,017)	(167,052,017,532)	(163,730,312,006)
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	263,200,671,981	213,597,265,866	204,485,494,462	197,303,745,017	192,052,017,532	188,730,312,006
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah						

NO	URAIAN	2019 (RP)	PROYEKSI				
			2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	5,497,032,260	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah						
3.1.7	Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja						
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	268,697,704,241	219,094,298,124	209,982,526,720	202,800,777,275	197,549,049,790	194,227,344,264
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5,497,032,260	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258	5,497,032,258
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah						

NO	URAIAN	2019 (RP)	PROYEKSI				
			2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11,497,032,260	30,497,032,258	30,497,032,258	30,497,032,258	30,497,032,258	30,497,032,258
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	257,200,671,981	188,597,265,866	179,485,494,462	172,303,745,017	167,052,017,532	163,730,312,006
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

Selanjutnya berdasarkan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud di atas, penjabaran program perangkat daerah berdasarkan urusan/fungsi penunjang dapat dijelaskan pada Tabel 7.2 sampai dengan Tabel 7.38 tentang Penjabaran Program Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan/Fungsi Penunjang Tahun 2019-2024.

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor Tahun 2019

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
	Pendidikan	PENDIDIKAN			
	Dinas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	16.904.367.035
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.648.221.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	33.729.400
		Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	59	168.000.000
			Persentase Akreditasi satuan pendidikan PAUD		
			- PAUD Formal (%)	79	
			- PAUD Non Formal (%)	23	
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	114	118.241.229.000
			Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	105	
			Persentase ruang kelas SD/MI yang memadai(%)	86	
			Persentase Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang memadai (%)	96	
			Nilai Rata-rata Ujian Akhir Standar Nasional (USBN) SD	76	
			Nilai rata-rata Ujian Nasional Tingkat SMP	67.75	
		Manajemen Layanan Pendidikan	Prosentase satuan pendidikan yang terakreditasi A	65	45.223.424.600
			Persentase Guru Berprestasi disemua jenjang (%)	3	
			Siswa berprestasi		
			- tingkat provinsi	60	
			- tingkat nasional	16	
			- tingkat internasional	19	
			Satuan pendidikan/ lembaga yang berprestasi		
			Tingkat provinsi	5	
			Tingkat nasional	2	
			Pendidik/tutor berprestasi	2	
			Jumlah lembaga kursus yang terakreditasi	30	
			Jumlah siswa yang menerima bantuan BOS Kota	114,171	
			Terpenuhinya dokumen evaluasi belajar siswa di satuan pendidikan	2	
			Penurunan jumlah tawuran pelajar	5	
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	52	3.867.793.000
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	59	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	67	
		Pendidikan Non Formal	Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan (%)	100	985786600
			Persentase satuan pendidikan non formal yang sudah terakreditasi(%)	21	
			Persentase kelulusan Paket A(%)	100	
			Persentase kelulusan Paket B(%)	93	
			Persentase kelulusan Paket C(%)	95	
	Kesehatan	KESEHATAN			
	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	9.801.622.637
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	2.423.400.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	117.182.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	6001694200
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang memiliki JKN	100	1,20025E+11
			Prosentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin	100	
			Persentase kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera (Home visite)	85	
		Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			727.583.000
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Prosentase anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (kunjungan Balita)(%)	95	216.977.000
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	97.5	1991474000
			Persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangani(%)	100	
			Persentase pemeriksaan laboratorium di Puskesmas(%)	20	
			Persentase calon jemaah haji yang memenuhi syarat kesehatan (%)	100	
			Persentase kelompok olahraga yang dibina(%)	83	
			Persentase kasus KTA yang ditangani(%)	23	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Persentase penjarangan gangguan refraksi pada anak sekolah(%)	80	
			Persentase keluarga mandiri(%)	92	
			Persentase Pengobat tradisional yang memenuhi syarat (%)	75	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase posbindu yang dibina(%)	93	160.351.000
			Pelayanan kesehatan pada pada usia lanjut	100	
			Persentase pelayanan kesehatan lansia yang sesuai standar	100	
			Persentase puskesmas ramah lansia(%)	60	
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0.15	1.625.559.750
			Persentase Balita Gizi Kurang	6	
			Persentase Balita pendek (%)	2	
			Persentase cakupan ASI Eksklusif(%)	90	
			Persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat pelayanan kesehatan	100	
			Persentase Balita mendapat kapsul Vitamin A(%)	95	
			Persentase Balita yang ditimbang(%)	100	
			Persentase Remaja Putri Mendapat Fe(%)	35	
			Persentase Ibu hamil KEK (%)	4	
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate)(%)	86	1.881.908.205
			Menurunya angka kesakitan (IR) akibat DBD (per 100.000 penduduk)	45	
			Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD(%)	95,4	
			Prosentase penderita DBD yang ditangani (%)	100	
			Prosentase pelayanan kesehatan dengan orang TBC	100	
			Presentase penemuan kasus baru BTA positif TBC (CDR)(%)	92	
			Persentase Angka konversi TBC(%)	87	
			Prosentase keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	90	
			Prevalensi HIV/Aids	3	
			Persentase penemuan diare balita(%)	95	
			Persentase penemuan kasus pneumonia Balita(%)	100	
			Prosentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	85	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Prosentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100	
			Persentase pengetahuan Komprehensif HIV AIDS Usia 15-24 tahun(%)	95	
			Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC)(%)	30	
			Persentase ODHA yang mendapat ART(%)	85	
		Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas per 30.000 penduduk	1: 30.000	26.748.946.000
			Persentase puskesmas/pustu terbangun	100	
			Persentase puskesmas dengan perawatan	100	
			Persentase puskesmas dengan SIMPUS/SIR	100	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Sarana Kesehatan Dasar milik pemerintah yang terakreditasi nasional	100	3.244.046.000
			Jumlah Puskesmas dengan sistem pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD)	12	
			Persentase sarana kesehatan swasta yang terakreditasi	90	
		Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase jenis obat dengan tingkat ketersediaan minimal 18 bulan(%)	100	4.971.069.645
			Persentase produk makanan dan farmasi yang diuji memenuhi syarat kesehatan (%)	100	
			Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang di bina dan memenuhi syarat kesehatan(%)	95	
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Institusi yang Menerapkan 100% KTR(%)	75	20.879.245.000
			Persentase Rumah Tangga berPHBS(%)	72	
			Persentase RW Siaga (%)	45	
			Persentase Posyandu Purnama Mandiri (%)	75	
		Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses jamban keluarga(%)	82,5	2.313.233.000
			Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%)	31,5	
			Persentase Rumah sehat (%)	82,5	
			Persentase akses pengelolaan sampah (%)	70,5	
			Persentase kelurahan STBM (%)	90	
			Persentase air minum yang memenuhi syarat(%)	93	
			Persentase akses minum (%)	100	
			Persentase POS upaya kesehatan kerja (UKK) yang dibangun	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Persentase TTU yang memenuhi syarat	64	
			Persentase TPM yang memenuhi syarat	68	
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Prevalensi Hipertensi	23,38	9.420.958.000
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	15.000.000
	RSUD	KESEHATAN			
		Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Prosentase pemakaian tempat tidur (BOR di RSUD) (%)	85	121.433.099.000
			Persentase sarana prasarana (fisik dan alkes) sesuai standar RS kelas B dan IPTEK	75	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase capaian standar pelayanan minimal RSUD Kota Bogor	75	176.550.359.608
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	4.978.091.724
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	7.039.375.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	14.956.000
		Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 – 2031 (km)	272.018	27.047.736.000
			Jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya	4	
			Jumlah panjang ruas jalan yang dilebarkan/ditingkatkan kapasitasnya (km)	5,74	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/kelasnya (km)	58.857	88.201.265.000
			Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	88,5	
		Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda	Panjang prasarana pedestrian yang meningkatkan kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km)	24,813	9.972.000.000
			Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)	271,062	
			Jalur sepeda yang dikembangkan (koridor)	3	
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Penurunan jumlah lokasi rawan genangan	4	7.431.560.000
		Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III			7.431.560.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan (%)	90	2.006.880.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai berkondisi baik (km)	184,5 4	33.497.250.000
			Panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya (km)	5	
			Jumlah situ/danau/kolam retensi berkondisi baik	7	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km)	11	2.029.898.000
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			73.322.615.755
			Prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawas an/kota	67,58	
			Prosentase cakupan layanan air bersih non PDAM (%)	1,65	
			Jumlah penduduk berakses air minum bersih (non PDAM) *intervensi per tahun) (SR)	4,179	
			Prosentase rumah tangga berakses air minum bersih (PDAM)	97,3	
		Perencanaan Tata Ruang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	100	714.500.000
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang			80.115.500
			Prosentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan (%)	98	
			Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	80	
			Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang (%)	100	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	1:6000	411.307.000
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan			68.825.694.000
			Pengurangan kawasan kumuh dari kumuh sedang ke kumuh ringan dalam hal infrastruktur	17	
			Prosentase peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusun ami (%)	98	
			Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah di Kota B	85,5	
		Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung	Prosentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut	90	18.496.700.920
		Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi	Prosentase penyedia jasa konstruksi yang mendapat pembinaan teknis	90	360.800.000
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Dinas Perumahan dan Permukiman	Perencanaan Tata Ruang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	100	191.500.000,00
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	11.612.100.139	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	3.444.013.900	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	16.950.000	
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100		
		Lingkungan Sehat Perumahan	Pengurangan kawasan kumuh dari kumuh sedang ke kumuh ringan dalam hal infrastruktur	17	42.875.418.950	
			Prosentase peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusun ami (%)	98		
			Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah di Kota B	85,5		
		Peningkatan Utilitas Perkotaan	Prosentase luas kawasan permukiman yang sudah dilayani PJU	74	76.767.474.736	
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Luas TPU yang terkelola dengan baik (Ha)	46,25	3.677.241.900	
			Prosentase pelayanan penguburan dan ambulance (%)	100		
		LINGKUNGAN HIDUP				
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dibangun (Ha)	0,93	13.650.300.000	
			Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya (Ha)	42,08		
		JUMLAH				152.234.999.625
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Sat Pol PP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	4.257.952.095	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	3.175.169.000	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	41.380.000	
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	35.990.000	
				Persentase peningkatan kompetensi		85
			Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Presentase penegakan Perda KTR		80
	Presentase bangunan melanggar yang ditertibkan	98				
	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/ kelurahan)	50				

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Tingkat penegakan Perda ketertiban umum	100	
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response time)	95	250.676.000
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	BPBD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.923.162.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.805.400.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	1.875.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Program Tanggap Darurat Bencana Daerah	Tingkat penanganan kejadian bencana	100	806.100.000
		Program Pemulihan Pasca Bencana	Prosentase pelaksanaan kegiatan non fisik yang mendukung pemulihan pasca bencana	100	76.834.000
		Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah kelurahan tangguh bencana	2	593.220.000
			Jumlah kelompok masyarakat (stakeholders kebencanaan) yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan kebencanaan	5	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Tingkat penguatan kelembagaan	100	52.600.000
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Kesbangpol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	819.784.599
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	154.600.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	3.600.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan)	≥12	325.915.600
			Prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani	100	
			Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	0	
			Prosentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat	0,5	
			Jumlah pelanggaran norma agama	0	
			Jumlah konflik SARA	0	
			Prosentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	10	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Kota (%)		184.680.000
			Tingkat partisipasi dalam Pemilu Provinsi (%)	70	
			Tingkat partisipasi dalam Pemilu Nasional (%)	78	
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Angka kriminalitas	<0,146	19.080.000
	Sosial	SOSIAL			

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.184.695.994
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	710.433.510
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	10.695.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Prosentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	1.112.052.500
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Presentase panti asuhan / yayasan yang terbina (%)	100	5.700.000
		Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Presentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina (%)	67	107.510.000
		Pembinaan Anak Terlantar	Prosentase Jumlah Anak Terlantar / Anak Jalanan yang dibina	41	3.200.000
		Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase penyandang Cacat Trauma yang dibina	12	38.200.000
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	100	186.489.500
			Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/ terawat	1060	
			Jumlah PSKS yang terbina	267	
			Jumlah PSKS yang menerima bantuan	18	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	40	3.050.000
			Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%)	20,39	
			Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	100	
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/PD)	2	
			Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian)	100	
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	4.891.000
		JUMLAH			4.366.917.504
	Ketenagakerjaan	KETENAGAKERJAAN			
	Dinas Tenaga Kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.011.693.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	489.601.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	9.250.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	67,22	613.122.000
		Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja anak	100	80.051.000
	Jumlah Angka Kecelakaan Kerja		289		

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1514	488.209.800
			Presentase pencari kerja terserap dipasar kerja (%)	14,63	
			Jumlah wirausaha baru	164	
			Presentase pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja	29	
		TRANSMIGRASI			
		Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK calon transmigrasi yang mengikuti transmigrasi	2	32.688.000
	Pangan	PANGAN			
	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	939.932.700
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	317.925.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	1.515.000
			Presentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Ketahanan Pangan	ketersediaan energi per kapita (AKE= 2.200 kkal/hr)	2.220	1.007.967.600
			ketersediaan protein per kapita (AKP= 57 gr/kap/hari)	57	
			Presentase tertanganinya penduduk rawan pangan	22,29	
			Ketersediaan data informasi pasokan dan harga pangan daerah (beras, kacang, daging, minyak goreng, tepung, gula, ubi, cabe, dan jagung)	12	
			Penguatan cadangan pangan CPP kab/kota 100 ton	91,19	
			konsumsi energi per kapita (AKE= 2.000 kkal/hr)	1966	
			Presentase konsumsi protein per kapita (AKP= 52 gr/kap/hr)	52	
			Presentase tingkat kemanaan pangan	95	
			Skor PPH konsumsi*	97,1	
	Lingkungan Hidup	LINGKUNGAN HIDUP			
	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	46.550.148.740
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	7.576.490.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	20.000.000
			Presentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Presentase volume sampah terangkut (%)	75,37	18.904.830.250
		Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	98,16	25.001.804.770
		Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)	4,7	4.953.520.000
			Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	18	
			Jumlah Bank Sampah (lokasi)	0	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat indeks kualitas air (%)	55	1.663.448.000
			Tingkat indeks kualitas udara (%)	80	
			Presentase ketersediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	100	
			Presentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan	120	
			Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang telah menyediakan tempat sampah terpilah (khusus untuk kegiatan usaha yang memiliki ijin lingkungan)	100	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Bogor (kegiatan usaha)	200	714.500.000
			Prosentase peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air (%)	10	
			Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit)	100	
			Jumlah kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)	7	
			Persentase Sekolah yang menjadi sekolah Keanekaragaman hayati	1,42	
			Persentase kelurahan yang menjadi kelurahan keanekaragaman hayati	37,76	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi kualitas lingkungan	2	413.306.000
		Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen)	1	284.332.000
			Jumlah kampung iklim	1	
			Jumlah biodiesel yang dihasilkan (liter)	-	
			Jenis energi terbarukan yang dikembangkan (jenis)	-	
		Program Kemitraan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	100	695.984.000
			Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)	3	
			Jumlah kampanye lingkungan hidup	1	
		JUMLAH			106.778.363.760
	Administrasi Kependudukan dan Capil	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			
	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	4.194.050.306
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.609.946.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	11.216.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	6.700.000
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki KK	85,4	1.710.042.400
			Prosentase penduduk yang memiliki E-KTP	73,1	
			Prosentase anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	26,2	
			Prosentase pelayanan E-KTP- el kurang dari 2 jam	90	
			Prosentase penduduk yang pindah datang	0,45	
			Prosentase penduduk yang pindah keluar	0,45	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Prosentase penduduk yang pindah antar kelurahan dan kecamatan	0,8	
			Prosentase penduduk yang ber-akta kelahiran	88	
			Prosentase penduduk yang ber-akta kematian	66	
			Prosentase penduduk ber-akta perkawinan	63,15	
			Prosentase penduduk ber-akta perceraian	44,02	
			Prosentase bayi lahir pulang bawa akta	95	
			Prosentase database kependudukan yang valid dan update	91	
			Prosentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	64,5	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	40	434.524.000
			Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%)	20,39	
			Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	100	
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/PD)	2	
			Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian)	100	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	54.528.000
			Halal	100	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	5.082.554.431
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	357.449.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	613.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang)	540	280.233.500
			Persentase KK miskin yang meningkat pendapatannya (%)	90	
			Jumlah Pengurus UEK SP yang mendapat pelatihan	204	
			Jumlah penerima KUBE Gakin	2887	
			Jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha ekonomi syariah	900	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	572.597.800
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			129.592.500
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	75	188.440.000
		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	20	1.427.958.000
			Persentase perempuan berpolitik (%)	15	
			Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	74	
			Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	238	
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	20	252.883.000
			Persentase perempuan berpolitik (%)	15	
			Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	74	
			Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	238	
			Jumlah anak yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	272	
			Jumlah satuan pendidikan yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	36	
			Jumlah Peserta pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	30	
		PERENCANAAN			
		Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Prosentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik	97	109.680.400
			telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data	9266	
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Target PAD	754.439.728.200	1.269.000
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.054.302.338
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	368.065.882
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	6.947.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Keluarga Berencana	Tingkat Penurunan TFR	2	2.160.687.400
			Kesertaan ber-KB (akseptor)	9000	
		Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kelompok kegiatan (Poktan)	24	255.129.000
	Perhubungan	PERHUBUNGAN			
	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	11.769.840.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	2.599.250.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	811.800.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.225.140.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	12.885.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah jalan utama yang menerapkan off street parking	2 lokasi	3.863.225.000
			Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor yang dilalui oleh Angkutan Umum	35,15	
			Prosentase ketersediaan Prasarana & Sarana Perhubungan berkondisi baik	90	
		Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Terpasang	7	6.393.360.000
			Persentase fasilitas lalu lintas terpasang dalam kondisi baik	100	
			Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	90	
		Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	Persentase kelompok masyarakat/ pelaku transportasi yang dibina	75	393.606.000
		Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans Pakuan	7	5.241.136.000
			Jumlah Trayek Feeder	30	
			Jumlah becak laik jalan	331	
			Jumlah koridor bus sekolah	3	
			Angkutan wisata dalam kota (paket)	2	
		Pengembangan Transportasi Yang Ramah Lingkungan	Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	99	133.000.000
			Persentase Angkutan Umum berbahan bakar ramah lingkungan	55	
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	400.269.000
	Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
	Diskominfo Standi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.013.502.579
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.013.502.579
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	409.303.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			335.950.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			73.353.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	14.000.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi	60	8.350.605.010
		Pengadaan BANDWIDTH.			2.500.000.000
		Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor			669.936.800
		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota			772.327.400
		Pemeliharaan Wifi Ruang Publik			74.349.750
		Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan			74.425.000
		Pengembangan dan Pengelolaan e-Government			605.650.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor			48.493.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room			297.144.000
		Digitalisasi Profil			29.551.350
		Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan			95.717.000
		Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan			153.617.000
		Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik			11.660.000
		Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity			38.600.000
		Pengadaan Infrastruktur Data Center			295.782.000
		Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center			381.170.450
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)			50.540.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah			69.995.000
		Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat			1.322.800.000
		Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik			47.200.000
		Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi			35.450.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian			136.608.000
		Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)			1.429.550
		Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor			353.273.510
		Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik			63.417.000
		Pembangunan Wifi ruang publik			59.262.000
		Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat			88.200.000
		Penilaian Index E-Government Indonesia			33.588.200
		Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse			36.040.000
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral			4.378.000
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD)	2	
		Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			21.229.000
		Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD			8.829.000
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	Dinas Koperasi dan UMKM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.913.487.675
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	3.148.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	51.435.825
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	2.000.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang produktif	30	662.709.500
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	85	1.334.365.000
			Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum	28	
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah promosi yang dilakukan	5	1.013.878.000
			Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM	13	
		Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Persentase PKL yang terelokasikan berdasarkan zona	100	616.084.000
			Penetapan jalan utama sebagai zona bebas PKL (lokasi)	2	
			Persentase penataan zona PKL sehingga tidak mengganggu ketertiban umum	100	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi	60	78.788.000
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD)	2	
	Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL			
	DPMPTSP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.887.300.880

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.535.135.000	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	6.100.000	
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100		
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	7.292.535.000	
			Jumlah promosi penanaman modal	4		
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100		
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100		
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98		
	Kepemudaan dan Olah Raga	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.566.780.443	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	291.150.000
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	15.000.000
				Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
			Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan diklat PASKIBRAKA	300	216.818.500
				Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan BPAP	80	
				Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor	40	
				Jumlah pemuda Kota Bogor yang mengetahui cara berwirausaha	60	
				Jumlah Organisasi Pemuda (OKP) yang mengikuti kegiatan	60	
				Jumlah pemuda yang mengetahui bahaya HIV/AIDS	100	
		Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Jambore Komunitas		100		
		Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL	127	606.035.700	
			Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA	-		
			Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)			
			Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Wilayah (POSPEDAWIL)	0		
			Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Nasional (POSPEDANAS)	2		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan Olahraga yang di renovasi	5	1.047.700.000	
			Presentase sarana prasarana olahraga yang digunakan untuk kegiatan Olahraga (%)	5		

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Jumlah sarana kreativitas didukung ruang publik		
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian (%)	100	131.774.000
			Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	85	
	Kebudayaan	KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	Dinas Pariwisata dan Budaya	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang produktif	30	111.745.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		Program Pengembangan Kreativitas Masyarakat	Jumlah kampung kreatif	1	0
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	2	391.315.000
		KEBUDAYAAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.599.693.970
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	845.238.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	14.784.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Peningkatan jumlah Pelaku Seni Budaya (Komunitas dan sanggar) yang aktif	10	2.270.161.000
		PARIWISATA			
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%)	10	783.042.450
			Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata	10	
	Kearsipan	KEARSIPAN			
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	911.811.585
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	869.826.004
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	2.956.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib (%)	100	22.729.250
			Persentase arsip daerah yang dikelola dalam sistem informasi manajemen arsip daerah (%)	90	
			Jumlah arsip yang tertibkan	1932	
		Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Prosentase arsip daerah yang diselamatkan atau dilestarikan (%)	50	49.438.625
			Jumlah penambahan arsip dinamis in aktif	460	
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang)	97000	167.500.000
			Jumlah koleksi dan judul buku	60820	
			Peningkatan fungsi perpustakaan	100	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Pemenuhan sarana dan prasarana (Sarpras) perpustakaan sesuai standard	100	767.882.900
		KEUANGAN			

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)	
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretaria	100	5.000.000	
	Pertanian	PERTANIAN				
	Dinas Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	931.727.100	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	994.236.200	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	5.200.000	
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100		
		Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Prosentase rata-rata peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan per tahun (%)	3	1.525.338.700	
			Peningkatan status kelompok tani (kelompok)	10		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Peningkatan jumlah produk olahan yang dibina (produk)	13	173.701.400	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Jumlah kasus penyakit zoonosis pertahun	10	217.529.000	
			Presentase penurunan cemaran pada sampel pangan hewani (%)	25		
		JUMLAH			3.847.732.400	
	Perindustrian	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Disperindag	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah promosi yang dilakukan	5	288.128.030	
			Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM	13		
		PERINDUSTRIAN				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.450.472.250
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	993.357.035
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	16.920.000
				Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang produktif	1,075	299.318.250
			Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi	5	27.500.000
			PERDAGANGAN			
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n	≤ Proyeksi RKPD	2.029.600.000
				Tingkat pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	100	
			Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	25	1.996.022.000
				Rata-rata persentase kenaikan harga	12	
		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk berkualitas ekspor (komoditi)	29	320.180.000	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	116.837.500	
			Halal	100		
	SEKRETARIAT DAERAH					
	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan)	≥12	396.382.856	
			Prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani	100%		
			Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	0		
			Prosentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat	0,5		

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Jumlah pelanggaran norma agama	0	
			Jumlah konflik SARA	0	
			Prosentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	100	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	40	515.377.000
			Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%)	20,39	
		Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			676.728.650
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	3.812.937.400
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	365.100.331
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Prosentase penerbitan Perda dan Perwali	95	800.587.600
			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	100	
		Penegakan Hukum dan Penerapan HAM	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	100	715.115.375
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ORGANISASI	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	400.175.000
			Halal	100	
		Penataan Tata Laksana	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang memberikan pelayanan publik		70.762.500
			Persentase PD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%)	100	
		Penataan dan Penguatan Organisasi	Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)		209.764.250
		Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	A	264.737.500
			Prosentase OPD yang mendapat nilai B pada penilaian AKIP	90	
		Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Prosentase pemeringkatan jabatan untuk setiap jabatan pada PD (%)	100	174.937.000
		Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks RB		50.000.000
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	385.263.800
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	372.328.345
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		Kerjasama Pembangunan	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	100	257.976.250
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Prosentase rekomendasi hasil Rakerda yang ditindaklanjuti	100	100.000.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah promosi yang dilakukan Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM	5 13	132.670.000
		PERDAGANGAN			
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase jumlah kasus konsumen yang terselesaikan Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	35 11	484.335.000
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	84 100	585.916.000
		Kerjasama Pembangunan	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	100	756.422.045
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan) Prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah Prosentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat Jumlah pelanggaran norma agama Jumlah konflik SARA Prosentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	≥12 100% 0 0,5 0 0 10	716.290.000
		SOSIAL			
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		5.926.145.400
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh SKPD yang memberikan pelayanan publik	3,25	948.250.000
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	84 100	18.925.000
		Pengendalian Pembangunan	Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)	>97	469.725.272,00
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN UMUM	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	20.313.965.562,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	20.325.161.600
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Prosentase rekomendasi hasil Rakerda yang ditindaklanjuti	100	4.000.000.000,00
		KEUANGAN			

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	0
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	65.702.826.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	24.613.775.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	51.900.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi	60	1.218.500.000
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD)	2	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	1.978.200.000,00
			Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase rancangan Perda yang disetujui menjadi Perda (%)	80	6.116.099.000,00
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR UTARA	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.461.966.549
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	7.354.862.231
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	12.110.200
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	3.577.759.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	1.375.240.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan			7.240.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil			171.350.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantarjati			171.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh			171.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang			172.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi			171.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar			166.750.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru			172.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar			170.350.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			9.150.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	8.081.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		87.000.000
		LINGKUNGAN HIDUP			
		Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)	4,7	1.430.000
			Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	18	
			Jumlah Bank Sampah (lokasi)	0	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			260.214.000
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	16.950.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Prosentase UMKM yang produktif	30	26.890.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	6.410.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	17.760.000
			Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RRPD	100	
			Persentase Keselarasan RRPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RRPD	90	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	2.726.600.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	14.200.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			15.000.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	10.000.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		150.000.000
		LINGKUNGAN HIDUP			
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan			4.000.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	170.000.000
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	14.400.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang produktif	30	16.600.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	85	11.600.000
			Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum	28	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	16.600.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.613.752.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.849.650.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	33.200.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	6.163.198.500
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	18.600.000
			Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	13.600.000
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan			
			Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	461.000.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	9.300.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			54.000.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya			21.000.000
			Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Persentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		135.264.000
		LINGKUNGAN HIDUP			
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase volume sampah terangkut (%)	75,35	15.000.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			230.000.000
			Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			5.000.000
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	30.000.000
		Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan			30.000.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			74.250.000
			Persentase UMKM yang produktif	30	
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal			19.490.000
			Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.148.845.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.096.580.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	5.500.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	2.804.365.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	9.000.000
			Halal	100	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	9.000.000
			Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
			KEUANGAN		
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	16.400.000
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR BARAT	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	2.719.780.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	26.040.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			114.320.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	46.200.000
			Persentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Persentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		244.750.000
		LINGKUNGAN HIDUP			
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan			19.900.000
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut (%)	75,35	43.240.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	435.000.000
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			194.000.000
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	47.300.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang produktif	30	18.289.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	38.340.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.765.098.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.676.600.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	19.850.000
			Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	7.652.876.200
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	18.165.000
			Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	9.260.000
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR TENGAH	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	736.950.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	16.000.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			40.000.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	16.800.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		100.000.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			243.850.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	9.300.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase UMKM yang produktif	30	2.600.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	3.600.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.122.341.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	4.080.355.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	6.600.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	4.206.231.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	7.000.303
			Halal	100	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	5.000.000
			Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	4.550.000
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN TANAH SAREAL	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	1.376.930.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	13.200.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			50.000.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	25.000.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Persentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		112.500.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	248.250.000
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	51.600.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang produktif	30	20.300.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	15.050.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	788.216.103
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.137.500.000
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	4.762.980.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	15.500.000
			Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		KEUANGAN			
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	20.200.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
	Pengawasan				
	INSPEKTORAT	PENGAWASAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.274.557.459
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.068.350.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	38.984.500
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level maturitas penerapan SPIP	3	419.100.000
			Peningkatan level kapabilitas APIP	3	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Penetapan PD berpredikat WBK	3	
			Tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	100	
			Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	WTP	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Kota Bogor) (%)	100	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Provinsi Jawa Barat)	74	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan eksternal (BPK) (%)	89	
			Tidak adanya auditor yang dibebaskan sementara karena kekurangan angka kredit	0	
	Perencanaan				
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	90	757.255.000
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Kerjasama Pembangunan	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP	4 Milyar	60.450.000
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	10	
		Pengendalian Pembangunan	Konsistensi antara rencana kegiatan PD dan implementasinya	100	187.300.000
		PERENCANAAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	3.257.319.100
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.764.250.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	25.127.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	1.537.746.200
			Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	97	1.037.905.600
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	97	
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	97	505.300.000
		Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD	97	722.689.000
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA	97	
		Penelitian Pengembangan	Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir	60	236.250.000
		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019			236.250.000
			Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	30	
			Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat	3	
	Keuangan				
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	155.000.000
			Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		KEUANGAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	4.318.098.040
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	170.500.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.022.850.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Target PAD	754.439.728.200	670.616.000
			Target pendapatan pajak daerah	550.000.000.000	
			Piutang pajak daerah menurun (%)	3	
			WP yang diklarifikasi/diperiksa	70 WP	
			Presentase WP yang membayar pajak daerah secara online (%)	100	
			WP pajak daerah lainnya bertambah	10	
			Presentase WP pajak daerah bertambah(%)	2	
		Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Pelaporan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah	100	3.189.430.000
	Keuangan				
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	5.468.336.052
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.680.845.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	52.000.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	8.494.577.400
	Kepegawaian				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	KEUANGAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.510.000.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	641.525.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	87.100.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)		(8)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	6.187.880.000
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level maturitas penerapan SPIP	3	11.350.000
			Peningkatan level kapabilitas APIP	3	
			Penetapan PD berpredikat WBK	3	
			Tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	100	
			Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	WTP	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Kota Bogor) (%)	100	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Provinsi Jawa Barat)	74	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan eksternal (BPK) (%)	89	
			Tidak adanya auditor yang dibebaskan sementara karena kekurangan angka kredit	0	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian (%)	100	10.068.687.000
			Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	85	

Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pendidikan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (djm Juta)			
					Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan																			
1	Program	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Persentase PAUD Sehat	%	31	32	80	33	85	34	95	35	100	36	110	36	470	Dinas Pendidikan
			2	APK PAUD	angka	49,04	50	1.173	50,55	1.180	51	1.823	51,5	1.850	52	1.875	52	7.901	
			3	Terpenuhinya Cakupan Dasar Anak Usia Dini	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	Program	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	4	APK SD	angka	112,4	113	44.829	113,05	16.000	113,08	48.000	114	50.000	114,3	52.000	114,3	210.829	Dinas Pendidikan
			5	APK SMP	angka	104,1	104,3		104,8		105		105,5		106		106		
			6	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik	%	93,7	94,5	90.786	94,8	92.000	95	94.000	95,5	95.000	96	97.000	96	468.786	
			7	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik	%	94,7	94,8	18.979	95	19.000	95,2	20.000	95,4	21.000	95,6	22.000	95,6	100.979	
			8	Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68,12	76,02	806	76,04	808	76,06	810	76,08	812	76,1	814	76,1	4.050	
			9	Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58,27	67,77	300	67,79	320	67,81	340	67,83	360	67,85	380	67,85	1.700	
			10	Persentase Sekolah Sehat (%)	%	13	15	76	17	78	19	86	22	90	24	90	24	420	
			11	Terpenuhinya Cakupan Layanan Dasar Jenjang SD/MI dan SMP/MTs	%	100	100		100		100		100		100		100		
3	Program	Pendidikan non formal	12	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	%														
			13	Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi	%	33	34	45.370	35	46.000	48.000	48.000	37	50.000	38	55.000	38	244.370	
			14	Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi	%	50	51	470	52	475	53	500	54	520	55	540	55	2505	
			15	Persentase Kelulusan Paket A, B, dan C	%		100	45	100	50	100	55	100	60	100	60	100	270	
			16	Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan	%	50	51		52		53		54		55		55		
			17	Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan	%	0	100		100		100		100		100		100		
4	Program	Manajemen Layanan Pendidikan	18	Persentase Sekolah terakreditasi A	%														
			19	TK Terakreditasi A	%	38	39	1.290	40	1300	42	1320	44	1340	46	1350	46	6.600	
			20	SD Terakreditasi A	%	73	74	67	75	68	76	70	77	72	78	78	78	355	
			21	SMP Terakreditasi A	%	73	74	70	75	72	76	75	77	80	78	78	78	375	
			22	jumlah siswa berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional	orang	61	63	1936	64	1940	65	1945	66	1950	67	1100	67	8.871	
			23	Persentase Pelajar Bebas NAPZA	%	100	100	237	100	240	100	245	100	250	100	255	100	1.227	
			24	penurunan kejadian tawuran pelajar	kejadian	20	18		18		17		15		12		12		
			25	Jumlah beasiswa mahasiswa berprestasi miskin	mahasiswa	37	47	518	52	538	57	558	57	578	57	598	57	2.790	
5	Program	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)	%	67	68,4	7.120	68,9	7.130	69,0	7.150	69,3	7.200	69,8	7.250	69,8	35.850	Dinas Pendidikan
			27	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	%	19	20	510	21	530	23	545	25	570	26	580	26	2.735	
			28	Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	%	53	54	9.100	55	9.150	56	9.200	57	9.250	58	9.270	58	45.970	
			29	Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	%	53	54	3.200	55	3.250	56	3.300	57	3.350	58	3.400	58	16.500	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)					
			30	Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	orang	1	2	430	2	440	2	445	2	450	2	455	10	2.220		
6	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	31	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	17.000	100	19.000	100	21.000	100	23.000	100	25.000	100	105.000		
7	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	32	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	575	85	600	90	625	95	650	100	675	100	3.125		
8	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	35	90	50	95	65	95	80	100	85	100	315		
			34	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A			
			35	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		100	
9	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	36	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	80	85	175	90	175	95	175	95	175	100	175	100	875		
			37	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
10	Program	Pengembangan Data dan Informasi	38	Persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55	285	60	300	65	315	70	330	75	345	75	1.575		
			39	Persentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75		75	
			40	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		90		95		95		100		100		100	

Tabel 7.4. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Kesehatan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satu an	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah				
					2020		2021		2022		2023		2024			Target	Rp. (dlm Juta)		
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan																			
1	Program	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Indeks Keluarga Sehat	Point	0,32	0,50	80.046	0,57	85.407	0,64	91.256	0,71	96.056	0,8	97.586	0,8	450.351	Dinas Kesehatan
			2	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	68	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
			3	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	0	24%		31%		38%		44%		51%		51%		
			4	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	98,85	96%		97%		98%		99%		99,5%		99,5%		
			5	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	4	8 % (2 puskt)		16% (4puskt)		20% (5 puskt)		24% (6 puskt)		28% (7puskt)		28% (7puskt)		
			6	Cakupan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin	%	100	100	5.000	100	4.500	100	4.000	100	3.500	100	3.000	100	20.000	
2	Program	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	7	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	60	55	6.300	50	6.650	45	7.000	40	7.350	30	7.700	30	35.000	Dinas Kesehatan
			8	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	2,99	2,95		2,94		2,92		2,91		2,9		2,9		
			9	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	3,35	3,35		3,34		3,33		3,32		3		3		
			10	Persentase Ibu Hamil Dengan KEK	%	4,9	3,99		3,67		3,38		3,1		2,86		2,86		
			11	Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia	%	8,3	8,3		8,2		8,1		8		7,9		7,9		
			12	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	%	4,8	4,75		4,7		4,65		4,6		4,55		4,55		
			13	Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)	%	2,08	1,97		1,86		1,75		1,64		1,53		1,53		
			14	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	%	4,53	4,42		4,31		4,2		4,09		3,98		3,98		
3	Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15	Persentase kesembuhan TB Paru	%	81,22	86	7.500	86	8.750	87	10.000	87	11.250	87	12.500	87	50.000	Dinas Kesehatan
			16	Prevalensi HIV Aids	%	0,42	<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		
			17	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	66	65		62,5		62		61,5		60		60		
			18	Prevalensi Hipertensi	%	9,67	9,3		9		8,8		8,6		8,4		8,4		
			19	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,4	2,35		2,3		2,25		2		2		2		
			20	Angka Kesakitan ODGJ	%	≤ 0,13	≤ 0,13		≤ 0,13		≤ 0,13		≤ 0,13		≤ 0,13		≤ 0,13		
4	Program	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	21	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	70	80%	47.130	84%	74.409	88%	49.405	92%	48.045	96%	45.446	96%	264.435	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satu an	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024												KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)			
			22	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	80	85%		90%		95%		100%		100%					
			23	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0,68	0,66		0,67		0,7		0,7		0,72					
			24	Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	%	72	75%		77%		79%		81%		83%					
			25	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan	%	70,86	85		87		90		92		95					
5	Program	Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penvehatan Lingkungan	28	Persentase Rumah Tangga Ber PHS*(12 IKS)	%	66	68	10.125	69	10.725	70	10.125	71	10.125	72	12.600	72	53.700		
			29	Persentase Rumah sehat (%)	%	78,01	79		79,5		80		80,5		81		81			
6	Program	Pengembangan Data dan Informasi	26	Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health	%	50%	65%	900	65%	1000	75%	1100	85%	1200	95%	1300	100%	5.500		
7	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	27	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik	%	35%	50%	700	65%	750	85%	800	95%	850	100%	900	100%	4.000		
8	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	33	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.600	100	2.700	100	12.800		
9	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	34	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	5.000	85	6.000	90	7.000	95	8.000	100	9.000	100	35.000		
10	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	1.575	90	1.635	95	1.705	95	1.675	100	1.805	100	8.395		
			36	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Peringkat Daerah	Predikat	BB	BB		BB		BB		A		A		A			
			37	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	%	75	80		85		90		95		100		100			
11	Program	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	30	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	73,5	84,25	91.631	84,5	81.471	84,75	431.129	85	218.570	85,25	175.482	85,25	998.283		
12	Program	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	31	Persentase capaian SPM RSUD	%	93,45	93,75	180.492	93,8	180.308	93,85	200.916	93,9	206.592	94	212.845	94	981.153		
			32	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD	Point	3,66	3,66		3,7		3,72		3,75		3,8		3,8			

Tabel 7.5. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang																			
1	Program	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	91,98	93,15	189.288	94,86	59.000	96,85	8.500	98,29	8.500	100,00	11.000	100,00	276.288	Dinas PUPR
			2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah yang aman	%	67,21	67,47	12.050	70,42	82.494	72,06	155.850	72,62	95.550	73,03	93.610	73,03	439.554	
2	Program	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	3	jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani	Loka si	27	8	2.100	8	2.300	8	2.520	8	7.541	8	12.668	67	27.129	Dinas PUPR
			4	Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	45,83	58,75	2.200	60,00	2.500	61,25	2.660	62,50	2.900	63,54	3.000	63,54	13.260	
			5	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)	%	90	91,03	19.600	92,06	21.800	93,10	23.000	94,13	25.000	95,16	27.200	95,16	116.600	
3	Program	Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian	6	Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah)	Km	268,336	268,336	277.658	270,336	273.850	271,336	296.372	272,336	207.129	273,336	101.708	273,336	1.156.717	Dinas PUPR
			7	Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km)	Km	78,3	7		7		7		7		7		113,3		
			8	Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	Km	0	0		2		3		4		5		5		
			9	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Km	15,14	3		3		3		3		3		30,14		
			10	Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan	Angka	2	0		1		1		1		1		6		
			11	Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%)	%	11	21,8		32,6		43,4		54,2		65		65		
			12	Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan	M	278	0,3		3		3		3		3		290,3		
13	Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan (%)	Jalur	2	0		1		1		1		0		1	5				
4	Program	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	14	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	%	88.59	89	57.600	89,25	63.160	89,5	68.720	89,75	74.280	90	79.840	94	343.600	Dinas PUPR
5	Program	Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	15	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	50	60	1800	70	1700	80	1950	90	2200	100	2450	100	10.100	Dinas PUPR
6	Program	Perencanaan Tata Ruang	16	Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM	%	0	20	1.550	40	4.100	60	5.400	80	3.200	100	3.550	100	17.800	Dinas PUPR
			17	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPd	%	85	100	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	550	Bappeda
7	Program	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	18	Prosentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%) Periode rencana Tahun 2020-2024	%	0	20	250	40	300	60	350	80	400	100	450	100	1.750	Dinas PUPR

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (djm Juta)			
						Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)					
			19	Presentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%) Periode Rencana Tahun 2020-2024	%	0	20		40		60		80		100		100		Dinas PUPR	
			20	Presentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak	%	80	82	2100	84	700	86	800	88	900	90	1000	90	5.500		
			21	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)	%	90	90		92		94		96		98		98			
8	Program	Penataan dan Pengaturan Bagunan Gedung	22	Persentase Bangunan Gedung khusus/tertentu yang memiliki rekomendasi laik fungsi	%	70	75	1200	78	1300	80	1400	85	1600	90	1600	90	7.100		
9	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	23	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		100			
10	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	24	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80		85		90		95		100		100			
11	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90		90		95		95		100		100			
			26	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A			
			27	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100			
12	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	28	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	80	85		90		95		95		100		100			
			29	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100		100		100		100		100		100			
13	Program	Pengembangan Data dan Informasi	30	Presentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75			
			31	Presentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75			
			32	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		90		95		95		100		100			

Tabel 7.6. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)				
					Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)						
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																				
1	Program	Lingkungan Sehat Perumahan	1	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota	Ha	310,93	289,86	12.889	269,51	9.450	251,14	5.200	230,62	5.841	210,1	13.664	210,1	47.044	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			2	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi	Ha	54,49	44,82	19.791	34,26	21.770	24	23.945	13,7	26.342	0	28.340	0	120.188		
			3	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat	Ha	146,42	112,09		89,95		56,4		26,25		0		0			
			4	Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	%	50,73	63,21		71,25		73,64		75,39		80,73		80,73			
			5	Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	%	28,97	48,59		58,31		62,75		65,4		74,56		74,56			
			6	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh	%	75,45	78,76		85,34		85,72		86,46		89,65		89,65			
			7	Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik	%	58,51	63,84		74,97		78,49		82,43		88,59		88,59			
			8	Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh	%	76,93	78,62		81,55		83,54		87,19		90,53		90,53			
			9	Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh	%	56,87	66,05		75,76		77,09		80		83,46		83,46			
			10	Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh	%	23,84	36,55		47,97		50,6		62,56		68,16		68,16			
			11	Luas pencegahan kawasan kumuh Kota Bogor	Ha	365,94	292,71		221,55		144,75		75,18		0		0			
			12	Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi baik	%	44,64	52,60	98.400	60,60	98.400	68,58	98.400	76,56	98.400	86,54	98.400	86,54	492.000		Dinas PUPR
			13	Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik	Km	20,31	24,75		29,18		33,62		38,05		42,49		42,49			
			14	Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	titik	0	30		60		90		120		180		180			
			15	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	Lokasi	745	865		985		1105		1225		1345		1345			
			16	Persentase RTLH	%	29,4	25,20%	600	23,21%	660	21,23%	726	19,24%	798,6	17,26%	878,46	17,26%	3663,06		Dinas Perumahan dan Permukiman
			17	Persentase Rumah Layak Huni	%	70,6	74,80%	400	76,79%	440	78,77%	484	80,76%	532,4	82,74%	585,64	82,74%	2442,04		
2	Program	Peningkatan Utilitas Perkotaan	18	Persentase pemenuhan kebutuhan PJU	%	74,03	74,47%	3.550	75%	4.140	75,61%	4.730	76,31%	5.320	77,10%	5.910	77,10%	23.650		
			19	Persentase PJU yang terpelihara	%	81,09	77,09%	48.220	73,05%	53.570	68,99%	58.920	64,91%	64.270	60,84%	69.620	60,84%	294.600		

Tabel 7.7. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satu an	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)				
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)						
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
1	Program	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	Presentase penegakan PERDA KTR	%	90	95	75	95	80	95	85	95	90	95	95	95	425	Satuan Polisi Pamong Praja	
			2	penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	%		148	140	118	145	98	150	68	155	38	150	38	740		
			3	Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	%	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		90
			4	Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	%	90	90	290	90	307	90	324	90	341	90	358	90	1.620		
			5	Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang	Kawa san	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12		
2	Program	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	6	Respon time penanganan kebakaran	Menit	30	15	400	15	150	14	150	14	200	13	200	13	1.100		
			7	% sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	%	34	50	28.000	60	38.000	70	48.000	80	58.000	90	68.000	90	240.000		
3	Program	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	8	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	Kelur ahan	11	2	250	2	275	2	300	2	325	2	350	21	1.500	BPBD	
			9	Jumlah Sekolah Aman bencana	Sekol ah	0	2	200	2	250	2	300	2	350	2	400	10	1.500		
4	Program	Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan	10	Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	%	100	100	100	100	150	100	200	100	250	100	300	100	1.000		
5	Program	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	11	Rata-Rata Respon time penanganan bencana	Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	800	< 24 Jam	825	< 24 Jam	850	< 24 Jam	875	< 24 Jam	900	< 24 Jam	4.250		
6	Program	Pemulihan Pasca Bencana	12	PersentaseKetersediaan data dan informasi dampak serta kebutuhan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500		
7	Program	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	13	Jumlah Konflik SARA	angk a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	Badan Kesbangpol	
			14	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	rasio	3950 orang	12,5	2.900	12,75	3.250	13	3.600	13,25	3.950	13,5	4.300	13,5			
			15	Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	%	100	100	375	100	1.650	100	1.815	100	1.996	100	2.196	100	8.032		
8	Program	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	16	Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini	Angk a	0,00015	0,00013	150	0,00011	200	0,0009	250	0,0007	300	0,0005	350	0,0005	1.250	Badan Kesbangpol	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satu an	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah
							2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)	
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)			
9	Program	Pendidikan Politik Masyarakat	17	Persentase Partisipasi Pemilu	%	Pilwalkot = 75,35% Pilgub = 75,37% Pilpres = 83,87	0	550	0	650	0	750	0	850	80	950	81	3.750	
			18	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu	%	39,90	0		0		0		0		60		60		
10	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	7.200	100	9.500	100	12.000	100	14.500	100	17.000	100	60.200	SatpolPP
11	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	20	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	9.850	85	10.500	90	10.900	95	11.300	100	11.700	100	54.250	
12	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	75	90	75		75		75	100	75	100	375	
			22	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		
10	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	300	100	350	100	400	100	450	100	500	100	2.000	BPBD
11	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	2	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	400	85	450	90	500	95	550	100	600	100	2.500	
12	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	50	90	50	95	50	95	50	100	50	100	250	
			4	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		
10	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	300	100	350	100	400	100	450	100	500	100	2.000	Badan Kesbangpol
11	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	2	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	400	85	400	90	450	95	550	100	550	100	2.350	
12	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	50	90	50	95	50	95	50	100	50	100	250	
			4	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		

Tabel 7.8. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Sosial Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial																			
1	Program	Pembinaan Anak Terlantar	1	Persentase penurunan anak terlantar	%	Jumlah anak terlantar = 385 orang	19,48	225	38,96	225	58,44	225	77,92	225	97,4	225	97,4	1.125	Dinas Sosial
2	Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2	Prosentase anjal, gepeng dan WTS yang direhabilitasi	%	Jumlah anjal, gepeng dan WTS = 397	21,41	600	23,92	675	26,44	750	28,96	600	31,48	900	31,48	3.525	
			3	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	%	Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya=550	8		8	9		9	9	9		9	9		
3	Program	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	4	Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%)	%	Jumlah panti asuhan/yayasan = 83	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	750	
			5	Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi	%	Jumlah Panti Asuhan/Yayasan/Orsos = 83	12,04		24,09		36,14		48,19		60,24		60,24		
4	Program	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	6	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	%	Jumlah penyandang disabilitas dan trauma = 970 orang	29,58	325	37,32	420	45,05	450	52,78	450	60,51	450	60,51	2.095	
			7	Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	%	2 Kasus	100		100		100		100		100		100		
5	Program	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	8	Jumlah lansia yang berdaya	Orang	150	100	300	100	100	100	100	100	100	100	100	650	700	
			9	persentase jumlah fakir miskin	%	jumlah KK Miskin = 72,187 KK jumlah Penduduk Miskin = 321.250 jiwa	5,8	5.980	5,78	5.180	5,53	5.366	5,28	5.540	5	5.570	5	27.636	
				persentase jumlah PMKS yang tertangani	%	Jumlah PMKS yang ditangani = 55734, Jumlah PMKS keseluruhan = 60944 (91,45%)	92%		93%		94%		95%		96%		96%		
6	Program	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	12 Jenis Lembaga	100	2.475	100	2.318	100	2.721	100	3.147	100	3.047	73,46	13.708	
			11	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	%	relawan yang aktif 268 orang, Total PSKS 1142 orang	27,85		32,22		36,60		40,98		45,36		45,36		
7	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%		100	100	2.250	100	2.250	100	2.300	100	2.350	100	2.400	100	11.550
8	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	13	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%		80	80	1.250	85	950	90	900	95	1.000	100	1.100	100	5.200
9	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	70	90	70	95	70	95	70	100	70	100	350	
			15	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
			16	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		
10	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	17	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	80	85	150	90	200	95	250	95	300	100	350	100	1.250	
			18	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100		100		100		100		100		100		
11	Program	Pengembangan Data dan Informasi	19	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55	500	60	500	65	500	70	500	75	500	75	2.500	
			20	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75		
			21	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		90		95		95		100		100		

Tabel 7.9. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Ketenagakerjaan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah					
					2020		2021		2022		2023		2024			Target	Rp. (dim Juta)			
					Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)						
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan																				
1	Program	Perluasan Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	90,38	91,53	2.806	91,87	3.546	92,20	4.253	92,51	4.727	92,81	5.021	92,81	20.353	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2.189	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		12.500			
			3	Jumlah KK miskin yang dilatih dan terserap pasar kerja	KK	2018 = 26 2019 = 26	25		30		30		50		50		50			
			4	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	109.416	120.358	172	132.393	737	145.633	800	160.196	873	176.216	952	176.216	3.534		
			5	Penetapan besaran UMK	Rp	3.557.146	4.149.797		4.481.780		4.840.322		5.227.547		5.645.750		5.645.750			
			6	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100			
3	Program	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	7	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Juta/pekerja/tahun	63,91	65,78	72	68,59	76	71,52	78	74,57	80	77,76	83	77,76	389		
4	Program	Pembinaan dan penempatan transmigrasi	8	Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi	KK	0	2	301	2	303	2	305	2	408	2	411	10	1.728		
4	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	2.886	100	4.157	100	4.572	100	5.030	100	737	100	17.382		
5	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	9	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	1.817	85	9.056	90	18.112	95	36.225	100	72.450	100	137.660		
6	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10	Persentase rekomendasi temuan Inspektoral Kota, Inspektoral Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	28	90	46	95	92	95	185	100	370	100			
			11	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A			
			12	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100			

Tabel 7.10. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Transmigrasi Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah				
					2020		2021		2022		2023		2024			Target	Rp. (dim Juta)		
					Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang																			
1	Program	Pembinaan dan penempatan transmigrasi	1	Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada	KK	0	2	301	2	303	2	305	2	408	2	411	10	1.728	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 7.11. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1	Program	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO	1	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	%	2018 = 75 2019 = 76	77	1.200	78	1.300	79	1.400	80	1.500	81	1.600	81	7.000	DPMPPA
			2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	angka	2018 = 0,0240 2019 = 0,0136	0,0133		0,0128		0,0122		0,0117		0,0112		0,0112		
2	Program	Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Peringkat	Madya	Nindya	1.950	Nindya	2.100	Utama	2.250	Utama	2.400	Utama	2.550	Utama	11.250	
3	Program	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	4	Persentase perempuan berpolitik (%)	%	17	17	1.550	18	1.650	19	1.750	20	1.850	21	1.950	21	8.750	
			5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	2018 = 70 2019 = 75	78		80		82		84		86		86		
4	Program	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	6	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%)	%	2018 = 75 2019 = 76	77	5.250	78	5.500	79	5.750	80	6.000	81	6.500	81	29.000	
			7	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,025	0,0107		0,0106		0,0105		0,0091		0,009		0,009		
			8	Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya	%	2018 = NA 2019 = 1	1,5		3,10		4,65		6,20		7,75		7,75		
			9	Persentase Perempuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan	%	2018 = NA 2019 = 0,5	0,9		1,8		2,7		3,6		4,5		4,5		
			10	Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan	%	0,0126	0,0126		0,0127		0,0128		0,0129		0,013		0,013		
5	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.100	100	1.200	100	1.300	100	1.400	100	1.500	100	6.500	
6	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	12	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	1.500	85	1.400	90	1.300	95	1.200	100	1.100	100	6.500	
7	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	70	90	70	95	70	95	70	100	70	100	350	
			14	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
			15	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		
9	Program	Pengembangan Data dan Informasi	16	Persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55	200	60	250	65	300	70	350	75	400	75	1.500	
			17	Persentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75		
			18	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		90		95		95		100		100		

Tabel 7.12. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa																			
1	Program	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	1	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif	%	2018 = 45 2019 = 50	55	700	60	725	65	750	70	775	75	800	75	3.750	DPMPPA
			2	Rasio Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Rasio	2018 = 1 : 60 2019 = 1 : 55	1 : 50	7.715	1 : 45	10.123	1 : 40	11.653	1 : 30	13.294	1 : 20	15.049	1 : 20	57.834	
2	Program	Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat	3	Persentase Pelaku Usaha yang mampu memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	%	2018 = 0 2019 = 11,5	13,5	400	18,5	425	23,5	450	28,5	475	33,5	500	33,5	2.250	
			4	Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi	%		2,51	1.500	5,02	1.625	7,53	1.750	10,04	1.875	12,54	2.000	12,54	8.750	

Tabel 7.15. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2020-2024

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)				
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)						
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup																				
1	Program	Kemitraan Lingkungan Hidup	1	Persentase sekolah adiwiyata (%)	%	30	31	3.000	33	3.020	35	3.050	36	3.080	38	3.100	38	15.250	Dinas Lingkungan Hidup	
			2	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	%	0	10		20		30		40		50		50			
2	Program	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	%	75,85	76	28.734	76,5	38.506	77	43.761	77,5	49.051	78	54.378	78	214.430		
			4	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%	195,900 m	48,8		48,8		48,8		48,8		48,8		48,8			
			5	Persentase peningkatan retribusi persampahan	%	9,5 Milyar	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1			
3	Program	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	6	Persentase Reduksi Sampah (%)	%	6,26	6,4	3.200	6,6	3.780	6,8	4.406	7,0	5.087	7,2	5.934	7,2	22.407		
			7	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	%	4	4		4,2		4,4		4,6		4,8		4,8			
4	Program	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	8	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA	%	98,16	98,16	54.946	98,16	83.324	98,16	84.766	98,16	68.128	98,16	101.763	98,16	392.927		
			9	Kapasitas pengolahan sampah	Ton/ha ri	931	931		949		966		984		1.002		1.002			
5	Program	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	10	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	35	36	1.100	37	650	38	700	39	1.400	40	1.100	40	4.950		
			11	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran air =	100	120	100	150	100	180	100	225	100	270	100	945		
			12	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	%	30	40	300	45	425	50	150	60	175	70	700	70	1.750		
			13	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	%	30	35	1.300	35	850	40	900	45	1.600	50	1.300	50	5.950		
			14	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	40	50	1.300	55	1.400	60	1.100	65	1.550	70	1.550	70	6.900		
			15	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran udara =	100		100		100		100		100		100			100
6	Program	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	16	Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	%	12 titik berkondisi baik	50		60		70		75		80		80			
			17	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	emisi GRK = 2,8	3,92	700	5,87	700	7,11	700	7,72	700	7,98	700	7,98		3.500	
7	Program	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	18	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	Angka	1	1	750	1	1.300	1	350	1	350	1	750	1	3.500		
8	Program	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Perlindungan dan Konservasi Air)	19	Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air	%	10	10	1300	10	900	10	900	10	900	10	900	10	4.900	Dinas Lingkungan Hidup	
			20	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (IHa)	Ha	Luas Kawasan konservasi =	0,5	1300	0,5	900	0,5	900	0,5	900	0,5	900	2,5	4900		
9	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	21	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	49.937	100	52.906	100	56.064	100	59.430	100	63.021	100	281358		
10	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	22	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	7.934	85	8.390	90	9.058	95	9.697	100	10.418	100	45497		
11	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	25	90	27,5	95	30	95	32,5	100	35	100	150		
			24	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A	0		
			25	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100	0		

Tabel 7.16. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (djm Juta)				
					Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)						
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil																				
1	Program	Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	%	94%	95%	500	96%	500	97%	400	98%	400	100%	400	100%	2.200	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
			2	Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	31%	33%	500	34%	400	35%	400	40%	350	45%	350	45%	2.000		
			3	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	99%	99,50%	500	99,80%	500	100%	600	100%	650	100%	700	100%	2.950		
			4	Persentase Penduduk yang memiliki KK	%	100%	100%	250	100%	300	100%	300	100%	350	100%	350	100%	1.550		
			5	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	1%	30%	500	40%	500	50%	400	60%	400	70%	400	70%	2.200		
2	Program	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	Indeks Kepuasan Masyarakat		3,2	3,0	250	3,1	280	3,2	300	3,3	330	3,4	350	3,5	1.510		
3	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	5.500	100	6.000	100	6.500	100	7.000	100	7.500	100	32.500		
4	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	8.500	85	8.400	90	9.000	95	9.900	100	10.500	100	46.300		
5	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	75	90	100	95	130	95	150	100	185	100	640		
			10	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A			
			11	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		100	
6	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	80	85	3.100	90	3.550	95	4.250	95	4.950	100	5.650	100	21.500		
			13	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
7	Program	Pengembangan Data dan Informasi	14	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55	250	60	300	65	300	70	350	75	350	75	1.550		
			15	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75		75	
			16	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		90		95		95		100		100		100	

Tabel 7.17. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
					2020		2021		2022		2023		2024			Target	Rp. (dlm Juta)	
					Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana																		
1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Per 1000 Remaja	14,42	14,41	200	14,4	400	14,39	500	14,38	600	14,37	700	14,37	2.400	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Persentase PIK R Aktif	%	PIKR Aktif = 24 PIKR = 59 Persentase PIK R Aktif = 40,68%	42,18			43,48			44,59			45,56			
2	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	3	CPR (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>) Tingkat Peserta KB Aktif	%	Peserta Aktif (PA) = 120.210 PUS = 155.284 CPR = 77,41	77,41%	1.860	77,42%	2.600	77,42%	3.250	77,43%	3.600	77,43%	4.050	77,43%	15.360	
		4	Persentase Peserta KB MKJP pada PUS	%	Peserta MKJP= 34.725 PUS = 155.284 Persentase MKJP = 22,36%	22,4			22,44			22,48			22,52			
3	Program Pembangunan Keluarga	5	Persentase Keluarga Sejahtera	%	Jumlah Keluarga Sejahtera = 196.428 Jumlah Keluarga = 212.082 Persentase Keluarga Sejahtera = 92,62%	93,00	713	93,50	1350	94,00	1.450	94,50	1.530	95,00	1.615	95,00	6.658	
		6	Persentase Anggota bina keluarga balita aktif	%	Anggota BKB Aktif = 7.521 Jumlah Anggota BKB Keseluruhan = 9.575 Persentase Anggota BKB Aktif = 78,54%	78,74%			78,94%			79,14%			79,34%			

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
						2020		2021		2022		2023		2024			Target	Rp. (dlm Juta)
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)			
			7	Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif	%	Anggota BKR Aktif = 3.702 Jumlah Anggota BKR Keseluruhan = 4.999 Persentase Anggota BKR Aktif = 74,05%	74,25%		74,45%		74,65%		74,85%		75,02%		75,02%	
			8	Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif	%	Anggota BKL Aktif = 5.366 Jumlah Anggota BKL Keseluruhan = 7.290 Persentase Anggota BKL Aktif = 73,60%	73,80%		74,00%		74,02%		74,04%		74,06%		74,06%	
			9	Jumlah Kelompok UPPKS aktif	angka	22	23		24		25		26		27		27	
4	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	2.051	100	3.000	100	3.000	100	4.000	100	4.500	100	16.551
5	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	11	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	1.175	85	1.065	90	957	95	900	100	725	100	4.822
6	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	20	90	50	95	50	95	50	100	50	100	220
			13	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A	
			14	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100	

Tabel 7.18. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Perhubungan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlim .luta)				
						Target	Rp. (dlim .luta)	Target	Rp. (dlim .luta)	Target	Rp. (dlim .luta)	Target	Rp. (dlim .luta)	Target	Rp. (dlim .luta)						
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan																					
1	Program	Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	1	Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%)	%	100	100	375	100	375	100	375	100	375	100	375	100	1.875	Dinas Perhubungan		
			2	Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif	%	40	40	0	40	50	50	250	60	250	70	250	70	250		70	800
			3	Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	%	87,82	88	150	89	150	90	165	91	165	92	165	92	165		92	795
			4	Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi	Angka	1	2	2.557	3	1.500	4	1.675	5	1.750	7	975	7	975		7	8.457
2	Program	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Trasportasi	5	Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik	%	70	75	9.700	80	7.900	85	10.900	90	7.900	95	10.450	95	10.450	95	46.850	
3	Program	Peningkatan Pelayanan Angkutan	6	Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%)	%	50	50	42.050	60	55.350	70	75.750	80	89.450	90	104.450	90	104.450	90	367.050	
			7	Load Factor Angkutan Umum	%	40	45	650	50	500	55	950	60	500	65	650	65	650	65	3.250	
4	Program	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	8	Konektivitas transportasi multimoda	point	2	2	526.871	3	384.948	4	488.828	5	77.898	7	44.408	7	44.408	7	1.522.953	
5	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	15.500	100	16.200	100	16.400	100	16.600	100	16.800	100	16.800	100	81.500	
6	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	10	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	8.300	85	8.200	90	8.400	95	9.100	100	9.800	100	9.800	100	43.800	
7	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	100	90	100	95	100	95	100	100	100	100	100	100	500	
			12	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		A		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm .Juta)		
						Target	Rp. (dln .Juta)	Target	Rp. (dln .Juta)	Target	Rp. (dln .Juta)	Target	Rp. (dln .Juta)	Target	Rp. (dln .Juta)				
			13	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		
8	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	14	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	80	85	4.815	90	7.607	95	7.914	95	8.557	100	8.957	100	37.850	
			15	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100		100		100		100		100		100		
9	Program	Pengembangan Data dan Informasi	16	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55	200	60	200	65	250	70	250	75	250	75	1.150	
			17	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75		
			18	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		90		95		95		100		100		

Tabel 7.19. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika																			
1	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,91	2,92	23.740	2,92	14.240	2,93	14.840	2,93	15.265	2,94	15.665	2,94	83.750	Dinas Kominfostandi
			2	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	%	7	14	9.500	21	4030	28	4080	34	4170	41	4220	41	26.000	
			3	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	80	85	1.560	90	1.560	95	2.065	95	2.065	100	2.070	100	9.320	
			4	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.280	100	1.342	100	1.410	100	1.479	100	1.551	100	7.062	
3	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	6	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	1.343	85	1.415	90	1.503	95	1.581	100	1.668	100	7.510	
4	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	30	90	30	95	30	95	30	100	30	100	150	
			8	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	BB	BB		BB		BB		BB		BB		BB		
			9	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		

Tabel 7.20. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Statistik Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik																			
1	Program	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	70	3.800	73	4.200	76	4.600	79	5.000	82	5.400	82	23.000	Dinas kominfostandi

Tabel 7.21. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Persandian Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dml Juta)			
					Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian																			
1	program	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	NA	Level 1	1.900	Level 1	1.100	Level 2	1.200	Level 3	1.300	Level 3	1.300	Level 3	6.800	Dinas Kominfostandi

Tabel 7.23. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Penanaman Modal Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)			
					Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal																			
1	Program	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1	Nilai Investasi	Trilyun Rp.	3,1	2,50	10.150	2,53	11.560	2,55	12.055	2,58	11.825	2,60	11.660	2,6	57.250	DPMPTSP
			2	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	64	75		85		95		100		100		100		
2	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	2.200	100	2.300	100	2.500	100	2.700	100	2.700	100	12.400	
3	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	4	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	1.100	85	1.100	90	1.100	95	1.100	100	1.100	100	5.500	
4	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	50	90	50	95	55	95	55	100	60	100	270	
			6	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	CC	B		BB		BB		BB		A		A		
			7	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		
5	Program	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8	Indeks Kepuasan Masyarakat		3,2	3.0		3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		

Tabel 7.24. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah				
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlim Juta)					
					Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)							
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga																					
1	Program	Kepemudaan dan Keolahragaan	1	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45	1.095	0,47	1.515	0,49	1.320	0,51	1.385	0,53	1.340	0,53	6.655	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
			2	Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	Per 916,052 Penduduk	0.001511 : 2.08	0.001552 : 2.08		0.001661 : 2.08		0.001734 : 2.08		0.0011808 : 2.08		0.001887 : 2.08		2,08				
			3	Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	%	33,34	33,34	21.623	50,01	167.598	66,67	49.789	83,33	71.424	100	40.294	100	350.728			
			4	Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	Angka	1	0		1		1		1		1		5				
			5	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	%	NA	0	2.250	5	2.250	5	2.250	5	2.250	5	2.250	25	11.250			
			6	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	%		Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5		20		40		60		80		100			100	
			7	Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)	Predikat	0%	30 % Menuju KLP		40 % Menuju KLP		50% Menuju KLP		75% Menuju KLP		KLP		KLP				
			8	jumlah wirausahawan muda pemula	orang	-	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	500	750			
2	Program	Peningkatan Prestasi Olah Raga	9	Jumlah perolehan medali Tk. Internasional	Medali	4	4	3.670	3	3.195	4	23.301	4	3.521	4	4.241	4	37.928			
			10	Jumlah perolehan medali Tk. Nasional	Medali	14	66		16		0		0		66		66				
			11	Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar	Medali	162	64		32		264		35		76		76				
3	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.920	100	1.920	100	1.920	100	1.920	100	1.920	100	9.600			
4	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	13	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	650	85	975	90	1.050	95	1.175	100	1.300	100	5.150			
5	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	20	90	20	95	20	95	20	100	20	100	100			
			15	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A				
			16	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100				

Tabel 7.25. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)		
						Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan																			
1	Program	Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni atau budaya	%	jumlah pelaku seni budaya =	10	950	10	1.065	10	1.215	10	1.270	10	1.330	jumlah pelaku seni budaya =	5.830	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasanggiri /Lomba/Sayembara Karyaseni	Event	13	15	2557	17	2729	19	3035	21	3239	23	3609	23	15.169	
			2	Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	Angka	NA	150	400	150	500	150	600	150	700	150	800	750	3.000	
			3	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	%	Jumlah cagar budaya = jumlah museum = jumlah pelaku pelestarian budaya =	2	1380	2	4730	2	2750	2	1675	2	825	jumlah cagar budaya = jumlah museum = jumlah pelaku pelestarian =	11.360	

Tabel 7.26. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Pariwisata Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dml Juta)		
						Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)				
Urusan Pilihan Bidang Pariwisata																			
1	Program	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.965.987	7.004.033	3.050	7.704.436	3.650	8.474.879	4.250	9.322.366	4.850	10.254.602	5.450	10.254.602	21.250	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	12.500	
3	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	3	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	2.000	85	2.000	90	2.000	95	2.000	100	2.000	100	10.000	
4	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	20	90	20	95	20	95	20	100	20	100	100	
			5	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
			6	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		

Tabel 7.27. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
						2020		2021		2022		2023		2024			Target	Rp. (dlm Juta)	
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan																			
1	Program	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/taman bacaan	%	jumlah kunjungan ke perpustakaan = 25,421	10	65	35	70	42	75	56	80	76	85	76	375	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	%	-	40	6.820	100	9.180	100	200	100	200	100	200	100	16.600	

Tabel 7.28. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Kearsipan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
						2020		2021		2022		2023		2024			Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan																			
1	Program	Peningkatan Sadar Tertib Arsip	1	Persentase PD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%)	%	17	17	248	38	250	58	255	79	260	100	265	100	1.278	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	2	Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	arsip	100	100	75	100	100	100	125	100	150	100	175	500	625	
3	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.500	100	1.650	100	1.815	100	1.996	100	2.196	100	9.157	
4	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	4	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	3.020	85	3.322	90	3.654	95	4.019	100	4.421	100	18.436	
5	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	10	90	10	95	10	95	10	100	10	100	100	50
			6	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
			7	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		

Tabel 7.29. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Pertanian Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)		
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)				
Urusan Pilihan Bidang Pertanian																		
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	1	Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun	Kasus	0	3	750	3	820	3	890	3	960	3	1.030	3	4.450	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	%	22,2	22		21		20		19		18		18		
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian	3	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	Padi: 5439 Ton Palawija: 11.540 Ton Hortikultura: 28.972 Ton	4	3.948	6	4.415	8	4.033	10	4.305	12	4.226	12	20.927	
		4	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	Daging: 5.999 Ton Telur: 93,5 Ton Susu: 1.929.3 16 Liter	2		4		6		8		10		10		
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	2.500	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	14.500	
4	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	6	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	3.000	85	3.000	90	3.000	95	3.000	100	3.000	100	15.000	
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	20	90	20	95	20	95	20	100	20	100	100	
		8	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
		9	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		

Tabel 7.30. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Perikanan dan Kelautan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dml Juta)		
						Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)	Target	Rp. (dml Juta)				
Urusan Pilihan Bidang Perikanan dan Kelautan																			
1	Program	Peningkatan Produksi Perikanan	1	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	Ikan Konsu msi: 4.980 Ton Ikan Hias: 18.578. 560 ekor	3	750	4,5	755	6	810	7,5	865	9	920	9	4.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program	Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan	2	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	27,28	29,37	300	29,76	350	30,03	400	30,36	450	30,4	500	30,4	2.000	

Tabel 7.31. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Perdagangan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
Urusan Pilihan Bidang Perdagangan																			
1	Program	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1	Prosentase pemanfaatan E Commerce oleh IKM	%	Jumlah IKM keseluruhan = 1.000 Jumlah IKM yang sudah menggunakan E commerce = 44 Persentase pemanfaatan E commerce = 4,4 %	5,4	695	5,94	400	6,53	340	7,18	425	7,9	475	7,9	2.335	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	%	Tahun 2018 = 2,99 Tahun 2017 = 5,58	5,59	5.903	5,6	15.495	5,61	24.678	5,62	14.111	5,63	14.188	5,63	74.374	
2	Program	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	%	99.283.771,63	1,1	1650	1,35	1900	1,6	2075	1,85	2375	2,1	2325	2,1	10.325	
3	Program	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	4	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	%	11630 UTTP	95	2885	95,01	755	95,02	835	95,03	1105	95,04	925	95,04	6.505	
			5	Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)	%	3,69	2-4 %	360	2-4 %	600	2-4 %	600	2-4 %	600	2-4 %	600	2-4 %	2.760	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama

Tabel 7.32. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Perindustrian

Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlim Juta)				
					Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)						
Urusan Pilihan Bidang Perindustrian																				
1	Program	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya	%	Jumlah IKM keseluruhan = 1.000 Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri = 20 Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi = 2%	2,5	900	3	900	3,5	900	4	900	5	1000	4	4.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	Program	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2	Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM	orang	-	600	200	600	200	600	200	600	200	600	200	3000	1000		
			3	Persentase peningkatan IKM yang produktif	%	1000 IKM	2	2970	2,1	2970	2,2	2970	2,3	2970	2,4	2970	2,4	14.850		
3	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	2.500	100	2.700	100	3.000	100	3.200	100	3.500	100	14.900		
4	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	5	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	1.500	85	1.500	90	1.800	95	1.800	100	2.000	100	8.600		
5	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	45	90	45	95	45	95	45	100	45	100	225		
			7	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A			
			8	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100			

Tabel 7.33. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlim Juta)			
					Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)					
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan																			
1	Program	Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	20 : 100	20 : 100	750	22 : 100	780	25: 100	565	27 : 100	590	30 : 100	620	30 : 100	3.305	Bappeda
			2	Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	1 : 100	1 : 100		2 : 100		3 : 100		4 : 100		5 : 100		5 : 100		
			3	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5	6		7		8		9		10		10		
			4	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10	10		10		15		15		20		20		
			5	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Angka	21	22	300	23	800	24	300	25	300	26	300	26		
2	Program	Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam	6	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,7	73	1267	77	1350	80	1750	83	1350	87	1400	87	7117	
3	Program	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	7	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,7	73	587	78	590	80	673	83	675	87	738	87	3263	
4	Program	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	8	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,7	73	175	79	195	80	200	83	200	87	200	87	970	
5	Program	Kerjasama Pembangunan	9	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	10	110	10	120	10	130	10	140	10	150	10	650	
6	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	3.110	100	3.100	100	3.200	100	3.300	100	3.400	100	16.110	
7	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	11	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	2.000	85	1.450	90	1.600	95	1.800	100	1.900	100	8.750	
8	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	75	90	75	95	75	95	75	100	100	100	400	
			13	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
			14	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		
9	Program	Pengembangan Data dan Informasi	15	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55	100	60	150	65	100	70	100	75	100	75	550	
			16	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75		
			17	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		90		95		95		100		100		

Tabel 7.35. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlim Juta)	
					Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)	Target	Rp. (dlim Juta)			
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan																	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	%	100	100	3700	100	3700	100	3750	100	3800	100	3800	100	18.750	BPKAD
2	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80	81	17000	82	5475	83	5750	84	5855	85	6200	85	40.280	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Nilai Pajak Daerah	dalam Juta Rp.	592.978	733.072	11.850	791.000	11.983	878.500	12.361	976.000	12.773	1.087.000	13.743	1.087.000	62.710	Bapenda
		4 Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	nilai realisasi pajak tahun 2018 = 592.978.746.864 target 2019 = 620.894.818.419	18,06	7,90	11,06	11,10	11,37	11,37							
		5 Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)		realisasi 2018 = 912.197.971.288 target 2019 = 944.394.650.807	1.090.708,00	1.127.767,17	1.241.375,86	1.349.164,16	1.465.472,63	1.465.472,63							
		6 Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	%	nilai realisasi PAD tahun 2018 = 912.197.971.288	15,49	3,4	10,07	8,68	8,62	8,62							
4	Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	7 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	3,31	3,32		3,35		3,4		3,45		3,5		3,5		
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	5.000	100	21.000	BPKAD
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	9 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	1.500	85	6.000	90	1.500	95	1.500	100	1.500	100	12.000	
7	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	50	90	50	95	50	95	50	100	50	100	250	
		11 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
		12 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		

Tabel 7.36. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)		
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)				
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan																			
1	Program	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	%	100	100	11,35	100	11,35	100	11,35	100	11,35	100	11,35	100	56,75	BKPSDA
2	Program	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	Persentase Pemenuhan Formasi ASN	%	55	60	2.740	63	3.100	66	3.420	69	3.740	72	4.050	72	17050	BKPSDA
			3	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan	%	75	80		83		86		89		92		92		
			4	Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	%	85	90		91		92		93		94		94		
			5	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
3	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	%	30	35	5.761	40	5.762	45	5.762	50	5.762	55	5.762	55	28.807	BKPSDA
			7	Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	68	75		77,5		80		82,5		85		85		
			8	Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional	%	60	77		79		81		83		85		85		
			9	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	85	87		89		91		93		95		95		
4	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	8.585	100	8.585	100	8.585	100	8.585	100	8.585	100	42.925	BKPSDA
5	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	11	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	1.241	85	25.641	90	641	95	641	100	641	100	28.805	BKPSDA

Tabel 7.37. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan
Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah			
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)				
					Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)						
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan																				
1	Program	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	125	WTP	150	WTP	165	WTP	175	WTP	185	WTP	800	Inspektorat	
			2	Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan	%	100	100	220	100	225	100	230	100	235	100	240	100	1.150		
			3	Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100			
			4	Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100			
			5	Level Maturitas SPIP	Level	1	2	200	3	250	3	300	3	350	3	400	3	1.500		
			6	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	%	43,24	45,95		48,65		51,35		54,05		56,76		56,76			
			7	Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate	Elemen	3	3	350	3	350	4	350	4	350	4	350	4	1.750		
			8	Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM	Angka	7	8		8		8		9		9		9			
			9	Jumlah PD berpredikat WBK	%	0	1	84	1	120	1	125	1	150	1	175	5	654		
2	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.750	100	1.300	100	1.300	100	1.350	100	1.375	100	7.075		
3	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	11	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	12.400	85	750	90	850	95	950	100	1.050	100	16.000		
4	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	53	90	18	95	21	95	24	100	24	100	140		
			13	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A			
			14	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100			
5	Program	Pengembangan Data dan Informasi	15	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55	125	60	125	65	125	70	125	75	125	75	625		
			16	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55		60		65		70		75		75			
			17	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		90		95		95		100		100			

Tabel 7.38. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (dlm Juta)		
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)				
Usuran Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan																			
1	Program	Pemberdayaan lembaga Sosial	1	Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	%	43	50	6.898	55	10.123	60	11.653	65	13.294	70	15.049	70	57.017	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2	Program	Penerapan Reformasi Birokrasi	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,31	3,32	1.150	3,35	1.125	3,4	1.075	3,45	1.125	3,5	1.075	3,5	5.550	Bagian Organisasi
			3	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	Point	B	BB		BB		A		A		A		A		
			4	Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi	Point	3,84	4		4,25		4,5		4,75		5		5		
			5	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	18,92	67,56	53	70,27	18	100	21	100	24	100	27	100	143	Inspektorat
3	Program	Pengendalian pembangunan	6	Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana	%	80	80	688	83	750	85	750	87	750	90	750	90	3688	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
			7	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%	75	80	450	85	300	90	300	95	300	100	800	100	2150	Bappeda
4	Program	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Point	3,1	3,12	165	3,15	175	3,17	185	3,2	195	3,22	205	3,22	925	Bagian Administrasi Pemerintahan
				Persentase BUMD yang Sehat	%	50	50	475	50	600	50	500	50	600	50	500	50	2675	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
5	Program	Kerjasama Pembangunan	9	Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	%	70	70	615	75	1.035	80	1.075	85	1.115	90	1.145	90	4.985	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
6	Program	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	10	Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	%	70	70	400	76	500	81	850	87	600	92	925	92	3.275	Bagian Administrasi Pemerintahan
7	Program	Penataan Perundang-undangan	11	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	%	90	95	809	95	1.425	95	1.425	95	1.425	95	1.425	95	6.509	Bagian Hukum dan HAM
8	Program	Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM	12	Persentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	%	100	100	515	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	4.515	
9	Program	Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah	13	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda	%	80	80	10.297	80	10.297	85	10.297	85	10.297	90	10.297	90	51.485	Setwan
			14	Persentase Perda yang Disosialisasikan	%	100	100		100		100		100		100				
			15	Persentase Rapat dan Risalah Rapat yang Berkualitas	%	70	80		82		83		84		85		85		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		Target
10	Program	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa	16	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa	%	8,53	10	1.250	10	2.550	10	2.800	10	3.000	10	3.200	10	12.800	Bagian Pengadaan Barang/jasa
11	Program	Kerjasama Informasi dengan Media massa	17	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	91,9	100	3.881	100	4840	100	5324	100	5856	100	6442	100	26.343	Bagian Humas dan Protokol
12	Program	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	18	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	100	4.845	100	4.100	100	4.210	100	4.331	100	4.464	100	21.950	Bagian Humas dan Protokol : dan Bagian Umum
13	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	17.451	100	19.184	100	21.078	100	23.161	100	25.451	100	106.325	Sekretariat Daerah
14	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	20	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	16.651	85	216.372	90	134.692	95	107.573	100	17.325	100	492.613	
15	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	61.441	90	100	95	100	95	100	100	100	100	61.841	
			22	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
			23	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		
16	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	24	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.600	100	1.650	100	1.650	100	1.700	100	1.750	100	8.350	Kecamatan Tanah Sareal
17	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	25	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	1.400	85	1.450	90	1.500	95	1.550	100	1.600	100	7.500	
18	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	60	90	60	95	60	95	60	100	60	100	300	
			27	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B		BB		BB		BB		A		A		
			28	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100		100		
19	Program	Peningkatan Pelayanan PATEN	29	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	%	80	82	14.032	85	13.832	87	13.917	90	13.892	95	13.997	95	69.668	
			30	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	Point	3	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		Target
20	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	31	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.968	100	2.164	100	2.381	100	2.619	100	100	9.132	Kecamatan Bogor Utara	
21	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	32	Persentase pemenuhan sarana prasarana <u>aparatur</u>	%	80	80	1.432	85	1.575	90	1.733	95	1.906	100	100	6.647		
22	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	46	90	51	95	56	95	61	100	100	214		
			34	Nilai Hasil Evaluasi LKIP <u>Perangkat Daerah</u>	Point	B	B		BB		BB		BB		A	A			
			35	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100	100			
23	Program	Peningkatan Pelayanan PATEN	36	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi <u>sesuai ketentuan</u>	%	80	82	11.138	85	9.616	87	10.142	90	10.720	95	95	41.615		
			37	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di <u>kecamatan</u>	Point	3	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5				
24	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	38	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.869	100	2.000	100	2.200	100	2.400	100	2.600	100	11.069	Kecamatan Bogor Selatan
25	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	39	Persentase pemenuhan sarana prasarana <u>aparatur</u>	%	80	80	12.107	85	2.030	90	2.220	95	2.410	100	2.600	100	21.367	
26	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	70	90	70	95	70	95	70	100	70	100	350	
			41	Nilai Hasil Evaluasi LKIP <u>Perangkat Daerah</u>	Point	B	B		BB		BB		BB		A	A			
			42	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80		85		90		95		100	100			
27	Program	Peningkatan Pelayanan PATEN	43	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi <u>sesuai ketentuan</u>	%	80	82	17.815	85	31.537	87	17.162	90	17.457	95	17.997	95	101.969	
			44	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di <u>kecamatan</u>	Point	3	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5				
28	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	45	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100			Kecamatan Bogor Barat	
29	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	46	Persentase pemenuhan sarana prasarana <u>aparatur</u>	%	80	80	236	85	300	90	350	95	400	100	450	100		1.736

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDI SI AWAL (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah	
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
30	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	20	90	94	95	100	95	100	100	100	414	Kecamatan Bogor Barat	
			48	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B			BB		BB		A		A			
			49	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80			85		90		95		100			
31	Program	Pengembangan Data dan Informasi	50	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55			60		65		70		75			
32	Program	Peningkatan Pelayanan PATEN	51	Prosentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	%	80	82	14.032	85	13.832	87	13.917	90	13.997	95	13.997	95	69.773	
			52	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	Point	3	3,1			3,2		3,3		3,4		3,5		3,5	
33	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	53	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	2.000	100	2.200	100	2.300	100	2.400	100	2.500	100	11.400	Kecamatan Bogor Timur
34	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	54	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	2.200	85	2.400	90	2.500	95	2.600	100	2.750	100	12.450	
35	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90			90		95		95		100		100	
			56	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B			BB		BB		BB		A		A	
			57	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80			85		90		95		100		100	
36	Program	Peningkatan Pelayanan PATEN	58	Prosentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	%	80	82	9.116	85	13.105	87	11.535	90	9.605	95	9.950	95	53.311	
			59	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	Point	3	3,1			3,2		3,3		3,4		3,5		3,5	
37	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	1.450	100	1.523	100	1.599	100	1.679	100	1.572	100	7.822	Kecamatan Bogor Tengah
38	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	61	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	950	85	998	90	1.047	95	1.152	100	1.267	100	5.414	
39	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	25	90	26	95	28	95	29	100	30	100	138	
			63	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B			BB		BB		BB		A		A	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

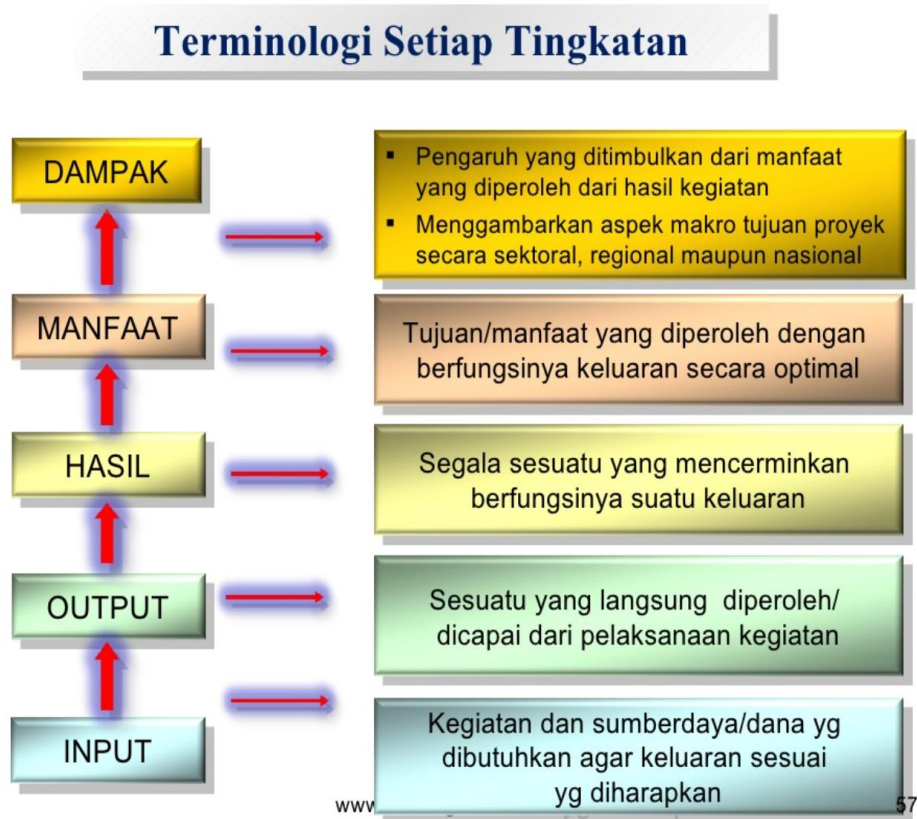
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu ditetapkan tolok ukur/indicator tingkat keberhasilannya. Berikut ini adalah terminology tahapan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Gambar 8.1

Terminologi tahapan pencapaian Visi Pembangunan Daerah



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu :

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah.

8.1 PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2019-2024

Indikator Makro pembangunan Kota Bogor menjadi salah satu tolok ukur kunci keberhasilan rencana pembangunan Kota Bogor selama 5 tahun (Tahun 2019-2024). Berikut ini adalah Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel Berikut ini :

Tabel 8.1

Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2019-2024

INDIKATOR MAKO PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN 2019-2024						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75.66	76.12	76.67	77.22	77.78	78.33	78.89
2	Jumlah Penduduk	Dalam Ribu Jiwa	1.096	1.112	1.131	1.148	1.166	1.183	1.200
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	%	1.53	1.52	1.51	1.47	1.46	1.44	1.44
4	Angka Kemiskinan (%)	%	5.93	5.85	5.8	5.78	5.53	5.28	5
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	%	9.28*	8.9	8.47	8.22	7.97	7.8	7.6
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	%	6.14*	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7
7	Indeks Gini Rasio	Angka	0.41	0.41	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36

INDIKATOR MAKO PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN 2019-2024						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8	Tingkat Inflasi (%)	%	3.69	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, 2019

8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2019-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN 2020-2024					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	AHH saat lahir	Tahun	73.21	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	%	66	68	69	70	71	72
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Angka	0.45	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53
4	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman (%)	%	91,98	93,15	94,86	96,85	98,29	100
5	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman (%)	%	67.21	67.47	70.42	72.06	72.62	73.03
6	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota (%)	%	2,62	2,44	2,27	2,12	1,94	1,77
7	Persentase Reduksi Sampah	%	6.26	6.4	6.6	6.8	7	7.2
8	Indeks Kualitas Air	Angka	49.6	49.67	49.67	49.8	49.9	50
9	Indeks Kualitas Udara	Angka	85.86	85.9	86	86.1	86.2	86.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
10	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik (%)	%	5.89	10,98	11,13	11,27	11,37	11,47
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.30	10.63	10.97	11.31	11.65	12
12	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.38	13.6	13.9	14.2	14.5	15
13	Nilai rata-rata Ujian Nasional Tingkat SD	Angka	68.12	68.14	68.18	68.20	68.23	68.25
	Nilai rata-rata Ujian Nasional Tingkat SMP	Angka	58.27	58.3	58.32	58.36	58.40	58.42
14	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05
15	Indeks Inovasi daerah	Angka	600	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650
16	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	NA	70.5	71	71.5	72	72.5
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	BB	A	A	A
19	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9.28	8.47	8.22	7.97	7.8	7.6
21	Angka Kemiskinan	%	5.93	5.8	5.78	5.53	5.28	5
22	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	0	73-74	74-75	75-76	76-77	76-77
23	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.14	6.66	6.75	6.84	6.94	7
24	PDRB Per Kapita	Trilyun Rp	37.99	40.36	42.73	45.1	47.47	49.84
25	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	10.940	11.124	11.219	11.314	11.409	11.504
26	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19.68	21	22	23	24	25
27	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0%	20%	40%	60%	80%	100%
28	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode	%	0%	20%	40%	60%	80%	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Rencana 2020-2024)							
29	Persentase Jalan Berkondisi Baik (%)	%	88.5	89	89,25	89,5	89,75	90
30	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum (%)	%	45	50	60	70	80	90

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, 2019

Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang sama pada seluruh pemangku kepentingan, maka setiap indicator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2020-2024, dapat dijelaskan pengukurannya sebagaimana tercantum dalam table sebagai berikut :

8.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.3. berikut.

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Inflasi	%	3,69	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%
2	PDRB per kapita	Juta Rp.	38,5	38.8	39.1	39.3	39.5	39.8	39.8
3	indeks gini	Point	0,41	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36
4	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	%	94.07	94.2	94.22	94.47	94.72	95	95
5	indeks pembangunan manusia (IPM)	Point	75,66	76.67	77.22	77.78	78.33	78.89	78.89
6	Jumlah Penduduk	jiwa	1.096.828	1.131.890	1.148.968	1.166.046	1.183.124	1.200.202	1.200.202
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.53	1.52	1.51	1.47	1.46	1.44	1.44
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	6.14*	6.66	6.75	6.84	6.94	7	7
9	Indeks Gini	poin	0,41	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36
10	angka melek huruf	Persen	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
11	rata rata lama sekolah	tahun	10,29	10.91	11.07	11.23	11.39	11.55	11.55

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
12	harapan lama sekolah	tahun	13.37	13.6	13.9	14.2	14.5	15	15
13	angka usia harapan hidup	tahun	73.37	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	74.91
14	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	persen	4.8	4.75	4.7	4.65	4.6	4.55	4.55
14	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	persen	4.53	4.31	4.2	4.09	3.98	3.98	3.98
15	cakupan desa siaga aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62,27	64.30	65.55	66.79	68.04	69.28	69.28
17	tingkat pengangguran terbuka	opini	9,57	8.47	8.22	7.97	7.8	7.6	7.6
18	rasio penduduk yang berkerja	persen	57,1	59.46	61.01	62.56	64.10	65.65	65.65
19	rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	persen	90,35	90.62	90.80	90.85	90.90	90.91	90.91

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
21	keluarga pra sejahtera	persen	7.38	7	6.5	6	5.5	5	5
22	indeks kepuasan masyarakat	angka	3,39	3.41	3.43	3.45	3.48	3.5	3.5
23	persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	42.83	43	43.5	44	44.5	45	45
24	opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	84,9	86,9	87,9	88,9	89,9	90,9	90,9
26	penguatan cadangan pangan	Ton	5,4	30	26,72	26,66	26,59	25,52	25,52
27	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,73	0.696	0.681	0.666	0.651	0.636	0.636
28	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Konstan	persen	0,81	0.75	0.73	0.71	0.68	0.66	0.66

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
29	produksi Pertanian (Padi)	ton	5.439	5.548	5.602	5.657	5.711	5.765	5.765
30	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	18,34	18.22	18.18	18.13	18.08	18.03	18.03
31	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	21,21	21.07	21.00	20.95	20.90	20.85	20.85
32	kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	18,35	18.28	18.26	18.23	18.21	18.19	18.19
33	kontribusi sektor perdagangan besar, ecern, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,212	0.211	0.210	0.209	0.209	0.208	0.208
34	kontribusi sektor perdagangan besar, ecern, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan	persen	0,22	0.218	0.217	0.216	0.215	0.214	0.214

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
35	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	12,04	12.31	12.42	12.53	12.64	12.75	12.75
36	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan	persen	22	21.76	21.66	21.56	21.46	21.36	21.36
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi perkapita	Ribu Rp.	10 .940	11.396	11.533	11.670	11.807	11.944	11.944
2	Angka kriminalitas	Angka	0,00048	0,00047	0,00046	0,00045	0,00044	0,00043	0,00043
3	Rasio ketergantungan	Persen	42,28	41.54	41.17	40.80	40.44	40.07	40.07
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	73.5

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62,27	64.30	65.55	66.79	68.04	69.28	69.28
III	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	49,06	50	50.55	51	51.5	52	52
2	Angka partisipasi sekolah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni								
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	108,05	108,06	108,07	108,08	108,09	108,1	108,1
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,14	94,15	94,20	94,25	94,30	94,35	94,35
5	Angka Partisipasi Kasar								
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	112,6	113	113.05	113.08	114	114.3	114.3

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	104,1	104.3	104.8	105	105.5	106	106
6	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Persen	115.271	115,28	115,29	115,30	115,31	115,32	115,32
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	30,93	30,94	30,95	30,96	30,97	30,99	30,99
7	Angka Putus Sekolah								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0	0.06	0,05	0.04	0.03	0.02	0,02
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0	0.06	0,05	0.04	0.03	0.02	0,02
8	Angka kelulusan								
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9	Angka Melanjutkan (AM):								
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	111	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	110	100	100	100	100	100	100
10	Fasilitas Pendidikan :								
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	93.7	94.5	94.8	95	95.5	96	96
	Sekolah pendidikan SMP/MTs	Persen	94.7	94.8	95	95.2	95.4	95.6	95,6
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	33,14	33,15	33,16	33,17	33,18	33,19	33,19
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	31,26	31,25	31,22	30,55	30,25	30	30

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	01:33	1:33	1:33	1:33	1:32	1:32	1:32
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP	Rasio	01:23	1:23	1:23	1:23	1:24	1:24	1:25
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	99,73	100,73	101,05	101,37	101,69	102,00	102,00
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
17	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	Persen	99,98	98,15	97,80	97,46	97,11	96,77	96,77
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	87,87	88	88,1	88,2	88,3	88,4	88,4

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	KESEHATAN								
1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	60 / 100.000 KH	55	50	45	40	30	30
2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	2,95 / 1.000 KH	2,9	2,94	2,92	2,91	2,90	2,90
3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Angka	3,35/1.000 KH	3,35	3,34	3,33	3,32	3	3
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,0180	0,0185	0,0191	0,0200	0,0202	0,0208	0,0208
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,74	0,80	0,84	0,88	0,92	0,96	0.96
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	96,1	97	98	99	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
7	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Persen	80	85	90	95	100	100	100
8	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0.68	0.66	0.67	0.70	0.70	0.72	0.72
9	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	98,5	99	99.5	100	100	100	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	96,5	97	97.5	98	98.5	99	100
12	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	non polio AFP rate	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif
13	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
15	Prevalensi Hipertensi	%	9,67%	9,30%	9,00%	8,80%	8,60%	8,40%	8,40%
16	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,40%	2,35%	2,30%	2,25%	2,00%	2,00%	2,00%
17	Persentase kesembuhan TB Paru	Persen	81,22	86	86.5	87	87.2	87.5	87.5
18	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	66/100.000 Penduduk	65	62.5	62	61.5	60	60
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
20	Angka bebas jentik nyamuk DBD	Persen	95	95.3	95.4	95.6	95.7	96	96
21	Persentase penemuan penderita diare pada balita	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
22	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,42	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	97,2	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	68	80	85	90	95	100	100
26	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	0	24	31	38	44	51	51

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
27	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	95,85	96	97	98	99	99.5	99.5
28	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	4%	8 % (2 puskesmas)	16% (4puskesmas)	20 % (5 puskesmas)	24% (6 puskesmas)	28% (7 puskesmas)	28% (7puskesmas)
29	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	Persen	97,6	100	100	100	100	100	100
30	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	Persen	98	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
31	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	Persen	90,1	100	100	100	100	100	100
32	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	Persen	98	100	100	100	100	100	100
33	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani	Persen	75	75	76	77	78	80	80
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
35	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100	100	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	PEKERJAAN UMUM								
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88,59	89	89.25	89.5	89.75	90	90

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,0660997	0,0642509	0,0634	0,0625	0,0617	0,0609	0,0609
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	88,59	89	89.25	89.5	89.75	90	90
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	66,44	67	67.5	68	68.5	69	69.5
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	67.21	67.47	70.42	72.06	72.62	73.03	73.03
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	11,01	21,8	32,6	43,4	54,2	65	65
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	71,57	75	77.5	80	82.5	85	85

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	745	865	985	1.105	1.225	1.345	1.345
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	45,83	58,75	60	61.25	62.5	63.75	63.75
	Rasio jaringan irigasi	Point	0,2578	0,3304	0,3374	0,3445	0,3515	0,3574	0,3574
10	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	Persen	90	91.03	92.06	93.1	94.13	95.16	95.16
11	persentase penduduk berakses air minum	Persen	91,98	93,15	94,86	96,85	98,29	100	100
12	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	91,98	93,15	94,86	96,85	98,29	100	100
13	persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota	Persen	2,62	2,44	2,27	2,12	1,94	1,77	1,77

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
14	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	10	12.5	15	17.5	20	25	25
15	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	11,71	12	12.5	13	13.5	14	14
16	rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0,018	0.019	0.020	0.025	0.030	0.035	0.035
PENATAAN RUANG									
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	20	20	20	20	20	20	20
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Persen	35	37	39	41	43	45	45

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	80	82	84	86	88	90	90	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	rasio rumah layak huni	persen	17,28	16,17	16,36	16,54	16,73	16,91	16,91	
2	rasio pemukiman layak huni	persen	95,14	95,47	95,80	96,13	96,46	96,78	96,78	
3	cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	70,59	74,80	76,79	78,77	80,76	82,74	82,74	
4	persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota	persen	2,62	2,44	2,27	2,12	1,94	1,77	1,77	

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5	persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)	persen	4,31	3,77	3,32	2,79	2,28	1,77	1,77
6	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	1,09	1,07	1,05	1,03	1,01	0,99	0,99
7	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	77,33	80,67	84,00	87,33	90,67	94,00	94,00
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	rasio (RT/linmas)	3739	3739	3739	3739	3739	3739	POLPP
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketenteraman, keindahan) K3	Persen	90	90	90	90	90	90	POLPP

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	90	90	90	90	90	90	POLPP
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	68	70	72.5	75	77.5	80	POLPP
5	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana	persen	75	77.5	80	82.5	85	85	POLPP
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	POLPP
6	SOSIAL								
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	persen	91,45	92	93	94	95	96	96
2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	91,45	92	93	94	95	96	96

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	91,45	92	93	94	95	96	96
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	persen	8,9	12,8	15,5	17,9	20,5	23,07	23,07
5	Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	NA	33,3	50	66,6	83	100	100
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	persen	24,32	26	27	28	29	30	30
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	TENAGA KERJA								
1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	90,38	91,53	91,87	92,20	92,51	92,81	92,81
2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	109.416	120.358	132.393	145.633	160.196	176.216	176.216
4	Penetapan besaran UMK	Rupiah	3.557.146	4.149.797	4.481.780	4.840.322	5.227.547	5.645.750	5.645.750
5	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (%)	Juta/ Pekerja/ Tahun	63,91	65,78	68,59	71,52	74,57	77,76	77,76
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tenaga kerja	50	75	100	125	150	150	150
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Tenaga kerja	26	25	30	30	50	50	211

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor	Persen	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	19	19
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	11,72	12,22	12,72	13,22	13,72	14,22	14,22
4	Rasio KDRT	Persen	0,05	0,10	0,15	0,2	0,25	0,3	0,3
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	26,88	26,98	27,08	27,18	27,28	27,38	27,38
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	8,9	7,1	5,3	3,5	1,7	1,7	1,7
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	1,7	3,5	5,3	7,1	8,9	10,7	10,7

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	47,16	56,60	66,03	75,47	84,90	94,33	94,33
13	rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	99,98
14	rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	92,48	92,58	92,73	92,82	92,97	93,00	93,00
15	rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	97,49	97,58	97,63	97,77	97,81	98,00	98,00
16	rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	Pusat						
17	rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3	PANGAN								
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/tahun	230,61	246,61	254,87	263,40	272,21	281,32	281,32
2	Ketersediaan energi perkapita	kkal/kap/hr	2512,8	2400	2400	2400	2400	2400	2400
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	89,4	63	63	63	63	63	63
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	91,53	93	93,5	94	94,5	95	95
4	PERTANAHAN								
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	49	40.36	40.47	40.58	40.69	40.80	40.80
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	85.86	80.1	80.21	80.32	80.34	80.54	80.54
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	50	50	55	60	65	70	70
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.	Persen	50	60	70	80	90	100	100
10	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	75.37	76	76.5	77	77.5	78	78
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	6.26	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.2

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	81.47	80.1	81.5	82.2	82.9	83.8	83.8
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	75	80	85	90	95	100	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	75	76	80	82	85	90	90

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8	Kepemilikan KTP	Persen	93.30	99.50	99.80	100	100	100	100
9	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen	94	95	96	97	98	100	100
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0- 18 Tahun	Persen	94.07	95	96	97	98	100	100
11	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	Persen	NA	25	30	35	40	45	45
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	75	75	75	75	75	75	75
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	75	75	75	75	75	75	75

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,53	1,52	1,51	1,47	1,46	1,44	1,44
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	Persen	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	40,54	40,54
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	NA	5	5	5	5	5	5
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan	Jumlah	NA	1	1	1	1	1	1
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
8	Ratio Akseptor KB	Persen	77,41	77,41	77,42	77,42	77,43	77,43	77,43

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	77,41	77,41	77,42	77,42	77,43	77,43	77,43
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persen	14,42	14,41	14,40	14,39	14,38	14,37	14,37
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	11,43	11,42	11,41	11,40	11,39	11,38	11,38
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	22,36	22,40	22,44	22,48	22,52	22,56	22,56

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	77.41	77,41	77,42	77,42	77,43	77,43	77,43
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	66	66,05	66,06	66,07	66,08	66,09	66,09
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	52,73	52,74	52,75	52,76	52,77	52,78	52,78
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	25,75	25,76	25,77	25,78	25,79	25,80	25,80
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	40,68	42,18	43,48	44,59	45,56	46,42	46,42

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	persen	39,94	39,94	39,94	39,95	39,95	39,96	39,96
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	93,2	93,2	93,2	94,9	94,9	96,6	96,6
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	100	100	100	100	100	100	100
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	0	0	0	0	0	0	0

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	70	77	79	81	83	85	85
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	35,13	35,30	35,47	35,64	35,81	36,00	36,00
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21	21	21	21	21
9	PERHUBUNGAN								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	24.060.642	22.442.108	23.140.448	23.890.192	24.696.261	25.564.066	143.793.717

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	0,000381	0,0021	0,0024	0,0025	0,0025	0,0027	0,0027
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	5.851	4.504	5.094	5.307	5.247	5.593	5.593
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit terminal bis	3	3	3	4	4	5	5
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	1.11	1.36	1.22	1.11	1.02	0.94	0.94
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	25,64	14,91	15,07	15,08	15,17	15,11	15,11
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1.31	1.25	1.19	1.13	1.08	1.03	0.98
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpang	24.261.237	16.466.814	21.457.800	25.297.272	27.597.024	33.580.638	148.660.785

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal	penumpang	4.335.315	4.890.991	5.380.090	5.918.099	6.509.909	7.160.900	34.195.304
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	57	66	74	81	88	100	100
2	Hasil Penilaian SPBE	Point	2,91	2,92	2.92	2.93	2.93	2.94	2.94
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	persen	7	14	21	28	34	41	41
4	Persentase Keterbukaan Informasi public	persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi Aktif	persen	62,26	65	67	69	71	73	73
2	Persentase Koperasi berkualitas	persen	8,3	8,7	9,2	9,8	10,2	10,9	10,9
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	0	180	180	180	180	180	180
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Rupiah	2,3 T	68	81	95	109	329	3,045 T
5	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	418	500	500	500	500	500	2.918
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	418	150	150	150	150	150	1.168
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	75	75	80	85	85	90	90

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	85	85	90	90
12	PENANAMAN MODAL								
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	trilyun rupiah	3.1	2.5	2.53	2.55	2.58	2.6	2.6
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	0	1,2	0,79	1,2	1,2	0,78	0,78
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
1	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	Persen	NA	0	5	5	5	5	25

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persen	Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5	20	40	60	80	100	100
2	Wirausaha muda	orang	25	30	35	35	35	35	195
3	Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	Persen	33,34	33,34	50.01	66.67	83.33	100	100
4	Rasio ketersediaan SDM Tenaga keolahragaan	Rasio	0,001511 : 2,08	0,001552 : 2,08	0,001661 : 2,08	0,001734 : 2,08	0,0011808 : 2,08	0,001887 : 2,08	0,001887 : 2,08
14	STATISTIK								
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "Kota Bogor Dalam Angka"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	PERSANDIAN								
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	persen	NA	20	30	60	70	80	80
16	KEBUDAYAAN								
1	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	Persen	10	10	10	10	10	10	10
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	cagar budaya non bangunan							
3	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	buah	15	15	17	19	21	23	23

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	Persen	2	2	2	2	2	2	10
17	PERPUSTAKAAN								
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustaka	25.421	35.000	42.000	60.000	76.000	100.000	100.000
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	67.999	77.370	79.870	82.370	84.870	87.370	87.370
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustakaan	6,6	7,5	7,7	8,0	8,2	8,4	8,4
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pemustaka	25.421	35.000	42.000	60.000	76.000	100.000	100.000

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	37.017	39.517	42.017	44.517	47.017	49.517	49.517
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	7	9	11	13	15	15
18	KEARSIPAN								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	NA	25	45	70	95	120	120
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	NA	100	100	100	100	100	100
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	PARIWISATA								
1	Kunjungan wisata	Orang	7.965.987	7.004.033	7.704.436	8.474.879	9.322.366	10.254.602	10.254.602
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	239,350,000,000						

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	PERTANIAN								
1	Produktivitas padi per hektar	ton/ha	7	7,14	7,21	7,28	7,35	7,47	7,47
2	Cakupan bina kelompok petani	persen	68.97	70,25	71,43	72,52	73,35	74,47	74,47
3	PERDAGANGAN								
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	persen	99.283.771,6 3 USD	1,1	1,35	1,6	1,85	2,1	2,1
4	PERINDUSTRIAN								
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	75	77.5	80	82.5	85	85	85
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Produksi perikanan (Persentase Produksi Ikan Konsumsi)	%	87,49	89	90	91	92	93	93
2	Konsumsi ikan (Persentase Konsumsi Ikan)	%	95,37	96	96,5	97	97,5	98	98
3	Produksi Ikan Konsumsi	ton	4980	5129	5179	5229	5279	5329	5329
4	Jumlah Konsumsi Ikan	kg	28.068.674,5 0	30.939.680	31.553.524	32.158.194	32.836.697	33.208.759	33.208.759

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN								
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKP kedalam APBD	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	-	-	-	-	-
10	Jumlah dokumen perencanaan RKP yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	1	1	1	1	1	1	1

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	-	-	-	-	-
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	KEUANGAN								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	persen	10,88	10	9.5	9.0	8.5	8	8
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	10,88	10	9.5	9.0	8.5	8	8

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	0	0	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	23,49	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	16,54	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT								
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	1	1	1	2	2	2	2
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	91.84	92	92.5	93	93.5	94	94
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	68	75	77.5	80	82.5	85	85

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	34	34	34	34	34	34
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150	150	150	150	150	150	150
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3690	3700	3710	3720	3730	3740	3740
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Penerapan SIDA:	persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	73.68	75	77.5	80	82.5	85	85
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	PENGAWASAN								
1	Persentase pelanggaran pegawai	persen	0.084	0.075	0.050	0.025	0.012	0	0
2	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	persen	70	72.5	75	77.5	80	82.5	82.5

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
6	SEKRETARIAT DPRD								
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bogor, RPJPD propinsi Jawa Barat dan RPJMN. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024.

9.1 Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020-2024, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun 2019-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diperlukan

langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya

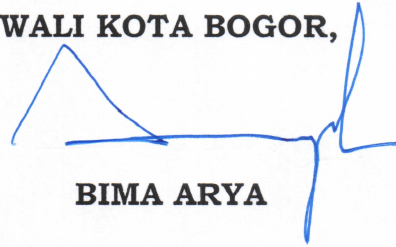
4. Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
6. Penyusunan RKPD Kota Bogor pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2020 sampai dengan 2024.
7. Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

9.2 Pedoman Transisi Dalam Rangka Menjaga Kestinambungan Pembangunan

Pada masa transisi dimana RPJMD Kota Bogor 2019-2024 telah habis masa berlakunya dan belum ditetapkannya RPJMD 2024-2030, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kota Bogor. Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025. Selanjutnya RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bogor Tahun 2025. Pemerintah Kota Bogor akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD

yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya.

WALI KOTA BOGOR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and lines, positioned above the printed name BIMA ARYA.

BIMA ARYA